

RANCANGAN TEKNOKRATIK

RPJMD

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

TAHUN 2025 - 2029



**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2024**



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang.....	1
1.2	Dasar Hukum.....	3
1.3	Hubungan antar Dokumen.....	5
1.4	Maksud dan Tujuan.....	7
1.5	Sistematika Rancangan Teknokratik RPJMD.....	8

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1	Aspek Geografi dan Demografi.....	1
2.1.1	Aspek Geografi.....	1
2.1.2	Aspek Demografi.....	48
2.2	Aspek Kesejahteraan Sosial dan Budaya.....	55
2.2.1	Kesejahteraan Ekonomi.....	55
2.2.2	Kesejahteraan Sosial Budaya.....	70
2.3	Aspek Daya Saing Daerah.....	74
2.3.1	Daya Saing Ekonomi Daerah.....	74
2.3.2	Daya Saing Sumber Daya Sumber (SDM).....	84
2.3.3	Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah.....	94
2.3.4	Daya Saing Iklim Investasi.....	100
2.4	Aspek Pelayanan Umum.....	102
2.4.1	Aspek Kinerja Pemerintahan.....	103
2.4.2	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.....	108

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1	Gambaran Ringkas Kondisi Keuangan Daerah Lima Tahun Terakhir.....	2
3.1.1	Gambaran Pelaksanaan APBD.....	2
3.2	Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun Kedepan.....	18

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

4.1	Permasalahan Pembangunan Daerah.....	2
4.1.1	Aspek Geografi.....	2
4.1.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	4
4.1.3	Aspek Daya Saing Daerah.....	6



4.1.4 Aspek Pelayanan Umum	8
4.2 Isu Strategis	8
4.2.1 Telaah Dokumen Perencanaan	9
4.2.2 Isu Strategis Provinsi Sulawesi Tengah	25
4.2.3 Isu Strategis Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan.....	35

BAB V REKOMENDASI

5.1 Rekomendasi Visi.....	1
5.2. Rekomendasi Misi	4
5.3. Upaya Transformasi Super Prioritas (Game Changers) RPJPD	9
5.3.1. Transformasi Sosial	10
5.3.2. Tranformasi Ekonomi	10
5.3.3. Tranformasi Tata Kelola.....	10
5.3.4. Tranformasi Sosial Budaya dan Ekologi.....	10
5.4. Rekomendasi Arah Kebijakan	11
5.5. Rangkaian Kinerja	23

BAB VI PENUTUP



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Desa dan Kelurahan per Kecamatan Di Kab. Banggai Kepulauan	4
Tabel 2.2	Kondisi Topografi rata-rata per Kecamatan dan Jarak ke Ibukota Kabupaten di Kabupaten Banggai Kepulauan (km) Tahun 2023.....	6
Tabel 2.3	Hubungan Antara Ekoregion, Tanah dan Penggunaan Lahan di Kabupaten Banggai Kepulauan, 2023.....	7
Tabel 2.4	Sebaran Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya di Kabupaten Banggai Kepulauan	9
Tabel 2.5	Wilayah Ekologis/Fungsional Kabupaten Banggai Kepulauan.....	10
Tabel 2.6	Klasifikasi Satuan Ekoregion Bentang Alam di Kabupaten Banggai Kepulauan	12
Tabel 2.7	Deskripsi dan Karakteristik Bentang Alam di Kabupaten Banggai Kepulauan	15
Tabel 2.8	Parameter dan deskripsi Solusional Karst sebagai bentang alam dominan di Kabupaten Banggai Kepulauan	15
Tabel 2.9	Kondisi Vegetasi Alami Wilayah Ekologis Kabupaten Banggai Kepulauan	17
Tabel 2.10	Deskripsi Satuan Vegetasi Alami Wilayah Ekologis Kabupaten Banggai Kepulauan	18
Tabel 2.11	Kondisi Tutupan Lahan di Wilayah Ekologis Kabupaten Banggai Kepulauan	19
Tabel 2.12	Sumber Air Minum Utama (Air Bersih) bagi Masyarakat di Kabupaten Banggai Kepulauan	24
Tabel 2.13	Distribusi Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan di Kabupaten Banggai Kepulauan per Wilayah Kecamatan ..	25
Tabel 2.14	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih untuk Domestik pada Tahun 2025 di Kabupaten Banggai Kepulauan menurut Kecamatan	26
Tabel 2.15	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih untuk Domestik pada Tahun 2047 di Kabupaten Banggai Kepulauan menurut Kecamatan	26
Tabel 2.16	Status Lingkungan Hidup menurut Jasa Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025	27



Tabel 2.17	Status Lingkungan Hidup menurut Jasa Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2047	27
Tabel 2.18	Indeks Kualitas Air Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018-2022.....	30
Tabel 2.19	Distribusi Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan di Kabupaten Banggai Kepulauan per Wilayah Kecamatan ..	32
Tabel 2.20	Hasil Pemantauan Kualitas Air	34
Tabel 2.21	Status Mutu Air pada Airtanah dan Mataair di Kabupaten Banggai Kepulauan	36
Tabel 2.22	Status Mutu Air pada Sungai di Kabupaten Banggai Kepulauan.....	37
Tabel 2.23	Status Mutu Air pada Danau di Kabupaten Banggai Kepulauan.....	37
Tabel 2.24	Hasil Kajian Exposure, Sensitivitas, Kapasitas Adaptasi, Nilai IKA Dan IKS Terhadap Dampak Dan Resiko Lingkungan Hidup Di Kabupaten Banggai Kepulauan.....	42
Tabel 2.25	Kerentanan wilayah kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan.....	44
Tabel 2.26	Hubungan Antara Ekoregion, Tanah dan Penggunaan Lahan di Kabupaten Banggai Kepulauan, 2022	45
Tabel 2.27	Sebaran Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya di Kabupaten Banggai Kepulauan	48
Tabel 2.28	Perbandingan Jumlah Penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan Dengan Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2019-2023	50
Tabel 2.29	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022-2023.....	51
Tabel 2.30	Rasio Jenis Kelamin Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023	52
Tabel 2.31	Tingkat Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023	53
Tabel 2.32	Komposisi Penduduk Menurut Umur di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023	53
Tabel 2.33	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023	58
Tabel 2.34	Jumlah, Persentase, dan Garis Kemiskinan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023	62
Tabel 2.35	IPM Kabupaten/Kota, Sulawesi Tengah, Dan Nasional Tahun 2019-2023	70



Tabel 2.36	PDRB Kabupaten Banggai Kepulauan Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha (Milyar) Tahun 2019-2023.....	74
Tabel 2.37	PDRB Kabupaten Banggai Kepulauan Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha (Milyar) Tahun 2019-2023.....	77
Tabel 2.38	Distribusi PDRB Kabupaten Banggai Kepulauan Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2019-2023.....	79
Tabel 2.39	Tingkat Inflasi Kota Luwuk Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2020-2022	80
Tabel 2.40	PDRB Perkapita Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023 (juta Rp)	80
Tabel 2.41	Rasio Ketergantungan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023	88
Tabel 2.42	Jenis Dan Jumlah Bank Dan Cabang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023.....	97
Tabel 2.43	Jumlah Kasus Kriminalitas Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023.....	102
Tabel 2.44	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022-2023.....	103
Tabel 2.45	Indeks Inovasi Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023	105
Tabel 2.46	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023	106
Tabel 2.47	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023	107
Tabel 2.48	Fasilitas Pendidikan Kabupaten Banggai Kepulauan (Unit) Tahun 2019-2023	112
Tabel 2.49	Ketersediaan Guru di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023	112
Tabel 2.50	Jumlah Rumah Sakit dan Rasio Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2018-2023.....	116
Tabel 2.51	Jumlah Dokter dan Rasio Dokter Terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2018-2023.....	117
Tabel 2.52	Rasio Pemukiman Layak Huni Tahun 2019-2023	121
Tabel 2.53	Cakupan Ketersediaan Layanan Rumah Layak Huni Tahun 2019-2023	122
Tabel 2.54	Persentase Pemukiman yang tertata Tahun 2018-2023 ...	122
Tabel 2.55	Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh Tahun 2019-2023.....	123



Tabel 2.56	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023.....	123
Tabel 2.57	Kejadian Kebakaran per Penyebab Tahun 2019-2023	124
Tabel 2.58	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023	124
Tabel 2.59	Cakupan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023.....	125
Tabel 2.60	Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018-2022	125
Tabel 3.1	Proporsi Item Pendapatan Asli Daerah Terhadap PAD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023	6
Tabel 3.2	Proporsi Item Pendapatan Transfer Terhadap Pendapatan Transfer Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023.....	8
Tabel 3.3	Proporsi Item Pendapatan Terhadap Lain-lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023.....	10
Tabel 3.4	Laju Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023 (%).....	13
Tabel 3.5	Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023.....	15
Tabel 3.6	Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029	20
Tabel 4.1	Transformasi Tahap Pertama RPJPN/Tema dan Arah Kebijakan RPJMN Teknokratik Tahun 2025-2029.....	19
Tabel 4.2	Thema Pembangunan Wilayah Sulawesi.....	21
Tabel 5.1	Penyelarasan 5 (lima) Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Banggai kepulauan dengan Sasaran Visi RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah dan RPJPN Tahun 2025-2045	2
Tabel 5.2	Rumusan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2025-2045	14
Tabel 5.3	Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025-2029.....	24



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan RPJM Daerah dengan Dokumen Rencana Lainnya	7
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Banggai Kepulauan	2
Gambar 2.2	Luas Daerah Menurut Kecamatan (km ²) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023	3
Gambar 2.3	Peta Topografi Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	5
Gambar 2.4	Peta Batas Wilayah Ekologis/Fungsional Kabupaten Banggai Kepulauan	11
Gambar 2.5	Satuan Ekoregion di Kabupaten Banggai Kepulauan....	14
Gambar 2.6	Peta Karakteristik Bentang Alam Wilayah Ekologis Kabupaten Banggai Kepulauan	16
Gambar 2.7	Peta Karakteristik Vegetasi Alami Wilayah Ekologis Kabupaten Banggai Kepulauan	18
Gambar 2.8	Peta Penutupan Lahan Wilayah Ekologis Kabupaten Banggai Kepulauan	22
Gambar 2.9	Status Daya Dukung Lingkungan Jasa Penyediaan Bahan Pangan Berdasarkan Kecenderungan Perubahan Penggunaan Lahan di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2012-2018.....	22
Gambar 2.10	Jasa Ekosistem Fungsi Penyedia Air Bersih Kabupaten Banggai Kepulauan	25
Gambar 2.11	Kecenderungan Jasa Ekosistem Penyedia Air Kabupaten Banggai Kepulauan	28
Gambar 2.12	Peta Kecenderungan Jasa Ekosistem Penyedia Air Kabupaten Banggai Kepulauan	29
Gambar 2.13	Peta Kecenderungan Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir Kabupaten Banggai Kepulauan ...	29
Gambar 2.14	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018-2022.....	31
Gambar 2.15	Persebaran Jasa Ekosistem Penyediaan Bahan Pangan di Kabupaten Banggai Kepulauan.....	32
Gambar 2.16	Peta Jasa Ekosistem Penyedia Pangan di Kabupaten Banggai Kepulauan	33



Gambar 2.17	Kecenderungan Jasa Ekosistem Penyedia Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan	33
Gambar 2.18	Ilustrasi Perjalanan Pencemar dari Sumber Buangan hingga ke Muara Sungai Bawah Tanah atau Mata air yang muncul dari Lubang Aliran Bawah Tanah	36
Gambar 2.19	Distribusi Jasa Ekosistem di Kabupaten Banggai Kepulauan	41
Gambar 2.20	Kajian indeks kerentanan pada wilayah kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan	43
Gambar 2.21	Indeks Resiko Bencana Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023	45
Gambar 2.22	Jumlah Penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023	49
Gambar 2.23	Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Banggai Kepulauan 2019-2023	49
Gambar 2.24	Piramida Kependudukan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023	55
Gambar 2.25	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulteng dan Nasional Tahun 2019-2023	57
Gambar 2.26	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Tahun 2023	58
Gambar 2.27	Indeks Gini Rasio Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023	61
Gambar 2.28	Koefisien Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023	61
Gambar 2.29	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023	63
Gambar 2.30	Indeks Kedalaman (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023	64
Gambar 2.31	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023	65
Gambar 2.32	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023	66
Gambar 2.33	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023	67
Gambar 2.34	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023	68
Gambar 2.35	Perkembangan IPM Banggai Kepulauan, Sulteng dan Nasional Tahun 2018-2023	69



Gambar 2.36	Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023.....	71
Gambar 2.37	Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023.....	72
Gambar 2.38	Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023.....	73
Gambar 2.39	PDRB PerKapita Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023	82
Gambar 2.40	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2021	83
Gambar 2.41	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021	84
Gambar 2.42	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022-2023	85
Gambar 2.43	Indeks Pembangunan Literasi Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023	86
Gambar 2.44	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023	86
Gambar 2.45	Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023.....	87
Gambar 2.46	Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Banggai Kepulauan dan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019-2023	89
Gambar 2.47	Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Tahun 2023.....	90
Gambar 2.48	Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Banggai Kepulauan dan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019-2023	91
Gambar 2.49	Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023	92
Gambar 2.50	Usia Harapan Hidup Kabupaten Banggai kepulauan dan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019-2023	93
Gambar 2.51	Angka UHH Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.....	93
Gambar 2.52	Proporsi Panjang Jalan Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik (Persen) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023.....	94
Gambar 2.53	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023	95



Gambar 2.54	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (> 40 Km/Jam Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023	96
Gambar 2.55	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023	96
Gambar 2.56	Jumlah Restoran Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023.....	98
Gambar 2.57	Jumlah Penginapan/Hotel Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023.....	98
Gambar 2.58	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023	99
Gambar 2.59	Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023	100
Gambar 2.60	Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022-2023.....	101
Gambar 2.61	Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.....	102
Gambar 2.62	Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021-2023.....	104
Gambar 2.63	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023.....	108
Gambar 2.64	Tingkat Partisipasi Pendidikan di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023.....	109
Gambar 2.65	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018-2023	110
Gambar 2.66	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023	111
Gambar 2.67	Angka Kematian Bayi di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023.....	113
Gambar 2.68	Jumlah Kematian Bayi di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023.....	114
Gambar 2.69	Perkembangan Angka Kematian Ibu di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023	115
Gambar 2.70	Jumlah Kematian Ibu Secara Absolut di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023	115
Gambar 2.71	Proporsi Panjang Jalan Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik (Persen) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023.....	118
Gambar 2.72	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023	119



Gambar 2.73	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023	119
Gambar 2.74	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023	120
Gambar 3.1	Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023	3
Gambar 3.2	Proporsi dan Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023	5
Gambar 3.3	Proporsi dan Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023	7
Gambar 3.4	Proporsi dan Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023	9
Gambar 3.5	Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023	11
Gambar 3.6	Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023	14
Gambar 4.1	Megatren Tahun 2045	15
Gambar 5.1	Perumusan Misi RPJPD Banggai Kepulauan 2025-2045	9
Gambar 5.2	Model Upaya Transformasi Super Prioritas (Game Changers Pencapaian Bangkep Emas 2045	11
Gambar 5.3	Tema Tahapan Pembangunan RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan 2025-2045	12



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sesuai amanah pasal 41, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rancangan Teknokratik RPJMD sebagai salah satu tahapan persiapan penyusunan penyusun dalam rangka persiapan penyusunan RPJMD sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan menggunakan pendekatan teknokratik. Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu pendekatan yang menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Rancangan Teknokratik diselesaikan paling lambat sebelum penetapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Rancangan teknokratik dibahas tim penyusun bersama dengan Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dan saran sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 1 disebutkan Rancangan RPJMD adalah rancangan dokumen awal perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan kerangka berpikir ilmiah melalui pendekatan tehokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah. Lebih lanjut pada Pasal 41 Persiapan penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi orientasi mengenai RPJMD, penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah



berdasarkan SIPD dan Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD.

Rancangan tehnokratik RPJMD merupakan dokumen analisis gambaran umum kondisi Daerah hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan RPJMD tahun sebelumnya, perumusan gambaran keuangan Daerah, perumusan permasalahan pembangunan Daerah dan penelaahan dokumen perencanaan lainnya serta perumusan isu strategis daerah. Selain berpedoman pada RPJPD, penyusunan dokumen Rancangan Tehnokrattik RPJMD juga memperhatikan rencana tata ruang, dimana. Setiap kebijakan pembangunan harus memperhatikan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, indikasi program pemanfaatan ruang, yaitu program pembangunan sektoral wilayah, program pengembangan wilayah dan program pengembangan kawasan dan lingkungan strategis yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Tehnokratik RPJMD adalah Pendekatan dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Permendagri nomor 86 tahun 2017 Pasal 7 huruf a, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah, walaupun dalam implementasinya juga menggunakan pendekatan analisis dan kajian ilmiah dan partisipatif; atas-bawah (*top-down*); dan bawah-atas (*bottom-up*) hasil evaluasi capaian pembangunan masa lalu. Sementara Pendekatan politik belum digunakan dalam penyusunan naskah Rancangan Tehnokratik RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan periode 2025-2029, karena menunggu Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk dilantik, dan mekanisme perencanaan pembangunan yang berpangkal dari proses politik selesai tahapan.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Nasional yang menyatakan bahwa dalam pendekatan politik memandang pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan berdasarkan pendekatan politis adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan stakeholders dimaksudkan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan, yang selanjutnya Dokumen Rencana hasil proses perencanaan tersebut diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan daerah.

Penyusunan Rancangan Tehnokratik dan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2025-2029 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 dilakukan melalui berbagai tahapan dokumen analisis gambaran umum kondisi Daerah dan keuangan daerah, analisis permasalahan dan isu strategis pembangunan, serta analisis dokumen RPJPD dan dokumen Tata ruang



daerah. Selain itu, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan selama kurun waktu 2025-2029, diarahkan untuk mencapai sejumlah target pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals/SDGs*) yang terdiri dari empat pilar yaitu Pilar Sosial (aspek kemiskinan, kesehatan, pendidikan dan gender); Pilar Ekonomi (energi terbarukan, pertumbuhan ekonomi, dan keadilan-pemerataan kesempatan akses, distribusi produksi-konsumsi komoditi); Pilar Hukum dan Tata Kelola (langkah-langkah reformasi birokrasi dan ASN dalam meningkatkan tata- kelola pemerintahan); serta Pilar Lingkungan Hidup (terkait isu lingkungan hidup dan perubahan iklim).

1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum Penyusunan Dokumen Rancangan Tehnokratik RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 Ayat (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);



8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 ayat (8) menyatakan bahwa Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);



17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
22. Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 000.8.2.2/4075/Bangda tentang Penyusunan Rancangan Teknikratik RPJMD Tahun 2025-2029;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Povinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 1);

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 260 mengamanahkan bahwa Daerah sesuai kewenangannya menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan dikoordinasikan, disinergikan dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah. Sesuai ketentuan pasal 41, Permendagri 86 Tahun 2017 sebagai salah satu dari rangkaian persiapan Penyusunan RPJMD adalah penyusunan rancangan teknokratik RPJMD yang merupakan rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah Daerah dengan sepenuhnya

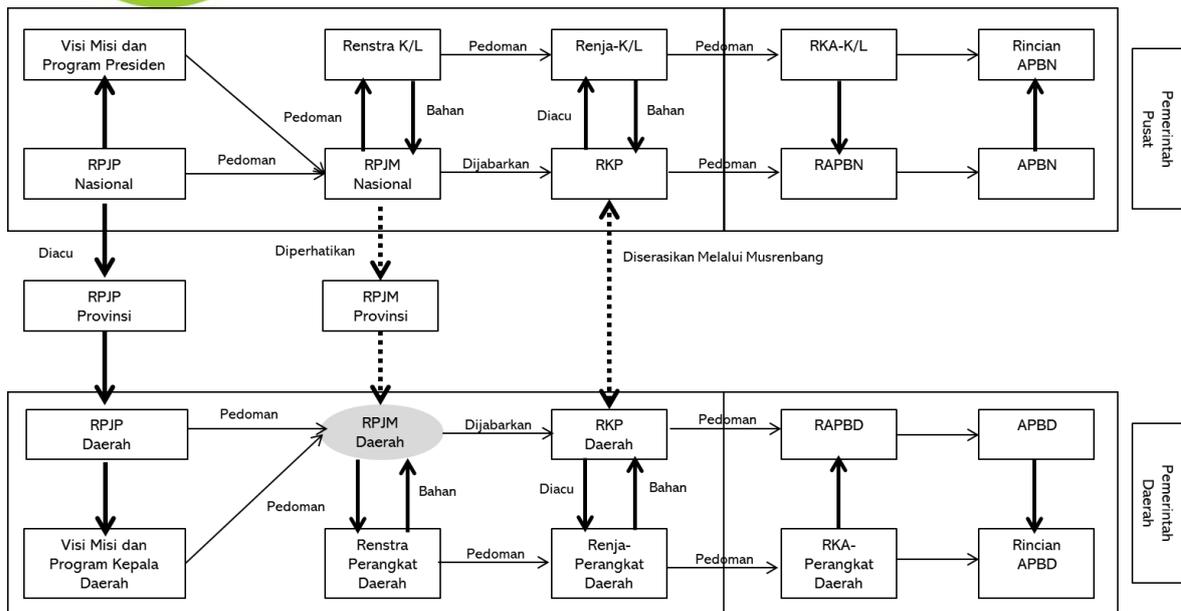


menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.

Rancangan Tehnokratik RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan pembangunan nasional yang berkaitan dengan pembangunan daerah yang mempengaruhi pembangunan nasional khususnya RPJP Nasional dan Rancangan Teknokratik RPJM Nasional 2025-2029. Penyusunan Rancangan Tehnokratik RPJMD Banggai Kepulauan ini memperhatikan juga Rantek RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2029, dan RPJMD Daerah sekitar dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dan harus selaras dan sinergi antardaerah, antarwaktu, antarruang, dan antarfungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Selain itu, Rantek RPJP Nasional dan Rantek RPJP Provinsi, maka RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan 2025-2045 akan menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan Rancangan Tehnokratik RPJMD 2025-2029. Selain itu, RPJMD ini akan menjadi dasar Penyusunan Visi Misi calon Kepala daerah yang akan mengikuti kontestasi Pemilihan Kepala Daerah tahun 2025-2045.

Permendagri Nomor 7 tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rancangan Teknokratik RPJMD juga harus memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS Rancangan Teknokratik dipakai sebagai dasar penentuan permasalahan dan isu strategis, yang merupakan identifikasi isu Pembangunan Berkelanjutan. Rancangan Teknokratik RPJMD dijadikan pijakan penyusunan RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan 2025-2029, sehingga diharapkan penyusunan RPJMD tidak lagi dimulai dari nol.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan, rencana pembangunan daerah memiliki keterkaitan yang erat dan saling terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional maupun provinsi. Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD harus berpedoman pada RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan dan memperhatikan RPJMD Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan RPJM Nasional. Rancangan Teknokratik RPJMD berisi permasalahan dan isu strategis daerah yang diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi bakal calon kepala daerah tahun 2024 dalam merumuskan visi dan misi sesuai permasalahan dan isu strategis yang dirumuskan dalam RPJMD teknokratik serta memperhatikan sasaran pokok dalam RPJPD. Gambar 1.1. menunjukkan keterkaitan antara dokumen RPJMD dan RPJPD serta keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan pemerintah pusat. Dengan keterkaitan tersebut diharapkan akan tercipta sinkronisasi antara dokumen perencanaan pusat dan daerah.



Sumber: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Diolah

Gambar 1.1
Keterkaitan RPJM Daerah dengan Dokumen Rencana Lainnya

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Banggai Kepulauan Tahun 2025-2029 adalah sebagai acuan/pedoman bagi para calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang mengikuti Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dalam penyusunan visi dan misi serta program pembangunan jangka menengah daerah, yang akan dijadikan sebagai bahan dasar dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025-2029. Sementara itu, tujuan dari penyusunan dokumen Rancangan Tehnokratik RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- Mengumpulkan, menyajikan, menganalisis data dan informasi yang relevan dan penting terkait gambaran umum kondisi daerah baik pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing Daerah serta Aspek Pelayanan Umum;
- Memberikan gambaran umum tentang kondisi daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang merupakan hasil evaluasi RPJMD periode sebelumnya yang selaras dan mendukung permasalahan dan Isu Strategis pembangunan daerah dalam rumusan RPJPD Banggai Kepulauan 2025-2045;
- Menelaah, menyajikan dan menyajikan hasil evaluasi rencana pembangunan lima tahunan (RPJMD) untuk memberikan gambaran tentang hasil pencapaian kinerja pembangunan daerah yang telah dilaksanakan dalam dokumen rencana tahunan (RKPD) untuk menjamin kesinambungan dengan rencana pembangunan yang disusun;
- Menyajikan analisis belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah dengan tujuan memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan



pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kualitas dan kapasitas pendanaan pembangunan daerah;

- e. Merumuskan permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam pelaksanaan Urusan;
- f. Menyusun rekomendasi yang sejalan dengan Periode pertama RPJPD 2025-2045 terkait sasaran Visi dan target Indikator serta arah kebijakan Pembangunan Tahap pertama RPJPD yaitu 2025-2029.

1.5 SISTEMATIKA RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMD

Sistematika penyusunan dokumen Rancangan Tehnokratik RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJMD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini memaparkan gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Banggai Kepulauan hasil evaluasi RPJMD periode sebelumnya yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, dan kebutuhan perumusan strategi, yang mencakup aspek: geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum serta daya saing daerah hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah periode RPJMD Sebelumnya.

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

Bab ini terdiri uraian tentang kinerja keuangan di masa lalu seperti kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah; kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu seperti proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan; kerangka pendanaan yang mencakup analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama, proyeksi data masa lalu, dan penghitungan kerangka pendanaan.

**BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

Bab ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan daerah yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan, dan isu-isu strategis yang dapat berasal dari permasalahan pembangunan maupun yang berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional maupun regional, yang dapat memberikan manfaat/pengaruh di masa datang terhadap daerah tersebut, termasuk arah kebijakan pengembangan wilayah berdasarkan tataruang daerah serta rangkuman hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah periode RPJMD Sebelumnya.

BAB V REKOMENDASI

Bab ini berisi berbagai rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan dalam penyusunan visi, misi, dan program prioritas calon kepala daerah yang akan mengikuti kontestasi Pilkada Tahun 2024, meliputi rangkaian target kinerja yang dimungkinkan tercapai hingga Tahun 2029 dengan mempertimbangkan karakteristik dan kemampuan daerah, isu strategis, sasaran visi dan sasaran pokok RPJPD 2025-2045, serta Rantek RPJMN Tahun 2025-2029 yang dapat menjadi salah satu bahan dalam merumuskan visi calon kepala daerah.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi berbagai ketentuan dan kaidah pelaksanaan dari Rancangan teknokratik Rencana pembnagunan jangka Menengah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2025-2029.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah memberikan informasi kondisi geografi dan demografi serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam pembangunan di Kabupaten Banggai Kepulauan. Indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Gambaran umum kondisi daerah memberikan basis atau pijakan dalam proses perumusan perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan di Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan proses yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari dunia usaha, pemerintah, masyarakat maupun akademisi. Dengan proses seperti ini semua pihak dapat berkontribusi dalam pembangunan di Kabupaten Banggai Kepulauan secara proposional. Dengan demikian maka diharapkan dokumen perencanaan Pembangunan yang disusun benar-benar memenuhi prinsip keterbukaan, demokratis, transparansi, akuntabilitas, efisien, efektif, serta memenuhi azas kepatutan dan kewajaran.

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Analisis pada aspek geografi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan gambaran kondisi demografi antara lain mencakup perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu. Analisis dan pendeskripsian terhadap gambaran umum kondisi Kabupaten Banggai Kepulauan dilakukan berdasarkan sejumlah data yang disajikan dalam bentuk data *time series* dan *cross section*.

2.1.1 Aspek Geografi

Analisis pada aspek geografi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan



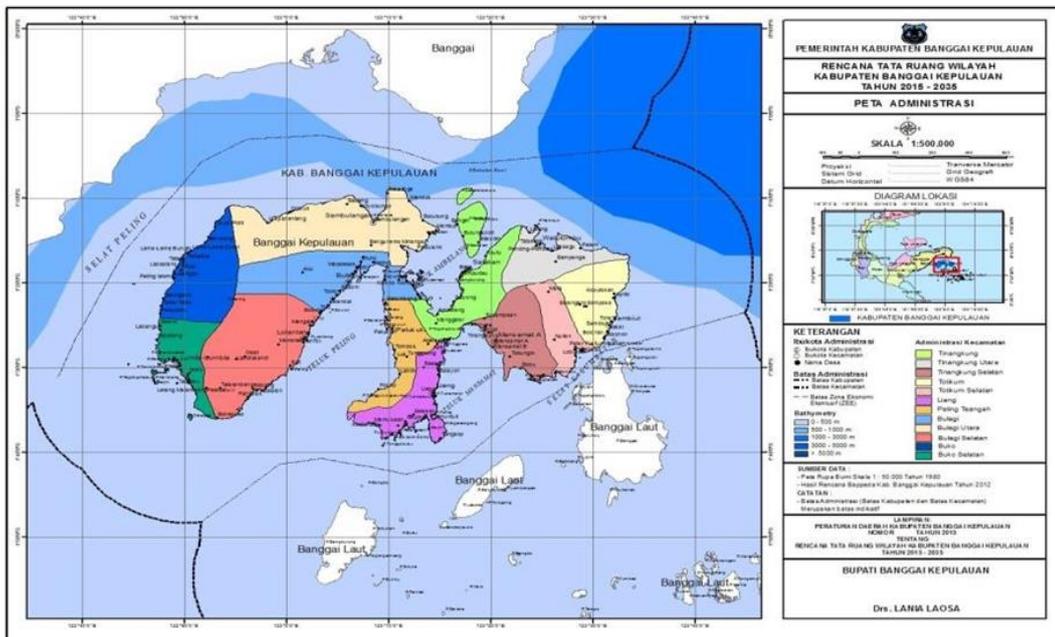
kerentanan wilayah terhadap bencana. Untuk data perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu merupakan data pendukung yang menggambarkan kondisi demografi.

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1.1 Letak dan Luas Wilayah Administrasi

Kabupaten Banggai Kepulauan beribukota di Salakan, secara astronomis terletak antara 1° 06' 30" - 1° 35' 58" Lintang Selatan dan 122° 37' 6,3" - 123° 40' 1,9" Bujur Timur. Setelah pemekaran pada tahun 2013, Kabupaten Banggai Kepulauan secara administratif memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Timur	• Berbatasan dengan Laut Maluku
Sebelah Selatan	• Berbatasan dengan Kabupaten Banggai Laut
Sebelah Barat	• Berbatasan dengan Selat Peling
Sebelah Utara	• Berbatasan dengan Kabupaten Banggai.



Sumber: BPS Kabupaten Banggai Kepulauan, 2024

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Banggai Kepulauan

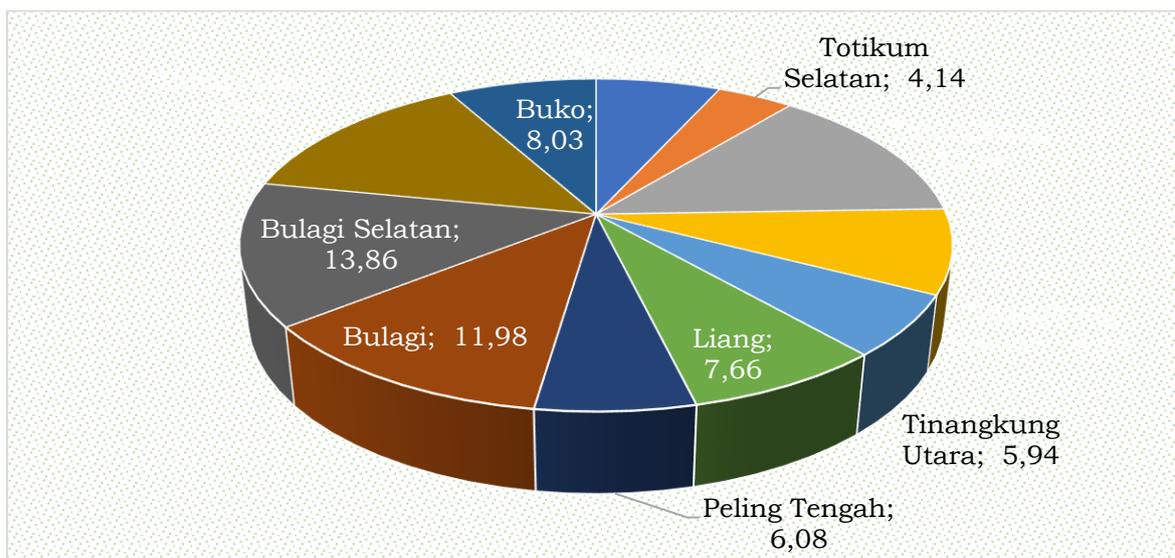
Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan daerah kepulauan/bahari yang mempunyai mempunyai gugusan atau rangkaian pulau-pulau berukuran sedang dan kecil sejumlah lebih kurang 121, dari jumlah tersebut lima diantaranya berukuran sedang, sisanya berukuran kecil-kecil bahkan ada yang berwujud batu karang yang



mencuat ke permukaan laut. Luas wilayah laut Kabupaten Banggai Kepulauan lebih besar dibandingkan dengan luas daratan, dimana luas wilayah darat sekitar 2.488,79 Km² atau sekitar 27,17 persen dan luas wilayah laut sekitar 6.671,32 km² atau sekitar 72,83 persen dari luas keseluruhan serta memiliki total panjang pantai mencapai 1.714,218 km. Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki persentase 4,02 persen (persen) dari seluruh luas Provinsi Sulawesi Tengah. Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan satu dari dua kabupaten di Sulawesi Tengah yang merupakan Kabupaten yang letaknya terpisah dari Pulau Sulawesi secara keseluruhan. Jarak antara ibukota Kabupaten ke ibukota Provinsi Sulawesi Tengah yaitu;

Salakan ke Luwuk = 1 Kilo Meter/38 Mil Laut

Salakan ke Banggai	= 53 Kilo Meter
Salakan ke Palu	= 671 Kilo Meter
Salakan ke Ampana	= 309 Kilo Meter
Salakan ke Poso	= 449 Kilo Meter



Sumber: BPS Kabupaten Banggai Kepulauan, 2024

Gambar 2.2
Luas Daerah Menurut Kecamatan (km²)
di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023

Kecamatan Bulagi Selatan merupakan kecamatan yang memiliki wilayah darat paling luas diantara 12 kecamatan lainnya, yaitu 319 km². Sementara Kecamatan Totikum Selatan merupakan Kecamatan yang memiliki luas wilayah paling kecil 95,19 km². Sedangkan Kecamatan Totikum memiliki wilayah laut paling luas sebesar 1082,85 km² dan Kecamatan Tinangkung Utara memiliki wilayah laut paling sedikit yaitu 195,38 km². Kabupaten Banggai Kepulauan terbagi dalam 12 Kecamatan dengan ibu kota Kabupaten berada di Kota Salakan, Kecamatan



Tinangkung. Jumlah desa dan kelurahan menurut kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan, diuraikan secara rinci dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Desa dan Kelurahan per Kecamatan
Di Kab. Banggai Kepulauan

No.	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Desa	Kelurahan
1.	Totikum	Sambiut	11	-
2.	Totikum Selatan	Kalumbatan	8	-
3.	Tinangkung	Salakan	10	1
4.	Tinangkung Selatan	Mansamat	9	-
5.	Tinangkung Utara	Batu Lombu	6	-
6.	Liang	Saleati	16	-
7.	Peling Tengah	Patukuki	11	-
8.	Bulagi	Bulagi	15	1
9.	Bulagi Selatan	Lolantang	20	-
10.	Bulagi Utara	Sambulangan	11	1
11.	Buko	Tataba	13	-
12.	Buko Selatan	Lumbi - Lumbia	11	-
Banggai Kepulauan			141	3

Sumber: BPS Kabupaten Banggai Kepulauan, 2024

Jumlah desa di Kabupaten Banggai Kepulauan sampai dengan tahun 2024 berjumlah 141 desa dan ketinggian daratan di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan dari permukaan laut yaitu sebesar 98,61 persen berada kurang dari 500 Mdpl dan 1,39 persen berada pada ketinggian lebih dari 500 Mdpl.

2.1.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Berdasarkan astronomisnya, Kabupaten Banggai Kepulauan terletak pada posisi antara 1° 06" – 1° 35' Lintang selatan dan 122° 37' 6,3" – 123° 40' 1,9' Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan dibatasi oleh laut Maluku, bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Banggai Laut, bagian barat berbatasan dengan selat Peling, dan bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Banggai. Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan kabupaten bahari dengan luas laut sekitar 6.671,32 km² atau sekitar 72,83 persen dari luas keseluruhan.

2.1.1.1.3 Topografi

Berdasarkan tinjauan bentuk muka bumi yang ditunjukkan oleh Topografi atau morfologi, struktur, dan proses pembentukan, wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan dapat dibagi menjadi 4 satuan utama, yaitu:

a. Pegunungan/perbukitan struktural

Pegunungan struktural terdapat di bagian barat Pulau Peling, memanjang dengan pola selatan – utara dengan ketinggian lebih dari 700 Mdpl, lereng curam



hingga sangat curam dengan kemiringan ≥ 40 persen. Morfologi ini terdapat di sekitaran perbatasan Kecamatan Buko, Kecamatan Buko Selatan, Kecamatan Bulagi Selatan dan Kecamatan Bulagi. Perbukitan struktural terdapat hampir diseluruh pulau, dengan ketinggian mulai ± 200 hingga ± 700 meter di atas permukaan laut, dengan lereng relatif miring (15-30 persen) hingga berbukit curam (30-40 persen), yang terdapat di Pulau Peling. Puncak-puncak bukit terdapat di Bukit Babasal di Pulau Peling bagian timur.

b. Pegunungan/perbukitan karst

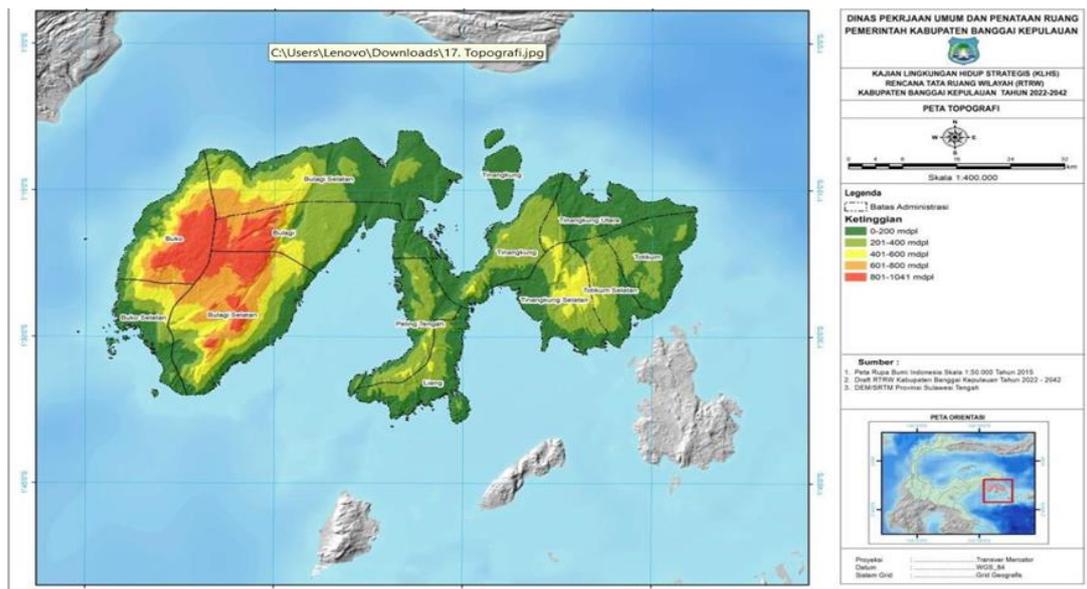
Perbukitan dan pegunungan karst menempati sebagian besar Pulau Peling, dan secara lokal-lokal pada pulau-pulau lainnya. Ciri khas morfologi ini adalah pola kerucut dan lembah karst, dolin, goa, ponor, dan sungai bawah tanah. Puncak terdapat di Gunung Tinakong (558 meter) dan Bukit Balombong di Pulau Peling.

c. Perbukitan intrusiv

Daerah ini merupakan perbukitan yang terbentuk karena penerobosan batuan gunung di wilayah Banggai berupa *granodiorite* dan *diorite*, terdapat di Kecamatan Totikum, Kecamatan Peling Tengah, Kecamatan Liang, Kecamatan Buko, dan Kecamatan Buko Selatan.

d. Dataran rendah

Dataran rendah terbentang di sepanjang wilayah pesisir dan lembah-lembah antar perbukitan atau pegunungan, yang sebagian besar dijumpai di bagian utara Pulau Peling, dan sebagian kecil di Selatan Pulau Peling meliputi Kecamatan Tinangkung Utara, Kecamatan Liang, Kecamatan Totikum Selatan, Kecamatan Liang, Kecamatan Buko.



Sumber: KLHS-RTRW Kab Banggai Kepulauan 2022 – 2042

Gambar 2.3
Peta Topografi Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan



Rincian kondisi tinggi rata-rata dari permukaan laut di tiap Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Kondisi Topografi rata-rata per Kecamatan dan Jarak ke Ibukota Kabupaten di Kabupaten Banggai Kepulauan (km) Tahun 2023

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Tinggi DPL (m)	Jarak ke Ibukota Kabupaten (km)
1.	Totikum	Sambiut	10	64
2.	Totikum Selatan	Kalumbatan	2	54
3.	Tinangkung	Salakan	3	0
4.	Tinangkung Selatan	Mansamat A	3	24
5.	Tinangkung Utara	Batulombu	1	25
6.	Liang	Liang	2	43
7.	Peling Tengah	Patukuki	2	30
8.	Bulagi	Bulagi 1	3	60
9.	Bulagi Selatan	Lolantang	5	78
10.	Bulagi Utara	Sambulangan	5	62
11.	Buko	Tataba	2	121
12.	Buko Selatan	Lumbi-Lumbia	3	134

Sumber: Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Angka Tahun 2024

Secara umum penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan tinggal di pesisir pantai dikarenakan sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai nelayan sehingga rata-rata letak ibukota kecamatan hanya berkisar 1-10 DPL diatas permukaan laut. Mengenai jarak ibukota kecamatan yang paling jauh ke ibukota Kabupaten yaitu kecamatan Buko Selatan mencapai 134 km dengan jarak tempuh sekitar 3 - 4 jam perjalanan, dimana kendala yang ditemui belum ada angkutan mobil umum yang mempunyai rute tetap dari ibukota Kecamatan ke ibukota Kabupaten sehingga menyulitkan dalam pelayanan umum dan tarif angkutan masih mahal karena masih harus menggunakan sistim carter.

2.1.1.1.4 Penggunaan Lahan

Kesesuaian penggunaan lahan adalah penilaian mengenai informasi yang menggambarkan mengenai pemanfaatan lahan di Kabupaten Banggai Kepulauan. Selain itu, juga dilakukan peninjauan terhadap faktor-faktor yang menghambat penggunaannya untuk tujuan-tujuan tertentu sehingga daya dukungnya dapat terpelihara dalam jangka waktu tidak terbatas. Secara terinci hubungan antara satuan *ecoregion* dan penggunaan lahan di Kabupaten Banggai Kepulauan, disajikan dalam tabel sebagai berikut:



Tabel 2.3
Hubungan Antara Ekoregion, Tanah dan Penggunaan Lahan
di Kabupaten Banggai Kepulauan, 2023

No	Satuan Ekoregion dan Material	Jenis Tanah	Penggunaan Lahan
1.	Wilayah Pesisir Endapan Aluvium Marin	Aluvial (<i>Entisols</i>)	Pemukiman, Wisata Pantai dan hutan lindung
2.	Dataran Aluvial Rawa Endapan Aluvium	Aluvial (<i>Entisols</i>)	Pemukiman, Rawa dan Sawah
3.	Lembah antar Perbukitan Endapan Aluvium	Aluvial (<i>Entisols</i>)	Pemukiman atau Perkarangan
4.	Lereng kaki Perbukitan Endapan Koluvium	Latosol (<i>Oxisols</i>), Podsolik (<i>Utisols</i>)	Pemukiman atau pekarangan, kebun campuran dan semak belukar
5.	Perbukitan Intrusif Batuan Vulkanik Tua Granit Banggai (Granit, Diorit, Granodiorit)	Podsolik (<i>Utisols</i>)	Hutan (dominan), semak belukar dan kebun
6.	Perbukitan dan Pegunungan Karst Batu Gamping Terumbu dan Gamping Napalan	Latosol (<i>Oxisols</i>),	Hutan (dominan), semak belukar dan kebun
7.	Perbukitan Struktural Patahan Batuan Vulkanik Tua Kelompok Diabas, Serpih, Konglomerat, Batupasir	Podsolik (<i>Utisols</i>)	Hutan (dominan), semak belukar
8.	Perbukitan dan Pegunungan Struktural Patahan Kelompok Batuan Malihan Sekis- Gnesis dan Batunapal	Kambisol (<i>Inceptisols</i>) Latosol (<i>Oxisols</i>)	Hutan (dominan) dan semak belukar
9.	Terumbu Karang dan Padang Lamun	-	Wisata Bahari (<i>Diving, Snorkling</i>)

Sumber: RPPLH Banggai Kepulauan (2022)

Berdasarkan klasifikasi tutupan atau jenis penggunaan lahan menurut SNI 7645-2010, maka di Kabupaten Banggai Kepulauan terdapat 10 (sepuluh) jenis tutupan lahan atau penggunaan lahan yaitu: Permukiman atau pekarangan; Hutan Lahan Kering Primer; Persawahan; Hutan Lahan Kering sekunder; Tegalan atau ladang; Hutan Mangrove; Kebun; Danau atau Telaga; Campuran; dan Rawa-rawa.

1. Kawasan Lindung

Kawasan linung merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Berdasarkan RTRW Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016- 2036, kawasan Lindung terdiri atas:

- kawasan hutan lindung;
- kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- kawasan perlindungan setempat;
- kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- kawasan rawan bencana alam; dan



f. kawasan lindung lainnya.

Kawasan Hutan Lindung dengan luas kurang lebih 26.739 Ha terdapat di beberapa kecamatan berikut ini:

- a. Kecamatan Tinangkung, dengan luasan kurang lebih 2.025,920 Ha;
- b. Kecamatan Tinangkung Utara, dengan luasan kurang lebih 248,190 Ha;
- c. Kecamatan Bulagi, dengan luasan kurang lebih 8.318,105 Ha;
- d. Kecamatan Bulagi Utara, dengan luasan kurang lebih 810,621 Ha;
- e. Kecamatan Bulagi Selatan, dengan luasan kurang lebih 14.487,200 Ha;
- f. Kecamatan Peling Tengah, dengan luasan kurang lebih 852,564 Ha;
- g. Kecamatan Totikum Selatan, dengan luasan kurang lebih 200,655 Ha;
- h. Kecamatan Buko Selatan, dengan luasan kurang lebih 40,690 Ha.

Kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya terdiri atas kawasan resapan air yang tersebar di seluruh kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan dengan luasan 237.842 Ha.

Kawasan perlindungan setempat terdiri atas kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, kawasan sekitar mata air; dan Kawasan ruang terbuka hijau.

Kawasan sempadan pantai terdapat di seluruh pulau di Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan panjang pantai kurang lebih 789,58 km. Kawasan sempadan sungai meliputi:

- a. Sungai Paisu Bebek dan Sungai Balayon di Kecamatan Liang;
- b. Sungai Ndudukan, Sungai Lomou, Sungai Tutung, di Kecamatan Totikum;
- c. Sungai Tobing, Sungai Tobungin, Sungai Nipah, Sungai Mandoni di Kecamatan Tinangkung Selatan;
- d. Sungai Manggalai, Sungai Ambelang di Kecamatan Tinangkung;
- e. Sungai Luksagu, Sungai Tatalalai dan Sungai Palam di Kecamatan Tinangkung Utara.

Kawasan sekitar danau terletak di:

- a. Danau Tendetung di Kecamatan Totikum Selatan;
- b. Danau Ndudukan di Kecamatan Totikum;
- c. Danau Alani di Kecamatan Buko;
- d. Danau Kuakon di Kecamatan Tinangkung; dan
- e. Danau Emeluk di Kecamatan Bulagi Selatan;

Berdasarkan Kepres Nomor 32 Tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung ditetapkan kawasan lindung sekitar danau sekurang-kurangnya 50 meter dari titik pasang tertinggi. Danau yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan terdapat di Kecamatan Totikum dan Kecamatan Totikum Selatan yakni Danau Tendetung dan Danau Ndudukan, serta di Kecamatan Buko yakni Danau Alani.

Kawasan mata air adalah kawasan tertentu di sekeliling danau, hulu sungai serta tebing-tebing sungai yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan kelestarian mata air yang ditetapkan sekurang-kurangnya 200



meter di sekitar mata air. Mata air di Kabupaten Banggai Kepulauan terdapat pada hulu sungai serta tebing sungai, tetapi debit airnya tidak cukup besar, sehingga untuk mengetahui kontinuitas dan besaran debit mata air perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Karena kebutuhan air dengan jumlah dan kualitas yang baik sangat diperlukan guna menunjang kegiatan rumah tangga, industri serta kegiatan di masa mendatang sehingga perlu dijaga dan dilestarikan. Kawasan sekitar mata air meliputi mata air atas Paisu Sinangkal, Lalanday, Bangunemo, Manggalai dan Lukpanenteng. Kabupaten Banggai Kepulauan juga memiliki Kawasan Ruang Terbuka Hijau yang ditetapkan di kawasan lapangan monumen Trikora dan Alun-alun di Kota Salakan. Kawasan Rawan Bencana Alam, tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan, yang meliputi: kawasan rawan gempa bumi, rawan tsunami, dan rawan tanah longsor.

2. Kawasan Budidaya

Kawasan Budidaya merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya pada hakekatnya adalah tempat di mana suatu wilayah dapat mengolah ruang sedemikian rupa menjadi peruntukan- peruntukan tersendiri sehingga dapat dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan dan memberikan kemakmuran kepada penduduknya namun tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Berbagai macam kawasan budidaya di Kabupaten Banggai Kepulauan tidak akan dideskripsikan secara mendetail, hanya akan dijabarkan beberapa kawasan saja yang terkait erat dengan potensinya sebagai tolok ukur penting untuk pembangunan, namun juga memiliki potensi untuk merusak kestabilan kondisi lingkungan apabila tidak direncanakan dan dikelola dengan matang. RTRW Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016-2036 mencatat Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya terdiri atas kawasan pantai berhutan bakau kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Tabel 2.4
Sebaran Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya di Kabupaten Banggai Kepulauan

Kecamatan	Kawasan Pantai	Konservasi Laut (Ha)	Kawasan Cagar Budaya
	Berhutan Bakau (Ha)		
Tinangkung	153,37		Monumen Trikora Bonua Lua Benteng Bebengketan
Tinangkung Selatan	439,71		
Tinangkung Utara	17,22		Rumah Satu Tiang Luksagu
Liang	65,55	32.359,35	
Peling Tengah	125,2		



Kecamatan	Kawasan Pantai	Konservasi Laut (Ha)	Kawasan Cagar Budaya
	Berhutan Bakau (Ha)		
Bulagi	42,35		Makam Raja Dallu, Makam Raja Boas, keramat Kombolon, Mustika Putih
Bulagi Utara	432,82		Batu Masigi, Batu Duangan
Bulagi Selatan	3,98	58.092,62	Tengkorak Manusia Zaman Dulu Desa Osan, Makam Lipuadino (Penyebar Islam), Peta Alam Desa Lolantang, Pusat Pembuatan Periuk
Buko	76,08		
Buko Selatan	226,06		Sanggar Batu Mesea

Sumber: Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2016 Tentang RTRW Kabupaten Banggai Kepulauan (2016-2036)

2.1.1.1.5 Daya Tampung dan Daya Dukung

A. Wilayah Ekologis/Fungsional

Batas wilayah ekologis fungsional Kabupaten Banggai Kepulauan dianalisis keterkaitan wilayah kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan/atau aspek fungsional. Selain batas administrasi yang menjadi acuan analisis wilayah ekologis atau fungsional, unsur lainnya yakni Daerah Aliran Sungai (DAS), daerah Cekungan Air Tanah (CAT) dan wilayah ekoregion. Sebagian batas wilayah ekologis atau fungsional di Kabupaten Banggai Kepulauan terdapat wilayah 12 mil wilayah laut sehingga menjadi salah satu input dalam wilayah ekologis. Adapun batas wilayah ekologis atau fungsional di Kabupaten Banggai Kepulauan disajikan pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.5
Wilayah Ekologis/Fungsional Kabupaten Banggai Kepulauan

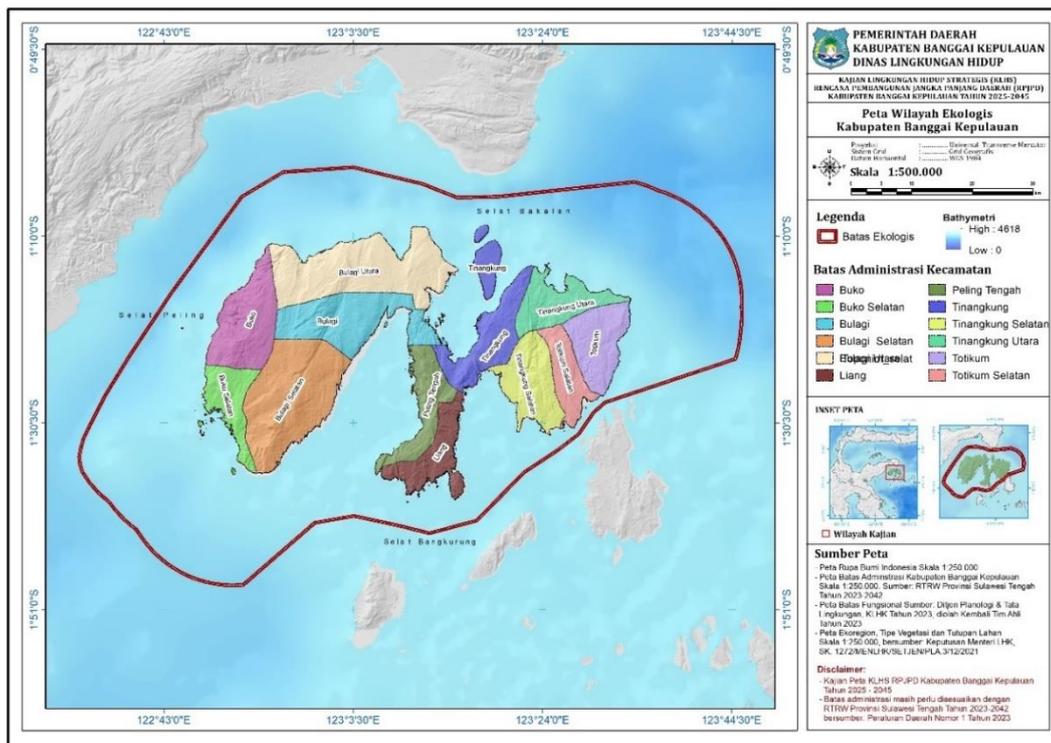
No.	Wilayah Ekologis	Luasan Wilayah (%)
1.	Kecamatan Liang	5,60%
2.	Kecamatan Buko Selatan	4,92%
3.	Kecamatan Bulagi Selatan	15,33%
4.	Kecamatan Peling Tengah	5,66%
5.	Kecamatan Tinangkung Selatan	7,12%
6.	Kecamatan Totikum Selatan	4,49%
7.	Kecamatan Tinangkung	9,04%
8.	Kecamatan Bulagi	10,56%
9.	Kecamatan Buko	8,96%
10.	Kecamatan Totikum	6,57%
11.	Kecamatan Bulagi Utara	15,83%
12.	Kecamatan Tinangkung Utara	5,93%



No.	Wilayah Ekologis	Luasan Wilayah (%)
	Total Wilayah Darat	32,52%
	Total Wilayah Laut	67,48%
	Total Luasan Wilayah Ekologis	100,00%

Sumber: Laporan Induk KLHS RPJMD Banggai Kepulauan, Tahun 2024

Zona ekologis atau fungsional mewakili beragam unsur terkait setiap bagian permukaan bumi. Diperlukan suatu alat atau metode untuk menampilkan kesamaan fungsi ekologis, agar dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai perencanaan suatu wilayah studi. Batas kawasan fungsional menjadi instrumen wilayah dalam peruntukan ruang, agar dapat mengetahui dampak positif atau negatif jika terjadi perubahan lingkungan hidup terhadap suatu kawasan. Misalnya batas kawasan fungsional memberikan dampak usaha dan/atau operasional yang direncanakan berdasarkan dampak tertentu, misalnya limbah (air, udara, dan tanah), di mana proses alami yang terjadi pada ruang tersebut akan mengalami perubahan yang mendasar bagi wilayah lain.



Sumber: Laporan Induk KLHS RPJMD Banggai Kepulauan, Tahun 2024

Gambar 2.4
Peta Batas Wilayah Ekologis/Fungsional di Kabupaten Banggai Kepulauan

Penyusun wilayah ekologis/fungsional adalah satu bentang alam dan vegetasi alami sebagai komponen utama dalam penyusunan ekoregion, maka diperlukan beberapa informasi penting sebagai aspek penyusun bentang alam, yaitu: informasi genesis atau sejarah pembentukan wilayah secara geotektonisme, stratigrafi dan



batuan penyusun, proses geomorfologis yang membangun dinamika bentang alam, dan morfologi atau topografi wilayah.

A.1) Ekoregion

Ekoregion tersusun atas beberapa pertimbangan, dengan aspek utama penyusun adalah bentangalam (natural landscape). Mendasarkan pada aturan dasar dan kerangka teori tentang ekoregion, dan memperhatikan aspek tektogenesis, stratigrafi (batuan penyusun dan strukturnya), kondisi topografi (morfologi lereng dan ketinggian), dan asal proses pembentukannya, maka di Kabupaten Banggai Kepulauan dapat diklasifikasikan ke dalam 5 (lima) satuan ekoregion bentang alam asal proses, yaitu: asal proses fluvial (aliran sungai), marin (gelombang), struktural (tektonik), solusional (pelarutan atau karstifikasi), dan organik (aktivitas organisme), yang menghasilkan 18 (delapan belas) satuan ekoregion bentang alam terinci, seperti disajikan dalam tabel dan gambar.

Tabel 2.6
Klasifikasi Satuan Ekoregion Bentang Alam
di Kabupaten Banggai Kepulauan

Morfologi: Lereng dan Ketinggian	Asal Proses	Struktur	Material / Batuan	Nama Ekoregion	Penggunaan Lahan
Ekoregion Darat					
Datar - Landai Lereng: 0 - 8% Elevasi: 0 - 30 m	Pengendapan sungai/fluvial	Selaras tersortasi baik	Aluvium sungai (Qa) Lempung berpasir	Lembah antar Perbukitan (F.Qa)	Permukiman dan Pekarangan
	Pengendapan gelombang/ marin	Tidak berstruktur	Aluvium marin (Qa) Pasir marin	Dataran Pesisir Bergisik (M.Qa)	Permukiman dan Wisata pantai
Miring Lereng: 8 - 15% Elevasi: 30 - 250 m	Agradasi rombakan lereng	Tidak berstruktur	Koluvium, hasil rombakan lereng akibat pelapukan batuan induk perbukitan	Lerengkaki Perbukitan Batuan Koluvium (K3.Qo)	Permukiman, Kebun campur, dan Belukar
Agak curam / Berbukit Lereng: 15 - 30% Elevasi: 250 - 500 m	Solusional/ pelarutan batuan	Berlapis banyak retakan dan diaklast	Batugamping terumbu Formasi Peling (Ql)	Perbukitan Karst Batugamping Terumbu (K2.Ql)	Hutan dan Semak belukar
			Batugamping napalan Formasi Salodik (Tems)	Perbukitan Karst Batugamping Napalan (K2.Tems)	Hutan dan Semak belukar
	Struktural akibat penunjaman tektonik	Patahan dan lipatan	Serpilh, batulempung bergamping, dan sisipan batupasir kuarsa Formasi Buya (Jb)	Perbukitan Struktural Batulempung Gampingan (S2.Jb)	Hutan dan Semak belukar
			Konglomerat, breksi, dan batupasir Formasi Bobong (Jbs)	Perbukitan Struktural Batuan Konglomerat, Breksi, dan Batupasir (S2.Jbs)	Hutan dan Semak belukar
			Granit, granodiorit, dan diorit Formasi Banggai (PTRBg)	Perbukitan Struktural Batuan Volkanik Tua Granit Banggai (S2.PTRBg)	Hutan alami



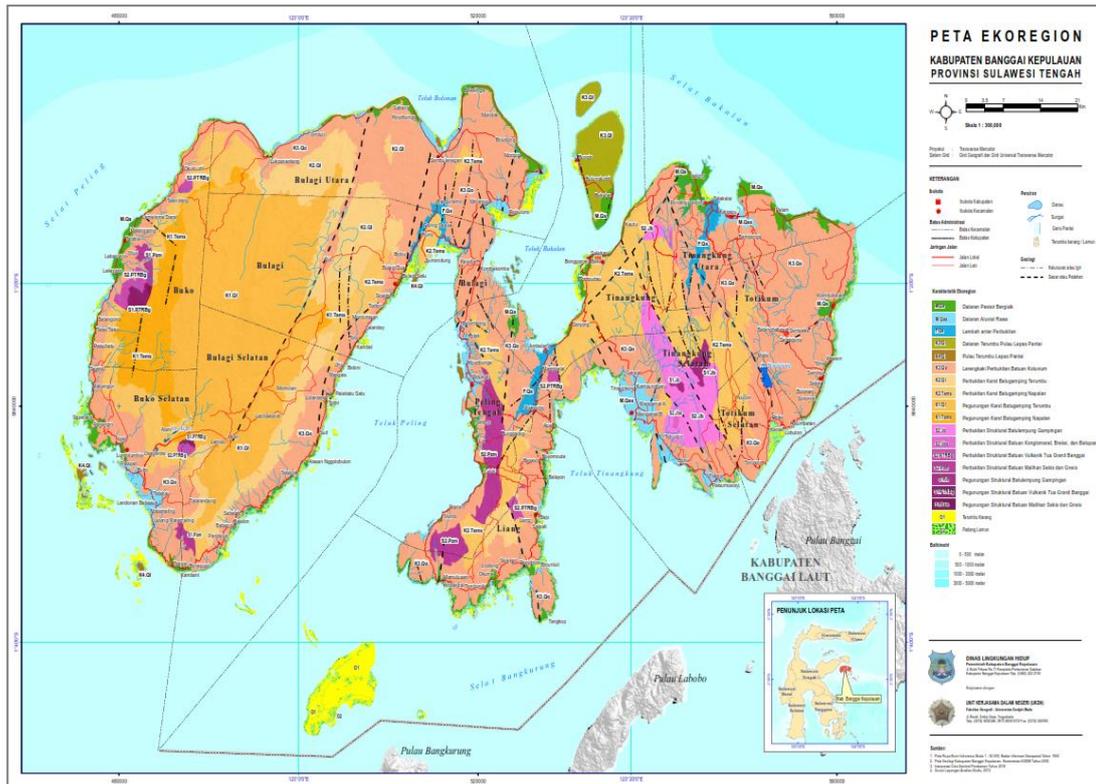
Morfologi: Lereng dan Ketinggian	Asal Proses	Struktur	Material / Batuan	Nama Ekoregion	Penggunaan Lahan
			Batuan malihan sekis, gneis, ampibolit, dan kuarsit (Pzm)	Perbukitan Struktural Batuan Malihan Sekis dan Gneis (S2.Pzm)	Hutan alami
Curam / Bergunung Lereng: 30 - >40% Elevasi: 500 - >1000 m	Solusional/ pelarutan batuan	Berlapis banyak retakan dan diaklas	Batugamping terumbu Formasi Peling (Ql)	Pegunungan Karst Batugamping Terumbu (K1.Ql)	Hutan alami
			Batugamping napalan Formasi Salodik (Tems)	Pegunungan Karst Batugamping Napalan (K1.Tems)	Hutan alami
	Struktural akibat penunjaman tektonik	Patahan dan lipatan	Batulempung bergamping, dan sisipan batupasir kuarsa Formasi Buya (Jb)	Pegunungan Struktural Batulempung Gampingan (S1.Jb)	Hutan alami
Curam / Bergunung Lereng: 30 - >40% Elevasi: 500 - >1000 m	Struktural akibat penunjaman tektonik	Patahan dan lipatan	Batuan malihan sekis, gneis, ampibolit, dan kuarsit (Pzm)	Pegunungan Struktural Batuan Malihan Sekis dan Gneis (S1.Pzm)	Hutan alami
Pulau kecil Lereng: 0 - 8% Elevasi: 0 - 30 m	Pulau kecil terumbu karang	Berlapis dan diaklas	Batugamping terumbu Formasi Peling (Ql)	Rataan atau Dataran Pulau Terumbu Lepas Pantai (K3.Ql)	Permukiman, semak dan hutan mangrove
				Pulau Terumbu Lepas Pantai (K4.Ql)	Hutan dan semak belukar
Ekoregion Laut					
Datar - Landai Zona Lithoral (Continental Shelf, lereng 0- 3%)	Organik	Tidak berstruktur	Terumbu	Terumbu Karang (O1)	Wisata bahari (Diving, Snorkling, Fishing)
		Tidak berstruktur	Pasir terumbu	Padang Lamun (O2)	
	Pengendapan fluviomarin	Tidak jelas	Aluvium berupa lumpur fluviomarin (Qas)	Rawa Payau (M.Qas)	Hutan mangrove

Sumber: Hasil Interpretasi dan Analisis Peta Rupa Bumi, Citra Quickbird, Citra SRTM, dan Peta Geologi (2019)

Karakteristik satuan ekoregion bentang alam ini adalah menempati morfologi datar hingga landai dengan kemiringan lereng 0 hingga 8 persen, yang berasosiasi pada lembah-lembah sempit memanjang akibat struktur patahan atau lipatan, tersusun atas material aluvium akibat pengendapan aliran sungai yang berupa campuran kerikil, pasir, lempung, dan lanau, yang tersortasi baik dengan struktur berlapis selaras (material kasar membentuk lapisan di bagian bawah, dan material halus di bagian atas), dan berumur Holosen (± 5.000 tahun yang lalu). Kondisi ini menyebabkan satuan ekoregion bentang alam ini merupakan satuan yang mampu menyimpan air tanah dengan baik dan cukup potensial, tanah berkembang dengan baik dengan kandungan hara yang tinggi dan disebut tanah aluvial, sehingga pada



satuan ekoregion ini banyak dimanfaatkan sebagai lahan-lahan permukiman, pekarangan, perkebunan, atau bahkan di sebagian wilayah dikembangkan sebagai sawah irigasi. Satuan Ekoregion Lembah antar Perbukitan (F.Qa) yang cukup luas dengan pola memanjang di Kabupaten Banggai Kepulauan, terdapat di lembah Tatakalai dan Poding-poding, Kecamatan Tinangkung Utara; lembah Ambelang di Kecamatan Tinangkung hingga Alakasing di Kecamatan Peling Tengah; lembah Meselesek dan Peling Seasa di Kecamatan Bulagi hingga Bangunemo di Kecamatan Bulagi Utara, serta lembah Kayubet di Kecamatan Bulagi.



Gambar 2.5
Satuan Ekoregion di Kabupaten Banggai Kepulauan

A.2) Bentang Alam

Bentang alam karst pada Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan suatu bentang lahan yang mempunyai relief dan drainase khas, yang disebabkan oleh derajat pelarutan batuan lebih tinggi dibanding dengan jenis batuan lainnya, yang salah satu jenisnya adalah batugamping ($CaCO_3$). Formasi batuan yang dapat membentuk topografi karst mempunyai syarat: (i) struktur lapisan batuan tebal dengan sifat batuan mudah larut (*soluble*), (ii) banyak terdapat struktur retakan (*diaklast*), (iii) curah hujan tinggi dengan kandungan gas karbondioksida (CO_2) yang tinggi pula, (iv) terletak pada elevasi yang tinggi, dan (v) permukaannya tertutup oleh vegetasi berakar kuat. Selain pada batugamping, topografi karst juga dapat terbentuk pada jenis batuan evaporit, seperti: *halit*, *gypsum*, dan *anhidrat*. Pembentukan topografi karst melalui proses yang sangat lama, melalui 4 (empat) tahapan atau stadium, yaitu: stadium muda, dewasa, tua, dan lanjut, seperti diilustrasikan dalam



gambar berikut.

Karakteristik fisik ekoregion Kabupaten Banggai Kepulauan terdiri dari bentang alam yang cukup beragam mencakup dataran fluvial, marin, solusial karst dan struktur lipatan yang disajikan pada tabel dan gambar pada karakteristik bentang alam Kabupaten Banggai Kepulauan berikut.

Tabel 2.7
Deskripsi dan Karakteristik Bentang Alam
di Kabupaten Banggai Kepulauan

Table with 3 columns: No., Bentang Alam, Luasan (%). It lists 10 types of landforms and their respective percentages, such as 'Perbukitan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat' at 41.96%.

Sumber: Laporan Induk KLHS RPJMD Banggai Kepulauan, Tahun 2024

Bentang alam perbukitan dan dataran solusional karst di Kabupaten Banggai Kepulauan tersebar dominan sebesar 69 persen pada kabupaten ini. Ekoregion ini tergolong ekoregion yang unik dan sangat rentan terhadap kerusakan. Ekoregion solusional/karst dicirikan dengan bahan dasar batuan berupa batugamping yang porous dan sangat mudah menyerap air untuk selanjutnya dialirkan ke sungai bawah tanah.

Tabel 2.8
Parameter dan deskripsi Solusional Karst sebagai bentang alam dominan
di Kabupaten Banggai Kepulauan

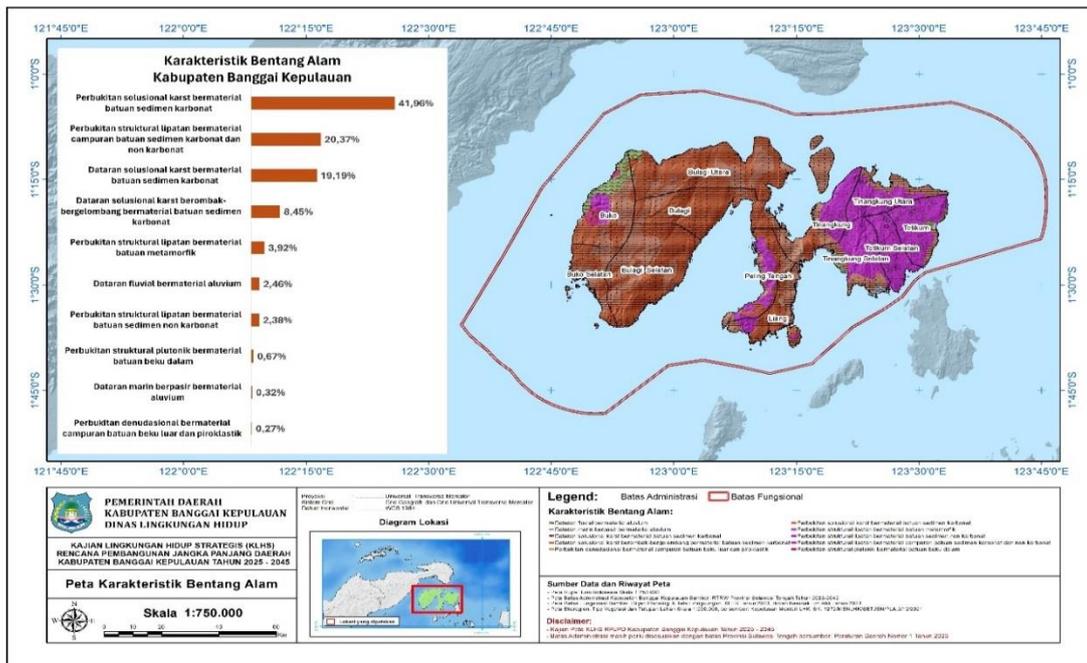
Table with 2 columns: Parameter, Deskripsi Solusional Karst. It describes geomorphology parameters like elevation (< 500 m dpal) and relief (0-300 m).



Parameter	Deskripsi Solusional Karst	
Hidrologi	Sumber daya air berupa sungai bawah tanah dengan kualitas air bawah tanah cenderung rendah.	
Jasa Ekosistem	Penyediaan	Air (Sungai bawah tanah), Pertanian lahan kering, potensial untuk hutan
	Pengaturan	Pengaturan iklim (carbon sink), pengaturan air (kaya sumberdaya air berupa sungai bawah tanah yang mengandung karbonat tinggi dan bakteri colli)
	Budaya	Estetika, Rekreasi (wisata minat khusus kars - caving), pendidikan (penelitian)
	Pendukung	Habitat kelelawar, walet

Sumber: Laporan Induk KLHS RPJMD Banggai Kepulauan, Tahun 2024

Ancaman kerusakan dan degradasi lingkungan solusional/karst yang lain adalah berupa kerentanan terjadinya kekeringan dan karstifikasi oleh air hujan. Jika air hujan jatuh tanpa ada halangan vegetasi yang menutupi tanah, air hujan akan mudah mengerosi lapisan tanah dan menyebabkan batugamping di bawahnya terekspose keluar. Dengan berjalannya waktu, batugamping yang terekspose tersebut mengalami proses karstifikasi yang lebih cepat dan menyebabkan hilangnya kemampuan lahan tersebut sehingga menjadi lahan kritis. Agar kekritisian dan kerusakan tersebut dapat dihindari, maka ekoregion solusional/karst harus selalu terlindungi oleh tutupan vegetasi yang cukup agar tidak tergerus oleh erosi. Di samping itu, pola konservasi tanah dengan pembuatan terasering juga sangat dianjurkan untuk menekan terjadinya erosi tanah.



Sumber: Laporan Induk KLHS RPJMD Banggai Kepulauan, Tahun 2024

Gambar 2.6
Peta Karakteristik Bentang Alam Wilayah Ekologis di Kabupaten Banggai Kepulauan



A.3) Vegetasi

Vegetasi menjadi komponen penting pada perhitungan Jasa ekosistem karena keberadaan vegetasi memberi pengaruh pada keberlangsungan hidup bagi makhluk hidup. Ketersediaan vegetasi mempengaruhi produksi oksigen dan pengikat karbon, erat kaitannya dengan tersedianya habitat untuk berbagai jenis spesies. Selain itu vegetasi juga mempengaruhi iklim lokal, mitigasi bencana, Tinggi rendahnya jasa ekosistem dipengaruhi oleh sebaran vegetasi. Jenis dan luasan tutupan vegetasi dapat mempengaruhi proses penyerapan karbon dioksida. Hutan rimba yang luas dengan tutupan vegetasi yang rapat memiliki peran besar dalam proses penyerapan karbon dioksida (CO₂). Selain itu hutan rimba yang masih alami menjadi habitat flora dan fauna. Hutan rimba dan perkebunan juga dapat membantu dalam pencegahan bencana alam. Kerapatan vegetasi mempengaruhi pengaturan iklim, semakin rapat tutupan vegetasinya maka sistem pengaturan iklimnya akan semakin baik. Kondisi ini menjadikannya memiliki Jasa ekosistem yang tinggi. Hal yang sama juga berlaku untuk distribusi vegetasi pada tanah kosong. Semakin rendah tutupan vegetasi maka berpengaruh pada rendahnya jasa ekosistem di wilayah tersebut. Luas dan jenis tutupan vegetasi di wilayah ekologis Kabupaten Banggai Kepulauan dapat dilihat pada tabel kondisi vegetasi alami berikut.

Tabel 2.9
Kondisi Vegetasi Alami Wilayah Ekologis
di Kabupaten Banggai Kepulauan

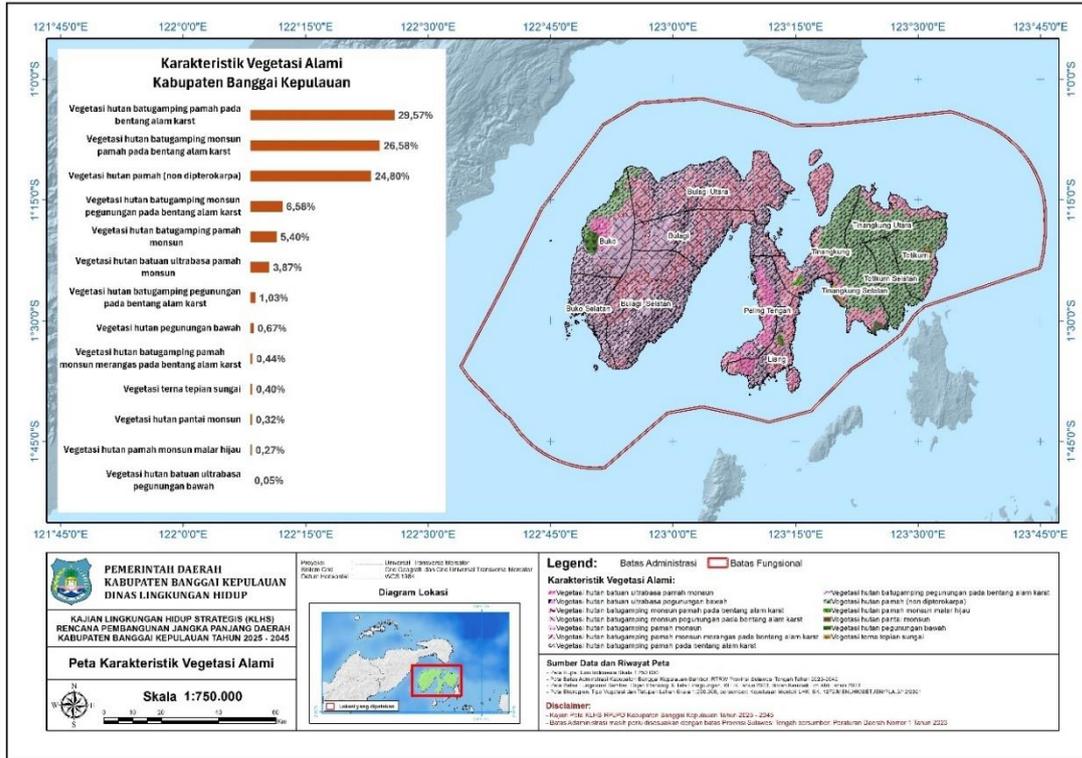
No.	Vegetasi	Luasan (%)
1.	Vegetasi hutan batugamping pamah pada bentang alam karst	29,57%
2.	Vegetasi hutan batugamping monsun pamah pada bentang alam karst	26,58%
3.	Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	24,80%
4.	Vegetasi hutan batugamping monsun pegunungan pada bentang alam karst	6,58%
5.	Vegetasi hutan batugamping pamah monsun	5,40%
6.	Vegetasi hutan batuan ultrabasa pamah monsun	3,87%
7.	Vegetasi hutan batugamping pegunungan pada bentang alam karst	1,03%
8.	Vegetasi hutan pegunungan bawah	0,67%
9.	Vegetasi hutan batugamping pamah monsun merangas pada bentang alam karst	0,44%
10.	Vegetasi terna tepian sungai	0,40%
11.	Vegetasi hutan pantai monsun	0,32%
12.	Vegetasi hutan pamah monsun malar hijau	0,27%
13.	Vegetasi hutan batuan ultrabasa pegunungan bawah	0,05%

Sumber: Laporan Induk KLHS RPJMD Banggai Kepulauan, Tahun 2024

Data komunitas vegetasi alami Kabupaten Banggai Kepulauan menunjukkan terdapat 13 jenis vegetasi alami dengan luasan terbesar yaitu vegetasi hutan batugamping monsun dan pamah pada bentang alam karst yaitu 64,21% dari total



luasan vegetasi, kemudian vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa) 24,80% dan diikuti dengan komunitas vegetasi lainnya. Gambaran vegetasi pada wilayah ekologis Kabupaten Banggai Kepulauan Berikut disajikan pada gambar dan tabel berikut.



Sumber: Laporan Induk KLHS RPJMD Banggai Kepulauan, Tahun 2024

Gambar 2.7
Peta Karakteristik Vegetasi Alami Wilayah Ekologis di Kabupaten Banggai Kepulauan

Sementara itu, deskripsi satuan vegetasi alami wilayah ekologis di Kabupaten Banggai Kepulauan disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.10
Deskripsi Satuan Vegetasi Alami Wilayah Ekologis di Kabupaten Banggai Kepulauan

Parameter	Deskripsi Satuan Vegetasi
Klimatologi	Beriklim agak kering, suhu udara rata-rata 24-28 °C. Curah hujan tahunan 1.500-2.500 mm.
Geomorfologi	Elevasi secara dominan < 500 m dpal. Relief dan lereng: berbukit, dengan amplitudo relief 0-300 m, kemiringan berkisar >16 %. Terbentuk oleh proses pelarutan oleh air hujan dan aliran permukaan pada bentang alam batugamping (koral).
Hayati (Flora-Fauna)	Jenis jati, mahoni, sengon, anggrek, kera ekor panjang, fauna dalam gua, reptil dan melata; Vegetasi Solusional/Karst Lahan Kering Pamah, Vegetasi Solusional/Karst Lahan Pamah, Vegetasi Monsun Solusional/Karst Lahan Pamah, Vegetasi Monsun Solusional/Karst Pegunungan Bawah, dan Vegetasi



Parameter	Deskripsi Satuan Vegetasi
	Solusional/Karst Pegunungan Bawah. Fauna Solusional/Karst di sekitar ekoregion ini sangat spesifik beberapa diantaranya merupakan endemik, berpotensi sebagai pengendali hama dan penyerbuk buah-buahan hutan tertentu. Kawasan Solusional/Karst potensial sebagai tempat berlindungnya fauna.
Kerawanan Lingkungan	Kekeringan dan karstifikasi oleh air hujan

Sumber: Laporan Induk KLHS RPJMD Banggai Kepulauan, Tahun 2024

Kabupaten Banggai Kepulauan terdapat keanekaragaman ekosistem yang membentang mulai dari ekosistem hutan perbukitan atau pegunungan, hutan dataran rendah, hutan mangrove, dan ekosistem terumbu. Masing-masing ekosistem tersebut mempunyai keanekaragaman hayati dengan flora fauna yang spesifik. Berbagai keragaman ekosistem dan formasi hutan pada dasarnya merupakan perpaduan berbagai faktor lingkungan, seperti: curah hujan, ketinggian, kondisi geologi, tanah, dan hidrologi. Secara geografis, ekosistem hutan di wilayah kajian merupakan ekosistem hutan tropis yang wilayahnya panas sepanjang tahun, dengan kelembaban udara yang tinggi, sehingga menyebabkan keanekaragaman hayati yang relatif tinggi.

A.4) Penutupan Lahan

Penutup lahan adalah tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati merupakan suatu hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutupan lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada penutup lahan tersebut. Sementara itu, penggunaan lahan diartikan sebagai bentuk pemanfaatan atau fungsi perwujudan suatu bentuk lahan. (SNI 7645, 2014). Data kondisi tutupan lahan di wilayah ekologis Kabupaten Banggai Kepulauan disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.11
Kondisi Tutupan Lahan di Wilayah Ekologis
di Kabupaten Banggai Kepulauan

No.	Penutupan Lahan	Luasan (%)	Keterangan
1.	Pertanian Lahan Kering Campur	40,01%	budidaya tanaman pertanian di lahan yang kurang air dan tanah yang kurang subur. Pertanian lahan kering campuran masih melakukan penggarapan secara temporer atau berpindah-pindah. Area yang digunakan untuk kegiatan pertanian dengan jenis tanaman selain padi, tidak memerlukan pengairan secara ekstensif dan memerlukan campur tangan manusia untuk menunjang kelangsungan hidupnya.
2.	Belukar	34,30%	Kawasan lahan kering yang ditumbuhi dengan berbagai macam vegetasi alami heterogen dan



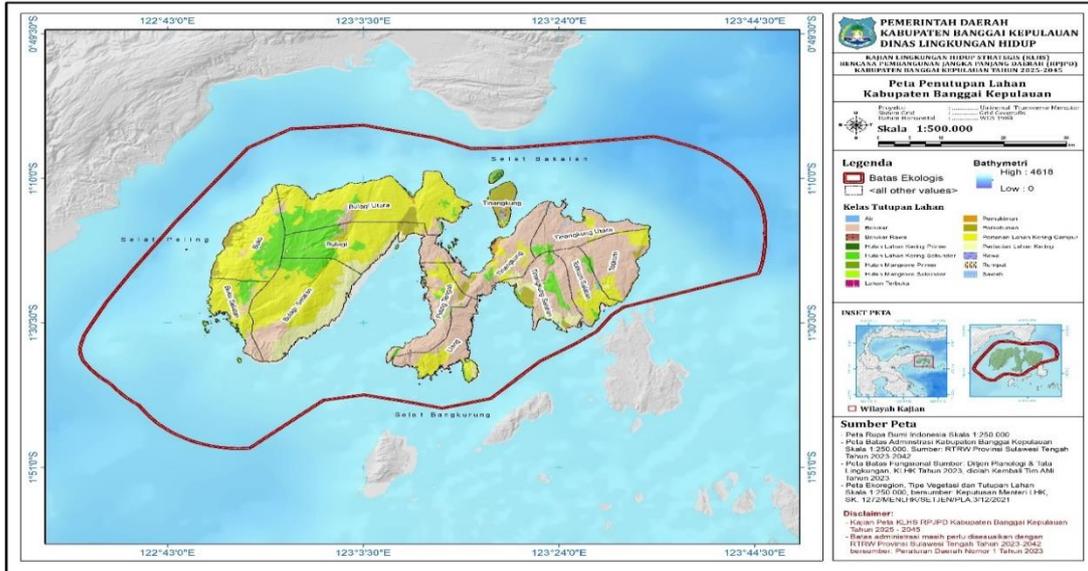
No.	Penutupan Lahan	Luasan (%)	Keterangan
			homogen dengan tingkat kerapatan jarang hingga rapat. Kawasan didominasi vegetasi rendah (alami). Semak belukar biasanya kawasan bekas hutan dan biasanya tidak menampilkan lagi bekas atau bercak terbangun.
3.	Hutan Lahan Kering Sekunder	12,84%	Hutan yang tumbuh berkembang pada habitat lahan kering yang dapat berupa hutan dataran rendah, perbukitan dan pegunungan, atau hutan tropis dataran tinggi yang sudah mengalami intervensi manusia atau bekas penebangan hutan primer.
4.	Pertanian Lahan Kering	6,21%	Pertanian lahan kering dengan penggarapan secara temporer atau berpindah-pindah. Ladang adalah area yang digunakan untuk kegiatan pertanian dengan jenis tanaman selain padi, tidak memerlukan pengairan secara ekstensif, vegetasinya bersifat artifisial dan memerlukan campur tangan manusia untuk menunjang kelangsungan hidupnya.
5.	Perkebunan	3,77%	Lahan yang ditanami tanaman keras lebih dari satu jenis atau tidak seragam yang menghasilkan bunga, buah, dan getah, dan cara pengambilan hasilnya bukan dengan cara menebang pohon. Perkebunan campuran di Indonesia biasanya berasosiasi dengan permukiman perdesaan atau pekarangan, dan diusahakan secara tradisional oleh penduduk.
6.	Pemukiman	1,29%	Areal atau lahan yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung kehidupan manusia.
7.	Hutan Mangrove Sekunder	0,68%	Areal ekosistem pesisir dengan didominasi kerapatan sedang yang memiliki produktivitas hayati yang tinggi, fungsi Mangrove sangat penting bagi peredam ancaman-ancaman kerusakan lingkungan dan pantai seperti abrasi, penahan gelombang, angin dan juga sebagai tempat nursery ground bagi makhluk pesisir
8.	Hutan Mangrove Primer	0,28%	Areal ekosistem pesisir dengan didominasi kerapatan tinggi yang memiliki produktivitas hayati yang tinggi, fungsi mangrove sangat penting bagi peredam ancaman-ancaman kerusakan lingkungan dan pantai seperti abrasi, penahan gelombang, angin dan juga sebagai tempat nursery ground bagi makhluk pesisir.
9.	Sawah	0,15%	Areal pertanian yang digenangi air atau diberi air,



No.	Penutupan Lahan	Luasan (%)	Keterangan
			baik dengan teknologi pengairan (sawah irigasi), tadah hujan, maupun pasang surut. Areal pertanian dicirikan oleh pola pematang dengan ditanami jenis tanaman pangan berumur pendek (padi).
10.	Tubuh Air	0,14%	Areal perairan, termasuk laut, sungai, danau, waduk, dll.
11.	Hutan Lahan Kering Primer	0,10%	Hutan yang tumbuh berkembang pada habitat lahan kering yang dapat berupa hutan dataran rendah, perbukitan dan pegunungan, atau hutan tropis dataran tinggi yang masih kompak dan belum mengalami intervensi manusia atau bukan bekas penebangan.
12.	Rawa	0,09%	Genangan air tawar atau air payau yang luas dan permanen di daratan. Tempat mengalir air yang bersifat alamiah.
13.	Belukar Rawa	0,07%	Kawasan bekas hutan yang tumbuh kembali suksesi alami atau semak belukar yang tergenang oleh air akibat terdrainase dengan buruk. Belukar rawa yang ditemukan di lapangan adalah kawasan dengan vegetasi rendah alami yang tergenang oleh air,
14.	Rumput	0,07%	Areal yang tutupan tanamannya didominasi oleh rumput, padang rumput yang belum dikembangkan tidak hanya terdiri dari rumput, tanaman hijauan, tanaman non-vaskular dan berkayu yang sangat beragam
15.	Lahan Terbuka	0,01%	Areal yang tidak digarap karena tidak subur dan/atau menjadi tidak subur setelah digarap serta tidak ditumbuhi tanaman

Sumber: Laporan Induk KLHS RPJMD Banggai Kepulauan, Tahun 2024

Persebaran bentuk dan pola penggunaan lahan di suatu wilayah berasosiasi dengan karakteristik ekoregion bentanglahannya. Pada satuan ekoregion berupa perbukitan dan pegunungan, umumnya didominasi dengan pemanfaatan lahan berupa hutan, kebun campuran, dan semak belukar. Pada lereng-lereng kaki perbukitan, banyak dijumpai lahan-lahan budidaya berupa tegalan atau ladang dan kebun-kebun penduduk. Sementara pada satuan ekoregion yang berada di bagian bawah atau dataran rendah (*low land*), seperti lembah antar perbukitan atau pegunungan, dataran aluvial pesisir, dan dataran aluvial rawa, didominasi oleh penggunaan lahan berupa permukiman, sawah (khususnya sawah irigasi), dan kebun pekarangan. Satuan ekoregion paling bawah berupa wilayah pesisir bergisik, pada umumnya telah berkembang sebagai lahan permukiman penduduk, di samping juga pada beberapa lokasi telah dikembangkan sebagai kawasan wisata alam pantai.

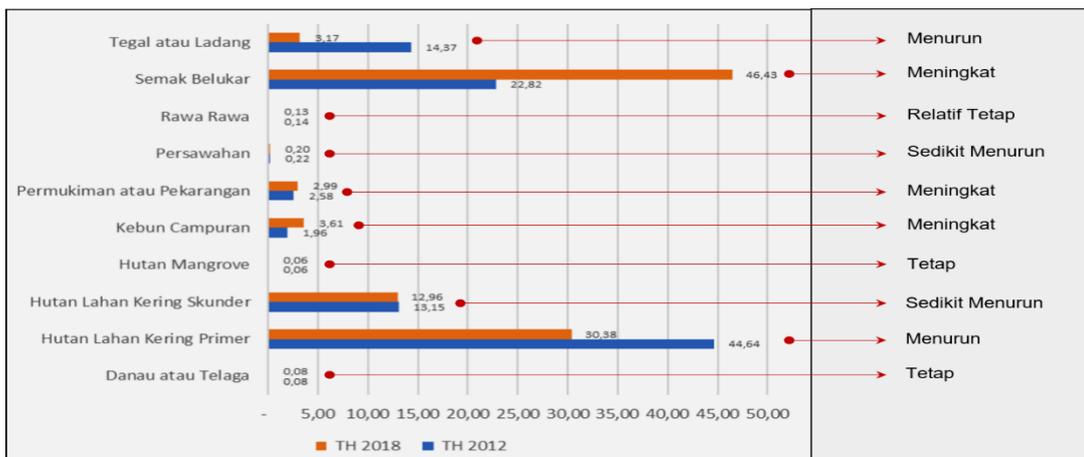


Sumber: Laporan Induk KLHS RPJMD Banggai Kepulauan, Tahun 2024

Gambar 2.8

Peta Penutupan Lahan Wilayah Ekologis di Kabupaten Banggai Kepulauan

Analisis perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Banggai Kepulauan, dilakukan RPPLH Kabupaten Banggai Kepulauan, hasil analisis perubahan penggunaan lahan antara tahun 2012 hingga 2018, maka di Kabupaten Banggai Kepulauan pada masa-masa yang akan datang akan terjadi kecenderungan (*trend*) penurunan luasan areal hutan lahan kering primer (yang berfungsi konservasi) menjadi lahan semak belukar akibat aktivitas pembakaran hutan untuk ladang berpindah, kebun campuran, dan sebagian untuk permukiman. Kecenderungan penurunan luasan lahan juga terjadi pada hutan lahan kering sekunder dan persawahan, yang umumnya berubah menjadi lahan kebun campuran dan permukiman. Kecenderungan (*trend*) perubahan penggunaan lahan disajikan dalam gambar berikut.



Gambar 2.9

Status Daya Dukung Lingkungan Jasa Penyediaan Bahan Pangan Berdasarkan Kecenderungan Perubahan Penggunaan Lahan di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2012-2018



B. Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung lingkungan merupakan indikasi kemampuan lingkungan untuk mendukung penggunaan tertentu, sedangkan daya tampung adalah indikasi toleransi mendukung perubahan penggunaan tertentu (atau pengelolaan tertentu) pada unit spasial tertentu. Salah satu metode untuk penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan dilakukan dengan pendekatan jasa ekosistem (*ecosystem services*), yaitu manfaat yang diperoleh oleh manusia dari berbagai sumberdaya dan proses alam yang secara bersama-sama diberikan oleh suatu ekosistem, yang dikelompokkan ke dalam 4 (empat) macam manfaat, yaitu: manfaat penyediaan (*provisioning*), manfaat pengaturan (*regulating*), manfaat budaya (*cultural*), dan manfaat pendukung (*supporting*), yang merujuk pada sistem klasifikasi jasa ekosistem menurut standar *Millenium Ecosystem Assessment* (MEA, 2005).

Status lingkungan hidup menunjukkan kualitas lingkungan di suatu wilayah, yaitu keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung optimal bagi ke langsgungan kehidupan manusia pada suatu wilayah. Kualitas lingkungan dicirikan antara lain dari suasana yang membuat orang merasa betah, kerasan tinggal, dan tenteram di tempatnya sendiri. Berbagai keperluan hidup terpenuhi dari kebutuhan dasar atau primer yang meliputi makan, minum, perumahan, sampai kebutuhan rohani atau spiritual yang meliputi pendidikan, rasa aman, dan sarana ibadah. Kualitas lingkungan hidup dapat dibedakan berdasarkan karakteristik biofisik, sosial-ekonomi, dan budaya. Berdasarkan definisi tersebut menunjukkan bahwa status lingkungan hidup dipengaruhi oleh komponen daya dukung lingkungan (ketersediaan sumber daya alam) dan daya tampung lingkungan (berbagai kebutuhan manusia akan sumber daya alam tersebut). Status lingkungan hidup dapat ditentukan berdasarkan analisis kesesuaian antara daya dukung yang menunjukkan potensi atau ketersediaan sumber daya alam dan karakteristiknya, dan daya tampung yang menunjukkan kemampuan lingkungan untuk memberikan pelayanan bagi berbagai kebutuhan hidup manusia dan risiko lingkungan akibat dari buangan hasil aktivitas manusia yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang berupa buangan limbah ke dalam lingkungan.

B.1) Daya Dukung Penyedia Air

Ekosistem memberikan manfaat penyediaan air bersih, yaitu ketersediaan air bersih baik yang berasal dari air permukaan maupun air tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), bahkan air hujan yang dapat dipergunakan untuk kepentingan domestik, pertanian, industri maupun jasa. Penyediaan jasa air bersih sangat dipengaruhi oleh kondisi curah hujan dan batuan yang dapat menyimpan air (akuifer), serta faktor yang dapat mempengaruhi sistem penyimpanan air tanah seperti kondisi bentang lahan, geologi, dan tutupan lahan. Aktivitas manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam (daya tampung) yang berlebihan (eksploitasi) khususnya sumber daya air, dapat melampaui batas daya dukung lingkungannya,



yang akhirnya menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem dalam mengatur siklus hidrologi di alam. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis status lingkungan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan pendekatan jasa ekosistem untuk penyediaan air bersih, agar pemanfaatan sumber daya air dapat berkesinambungan dengan tetap menjaga dan melindungi kelestarian fungsi ekosistem yang ada.

Sampai saat ini sumber utama air bersih bagi penduduk di Kabupaten Banggai Kepulauan pada umumnya masih mengandalkan sumber mata air, dengan perincian: sebanyak 90 desa menggunakan mata air, 15 desa menggunakan air PDAM (yang juga bersumber dari mata air), 15 desa menggunakan sumur gali (air tanah), 18 desa memanfaatkan air hujan, dan 3 desa menggunakan sumber air bersih dari air permukaan (sungai atau danau). Kondisi ini menunjukkan bahwa betapa tinggi dan pentingnya nilai dan fungsi air tanah termasuk mata air sebagai sumber air bersih bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Banggai Kepulauan. Berdasarkan kenyataan tersebut, mendesak kepentingan untuk mengetahui secara terinci tentang daya dukung atau ketersediaan air tanah dalam hubungannya dengan kemampuan untuk mencukupi kebutuhan air bersih penduduk pada masa kini dan masa yang akan datang. Sumber air bersih disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.12
Sumber Air Minum Utama (Air Bersih) bagi Masyarakat
di Kabupaten Banggai Kepulauan

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa dengan Sumber Air Minum				
		Mata air	PDAM	Sumur	Air Hujan	Sungai, Danau
1.	Totikum	9	2	-	-	-
2.	Totikum Selatan	8	-	-	-	-
3.	Tinangkung	2	-	7	-	2
4.	Tinangkung Selatan	9	-	-	-	-
5.	Tinangkung Utara	5	-	-	-	1
6.	Liang	13	3	-	-	-
7.	Peling Tengah	11	-	-	-	-
8.	Bulagi	2	7	-	6	-
9.	Bulagi Selatan	7	-	1	12	-
10.	Bulagi Utara	1	2	7	-	-
11.	Buko	13	-	-	-	-
12.	Buko Selatan	10	1	-	-	-
Jumlah		90	15	15	18	3

Sumber: RPPLH Kabupaten Banggai Kepulauan

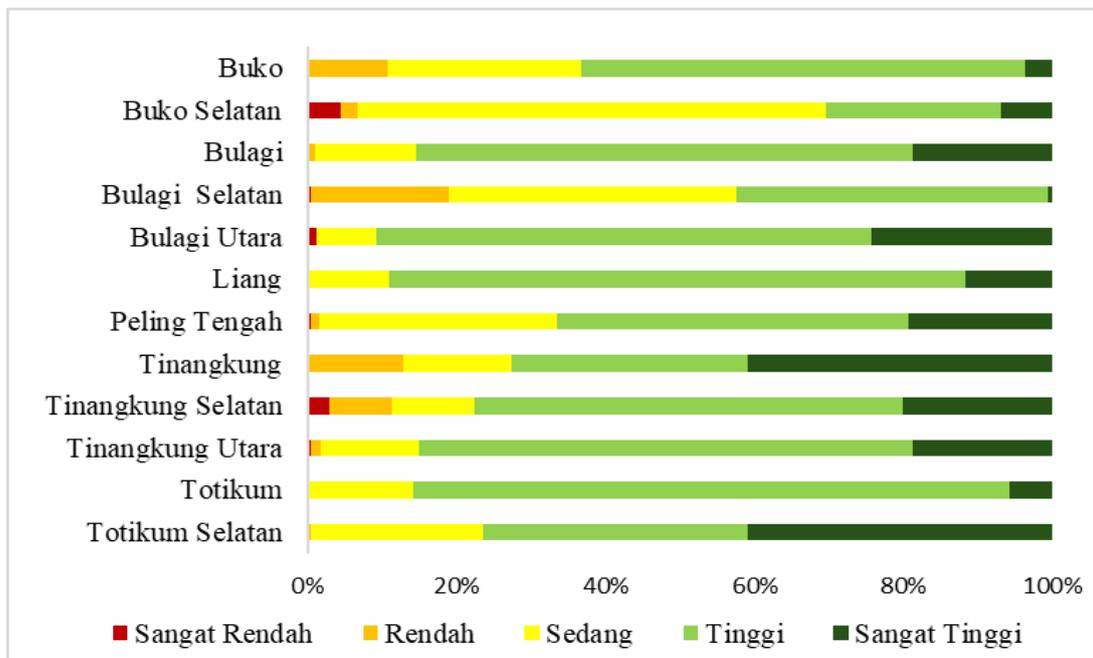
Berdasarkan hasil kajian kinerja jasa ekosistem, kemampuan lingkungan alami di Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai penyedia air bersih dengan kinerja tinggi hingga sangat tinggi meliputi wilayah seluas 72,03% dari total total luas wilayah, sisanya memiliki kelas kinerja sangat rendah sampai sedang. Persebaran wilayah dengan jasa ekosistem penyedia air bersih yang tinggi umumnya berada di daerah



Bulagi Utara dan Tinangkung.

Tabel 2.13
Distribusi Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan di
Kabupaten Banggai Kepulauan per Wilayah Kecamatan

Kecamatan	Persentase Luasan Jasa Ekosistem (%)					Total Luas (%)
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Buko	0,01%	0,95%	2,34%	5,35%	0,34%	8,98%
Buko Selatan	0,21%	0,12%	3,03%	1,14%	0,33%	4,83%
Bulagi	0,00%	0,11%	1,44%	7,03%	1,99%	10,57%
Bulagi Selatan	0,07%	2,86%	5,96%	6,44%	0,09%	15,42%
Bulagi Utara	0,20%	0,00%	1,26%	10,57%	3,88%	15,92%
Liang	0,00%	0,00%	0,60%	4,30%	0,65%	5,55%
Peling Tengah	0,03%	0,06%	1,79%	2,64%	1,09%	5,61%
Tinangkung	0,03%	1,13%	1,31%	2,89%	3,70%	9,06%
Tinangkung Selatan	0,21%	0,59%	0,79%	4,11%	1,43%	7,13%
Tinangkung Utara	0,03%	0,07%	0,79%	3,94%	1,12%	5,95%
Totikum	0,00%	0,01%	0,91%	5,20%	0,37%	6,49%
Totikum Selatan	0,01%	0,02%	1,03%	1,59%	1,84%	4,49%
Total Luas (%)	0,79%	5,92%	21,26%	55,21%	16,82%	100,00%



Sumber: Laporan Induk KLHS RPJMD Banggai Kepulauan, Tahun 2024

Gambar 2.10
Jasa Ekosistem Fungsi Penyedia Air Bersih
di Kabupaten Banggai Kepulauan

Berdasarkan hasil RPPLH Kabupaten Banggai Kepulauan proyeksi jumlah penduduk 30 tahun ke depan yakni Tahun 2047, maka dapat dihitung kebutuhan air domestik berdasarkan standar kebutuhan air domestik sebesar 60 liter/orang/hari untuk perdesaan dan 120 liter/orang/hari untuk perkotaan. Di Kabupaten Banggai Kepulauan, pada umumnya wilayah-wilayah kecamatan masih tergolong perdesaan, sedangkan yang dapat dikelompokkan ke dalam klasifikasi perkotaan adalah Kecamatan Tinangkung dengan Kota Salakan sebagai Ibukota Kabupaten dan



Kecamatan Buko yang secara ekonomi memang lebih maju dibanding wilayah kecamatan lainnya. Prediksi kebutuhan air domestik di Kabupaten Banggai Kepulauan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.14
Proyeksi Kebutuhan Air Bersih untuk Domestik pada Tahun 2025 di Kabupaten Banggai Kepulauan menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Penduduk Tahun 2025	Konsumsi (L/orang/hari)	Konsumsi selama Setahun (365 hari)	
				Liter	Meter ³
1.	Tinangkung (kota)	17.402	120	2.088.240	2.088,24
2.	Tinangkung Selatan	8.653	60	519.180	519,18
3.	Tinangkung Utara	9.317	60	559.020	559,02
4.	Totikum	10.917	60	655.020	655,02
5.	Totikum Selatan	9.069	60	544.140	544,14
6.	Liang	9.551	60	573.060	573,06
7.	Peling Tengah	10.851	60	651.060	651,06
8.	Bulagi	10.440	60	626.400	626,40
9.	Bulagi Selatan	10.159	60	609.540	609,54
10.	Bulagi Utara	9.768	60	586.080	586,08
11.	Buko (kota)	10.337	120	1.240.440	1.240,44
12.	Buko Selatan	8.249	60	494.940	494,94
	Banggai Kepulauan	124.713	-	9.147.120	9.147,12

Sumber: RPPLH Kabupaten Banggai Kepulauan

Tabel 2.15
Proyeksi Kebutuhan Air Bersih untuk Domestik pada Tahun 2047 di Kabupaten Banggai Kepulauan menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Penduduk Tahun 2047	Konsumsi (L/orang/hari)	Konsumsi selama Setahun (365 hari)	
				Liter	Meter ³
1.	Tinangkung (kota)	25.288	120	3.034.560	3.034,56
2.	Tinangkung Selatan	11.259	60	675.540	675,54
3.	Tinangkung Utara	12.137	60	728.220	728,22
4.	Totikum	12.533	60	751.980	751,98
5.	Totikum Selatan	10.708	60	642.480	642,48
6.	Liang	10.752	60	645.120	645,12
7.	Peling Tengah	13.492	60	809.520	809,52
8.	Bulagi	11.832	60	709.920	709,92
9.	Bulagi Selatan	10.812	60	648.720	648,72
10.	Bulagi Utara	11.129	60	667.740	667,74
11.	Buko (kota)	11.845	120	1.421.400	1.421,40
12.	Buko Selatan	8.785	60	527.100	527,10
	Banggai Kepulauan	150.572	-	11.262.300	11.262,30

Sumber: RPPLH Kabupaten Banggai Kepulauan

Status lingkungan hidup ditinjau berdasarkan jasa penyediaan air bersih di Kabupaten Banggai Kepulauan, dapat ditentukan dengan cara membanding antara daya dukung penyediaan air bersih terhadap daya tampung atau jumlah kebutuhan air bersih untuk keperluan domestik, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.



Tabel 2.16
Status Lingkungan Hidup menurut Jasa Penyediaan Air Bersih
di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025

No.	Kecamatan	Daya Dukung Air (M3)	Daya Tampung Air 2025 (M3)	Status Penyediaan Air Bersih	
				Cadangan (M3)	Keterangan
1.	Tinangkung (kota)	170.594.865,12	2.088,24	170.592.776,88	Surplus
2.	Tinangkung Selatan	63.641.692,29	519,18	63.641.173,11	Surplus
3.	Tinangkung Utara	78.895.772,43	559,02	78.895.213,41	Surplus
4.	Totikum	75.913.275,00	655,02	75.912.619,98	Surplus
5.	Totikum Selatan	45.483.885,10	544,14	45.483.340,96	Surplus
6.	Liang	93.182.395,34	573,06	93.181.822,28	Surplus
7.	Peling Tengah	59.339.972,09	651,06	59.339.321,03	Surplus
8.	Bulagi	157.370.223,91	626,40	157.369.597,51	Surplus
9.	Bulagi Selatan	187.411.059,67	609,54	187.410.450,13	Surplus
10.	Bulagi Utara	174.275.223,63	586,08	174.274.637,55	Surplus
11.	Buko (kota)	99.570.846,42	1.240,44	99.569.605,98	Surplus
12.	Buko Selatan	99.163.137,75	494,94	99.162.642,81	Surplus
	Banggai Kepulauan	1.304.842.348,7	9.147,12	1.304.833.201,64	Surplus

Tabel 2.17
Status Lingkungan Hidup menurut Jasa Penyediaan Air Bersih di Kabupaten
Banggai Kepulauan Tahun 2047

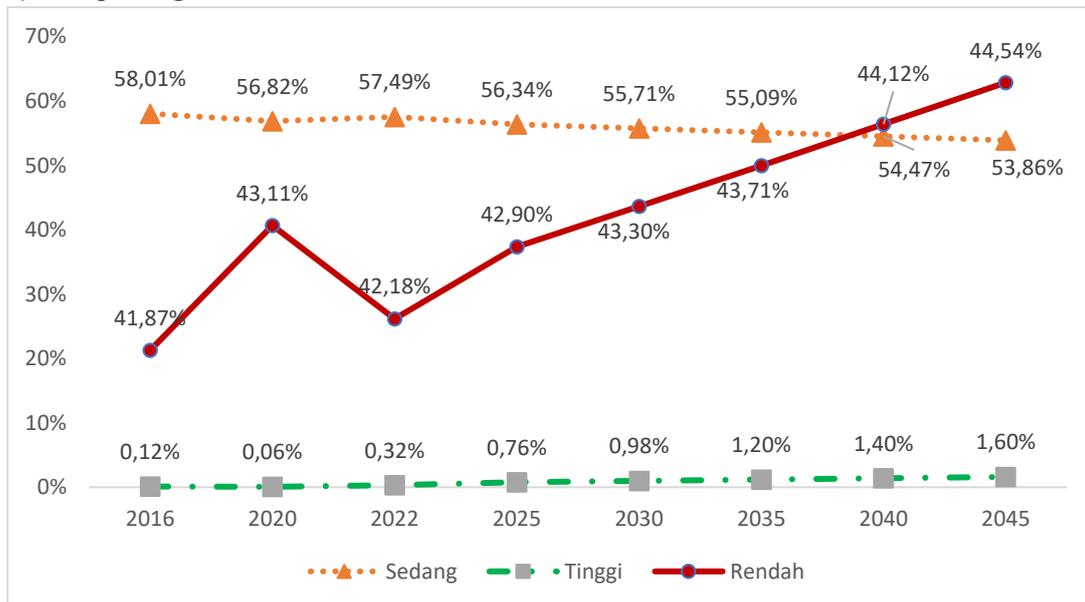
No.	Kecamatan	Daya Dukung Air (M3)	Daya Tampung Air 2047 (M3)	Status Penyediaan Air Bersih	
				Cadangan (M3)	Ket
1.	Tinangkung (kota)	170.594.865,12	3.034,56	170.591.830,56	Surplus
2.	Tinangkung Selatan	63.641.692,29	675,54	63.641.016,75	Surplus
3.	Tinangkung Utara	78.895.772,43	728,22	78.895.044,21	Surplus
4.	Totikum	75.913.275,00	751,98	75.912.523,02	Surplus
5.	Totikum Selatan	45.483.885,10	642,48	45.483.242,62	Surplus
6.	Liang	93.182.395,34	645,12	93.181.750,22	Surplus
7.	Peling Tengah	59.339.972,09	809,52	59.339.162,57	Surplus
8.	Bulagi	157.370.223,91	709,92	157.369.513,99	Surplus
9.	Bulagi Selatan	187.411.059,67	648,72	187.410.410,95	Surplus
10.	Bulagi Utara	174.275.223,63	667,74	174.274.555,89	Surplus
11.	Buko (kota)	99.570.846,42	1.421,40	99.569.425,02	Surplus
12.	Buko Selatan	99.163.137,75	527,10	99.162.610,65	Surplus
	Banggai Kepulauan	1.304.842.348,76	11.262,30	1.304.831.086,46	Surplus

Sumber: RPPLH Kabupaten Banggai Kepulauan



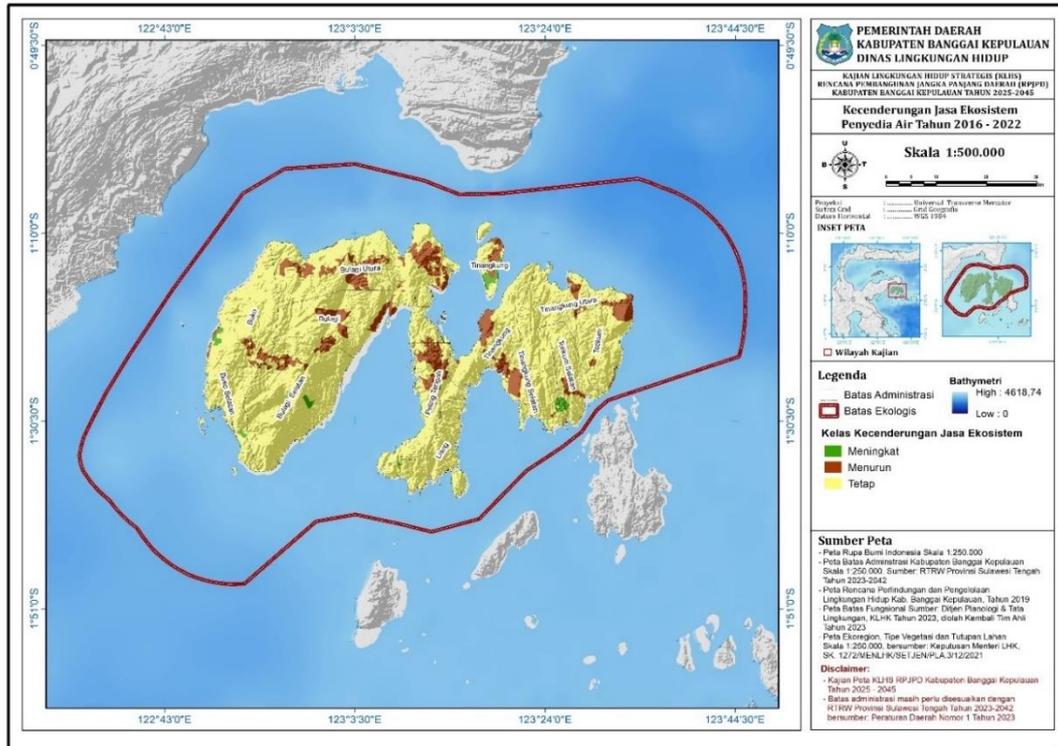
Berdasarkan hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa hingga 30 tahun ke depan, yang secara bertahap untuk tahun 2025 hingga 2047, status daya dukung lingkungan untuk penyediaan air bersih di Kabupaten Banggai Kepulauan adalah masih surplus (belum terlampaui), yang berarti masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi keperluan domestik. Untuk selanjutnya dapat dilakukan analisis lebih lanjut tentang daya tampung lingkungan dalam kaitannya dengan kebutuhan air bersih untuk pertanian, peternakan, perkantoran, dan pusat-pusat pelayanan lingkungan lainnya, seperti kesehatan, pendidikan, dan penginapan, jika terdapat data yang lengkap dan akurat pada masing-masing instansi terkait.

Perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Banggai Kepulauan selama periode waktu tertentu telah mengurangi daerah lahan jasa ekosistem penyedia air dan pengaturan tata aliran air. Hasil kajian terhadap status daya dukung daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten Banggai Kepulauan, diketahui bahwa untuk status penyedia air kelas rendah dan sangat rendah meningkat 44,54% dan terjadi penurunan kawasan pangan kelas sedang, faktor jasa ekosistem penyedia air yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk serta pemanfaatan kebutuhan air mengakibatkan status daya dukung penyedia air di wilayah ini akan terlampaui. Adapun gambaran kecenderungan status penyedia air dan pengaturan tata aliran air disajikan pada gambar berikut.



Sumber: Laporan Induk KLHS RPJMD Banggai Kepulauan, Tahun 2024

Gambar 2.11
Kecenderungan Jasa Ekosistem Penyedia Air
Di Kabupaten Banggai Kepulauan

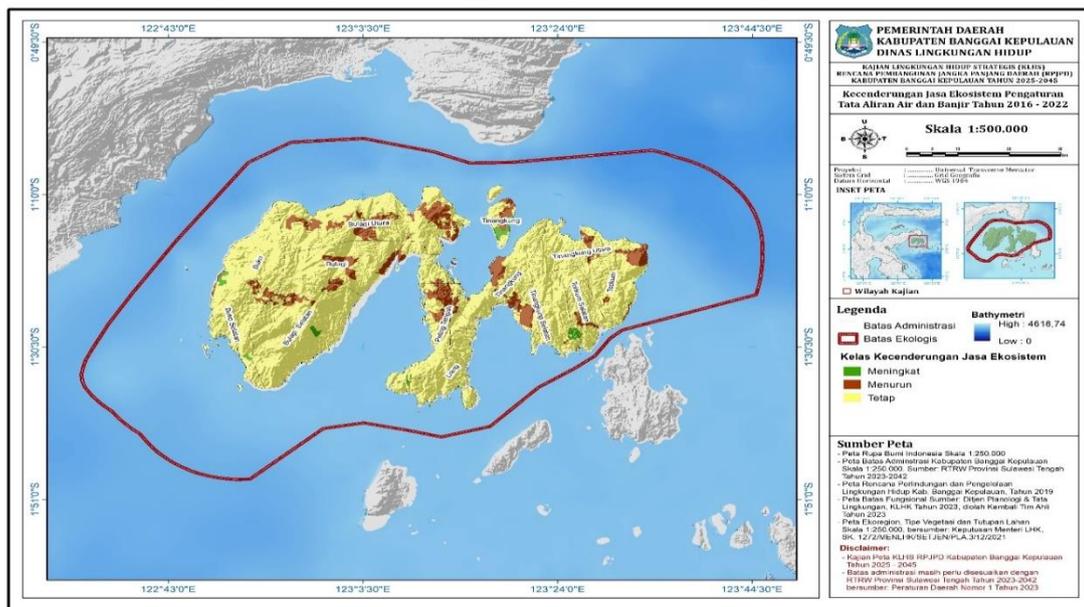


Sumber: Laporan Induk KLHS RPJMD Banggai Kepulauan, Tahun 2024

Gambar 2.12

**Peta Kecenderungan Jasa Ekosistem Penyedia Air
Kabupaten Banggai Kepulauan**

Selanjutnya disajikan Peta Kecenderungan Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai berikut.



Sumber: Laporan Induk KLHS RPJMD Banggai Kepulauan, Tahun 2024

Gambar 2.13

**Peta Kecenderungan Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir
Kabupaten Banggai Kepulauan**



Berdasarkan hasil kajian kinerja jasa ekosistem, kemampuan lingkungan alami di Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai pengaturan tata aliran air terjadi penurunan pada Kecamatan Bulagi Utara, Peling Tengah, Tinangkung, Tinangkung Utara dan Tinangkung Selatan. Persebaran wilayah penurunan jasa ekosistem pengaturan tata aliran air perlu menjadi perhatian bagi para pihak dan pemerintah kabupaten untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan daerah tangkapan dan sumber air.

Indeks Kualitas Air

Indeks Kualitas Air (IKA) di Kabupaten Banggai Kepulauan selama rentang waktu tahun 2018 hingga 2022. Indeks Kualitas Air adalah parameter yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi kualitas air dalam hal kesesuaian dengan standar atau persyaratan lingkungan hidup. Pada tahun 2018, Indeks Kualitas Air di Kabupaten Banggai Kepulauan tercatat sebesar 50,00. Terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2019, menjadi 54,44, menunjukkan adanya perbaikan dalam kualitas air pada periode tersebut. Namun, terjadi penurunan kembali pada tahun 2020 menjadi 48,57, dan indeks tersebut tetap stabil pada tahun 2021 dengan angka yang sama yaitu 48,57. Kemudian, pada tahun 2022, terjadi sedikit peningkatan ke angka 48,70. Meskipun fluktuasi ini tidak terlalu besar, perubahan dalam IKA menandakan adanya variasi dalam kualitas air di Kabupaten Banggai Kepulauan selama periode tersebut.

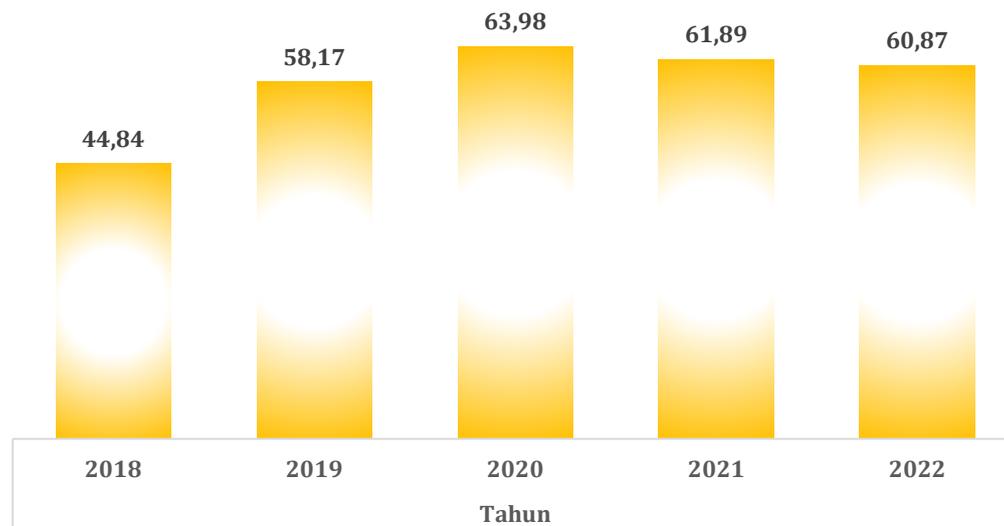
Tabel 2.18
Indeks Kualitas Air Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Indesk Kualitas Air	50,00	54,44	48,57	48,57	48,70

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Daerah Banggai Kepulauan Tahun 2023

B.2) Daya Dukung Penyedia Pangan

Ekosistem memberikan manfaat penyediaan bahan pangan, yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati (tanaman dan hewan) dan air (ikan), baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Jenis-jenis pangan di Indonesia sangat bervariasi, diantaranya: beras, jagung, ketela, gandum, sagu, segala macam buah, ikan, daging, telur dan sebagainya. Penyediaan pangan oleh ekosistem dapat berasal dari hasil pertanian dan perkebunan, hasil pangan peternakan, hasil laut dan termasuk pangan dari hutan. Di Kabupaten Banggai Kepulauan, jasa ekosistem untuk penyediaan bahan pangan, meliputi: tanaman pertanian berupa padi, jagung, ubi-ubian, kacang-kacangan, dan sayuran; tanaman perkebunan berupa kelapa kopra dan sagu; dan bahan pangan hasil dari perikanan laut. Daya dukung lingkungan yang terkait dengan ketersediaan bahan pangan sangat dipengaruhi oleh potensi sumber daya lahan.



Sumber: Badan Ketahanan Pangan RI, 2024

Gambar 2.14
Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2018-2022

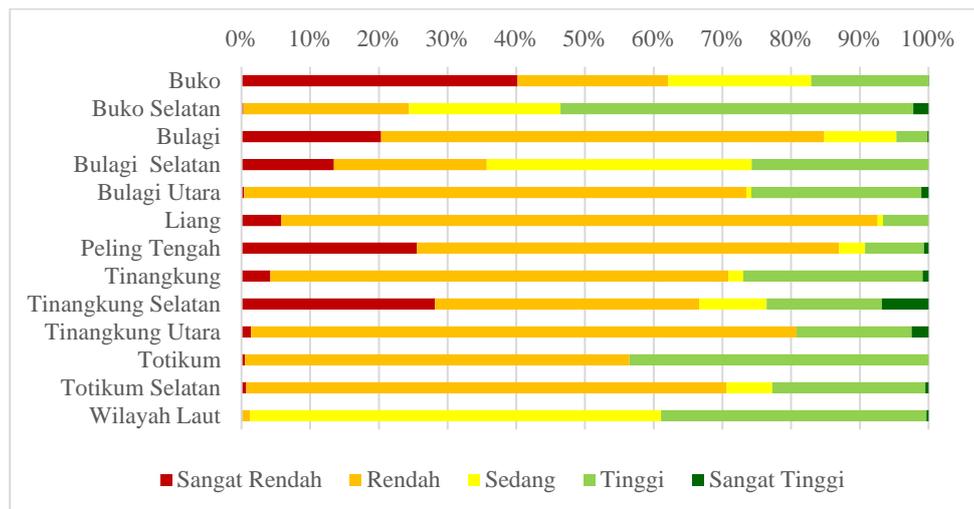
Data Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) dari tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan tren yang bervariasi. Pada tahun 2018, indeks ketahanan pangan berada pada angka 44,84, yang kemudian meningkat signifikan menjadi 58,17 pada tahun 2019. Peningkatan ini berlanjut hingga mencapai puncaknya pada angka 63,98 di tahun 2020, mencerminkan perbaikan dalam produksi pangan lokal, akses masyarakat terhadap pangan, dan stabilitas pasokan pangan. Namun, indeks ini mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 61,89, dan kembali menurun sedikit menjadi 60,87 pada tahun 2022. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh faktor-faktor seperti perubahan iklim, bencana alam, dan gangguan dalam rantai pasokan pangan. Untuk memperbaiki situasi ini, diperlukan penguatan produksi pangan lokal, perbaikan infrastruktur distribusi, peningkatan aksesibilitas pangan bagi masyarakat miskin, serta monitoring dan evaluasi berkala terhadap program ketahanan pangan yang ada. Upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting untuk memastikan ketahanan pangan yang berkelanjutan di Kabupaten Banggai Kepulauan. Nilai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem untuk penyediaan di Kabupaten Banggai Kepulauan, meliputi: jasa penyediaan bahan pangan, air bersih, serat dan bahan bakar energi, serta sumber daya genetik. Hasil analisis secara spasial dengan menggunakan metode *Simple Additive Weighting*, sebagaimana disajikan berikut ini.



Tabel 2.19
Distribusi Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan
di Kabupaten Banggai Kepulauan per Wilayah Kecamatan

Kecamatan	Persentase Luasan Jasa Ekosistem (%)				
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Buko	3,61%	1,97%	1,87%	1,53%	0,00%
Buko Selatan	0,01%	1,16%	1,07%	2,48%	0,11%
Bulagi	2,15%	6,82%	1,11%	0,48%	0,02%
Bulagi Selatan	2,08%	3,42%	5,95%	3,97%	
Bulagi Utara	0,06%	11,63%	0,12%	3,94%	0,16%
Liang	0,32%	4,82%	0,04%	0,37%	
Peling Tengah	1,43%	3,45%	0,21%	0,48%	0,04%
Tinangkung	0,38%	6,04%	0,20%	2,37%	0,08%
Tinangkung Selatan	2,01%	2,74%	0,70%	1,20%	0,48%
Tinangkung Utara	0,08%	4,72%	0,00%	0,99%	0,15%
Totikum	0,03%	3,63%	0,00%	2,82%	
Totikum Selatan	0,03%	3,14%	0,30%	1,00%	0,02%
Total Wilayah Darat	12,20%	53,56%	11,56%	21,63%	1,05%
Wilayah Laut	0,00%	1,25%	59,81%	38,65%	0,29%
Total Luas Wilayah Darat dan Laut (%)	12,20%	54,80%	71,37%	60,28%	1,34%

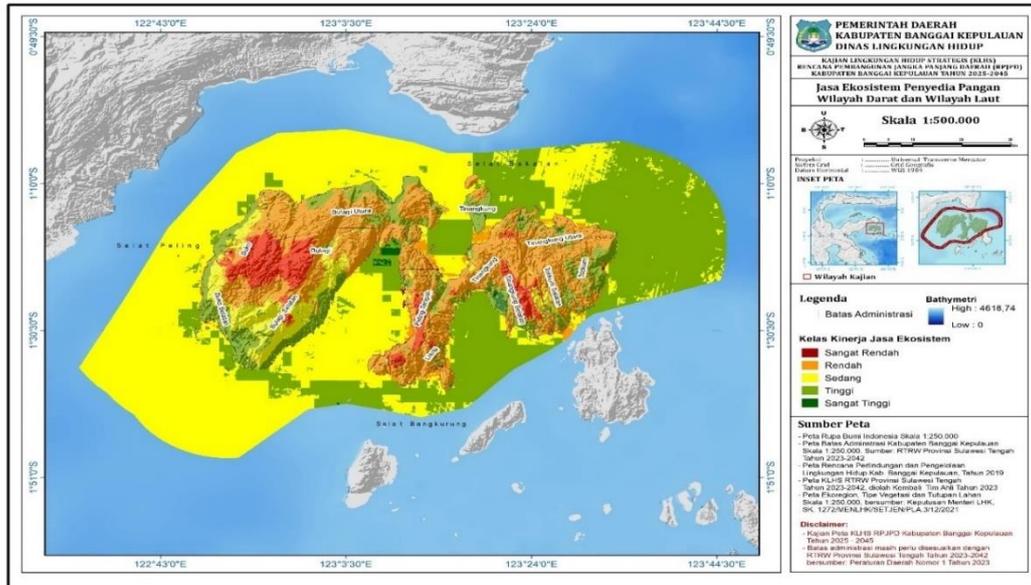
Sumber: RPPLH Kabupaten Banggai Kepulauan



Sumber: Laporan Induk KLHS RPJMD Banggai Kepulauan, Tahun 2024

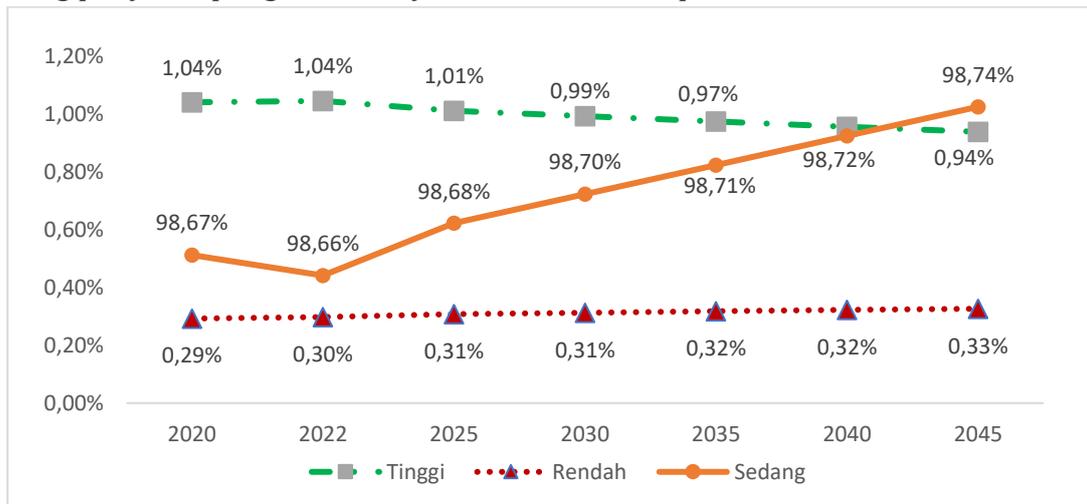
Gambar 2.15
Persebaran Jasa Ekosistem Penyediaan Bahan Pangan
di Kabupaten Banggai Kepulauan

Analisis jasa lingkungan penyediaan pangan di Kabupaten Banggai Kepulauan menunjukkan dominasi kawasan dengan status rendah dan sangat rendah. Hal ini karena ekoregion Kabupaten Banggai Kepulauan sebagian besar adalah pegunungan dan perbukitan dan tutupan lahan yang sebagian besar adalah hutan dan belukar. Tutupan lahan dan ekoregion yang sedemikian secara umum memberikan daya dukung yang sedang, rendah dan sangat rendah dalam penyediaan pangan.



Gambar 2.16
Peta Jasa Ekosistem Penyedia Pangan di Kabupaten Banggai Kepulauan

Perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Banggai Kepulauan selama periode waktu tertentu telah mengurangi daerah lahan pangan dan potensi lahan pangan. Hasil kajian terhadap status daya dukung daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten Banggai Kepulauan, diketahui bahwa untuk status penyedia pangan kelas sedang meningkat 94,74% dan terjadi penurunan kawasan pangan kelas tinggi dan sangat tinggi, faktor produksi pangan yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk serta pemanfaatan lahan pangan yang tidak sesuai mengakibatkan status daya dukung penyedia pangan di wilayah ini telah terlampaui.



Sumber: Laporan Induk KLHS RPJMD Banggai Kepulauan, Tahun 2024

Gambar 2.17
Kecenderungan Jasa Ekosistem Penyedia Pangan di Kabupaten Banggai Kepulauan



C. Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup

C.1) Pencemaran dan Kerusakann Lingkungan Hidup

Hasil kajian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 141 desa dan 3 kelurahan yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan telah tercemar oleh berbagai jenis pencemaran. Pencemaran lingkungan yang paling dominan terjadi adalah pencemaran air. Pencemaran air telah melanda semua desa yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan. Sumber pencemaran air yang paling banyak adalah pencemaran air yang berasal dari limbah rumah tangga. Berikut ini adalah hasil pemantauan kualitas air tahun 2018 pada beberapa sungai dan mata air yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Tabel 2.20
Hasil Pemantauan Kualitas Air

Nama Sungai dan Mata Air	Kategori	IP
Sungai Tatakalai Hulu	Tercemar Ringan	1,1
Sungai Tatakalai Tengah	Tercemar Ringan	1,1
Sungai Tatakalai Hilir	Tercemar Ringan	1,1
Mataair Kanali	Tercemar Ringan	1,1
Mataair Olulan	Tercemar Ringan	1,1
Mataair Lengbola	Tercemar Ringan	2,1
Mataair Leling	Tercemar Ringan	1,2
Mataair Abason	Tercemar Ringan	1,0
Mataair Mandoni	Tercemar Ringan	1,1
Mataair Tabak	Tercemar Ringan	1,1
Mataair Bibila	Tercemar Ringan	1,1
Mataair Ndongdolak	Tercemar Ringan	1,6
Mataair Sinangkal	Tercemar Ringan	1,0
Danau Lemelu	Tercemar Ringan	1,1
Danau Tendetung	Tercemar Ringan	1,2

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bangkep (2018)

Aktivitas permukiman sehari-hari yang dekat dengan badan air baik di pantai, sungai, yang menghasilkan limbah dan dibuang ke lingkungan sekitar dapat berupa: buang hajat besar dan kecil, penyemprotan pestisida, dan berkebun (pengolahan - tanah, penyemprotan hama, dan pemupukan). Limbah hasil aktivitas-aktivitas tersebut sering dikenal sebagai limbah domestik. Pada umumnya limbah domestik mengandung sampah padat, yang berupa tinja, sampah dapur, dan cair yang berasal dari sampah rumah tangga. Limbah domestik mengandung bakteri, parasit dan kemungkinan virus, dalam jumlah banyak, yang sering terkontaminasi dalam kerang-kerangan (*shellfish*), mengandung bahan organik dan padatan tersuspensi, sehingga *BOD (Biological Oxygen Demand)* biasanya tinggi, serta mengandung padatan (organik dan anorganik) yang mengendap di dasar perairan.

Komponen organik akan terurai secara biologis, sebagai akibatnya kandungan oksigen terlarut menjadi berkurang, mengandung unsur hara, terutama komponen posfor dan nitrogen, dalam jumlah yang tinggi; sehingga sering menyebabkan



terjadinya eutrofikasi. Di samping itu juga mengandung bahan-bahan terapung, berupa bahan-bahan organik dan anorganik, dalam bentuk suspensi. Kondisi ini sering mengurangi kenyamanan dan menghambat laju fotosintesis, serta mempengaruhi proses pemurnian alam (*self purification*). Penggunaan bahan detergen untuk mencuci dan keperluan industri seperti terlihat pada gambar di atas, mempunyai berbagai pengaruh yang membahayakan terhadap lingkungan perairan. Banyaknya kandungan detergen di permukaan air akan menghambat transfer massa, sehingga berbahaya bagi kehidupan laut.

Pada satuan Ekoregion Perbukitan dan Pegunungan Karst, karena tersusun atas batugamping terumbu yang banyak diaklas dan lubang-lubang pelarutan, maka airtanah tersimpan cukup dalam di bawah permukaan tanah, yang disebabkan oleh besarnya permeabilitas sekunder yang membentuk pelorongan pada akuifer. Akibatnya, sulit dijumpai airtanah dangkal, atau dengan kata lain airtanah tersimpan pada sungai-sungai bawah tanah yang keberadaannya tidak merata dan sangat dalam. Pada ekoregion ini, airtanah hanya dapat diamati ketika ada pemunculan mataair. Sementara itu, karena permeabilitas batumannya yang tinggi, maka hampir tidak dijumpai sungai permukaan, kecuali jika ada mataair yang keluar dari gua atau lorong-lorong bawah tanah dan membentuk alur aliran permukaan. Dari sisi kualitas air, hampir tidak ada masalah pada sumberdaya air, hanya ada beberapa hal yang perlu diwaspadai terkait dengan karakteristik siklus air pada ekoregion ini, yaitu:

sifat batumannya yang mempunyai permeabilitas besar, maka zat pencemar akan mudah tersebar ke semua bagian akuifer jika limbah dibuang langsung ke dalam tanah; banyak dijumpai mataair yang keluar dari lorong-lorong sungai bawah tanah dan dibiarkan percuma (belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber air bersih), sehingga hanya mengalir begitu saja terus sepanjang waktu; dan belum terpenuhinya fasilitas perpipaan (PAM) menyebabkan sebagian masyarakat masih menderita kekurangan air, meskipun sebenarnya sumberdaya air cukup berlimpah pada satuan ekoregion ini.

Berdasarkan hasil pemantauan terhadap kualitas airtanah, mataair, air sungai dan air danau yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan, maka dapat ditentukan status mutu air sesuai dengan KepMenLH Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air, dengan menggunakan metode STORET, yaitu membandingkan antara data kualitas air dengan baku mutu air yang disesuaikan dengan peruntukannya guna menentukan status mutu air. Berdasarkan hasil analisis dengan metoda STORET ini, maka dapat diketahui parameter-parameter yang telah memenuhi atau melampaui baku mutu air (BPLH Kabupaten Banggai Kepulauan dalam SLHD, 2010).



Sumber; RPPLH Banggai Kepulauan

Gambar 2.18

Ilustrasi Perjalanan Pencemar dari Sumber Buangan hingga ke Muara Sungai Bawah Tanah atau Mata air yang muncul dari Lubang Aliran Bawah Tanah

Cara untuk menentukan status mutu air adalah dengan menggunakan sistem nilai dari “US-EPA (*Environmental Protection Agency*)” dengan mengklasifikasikan mutu air dalam 4 (empat) kelas, yaitu:

- (1) Kelas A: baik sekali skor = 0 ☑ memenuhi baku mutu
- (2) Kelas B: baik skor = - 1 s/d - 10 ☑ tercemar ringan
- (3) Kelas C: sedang skor = - 11 s/d - 30 ☑ tercemar sedang
- (4) Kelas D: buruk skor ≥ - 31 ☑ tercemar berat

Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka status mutu airtanah mataair, air sungai, dan air danau di Kabupaten Banggai Kepulauan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.21

Status Mutu Air pada Airtanah dan Mataair di Kabupaten Banggai Kepulauan

No	Nama Mataair	Skor	Status Mutu Air Kep. Men. LH No. 115 Tahun 2003
1.	Sumur Bor Perkantoran	0	Memenuhi Baku Mutu
2.	Salakan	-18	Tercemar
3.	Mataair Manggalai	-18	Sedang Tercemar
4.	Mataair	-18	Sedang Tercemar
5.	Bangunemo Mataair	-18	Sedang Tercemar
	Luk Panenteng Mataair Lalandai		Sedang

Sumber: BPLH Kabupaten Banggai Kepulauan



Tabel 2.22

Status Mutu Air pada Sungai di Kabupaten Banggai Kepulauan

No	Nama Mata Air	Skor	Status Mutu Air Kep. Men. LH No. 115 Tahun 2003
1.	Sungai Patukuki Sungai	- 48	Tercemar Berat
2.	Malanggong Sungai Kambani	- 48	
3.	Sungai Lambako Sungai	- 48	
4.	Matube Sungai Nipa	- 60	
5.	Sungai Manggalai	- 36	
6.	Sungai Tatakalai	- 48	
7.	Sungai Babasal Kombutokan		

Sumber: BPLH Kabupaten Banggai Kepulauan

Tabel 2.23

Status Mutu Air pada Danau di Kabupaten Banggai Kepulauan

No	Nama Mataair	Skor	Status Mutu Air Kep. Men. LH No. 115 Tahun 2003
1.	Danau Alani	-12	Tercemar Sedang
2.	Danau Tendetung	-12	Tercemar Sedang

Sumber: BPLH Kabupaten Banggai Kepulauan

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap status mutu airtanah, mataair, air sungai, dan air danau yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa untuk kualitas air pada mataair dan danau sudah mengalami pencemaran (tercemar sedang) khususnya terhadap parameter mikrobiologi, hal ini akan mengakibatkan timbulnya berbagai penyakit yang bersumber dari air (*water borne diseases*) seperti diare; sedangkan untuk air sungai berdasarkan hasil perhitungan sudah menunjukkan tingkat tercemar berat. Hal ini disebabkan oleh perilaku masyarakat dalam berhajat besar (Buang Air Besar) dan membuang limbah (cair dan padat) pada umumnya menggunakan sungai sebagai media pembuangan (jamban) langsung. Untuk itu diperlukan pengelolaan daerah sekitar mataair, sungai dan danau agar kelestarian dan fungsinya dapat terjaga dan terpelihara.

C.2) Kegiatan Penambangan

Kegiatan penambangan memberi tingkat ancaman yang sangat tinggi, karena cepatnya proses perusakan habitat sebagai akibat pertambangan batugamping untuk kebutuhan bahan bangunan (pondasi rumah) dan jalan. Aktifitas pengambilan bebatuan relatif merata di Kabupaten Banggai Kepulauan terutama pada ekoregion



batu gamping yang sedang dalam kegiatan konstruksi jalan dan pembangunan perumahan. Sementara itu, kegiatan pengambilan batugamping mengancam langsung keanekaragaman hayati hutan di kawasan Kabupaten Banggai Kepulauan karena:

- a) Penghancuran keanekaragaman hayati secara serempak, baik pada ekosistem permukaan maupun pada ekosistem gua, sebagai akibat pemotongan dan pembongkaran habitat hutan di areal yang bergamping;
- b) Perusakan gua (burung dan serangga kehilangan habitat); dan
- c) Perusakan sistem air pada dasar gua atau danau dalam tubuh hutan (ikan dan udang, serta hewan lainnya kehilangan habitat), serta mengganggu kehidupan flora dan fauna yang selama ini tergantung dari sumber air dari gua gamping.

Menurut RTRW Kabupaten Banggai Kepulauan, Kawasan pertambangan yang bernilai tinggi diatur atau ditetapkan pengolahannya oleh Departemen Pertambangan dan Energi. Kawasan pertambangan yang ditetapkan Departemen Pertambangan dan Energi di Kabupaten Banggai Kepulauan, meliputi kawasan peruntukan batugamping di Pulau peling yang tersebar di Kecamatan Tinangkung, Kecamatan Tinangkung Utara, dan Kecamatan Tinangkung Selatan. Kegiatan ini tentunya akan melibatkan sejumlah peralatan berat untuk kegiatan eksploitasi dan transportasi. Beberapa aktivitas seperti angkutan truk atau mobil- mobil yang melewati hutan menunjukkan hal tersebut.

Dampak terhadap lingkungan hayati adalah rusaknya sejumlah vegetasi, terutama tumbuhan bawah dan semak-semak, karena dampak mekanik berbagai kendaraan tersebut mengganggu perkecambahan dan keluarnya bunga. Selain itu pemadatan tanah akan merusak liang-liang hewan tanah, seperti cacing, dan menghambat penetrasi air ke dalam tanah untuk mencapai biji yang terpendam dalam tanah, sehingga perkecambahan akan terganggu. Akibat mekanik dari roda dan suara mesin yang melewati jalan di hutan, dapat menyebabkan tertabraknya sejumlah satwa terutama yang dekat dengan badan jalan. Selain itu, sejumlah kendaraan dapat melewati liang atau terowongan tempat satwa tinggal, di mana beberapa satwa, seperti: ular, kadal, dan tikus yang menggunakan tempat itu untuk berlindung dari cuaca atau tempat bersembunyi dari pemangsa. Jika tempat tersebut tergilas roda, maka dapat mengakibatkan luka dan kematian sejumlah satwa yang berada di dalamnya. Sementara dampak tak langsung berupa matinya atau rusaknya sejumlah vegetasi. Sejumlah binatang bergantung pada tanaman dengan beragam cara mulai dari sebagai sumber makanan, tempat fungsi reproduksi, sarang, tempat sejumlah telur, sampai tempat berlindung (*shelter*).

C.3) Kerusakan Wilayah Pesisir

Kerusakan lingkungan yang terjadi di Kabupaten Banggai Kepulauan terdiri dari kerusakan pesisir pantai dan sungai yang disebabkan oleh pengambilan material untuk kebutuhan pembangunan yang berada di Kecamatan Tinangkung Utara, Kecamatan Buko Selatan, Kecamatan Tinangkung Selatan, Kecamatan Bulagi Selatan, Kecamatan Liang dan Kecamatan Bulagi Utara. Disamping itu, kegiatan pertambangan



rakyat di Kecamatan Peling Tengah yang mengolah batu gamping (kapur) sebagai bahan bangunan. Kerusakan lingkungan pada ekosistem mangrove disebabkan oleh aktivitas penduduk yang mengambil dan memanfaatkan kayu bakau sebagai bahan bangunan rumah dan bahan bakar, pengeboman ikan dan penggunaan potasium dalam penangkapan ikan sehingga menyebabkan kerusakan terumbu karang dan biota laut lainnya.

Dengan demikian, ditinjau berdasarkan kecenderungan penurunan luasan lahan hutan sebagai kawasan lindung atau konservasi menjadi lahan-lahan budidaya (ladang berpindah, kebun campuran, dan permukiman) di Kabupaten Banggai Kepulauan, maka hal ini mengindikasikan akan terjadinya penurunan status lingkungan hidup hingga dapat terlampaui daya dukungnya pada masa-masa yang akan datang. Aktivitas pembakaran hutan merupakan faktor utama penyebab kecenderungan perubahan penggunaan lahan berupa hutan menjadi lahan-lahan budidaya (ladang berpindah), yang sangat sering terjadi pada banyak lokasi di Kabupaten Banggai Kepulauan. Berdasarkan hasil kajian kerusakan tanah untuk produksi biomassa di Kabupaten Banggai Kepulauan (BPLH Banggai Kepulauan, 2015), aktivitas pembakaran hutan untuk ladang berpindah dan kebun campuran tersebut ternyata juga memicu status kerusakan tanah pada tingkat ringan hingga sedang.

Isu pokok permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu: Isu Lingkungan Fisik terdiri dari permasalahan sumber daya iklim, air, lahan, potensi ancaman bencana alam; Isu Lingkungan Hayati (Biotik) terdiri dari permasalahan konversi hutan, penebangan kayu hutan, pembuatan jalan melintas hutan, aktivitas penambangan, lahan kritis, kurangnya ruang terbuka hijau, pemanfaatan lahan pekarangan yang belum optimal, perburuan satwa liar, kebakaran hutan dan perladangan berpindah, kerusakan sumber daya pesisir, penangkapan perikanan laut yang tidak ramah lingkungan dan kerusakan ekosistem hutan mangrove; Isu Lingkungan Sosial yaitu permasalahan sosial budaya dan hutan adat; Isu Penataan Ruang Wilayah terdiri dari penataan umum ruang wilayah dan penataan khusus ruang wilayah.

C.4) Penangkapan perikanan laut yang tidak ramah lingkungan

Sejak tahun 2010 penduduk Banggai Kepulauan memiliki lapangan usaha dengan mata pencaharian pokok di sektor perikanan, yang mencapai 19,35%. Oleh karena itu banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya dengan mengambil hasil perikanan laut, dengan menggunakan berbagai jenis alat tangkap. Menurut informasi dari beberapa sumber, pada saat ini, hasil tangkapan ikan semakin menurun bila di dibandingkan dengan beberapa tahun lalu. Hal ini diduga disebabkan oleh kegiatan penangkapan hasil yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan, yang berdampak pada menurunnya populasi biota perairan. Pola penangkapan telah mengarah tujuan untuk mencari keuntungan semata dengan biaya yang rendah dan mudah, akibat permintaan pasar yang semakin tinggi. Praktek penangkapan



menggunakan racun serangga (insektisida), serta penggunaan pukat harimau (trawler) oleh berbagai jenis perusahaan kapal penangkap ikan di Banggai Kepulauan. Penangkapan hasil perikanan sudah mulai mengarah pada kegiatan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan. Berdasarkan pengamatan di lapangan serta informasi dari beberapa pihak dan beberapa nelayan lokal, berhasil diidentifikasi beberapa praktik penangkapan ikan yang tidak memperhatikan kelestarian ekosistem. Hal ini apabila tidak segera ditangani, maka akan menciptakan masalah yang lebih serius di masa mendatang yang dapat mengancam kepunahan berbagai jenis ikan potensial. Pemanfaatan yang terus meningkat di pesisir terutama di sepanjang pesisir Kabupaten Banggai Kepulauan, dalam tata guna lahan akan terus menambah tekanan terhadap habitat dan sumber daya pesisir. Masalah-masalah utama di pesisir Kabupaten Banggai Kepulauan yang memerlukan perhatian ialah konversi hutan rawa pasang-surut termasuk hutan bakau, yang menyediakan sistem air bersih, perlindungan daerah pesisir, dan masukan yang penting bagi rantai makanan muara sungai dan lepas pantai serta produksi perikanan.

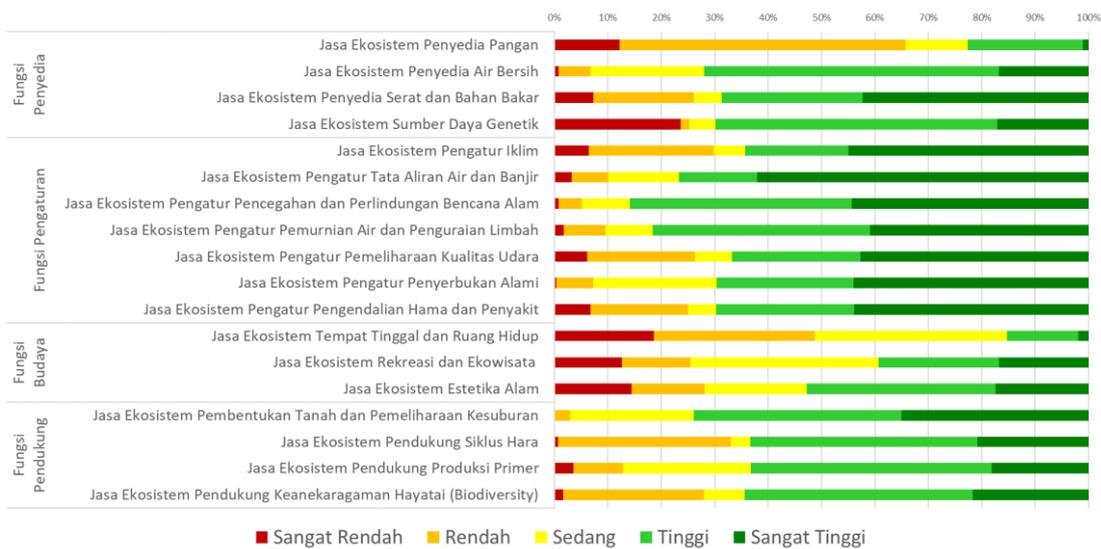
D. Kinerja Layanan Atau Jasa Ekosistem

Kapasitas daya dukung daya tampung lingkungan hidup terhadap jasa lingkungan tertentu direpresentasikan dalam bentuk indeks. Indeks jasa lingkungan dihitung dengan melibatkan nilai bobot jasa lingkungan terhadap bentuk lahan, tipe vegetasi dan penutupan/penggunaan lahan. Nilai indeks ini dapat menggambarkan seberapa besar tingkat kinerja masing-masing kelompok jasa lingkungan di suatu wilayah baik dari sisi penyediaan, pengaturan maupun pendukung. Ketiga komponen ini saling berpengaruh dan akan menggambarkan kondisi suatu wilayah secara menyeluruh. Suatu wilayah dapat dikatakan memiliki kondisi lingkungan hidup yang bagus, jika kemampuan wilayahnya dalam pengaturan sangat tinggi. Begitu pun suatu wilayah akan memiliki kemampuan penyediaan yang bagus jika kemampuan pendukung wilayahnya juga tinggi.

Jasa ekosistem adalah manfaat yang diberikan kepada manusia melalui transformasi sumber daya (atau aset lingkungan, termasuk tanah, air, tumbuh-tumbuhan, dan atmosfer) menjadi aliran barang dan jasa penting, misalnya, udara bersih, air, dan makanan. Jasa ekosistem menunjukkan kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan makhluk hidup lainnya sehingga semakin tinggi nilai jasa ekosistem menunjukkan kemampuan ekosistem yang semakin baik. Penyajian data dan deskripsi kinerja Jasa Ekosistem dapat dijabarkan berdasarkan administrasi wilayah untuk mengetahui daya dukung suatu wilayah. Berikut deskripsi hasil pengolahan data kinerja Jasa Ekosistem di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023



PERSENTASE LUASAN AREA BERDASARKAN KELAS KINERJA JASA EKOSISTEM



Sumber: Laporan Induk KLHS RPJMD Banggai Kepulauan, Tahun 2024

Gambar 2.19
Distribusi Jasa Ekosistem di Kabupaten Banggai Kepulauan

Hasil kajian indeks jasa ekosistem Kabupaten Banggai Kepulauan menunjukkan bahwa memiliki nilai rerata berkategori sedang dengan pada wilayah setiap kinerja jasa ekosistem. Kinerja layanan jasa ekosistem dominan di seluruh wilayah yakni jasa ekosistem fungsi penyediaan pangan dan budaya untuk tempat tinggal dan ruang hidup menjadi kinerja jasa ekosistem yang didominasi sangat rendah dan rendah. Akan tetapi, dari segi kinerja jasa ekosistem lainnya masih tergolong tinggi dan sangat tinggi.

E. Tingkat Kerentanan Dan Kapasitas Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim

Pembangunan berkelanjutan dikonstruksikan berlandaskan pada sinergitas basis ekologi, basis ekonomi, dan basis sosial pembangunan pada semua sektor. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan daerah dataran rendah yang luas, Indonesia sangat rentan terhadap dampak negatif perubahan iklim. Indonesia telah mengalami kejadian iklim ekstrem seperti banjir dan kekeringan, dan kemungkinan akan mengalami efek jangka panjang dari kenaikan permukaan air laut.

Kajian kerentanan dampak dan risiko lingkungan hidup dilakukan sebagai pendekatan dinamis menganalisis bagaimana suatu sistem dapat menangani risiko lingkungan hidup. Menurut Wignyosukarto, dalam Arief dan Pigawati (2015), Kerentanan adalah suatu keadaan penurunan ketahanan akibat pengaruh eksternal yang mengancam kehidupan, mata pencaharian, sumber daya alam, infrastruktur, produktivitas ekonomi dan kesejahteraan. Hubungan antara bencana dan kerentanan menghasilkan suatu kondisi resiko, apabila kondisi tersebut tidak dikelola dengan baik. Berdasarkan Kota Kita, et. al., (2014), menyatakan hasil kajian semacam ini dapat meningkatkan kesadaran dan mendukung persiapan kelembagaan, rencana pengembangan dan pembangunan suatu wilayah.



Proses kajian kerentanan sangat penting untuk memahami kerentanan, sangat penting untuk mengenali tiga komponen utama: Keterpaparan (*Exposure*), Sensitivitas dan Kapasitas Beradaptasi. Kerentanan ditentukan dengan mengintegrasikan hasil dari exposure, sensitivitas dan kapasitas beradaptasi (Kota Kita, et. al., 2014). Penilaian exposure dilakukan dengan mengidentifikasi tingkat tekanan lingkungan hidup melalui bencana banjir, longsor, kenaikan permukaan air laut, dan gempa bumi. Pertimbangan kondisi sensitivitas berdasarkan konteks sosial ekonomi, dan juga stressor non-iklim lain yang mempengaruhi kerentanan, seperti trend urbanisasi, ekonomi, dan rencana pembangunan kota. Kapasitas adaptasi merupakan kemampuan suatu sistem untuk menyesuaikan diri dengan kondisi dampak dan resiko perubahan lingkungan hidup. Dengan mengetahui kondisi lingkungan secara lebih detail dan lengkap, akan dapat memberikan pilihan dalam menetapkan suatu keputusan. Kondisi antar daerah berbeda-beda termasuk di dalamnya berupa kerawanan bencana. Bencana dapat ditimbulkan oleh alam maupun akibat dari aktivitas manusia. Untuk saat ini di Kabupaten Banggai Kepulauan belum banyak terjadi bencana alam, terutama bencana yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir telah terjadi sebanyak 15 (lima belas) kejadian bencana alam dengan jenis-jenis bencana sebagai berikut: 1). Tanah Longsor; 2). Gempa Bumi; 3). Angin Puting Beliung; 4). Abrasi Pantai; 5). Banjir; dan 6). Kekeringan dengan total kerugian Rp. 1.051.370.000,- (satu milyar lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). Adapun beberapa hasil kajian exposure, sensitivitas dan kapasitas adaptasi serta nilai Indeks Kemampuan Adaptasi (IKA) dan Indeks Keterpaparan dan Sensivitas (IKS) terhadap dampak dan resiko perubahan lingkungan hidup di Kabupaten Banggai Kepulauan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.24
Hasil Kajian Exposure, Sensitivitas, Kapasitas Adaptasi, Nilai IKA Dan IKS Terhadap Dampak Dan Resiko Lingkungan Hidup Di Kabupaten Banggai Kepulauan

No.	Kecamatan	Exposure	Sensitivitas	Kapasitas Adaptasi	IKA	IKS
1.	Totikum	0,59	3,30	2,89	0,20	0,09
2.	Totikum Selatan	0,64	2,85	1,84	-0,09	0,14
3.	Tinangkung	0,51	2,60	2,31	0,03	0,01
4.	Tinangkung Selatan	0,60	2,60	2,19	-0,01	0,10
5.	Tinangkung Utara	0,78	3,55	2,05	-0,05	0,28
6.	Liang	0,56	2,90	2,44	0,05	0,06
7.	Peling Tengah	0,78	4,20	2,33	0,03	0,28
8.	Bulagi	0,61	2,55	2,30	0,02	0,11
9.	Bulagi Selatan	0,61	3,15	2,34	0,05	0,11



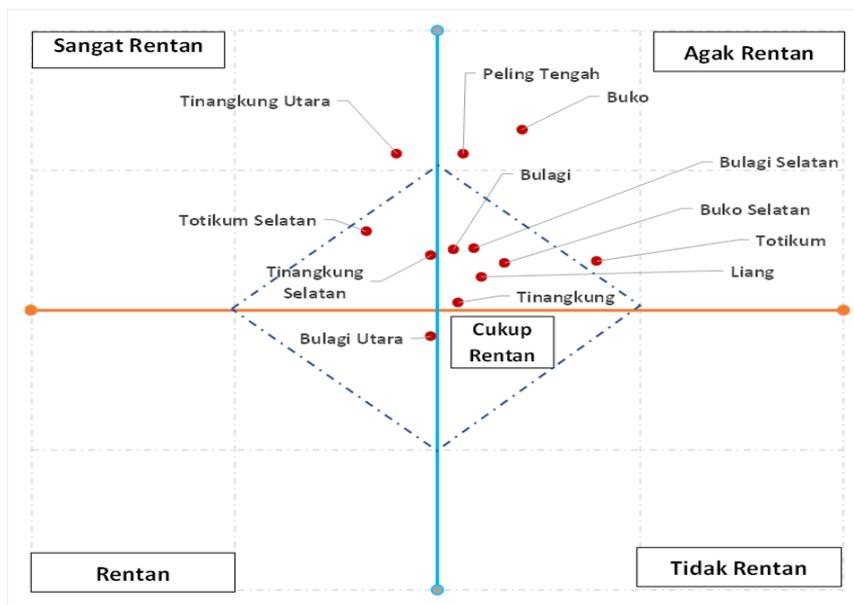
No.	Kecamatan	Exposure	Sensitivitas	Kapasitas Adaptasi	IKA	IKS
10.	Bulagi Utara	0,45	2,05	2,20	-0,01	-0,05
11.	Buko	0,82	4,00	2,61	0,10	0,32
12.	Buko Selatan	0,58	2,95	2,62	0,08	0,08

Keterangan Gradasi warna;

■ Tinggi	■ Tinggi	■ Rendah
■ Sedang	■ Sedang	■ Sedang
■ Rendah	■ Rendah	■ Tinggi

Sumber: Laporan Induk KLHS RPJMD Banggai Kepulauan, Tahun 2024

Hasil kajian pada tabel diatas dapat diketahui bahwa beberapa kecamatan di atas memiliki nilai indeks beragam, karena setiap daerah mempunyai karakteristik yang berbeda. Hasil keterpaparan (exposure) dan pertimbangan sensitivitas tertinggi berada pada Kecamatan Tinangkung Utara, Peling Tengah dan Buko, sementara tingkat kapasitas adaptasi terhadap adanya dampak dan resiko perubahan lingkungan hidup terdapat di Kecamatan Totikum Selatan kondisi ini karena pada kecamatan tersebut masih terdapat masyarakat miskin dan infrastruktur dasar seperti kesehatan, jalan dan listrik dalam memenuhi adaptasi perubahan lingkungan hidup masih minim.



Sumber: Laporan Induk KLHS RPJMD Banggai Kepulauan, Tahun 2024

Gambar 2.20
Kajian indeks kerentanan pada wilayah kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan

Selanjutnya dilaksanakan kajian kerentanan relatif pada wilayah kecamatan terhadap dampak dan risiko perubahan lingkungan hidup. Kerentanan relatif dalam merespons bencana (*coping range*) ialah dengan melihat posisi nilai indeks kerentanan dan kapasitas desa/kelurahan dalam sistem kuadran. Sumbu mendatar mencerminkan indeks kemampuan adaptasi (IKA) dan sumbu vertikal menyatakan



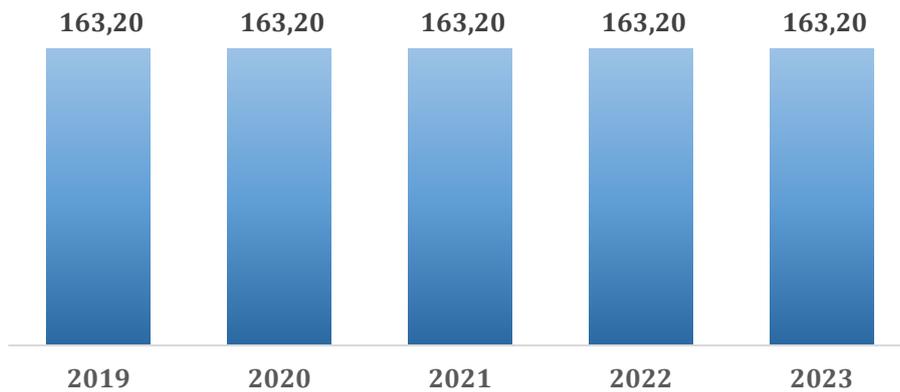
tingkat indeks keterpaparan dan sensitivitas (IKS), yang semuanya dinormalisasi pada internal [-0.5, 0.5]. Dengan demikian, sistem kuadran tersebut dapat dikelompokkan menjadi 5 nilai indeks kerentanan dan kapasitas berada di kuadran 5, maka dikatakan selang toleransi desa terhadap kejadian bencana rendah (coping range sempit). Adapun nilai kerentanan relatif dampak dan risiko lingkungan hidup disajikan pada gambar berikut. Kajian indeks kerentanan di Kabupaten Banggai Kepulauan, terdapat kelas kerentanan agak rentan, cukup rentan dan sangat rentan. Adapun keterangan kerentanan wilayah kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai berikut.

Tabel 2.25
Kerentanan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan

No.	Tingkat Kerentanan	Kecamatan	Jenis Potensi Bencana
1.	Sangat Rentan	Tinangkung Utara	Gempa bumi, tsunami, gelombang pasang, abrasi pantai, banjir dan longsor
2.	Cukup Rentan	Tinangkung, Tinangkung Selatan, Totikum Selatan, Bulagi, Bulagi Utara, Bulagi Selatan, Buko Selatan dan Liang	
3.	Agak Rentan	Totikum, Buko, Peling Tengah	

Sumber: Laporan Induk KLHS RPJMD Banggai Kepulauan, Tahun 2024

Selanjutnya untuk melihat kerentanan Bencana di Kabupaten Banggai Kepulauan juga dapat dilihat dari data Indeks Risiko Bencana Kabupaten Banggai Kepulauan dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan angka yang konsisten, yaitu 163,20. Ketidakberubahan angka ini selama lima tahun berturut-turut menandakan bahwa risiko bencana di daerah tersebut tetap stabil dan tidak mengalami peningkatan maupun penurunan. Indeks yang konstan ini bisa diartikan sebagai indikasi bahwa meskipun upaya mitigasi dan penanggulangan bencana mungkin telah dilakukan, mereka belum cukup efektif untuk menurunkan risiko secara signifikan. Selain itu, faktor-faktor risiko bencana seperti kerentanan geografis, infrastruktur yang rentan, dan kemungkinan bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau tanah longsor tetap ada dan tidak mengalami perubahan berarti. Untuk mengurangi indeks risiko bencana ini, perlu adanya peningkatan dalam kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana, termasuk pembangunan infrastruktur yang lebih tahan bencana, edukasi dan pelatihan masyarakat, serta pengembangan sistem peringatan dini yang lebih efektif. Upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait sangat penting untuk meningkatkan ketahanan dan mengurangi risiko bencana di Kabupaten Banggai Kepulauan.



Sumber: BNPB RI, 2024 (diolah)

Gambar 2.21

Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023

2.1.1.1.6 Penggunaan Lahan

Kesesuaian penggunaan lahan adalah penilaian mengenai informasi yang menggambarkan mengenai pemanfaatan lahan di Kabupaten Banggai Kepulauan. Selain itu, juga dilakukan peninjauan terhadap faktor-faktor yang menghambat penggunaannya untuk tujuan-tujuan tertentu sehingga daya dukungnya dapat terpelihara dalam jangka waktu tidak terbatas. Secara terinci hubungan antara satuan *ecoregion* dan penggunaan lahan di Kabupaten Banggai Kepulauan, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.26

Hubungan Antara Ekoregion, Tanah dan Penggunaan Lahan di Kabupaten Banggai Kepulauan, 2022

No	Satuan Ekoregion dan Material	Jenis Tanah	Penggunaan Lahan
1.	Wilayah Pesisir Endapan Aluvium Marin	Aluvial (<i>Entisols</i>)	Pemukiman, Wisata Pantai dan hutan lindung
2.	Dataran Aluvial Rawa Endapan Aluvium	Aluvial (<i>Entisols</i>)	Pemukiman, Rawa dan Sawah
3.	Lembah antar Perbukitan Endapan Aluvium	Aluvial (<i>Entisols</i>)	Pemukiman atau Perkarangan
4.	Lereng kaki Perbukitan Endapan Koluvium	Latosol (<i>Oxisols</i>), Podsolik (<i>Utisols</i>)	Pemukiman atau pekarangan, kebun campuran dan semak belukar
5.	Perbukitan Intrusif Batuan Vulkanik Tua Granit Banggai (Granit, Diorit, Granodiorit)	Podsolik (<i>Utisols</i>)	Hutan (dominan), semak belukar dan kebun
6.	Perbukitan dan Pegunungan Karst Batu Gamping Terumbu dan Gamping Napalan	Latosol (<i>Oxisols</i>),	Hutan (dominan), semak belukar dan kebun
7.	Perbukitan Struktural Patahan Batuan Vulkanik Tua Kelompok Diabas, Serpih, Konglomerat, Batupasir	Podsolik (<i>Utisols</i>)	Hutan (dominan), semak belukar



No	Satuan Ekoregion dan Material	Jenis Tanah	Penggunaan Lahan
8.	Perbukitan dan Pegunungan Struktural Patahan Kelompok Batuan Malihan Sekis- Gnesis dan Batunapal	Kambisol (<i>Inceptols</i>) Latosol (<i>Oxisols</i>)	Hutan (dominan) dan semak belukar
9.	Terumbu Karang dan Padang Lamun	-	Wisata Bahari (<i>Diving, Snorkling</i>)

Sumber: RPPLH Banggai Kepulauan (2022)

Berdasarkan klasifikasi tutupan atau jenis penggunaan lahan menurut SNI 7645-2010, maka di Kabupaten Banggai Kepulauan terdapat 10 (sepuluh) jenis tutupan lahan atau penggunaan lahan yaitu: Permukiman atau pekarangan; Hutan Lahan Kering Primer; Persawahan; Hutan Lahan Kering sekunder; Tegalan atau ladang; Hutan Mangrove; Kebun; Danau atau Telaga; Campuran; dan Rawa-rawa.

3. Kawasan Lindung

Kawasan linung merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Berdasarkan RTRW Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016- 2036, kawasan Lindung terdiri atas:

- kawasan hutan lindung;
- kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- kawasan perlindungan setempat;
- kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- kawasan rawan bencana alam; dan
- kawasan lindung lainnya.

Kawasan Hutan Lindung dengan luas kurang lebih 26.739 Ha terdapat di beberapa kecamatan berikut ini:

- Kecamatan Tinangkung, dengan luasan kurang lebih 2.025,920 Ha;
- Kecamatan Tinangkung Utara, dengan luasan kurang lebih 248,190 Ha;
- Kecamatan Bulagi, dengan luasan kurang lebih 8.318,105 Ha;
- Kecamatan Bulagi Utara, dengan luasan kurang lebih 810,621 Ha;
- Kecamatan Bulagi Selatan, dengan luasan kurang lebih 14.487,200 Ha;
- Kecamatan Peling Tengah, dengan luasan kurang lebih 852,564 Ha;
- Kecamatan Totikum Selatan, dengan luasan kurang lebih 200,655 Ha;
- Kecamatan Buko Selatan, dengan luasan kurang lebih 40,690 Ha.

Kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya terdiri atas kawasan resapan air yang tersebar di seluruh kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan dengan luasan 237.842 Ha. Kawasan perlindungan setempat terdiri atas kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, kawasan sekitar mata air; dan Kawasan ruang terbuka hijau. Kawasan sempadan pantai terdapat di seluruh pulau di Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan panjang pantai kurang lebih 789,58 km. Kawasan sempadan



sungai meliputi:

- a) Sungai Paisu Bebek dan Sungai Balayon di Kecamatan Liang;
- b) Sungai Ndudukan, Sungai Lomou, Sungai Tutung, di Kecamatan Totikum;
- c) Sungai Tobing, Sungai Tobungin, Sungai Nipah, Sungai Mandoni di Kecamatan Tinangkung Selatan
- d) Sungai Manggalai, Sungai Ambelang di Kecamatan Tinangkung
- e) Sungai Luksagu, Sungai Tatakalai dan Sungai Palam di Kecamatan Tinangkung Utara.

Kawasan sekitar danau terletak di:

- a) Danau Tendetung di Kecamatan Totikum Selatan
- b) Danau Ndudukan di Kecamatan Totikum;
- c) Danau Alani di Kecamatan Buko;
- d) Danau Kuakon di Kecamatan Tinangkung; dan
- e) Danau Emeluk di Kecamatan Bulagi Selatan;

Berdasarkan Kepres Nomor 32 Tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung ditetapkan kawasan lindung sekitar danau sekurang-kurangnya 50 meter dari titik pasang tertinggi. Danau yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan terdapat di Kecamatan Totikum dan Kecamatan Totikum Selatan yakni Danau Tendetung dan Danau Ndudukan, serta di Kecamatan Buko yakni Danau Alani.

Kawasan mata air adalah kawasan tertentu di sekeliling danau, hulu sungai serta tebing-tebing sungai yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan kelestarian mata air yang ditetapkan sekurang-kurangnya 200 meter di sekitar mata air. Mata air di Kabupaten Banggai Kepulauan terdapat pada hulu sungai serta tebing sungai, tetapi debit airnya tidak cukup besar, sehingga untuk mengetahui kontinuitas dan besaran debit mata air perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Karena kebutuhan air dengan jumlah dan kualitas yang baik sangat diperlukan guna menunjang kegiatan rumah tangga, industri serta kegiatan di masa mendatang sehingga perlu dijaga dan dilestarikan. Kawasan sekitar mata air meliputi mata air atas Paisu Sinangkal, Lalanday, Bangunemo, Manggalai dan Lukpanenteng. Kabupaten Banggai Kepulauan juga memiliki Kawasan Ruang Terbuka Hijau yang ditetapkan di kawasan lapangan monumen Trikora dan Alun-alun di Kota Salakan. Kawasan Rawan Bencana Alam, tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan, yang meliputi: kawasan rawan gempa bumi, rawan tsunami, dan rawan tanah longsor.

4. Kawasan Budidaya

Kawasan Budidaya merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya pada hakekatnya adalah tempat di mana suatu wilayah dapat mengolah ruang



sedemikian rupa menjadi peruntukan- peruntukan tersendiri sehingga dapat dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan dan memberikan kemakmuran kepada penduduknya namun tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Berbagai macam kawasan budidaya di Kabupaten Banggai Kepulauan tidak akan dideskripsikan secara mendetail, hanya akan dijabarkan beberapa kawasan saja yang terkait erat dengan potensinya sebagai tolok ukur penting untuk pembangunan, namun juga memiliki potensi untuk merusak kestabilan kondisi lingkungan apabila tidak direncanakan dan dikelola dengan matang. RTRW Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016-2036 mencatat Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya terdiri atas kawasan pantai berhutan bakau kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Tabel 2.27
Sebaran Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya di Kabupaten Banggai Kepulauan

Kecamatan	Kawasan Pantai	Konservasi Laut (Ha)	Kawasan Cagar Budaya
	Berhutan Bakau (Ha)		
Tinangkung	153,37		Monumen Trikora Bonua Lua Benteng Bebengketan
Tinangkung Selatan	439,71		
Tinangkung Utara	17,22		Rumah Satu Tiang Luksagu
Liang	65,55	32.359,35	
Peling Tengah	125,2		
Bulagi	42,35		Makam Raja Dallu, Makam Raja Boas, keramat Kombolon, Mustika Putih
Bulagi Utara	432,82		Batu Masigi, Batu Duangan
Bulagi Selatan	3,98	58.092,62	Tengkorak Manusia Zaman Dulu Desa Osan, Makam Lipudino (Penyebar Islam), Peta Alam Desa Lolantang, Pusat Pembuatan Periuk
Buko	76,08		
Buko Selatan	226,06		Sanggar Batu Mesea

Sumber: Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2016 Tentang RTRW Kabupaten Banggai Kepulauan (2016-2036)

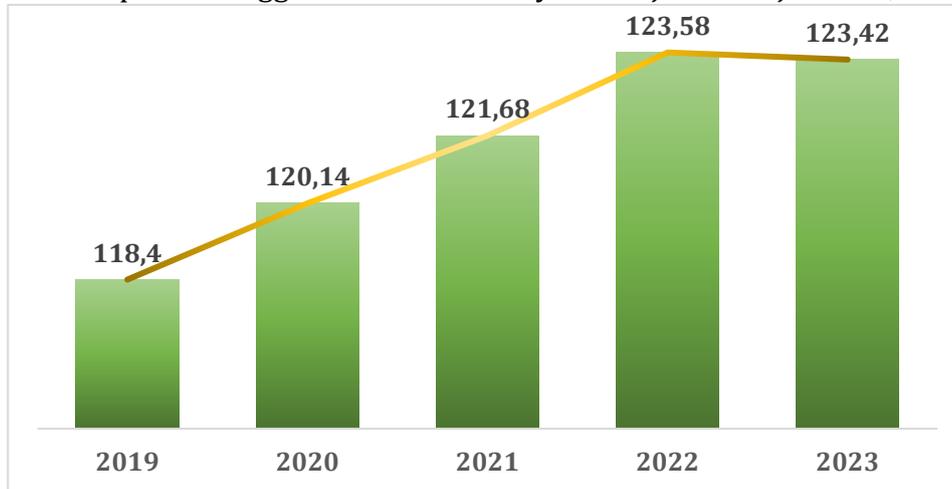
2.1.2 Aspek Demografi

2.1.2.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada Tahun 2019 jumlah penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan



tercatat sebanyak 118.401 jiwa dan selanjutnya pada Tahun 2020 meningkat menjadi 120.142 jiwa. Ditahun 2021 jumlah penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan mencapai 121.684 jiwa. Di tahun 2022 jumlah penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan tercatat sebanyak 123,58 ribu jiwa. Kemudian di tahun 2023 jumlah penduduk Kabupaten Banggai menurun sebanyak 160 jiwa menjadi 123,420 jiwa.

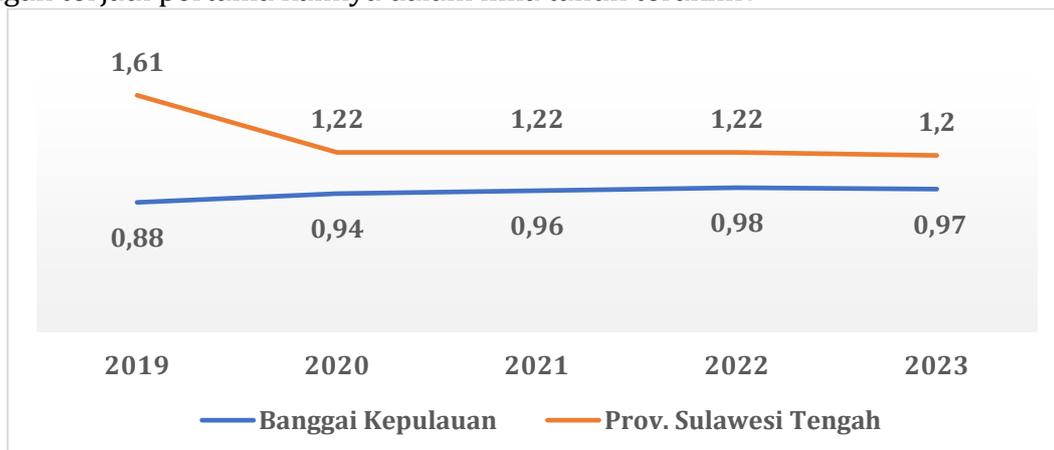


Sumber: BPS Kabupaten Banggai Kepulauan, 2024 (diolah)

Gambar 2.22

Jumlah Penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan di tahun 2023 tercatat meningkat lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk Provinsi Sulawesi Tengah, dimana laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan dari tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar 0,98 persen sementara laju pertumbuhan penduduk Provinsi Sulawesi Tengah dari tahun 2021 ke tahun 2022 bertumbuh sebanyak 1,22 persen. Untuk tahun 2023 jumlah penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar 0,97 persen dan untuk provinsi Sulawesi Tengah sebesar 1,20 persen. Kondisi laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan yang bertumbuh diatas rata-rata laju pertumbuhan penduduk Provinsi Sulawesi Tengah terjadi pertama kalinya dalam lima tahun terakhir.



Sumber: BPS Kabupaten Banggai Kepulauan, 2023 (diolah)

Gambar 2.23

Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Banggai Kepulauan 2019-2023



Data perbandingan jumlah penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Sulawesi Tengah dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan variasi yang signifikan dalam pertumbuhan populasi. Populasi penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan meningkat relatif stabil, dari sebanyak 118,4 ribu jiwa tahun 2019 menjadi 124,58 ribu jiwa tahun 2023. Dimana Kabupaten Banggai, yang memiliki populasi tertinggi di antara kabupaten lainnya, juga menunjukkan tren peningkatan dari 376,81 ribu jiwa pada tahun 2019 menjadi 377,6 ribu jiwa pada tahun 2023, meskipun mengalami fluktuasi. Sementara itu, Kabupaten Morowali menunjukkan peningkatan signifikan, terutama dari 2019 ke 2020, dengan kenaikan dari 121,3 ribu jiwa menjadi 161,73 ribu jiwa, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh perkembangan industri di daerah tersebut. Poso dan Donggala menunjukkan tren peningkatan yang konsisten tetapi dengan laju yang lebih lambat. Kabupaten Donggala, misalnya, meningkat dari 304,11 ribu jiwa pada tahun 2019 menjadi 311 ribu jiwa pada tahun 2023.

Kabupaten Toli-Toli dan Kabupaten Buol, mengalami penurunan jumlah penduduk pada awal periode yang kemudian naik kembali. Sementara itu, Parigi Moutong dan Sigi mencatat peningkatan jumlah penduduk yang konsisten. Kota Palu, sebagai ibu kota provinsi, juga menunjukkan peningkatan stabil dari 391,38 ribu jiwa pada tahun 2019 menjadi 392,51 ribu jiwa pada tahun 2023, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 akibat dampak gempa dan tsunami pada tahun 2018. Secara keseluruhan, Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan tren peningkatan jumlah penduduk dari 3.054 ribu jiwa pada tahun 2019 menjadi 3.121,75 ribu jiwa pada tahun 2023. Pertumbuhan penduduk ini mencerminkan dinamika sosial-ekonomi yang bervariasi di setiap kabupaten/kota, dengan beberapa daerah mengalami peningkatan pesat akibat industrialisasi dan urbanisasi, sementara daerah lain mengalami fluktuasi atau peningkatan yang lebih lambat.

Tabel 2.28**Perbandingan Jumlah Penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan Dengan Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2019-2023**

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Bangkep	118,4	120,14	121,68	123,58	124,58
Banggai	376,81	362,28	366,22	370,97	377,6
Morowali	121,3	161,73	167,91	176,24	173,31
Poso	256,39	244,88	248,35	252,65	254,06
Donggala	304,11	300,44	302,97	305,89	311
Toli-Toli	235,8	225,15	226,8	228,64	233,9
Buol	162,18	145,25	146,63	148,25	152,36
Parigi Moutong	490,92	440,02	443,17	446,71	459,78
Tojo Una-una	153,99	163,83	166,34	169,48	170,82
Sigi	239,42	257,59	261,68	266,81	269,96
Banggai Laut	75	70,44	70,87	71,35	74,02
Morowali Utara	128,32	120,79	122,24	124,01	127,87
Palu	391,38	373,22	377,03	381,57	392,51



Kabupaten/Kota	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Sulawesi Tengah	3.054	2.986	3.021,88	3.066,14	3.121,75

Sumber: BPS, Sulawesi Tengah Dalam Angka, Tahun 2020-2024 (diolah kembali)

Sedangkan jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk tahun 2022-2023 per kecamatan disajikan pada tabel berikut. Tabel dibawah menunjukkan bahwa kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar berada di wilayah Ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu di Kecamatan Tinangkung dengan jumlah penduduk sebesar 18.534 jiwa di tahun 2023 dengan tingkat pertumbuhan penduduk paling tinggi yaitu sebesar 2,59 persen, sedangkan penduduk dengan jumlah paling sedikit berada di Kecamatan Tinangkung Selatan sebesar 8.220 di tahun 2023, dengan Tingkat laju pertumbuhan penduduk 1,01 persen. Berdasarkan tabel dibawah, terlihat bahwa jumlah penduduk secara keseluruhan di Kabupaten Banggai Kepulauan mengalami peningkatan atau pertumbuhan sebesar 0,98 persen dengan seluruh kecamatan mengalami penambahan jumlah penduduk.

Tabel 2.29
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2022-2023

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2022-2023
1.	Totikum	10.638	0,58
2.	Totikum Selatan	8.625	0,54
3.	Tinangkung	18.534	2,59
4.	Tinangkung Selatan	8.220	1,01
5.	Tinangkung Utara	9.002	1,22
6.	Liang	9.736	0,80
7.	Peling Tengah	10.741	1,14
8.	Bulagi	9.478	-0,04
9.	Bulagi Selatan	9.698	0,00
10.	Bulagi Utara	9.854	0,79
11.	Buko	10.022	0,53
12.	Buko Selatan	8.872	0,90
	Banggai Kepulauan	123.420	0,98

Sumber: BPS Kab. Bangkep, 2024 (diolah)

2.1.2.2 Rasio Jenis Kelamin

Penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 lebih didominasi oleh jenis kelamin laki-laki dibandingkan perempuan. Jumlah penduduk laki-laki Kabupaten Banggai Kepulauan kurang lebih sebanyak 62.461 jiwa sementara penduduk perempuan sebanyak 60.959 jiwa. Yang berarti rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar 102. Sementara persebaran rasio jenis kelamin ditingkatan kecamatan terdapat pada tabel di bawah ini.



Tabel 2.30
Rasio Jenis Kelamin Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023

No.	Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin
1.	Totikum	104
2.	Totikum Selatan	103
3.	Tinangkung	103
4.	Tinangkung Selatan	101
5.	Tinangkung Utara	106
6.	Liang	98
7.	Peling Tengah	104
8.	Bulagi	102
9.	Bulagi Selatan	104
10.	Bulagi Utara	101
11.	Buko	100
12.	Buko Selatan	102
	Banggai Kepulauan	102

Sumber: BPS Kabupaten Banggai Kepulauan, 2024 (diolah)

Merujuk data pada tabel di atas menunjukkan bahwa Kecamatan Liang adalah satu-satunya kecamatan dengan jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari jumlah penduduk laki-laki dengan nilai rasio jenis kelamin 98. Kecamatan-kecamatan lainnya se-Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki rasio jenis kelamin yang merentang antara 100 hingga 106.

2.1.2.3 Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Persebaran penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan cenderung merata disemua kecamatan yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan. Kecamatan dengan persentase jumlah penduduk tertinggi adalah Kecamatan Tinangkung 15,02 persen dan Kecamatan dengan persentase penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Tinangkung Selatan 6,66 persen. Sementara itu, kepadatan penduduk secara menyeluruh di Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar 49,59 orang per km². Namun bila ditinjau berdasarkan kecamatan, wilayah yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Totikum Selatan dengan Kepadatan penduduk 90,61 orang per km². Meskipun sebaran jumlah penduduk paling besar di Kecamatan Tinangkung sebagai Ibu Kota Kabupaten, namun Kecamatan Totikum Selatan memiliki tingkat kepadatan penduduk paling tinggi. Hal ini dikarenakan daerah dengan luas wilayah paling kecil di Kabupaten Banggai Kepulauan tersebut yakni hanya sebesar 95,19 km² memiliki penduduk yang berjumlah 8.574 jiwa. Berikut tabel yang menunjukkan kepadatan penduduk berdasarkan kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan.



Tabel 2.31
Tingkat Kepadatan Penduduk per Kecamatan
di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023

No.	Kecamatan	Persentase Penduduk	Tingkat Kepadatan
1.	Totikum	8,62	68,43
2.	Totikum Selatan	6,99	90,61
3.	Tinangkung	15,02	59,29
4.	Tinangkung Selatan	6,66	43,75
5.	Tinangkung Utara	7,29	65,88
6.	Liang	7,89	55,26
7.	Peling Tengah	8,70	76,72
8.	Bulagi	7,68	34,38
9.	Bulagi Selatan	7,86	30,40
10.	Bulagi Utara	7,98	30,99
11.	Buko	8,12	54,22
12.	Buko Selatan	7,19	47,36
	Banggai Kepulauan	100	49,59

Sumber: BPS Kabupaten Banggai Kepulauan, 2024 (diolah)

2.1.2.4 Penduduk Menurut Umur

Perubahan dalam aspek demografi jelas terlihat dari perubahan struktur umur penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan. Pada Tahun 2023 penduduk di bawah usia 15 tahun mencapai 32.868 jiwa atau sebesar 26,63 persen dari total penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan yang berjumlah 123.420 jiwa. Dengan demikian Kabupaten Banggai Kepulauan mempunyai penduduk tergolong dalam penduduk Intermediate, dimana proporsi penduduk usia di bawah 15 tahun sekitar 30 persen. Komposisi penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan didominasi oleh penduduk berusia muda dimana komposisi penduduk berusia 0-39 tahun berjumlah 81.947 jiwa atau sebesar 66,40 persen dari total jumlah penduduk Kabupaten Banggai kepulauan. Penduduk usia produktif pun juga berjumlah lebih besar dari pada penduduk usia nonproduktif, penduduk kelompok umur 15-64 tahun di Kabupaten banggai kepulauan berjumlah 83.152 jiwa dari total keseluruhan jumlah penduduk Kabupaten Banggai kepulauan atau sebesar 67,37 persen. Gambaran secara lebih detail tentang komposisi penduduk Kabupaten Banggai kepulauan dapat dilihat pada tabel penduduk dibawah ini.

Tabel 2.32
Komposisi Penduduk Menurut Umur di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023

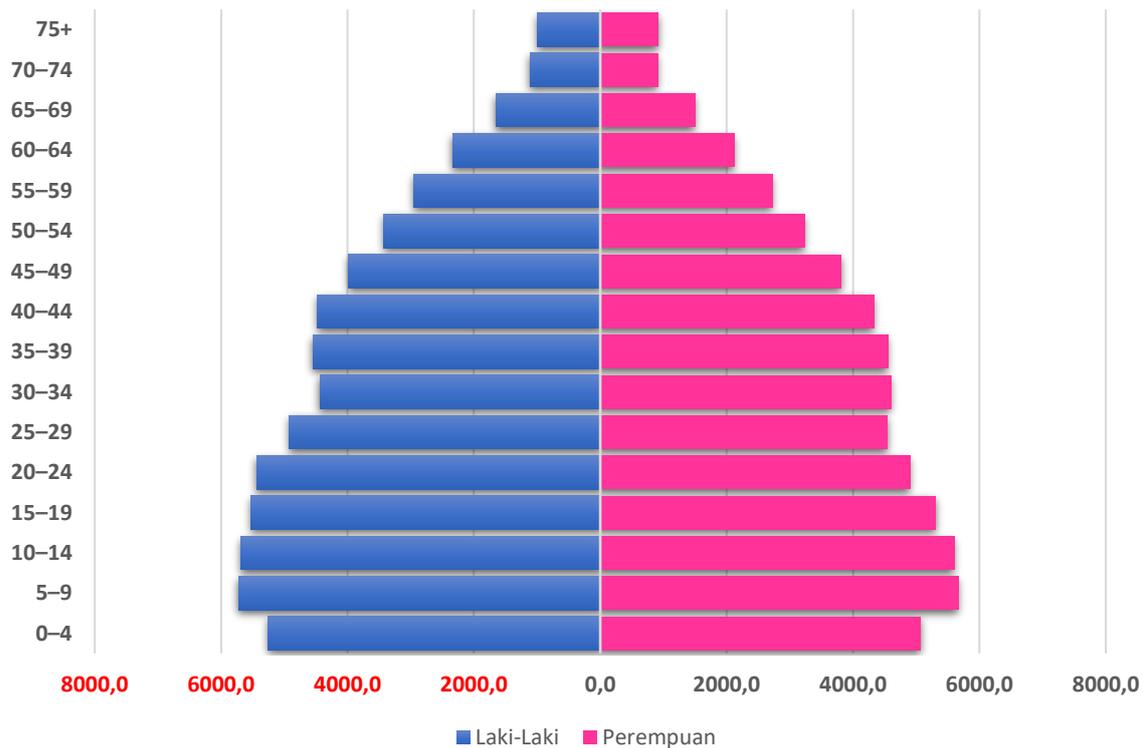
Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
-1	-2	-3	-4
0-4	5.256	5.073	10.329
5-9	5.726	5.536	11.262



Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
-1	-2	-3	-4
10-14	5.681	5.596	11.277
15-19	5.532	5.460	10.992
20-24	5.438	5.123	10.561
25-29	4.920	4.680	9.600
30-34	4.438	4.443	8.881
35-39	4.550	4.495	9.045
40-44	4.471	4.382	8.853
45-49	3.981	4.008	7.989
50-54	3.427	3.398	6.825
55-59	2.952	2.840	5.792
60-64	2.335	2.279	4.614
65-69	1.652	1.648	3.300
70-74	1.109	1.048	2.157
75+	993	950	1.943
Banggai Kepulauan	62.461	60.959	123.420

Sumber: BPS Kab. Bangkep, 2024 (diolah)

Berdasarkan data di atas, jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Banggai Kepulauan pada tahun 2023 adalah 83.152 orang, sedangkan jumlah penduduk usia tidak produktif adalah 40.268 orang. Rasio ketergantungan, yaitu perbandingan antara jumlah penduduk usia tidak produktif dengan jumlah penduduk usia produktif, adalah 48,43. Artinya, setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung sekitar 48 orang penduduk usia tidak produktif. Rasio ketergantungan yang rendah menunjukkan bahwa Kabupaten Banggai Kepulauan sedang mengalami bonus demografi. Namun, bonus demografi tidak akan berlangsung selamanya. Jika laju kelahiran dan kematian terus menurun, maka jumlah penduduk usia tidak produktif akan meningkat, terutama yang berusia 65 tahun ke atas. Hal ini akan menimbulkan masalah baru, seperti beban sosial, kesehatan, dan pensiun bagi penduduk usia lanjut. Oleh karena itu, Kabupaten Banggai Kepulauan perlu memanfaatkan bonus demografi dengan baik, misalnya dengan meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja bagi penduduk usia produktif, serta mengendalikan pertumbuhan penduduk. Secara detail dapat dilihat pada gambar piramida kependuduk dibawah ini.



Sumber: BPS Kabupaten Banggai Kepulauan, 2024 (diolah)

Gambar 2.24
Piramida Kependudukan di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN BUDAYA

Aspek kesejahteraan masyarakat berisi tentang capaian makro pembangunan yang mengindikasikan tentang kondisi tingkat kesejahteraan masyarakat. Aspek ini terdiri atas fokus pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial serta seni budaya dan olahraga. Penjelasan mengenai analisis pada aspek kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut:

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

2.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal ini dilakukan dengan memperluas lapangan kerja, pemerataan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan kata lain, arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin. Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu

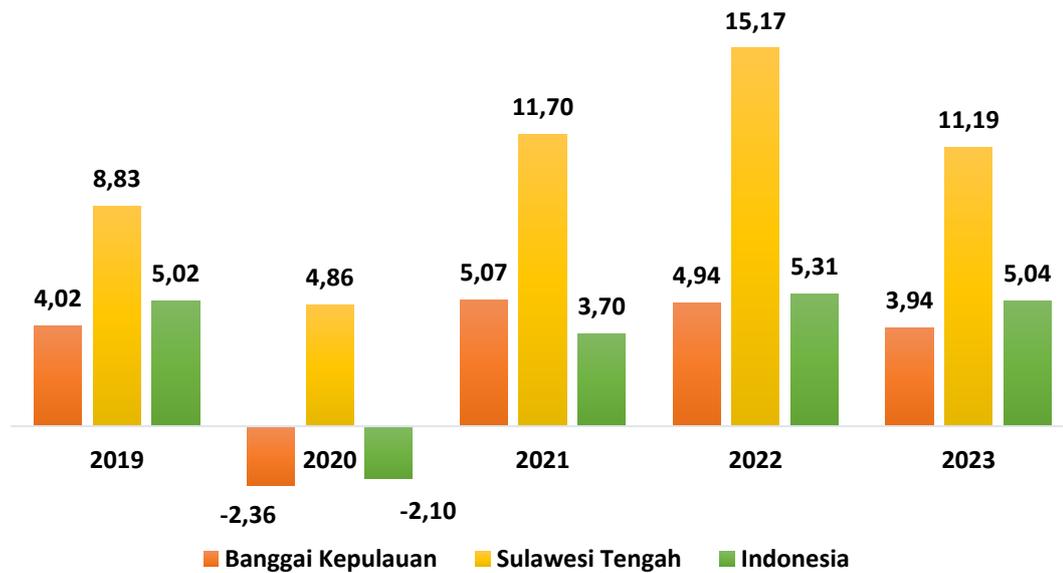


negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Data laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Indonesia dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan dinamika yang menarik dalam konteks ekonomi regional dan nasional. Kabupaten Banggai Kepulauan mengalami pertumbuhan ekonomi positif pada tahun 2019 sebesar 4,02 persen. Namun, pada tahun 2020, terjadi kontraksi ekonomi sebesar -2,36 persen, akibat dampak pandemi Covid-19 yang melanda secara global. Pada tahun 2021, Banggai Kepulauan berhasil bangkit dengan pertumbuhan sebesar 5,07 persen, dan meskipun ada sedikit penurunan pada tahun 2022 dan tahun 2023, pertumbuhan tetap positif masing-masing sebesar 4,94 persen dan 3,94 persen.

Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi yang lebih dinamis. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah mencapai 8,83 persen. Meskipun mengalami perlambatan pada tahun 2020 dengan pertumbuhan 4,86 persen akibat pandemi, provinsi ini berhasil mencatatkan lonjakan pertumbuhan signifikan sebesar 11,70 persen pada tahun 2021 dan bahkan mencapai puncaknya pada tahun 2022 dengan pertumbuhan 15,17 persen. Pada tahun 2023, meskipun mengalami penurunan, pertumbuhan ekonomi tetap tinggi pada 11,19 persen. Pertumbuhan yang tinggi ini kemungkinan besar didorong oleh perkembangan sektor industri dan pertambangan yang signifikan di wilayah tersebut. Secara nasional, Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02 persen pada tahun 2019. Pandemi Covid-19 menyebabkan kontraksi ekonomi sebesar -2,10 persen pada tahun 2020. Namun, ekonomi nasional mulai pulih pada tahun 2021 dengan pertumbuhan 3,70 persen dan terus menguat pada tahun 2022 dengan pertumbuhan 5,31 persen. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi nasional sedikit melambat tetapi tetap solid pada 5,04 persen.

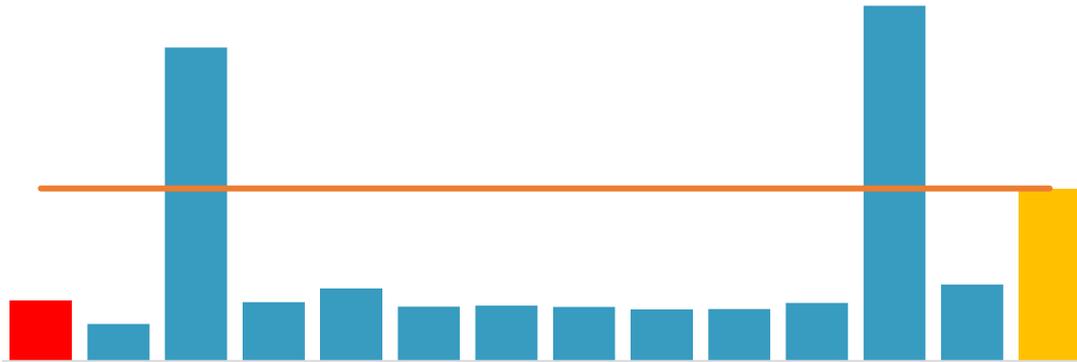
Dari data ini, terlihat bahwa Sulawesi Tengah memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan lebih dinamis dibandingkan dengan Banggai Kepulauan dan nasional. Meskipun Banggai Kepulauan juga menunjukkan pemulihan ekonomi yang baik pasca-pandemi, tingkat pertumbuhannya tidak secepat Sulawesi Tengah. Secara keseluruhan, ekonomi nasional menunjukkan pemulihan yang stabil dan konsisten setelah dampak pandemi, mencerminkan upaya yang berhasil dalam mengatasi tantangan ekonomi global.



Sumber: BPS Kab. Bangkep, 2024 (diolah)

Gambar 2.25
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023

Jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2023 masih belum bagus yaitu sebesar 3,94 persen, karena masih dibawah rata-rata Provinsi dan nasional. Hal tersebut karena sumber daya alam khususnya pertanian dan perikanan yang cukup berkembang. Selanjutnya, dilihat menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Maka Ekonomi Kabupaten Banggai Kepulauan berada pada urutan ke tertinggi ke-lima. Kemudian Pertumbuhan ekonomi tertinggi pertama Kabupaten Morowali Utara sebesar 23,04 persen, kemudian Kabupaten Morowali dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 20,34 persen dan di urutan ketiga Kota Palu sebesar 4,96 persen. Sedangkan Kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi terendah adalah Kabupaten Banggai sebesar 2,40 persen, Kabupaten Sigi sebesar 3,37 persen dan Tojo Una-Una sebesar 3,34 persen. Selain Kabupaten Morowali dan Morowali Utara, 11 kabupaten/kota rata-rata pertumbuhannya di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023, data terkait terdapat pada gambar berikut ini.



Sumber: BPS Tahun 2024 (data diolah)

Gambar 2.26
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota
di Sulawesi Tengah Tahun 2023

Secara keseluruhan, PDRB Kabupaten Banggai Kepulauan mengalami kontraksi pada tahun 2020 sebesar -2,36 persen akibat dampak pandemi Covid-19, tetapi berhasil pulih dengan pertumbuhan sebesar 5,07 persen pada tahun 2021 dan 4,94 persen pada tahun 2022. Ini menunjukkan kemampuan daerah ini untuk beradaptasi dan pulih dari dampak ekonomi global yang signifikan. Pertumbuhan yang bervariasi antar sektor mencerminkan dinamika ekonomi yang kompleks dan pentingnya diversifikasi ekonomi untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Secara rinci laju pertumbuhan menurut lapangan usaha kabupaten Banggai Kepulauan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.33
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha
di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023

Uraian		Tahun (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,23	-1,79	3,41	4,59	3,08
B	Pertambangan dan Penggalian	13,22	-17,21	-3,46	3,38	8,90
C	Industri Pengolahan	5,78	0,55	2,25	4,57	1,91
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,92	12,72	4,48	9,3	3,28
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,23	3,02	4,32	3,65	2,24
F	Konstruksi	17,59	-15,97	3,11	3,32	2,78



Uraian		Tahun (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,28	-5,47	9,64	7,27	5,91
H	Transportasi dan Pergudangan	4,67	-23,38	5,02	7,05	3,89
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,27	-8,89	12,35	6,65	7,45
J	Informasi dan Komunikasi	8,22	8,88	8,38	5,66	6,81
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,31	13,45	14,14	3,45	0,31
L	Real Estate	2,7	0,37	2,43	5,42	5,00
M,N	Jasa Perusahaan	5,1	0,99	2,36	5,79	4,50
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,66	0,27	4,41	1,96	1,91
P	Jasa Pendidikan	0,15	0,77	1,25	3,1	4,61
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,65	6,89	5,23	3,82	5,68
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,73	1,32	5,72	5,16	5,35
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		4,11	4,02	-2,36	5,07	4,94

Sumber: BPS Kab. Bangkep, 2024 (diolah)

Berdasarkan data di atas, laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha di Kabupaten Banggai Kepulauan dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan variasi yang signifikan antar sektor. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami pertumbuhan yang relatif stabil, meskipun terjadi kontraksi pada tahun 2020 sebesar -1,79 persen, kemudian pulih dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2022 sebesar 4,59 persen. Sektor pertambangan dan penggalian mengalami fluktuasi yang lebih drastis, dengan penurunan tajam sebesar -17,21 persen pada tahun 2020 dan pemulihan bertahap hingga 8,90 persen pada tahun 2023.

Sektor industri pengolahan menunjukkan pertumbuhan yang stabil dengan sedikit penurunan pada tahun 2020, tetapi pulih dengan kuat pada tahun-tahun berikutnya. Pengadaan listrik dan gas memiliki pertumbuhan yang cukup tinggi, terutama pada tahun 2020 sebesar 12,72 persen, meskipun mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya. Sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan positif. Sektor konstruksi mengalami penurunan signifikan sebesar -15,97 persen pada tahun 2020, tetapi kembali ke jalur positif pada tahun-tahun berikutnya. Perdagangan besar dan eceran mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2020, tetapi pulih dengan cepat dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 9,64 persen pada tahun 2021. Sektor transportasi dan pergudangan serta penyediaan akomodasi dan makan minum juga mengalami



kontraksi pada tahun 2020, tetapi pulih dengan pertumbuhan positif yang kuat pada tahun-tahun berikutnya.

Sektor informasi dan komunikasi, serta jasa keuangan dan asuransi menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil dan positif sepanjang periode. Sektor real estate dan jasa perusahaan juga menunjukkan pemulihan yang baik setelah kontraksi kecil pada tahun 2020. Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib mengalami pertumbuhan yang rendah tetapi stabil. Sektor jasa pendidikan dan jasa kesehatan serta kegiatan sosial menunjukkan pertumbuhan positif yang meningkat secara konsisten. Sektor jasa lainnya juga menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil dan positif.

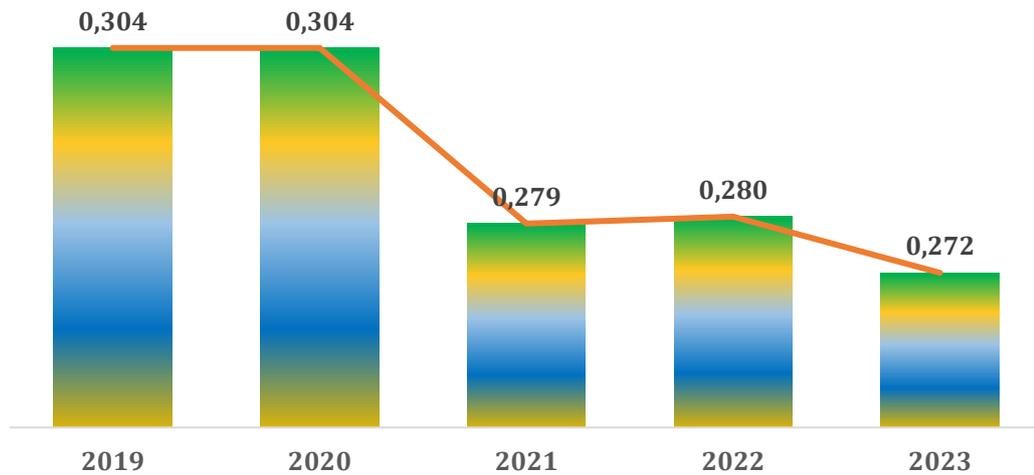
2.2.1.2 Ketimpangan (Indeks Gini)

Adanya peningkatan kesejahteraan penduduk dalam konteks ekonomi dapat diperlihatkan oleh terjadinya peningkatan pendapatan penduduk suatu wilayah. Peningkatan ini juga biasanya akan sejalan dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Selanjutnya, meningkatnya pendapatan penduduk ini diharapkan dapat merata dan dirasakan oleh semua tingkatan sosial masyarakat. Hal ini berarti bahwa aspek pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk dipantau, karena pemerataan pendapatan merupakan ukuran keberhasilan pembangunan, di mana semua lapisan masyarakat turut merasakan hasil pembangunan.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak cukup dilihat dari peningkatan pertumbuhan ekonomi semata. Lazim terjadi bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi berdampak terhadap ketimpangan pembangunan wilayah dan ketimpangan pendapatan, sehingga diperlukan distribusi pembangunan dan pendapatan yang merata. Untuk melihat ketimpangan pembangunan antar kecamatan dapat dilakukan dengan kajian ketimpangan pembangunan wilayah menggunakan indikator Indeks Williamsom, sementara untuk melihat pemerataan pendapatan masyarakat dilakukan dengan kajian ketimpangan pendapatan masyarakat menggunakan indikator Gini Ratio. Ukuran ketimpangan pendapatan dengan Koefisien Gini.

- Tinggi: koefisien gini ratio 0,5 atau lebih
- Sedang: koefisien gini ratio 0,30 - 0,49
- Rendah : koefisien gini ratio kurang dari 0,30

Kesenjangan pendapatan di Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana terlihat pada grafik koefisien gini dibawah memiliki trend yang baik. Kesenjangan pendapatan semakin menurun setiap tahunnya. Sejak tahun 2019 hingga 2020 dimana nilai koefisien gini berada pada skala diatas 0,304 menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan berada pada taraf sedang, memasuki tahun 2021 hingga 2023, kesenjangan pendapatan Kabupaten banggai kepulauan sudah memasuki taraf rendah dengan skala di bawah 0,300. Pada tahun 2023 gini raio Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar 0,272. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut ini.

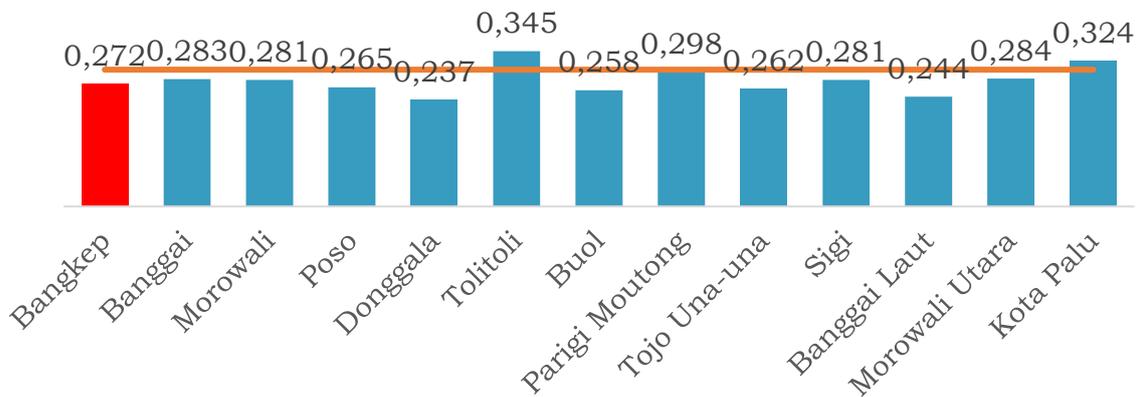


Sumber: BPS Kabupaten Banggai Kepulauan, 2024 (diolah)

Gambar 2.27

Indeks Gini Rasio Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023

Kesenjangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah secara umum cenderung merata dan berada dibawah angka 0,3. Di tingkat Provinsi sendiri, angka koefisien gini berada pada angka 0,308 yakni dalam skala sedang. Dari 13 Kabupaten/Kota yang ada di Sulawesi Tengah, hanya ada 2 Kabupaten/Kota yang memiliki indeks koefisien gini diatas 0,3, yaitu Kabupaten Banggai dengan indeks koefisien gini sebesar 0,315 dan Kota Palu sebesar 0,355. Sementara kabupaten dengan indeks koefisien gini terendah adalah Kabupaten Banggai Laut dengan indeks koefisien gini sebesar 0,247.



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2024 (diolah)

Gambar 2.28

Koefisien Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

2.2.1.3 Penduduk Miskin

A. Jumlah Penduduk Miskin

Pembangunan merupakan proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan merata. Wujud kesejahteraan masyarakat secara ekonomi ditunjukkan dengan



meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang ditunjukkan dengan meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat. Berbagai upaya telah ditempuh pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan penduduknya, baik dari segi peningkatan kinerja perekonomian maupun upaya pemerataan pembangunan. Dengan upaya tersebut, diharapkan terjadi penurunan kemiskinan secara berkelanjutan.

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.

Tabel 2.34**Jumlah, Persentase, dan Garis Kemiskinan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bln)
2019	18,38	14,84	317.475
2020	17,54	14,04	338.815
2021	16,70	13,72	364.025
2022	16,33	13,44	378.799
2023	15,50	12,90	432.673

Sumber: BPS Kab. Bangkep, 2024 (diolah)

Data mengenai jumlah, persentase, dan garis kemiskinan di Kabupaten Banggai Kepulauan dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan tren penurunan jumlah penduduk miskin dan persentase kemiskinan, meskipun garis kemiskinan meningkat setiap tahun. Pada tahun 2019, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 18,38 ribu orang dengan persentase 14,84 persen. Pada tahun berikutnya, 2020, jumlah ini menurun menjadi 17,54 ribu orang dengan persentase kemiskinan sebesar 14,04 persen. Tren penurunan ini berlanjut hingga tahun 2023, di mana jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 15,50 ribu orang, dengan persentase kemiskinan turun menjadi 12,90 persen.

Sementara itu, garis kemiskinan mengalami kenaikan setiap tahunnya, dari Rp317.475 per kapita per bulan pada tahun 2019 menjadi Rp432.673 per kapita per bulan pada tahun 2023. Kenaikan garis kemiskinan ini mencerminkan peningkatan biaya hidup dan kebutuhan dasar di wilayah tersebut.

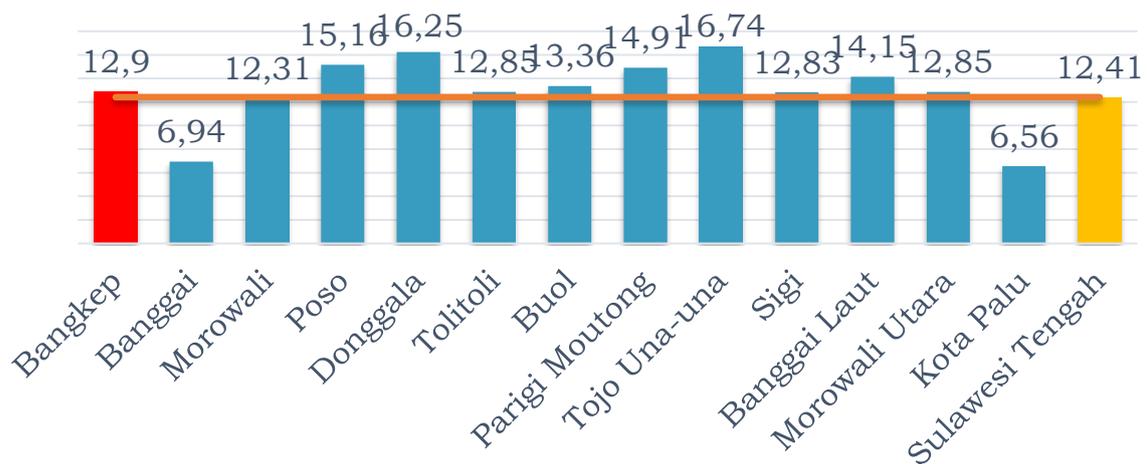
Penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin menunjukkan bahwa ada perbaikan dalam kondisi ekonomi masyarakat di Kabupaten Banggai Kepulauan, yang mungkin disebabkan oleh berbagai program pengentasan kemiskinan, peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi lainnya. Namun, peningkatan garis kemiskinan juga menunjukkan bahwa meskipun jumlah orang



yang hidup di bawah garis kemiskinan berkurang, tantangan untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik masih ada, karena standar minimum untuk hidup layak terus meningkat.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa upaya untuk mengurangi kemiskinan di Kabupaten Banggai Kepulauan berhasil dalam hal jumlah dan persentase, tetapi ada kebutuhan untuk terus meningkatkan daya beli dan kesejahteraan ekonomi masyarakat untuk menjaga agar kemiskinan tidak kembali meningkat. Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan. Namun, pemanfaatan potensi ini masih belum optimal, sehingga belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, ada juga ancaman kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang yang dapat mengganggu ekosistem karst dan ruang hidup masyarakat.

Untuk mengatasi masalah kemiskinan, pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mengembangkan potensi desa secara berkelanjutan, melindungi lingkungan, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.



Sumber: Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2024 (data diolah)

Gambar 2.29
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

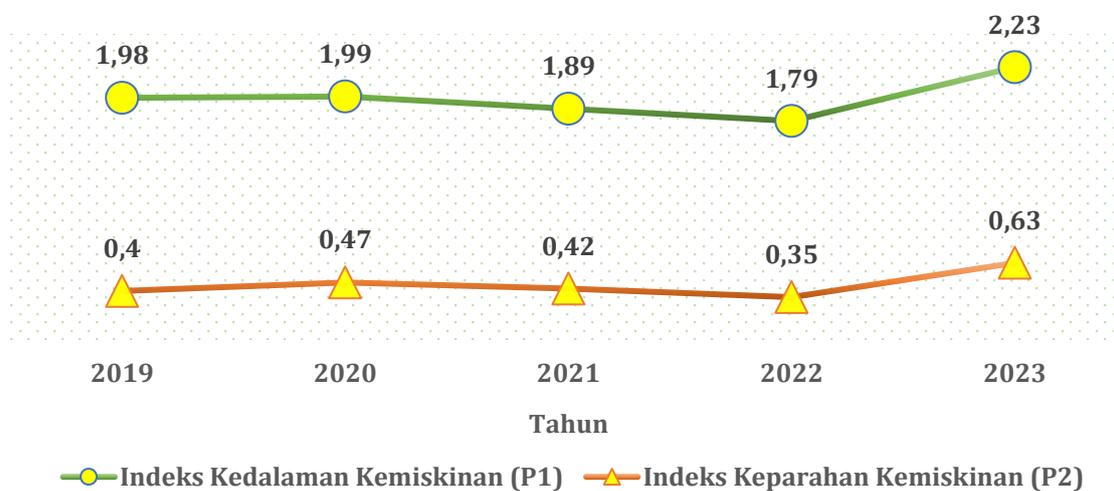
Selanjutnya perkembangan penduduk miskin antar Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa posisi Kabupaten Banggai Kepulauan masih di atas rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah, maka posisi Kabupaten Banggai Kepulauan berada pada urutan ketujuh. Sedangkan Kota Palu memiliki persentase penduduk miskin terendah. Beberapa daerah dengan persentase penduduk miskin lebih baik dari rata-rata Provinsi hanya Kabupaten Banggai dan Kabupaten Sigi, selain itu persentase penduduk miskin masih di atas



rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah. Data mengenai persentase penduduk miskin Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.

B. Indeks Kedalaman (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2)

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin, namun juga harus memperhatikan tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.



Sumber: BPS Kab. Bangkep, 2024 (diolah)

Gambar 2.30

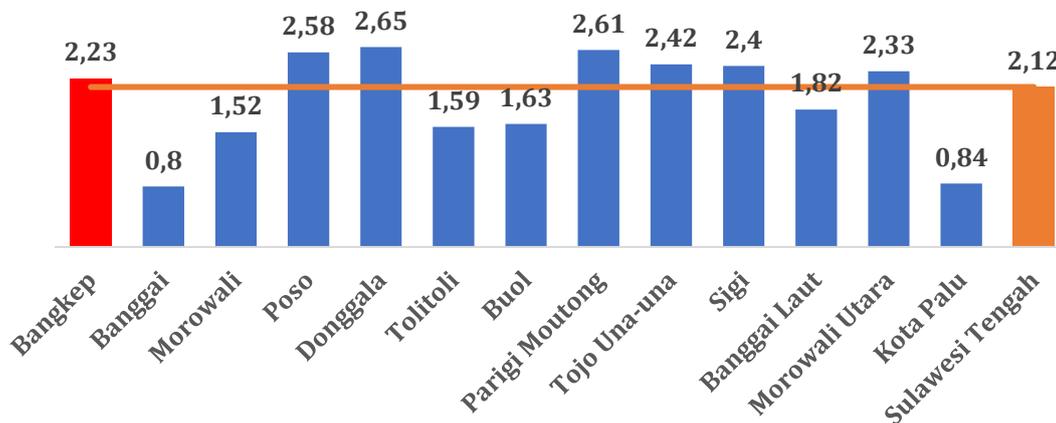
Indeks Kedalaman (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023

Data Indeks Kedalaman (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Banggai Kepulauan dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi dalam kondisi kemiskinan di wilayah tersebut. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengukur rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sementara Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengukur distribusi pengeluaran di antara penduduk miskin. Pada tahun 2019, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) berada pada angka 1,98 dan sedikit meningkat menjadi 1,99 pada tahun 2020. Kemudian, indeks ini menurun menjadi 1,89 pada tahun 2021 dan lebih lanjut menjadi 1,79 pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023, terjadi peningkatan signifikan menjadi 2,23. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa meskipun ada perbaikan dalam mengurangi kedalaman kemiskinan dari tahun 2019 hingga 2022, tahun 2023 memperlihatkan peningkatan kesenjangan pengeluaran di antara penduduk miskin.



Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga menunjukkan pola yang serupa. Pada tahun 2019, indeks ini tercatat pada angka 0,4 dan meningkat menjadi 0,47 pada tahun 2020. Setelah itu, indeks ini menurun menjadi 0,42 pada tahun 2021 dan lebih lanjut menjadi 0,35 pada tahun 2022, mencerminkan perbaikan dalam distribusi pengeluaran di antara penduduk miskin. Namun, pada tahun 2023, indeks keparahan kemiskinan meningkat tajam menjadi 0,63, menunjukkan peningkatan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Secara keseluruhan, meskipun ada kemajuan dalam mengurangi kedalaman dan keparahan kemiskinan hingga tahun 2022, data tahun 2023 menunjukkan kemunduran yang signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun jumlah penduduk miskin berkurang, kondisi ekonomi mereka yang berada di bawah garis kemiskinan justru memburuk, dengan kesenjangan dan ketimpangan yang meningkat. Penyebab peningkatan ini dapat beragam, termasuk dampak ekonomi pasca-pandemi, inflasi, dan kurangnya akses terhadap sumber daya ekonomi yang stabil. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih fokus dan terarah untuk tidak hanya mengurangi jumlah penduduk miskin tetapi juga memperbaiki kondisi kehidupan mereka secara keseluruhan.

Selanjutnya jika dilihat dari wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, dimana P1 Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 lebih rendah (lebih baik) dari rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah, namun lebih tinggi dari rata-rata nasional. Kondisi P1 Kabupaten Banggai Kepulauan berada pada urutan tujuh. Sedangkan, P1 terendah adalah Kota Palu dan Kabupaten Banggai, sedangkan P1 tertinggi adalah Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Donggala. Data P1 terdapat pada gambar sebagai berikut ini.



Sumber: Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2024 (data diolah)

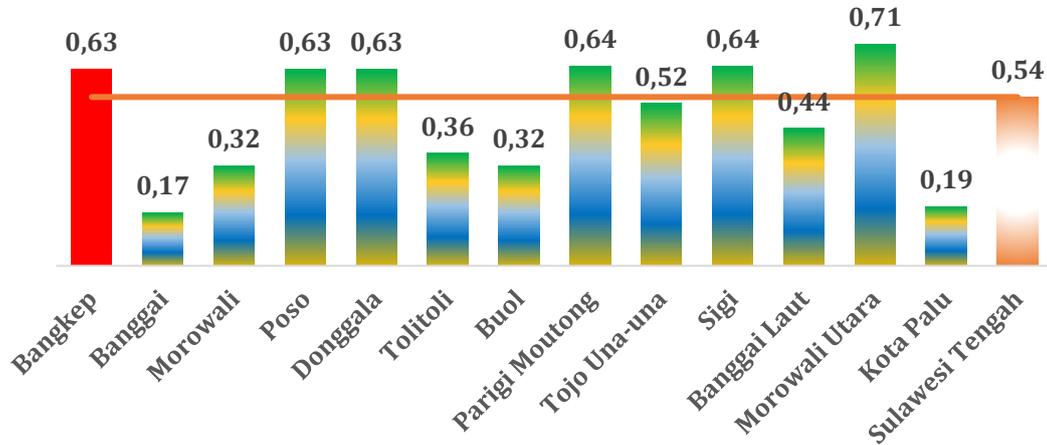
Gambar 2.31

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Selanjutnya indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Banggai Kepulauan dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 0,54. Beberapa daerah masih memiliki P2 lebih tinggi dari rata-rata Provinsi yakni Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kabupaten Donggala.



Kabupaten Banggai Kepulauan berada pada urutan ke-sembilan P2 di Provinsi Sulawesi Tengah, sedangkan P2 tertinggi adalah Kabupaten Parigi Moutong dan P2 terendah adalah Kabupaten Banggai, Kota Palu dan Kabupaten Tolitoli. Data terkait dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2024 (data diolah)

Gambar 2.32

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

2.2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

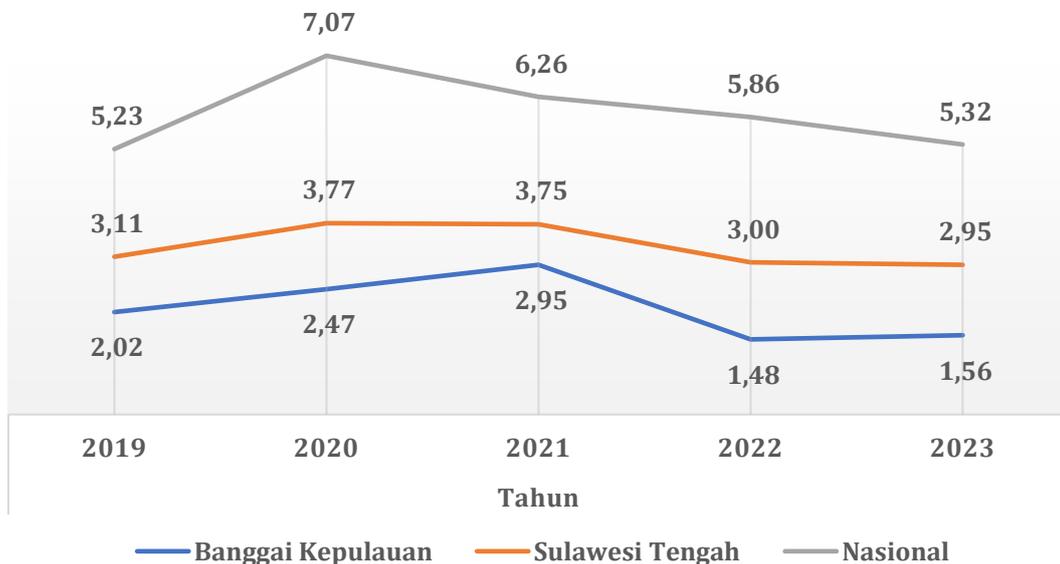
Penganggur (*unemployment*) adalah penduduk dalam angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkan, sedang mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan, dan tidak mempersiapkan usaha karena putus asa, atau sudah memiliki pekerjaan tapi belum memulainya. Pengangguran terbuka meliputi mereka yang tidak mau bekerja, karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik (penganggur sukarela), maupun mereka yang mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan (penganggur terpaksa).

Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah, dan nasional dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan tren yang menarik dalam konteks dinamika pasar tenaga kerja di berbagai tingkatan. Pada tahun 2019, TPT di Kabupaten Banggai Kepulauan tercatat sebesar 2,02 persen, lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Tengah yang sebesar 3,11 persen dan tingkat nasional yang mencapai 5,23 persen. Pada tahun 2020, dampak pandemi COVID-19 menyebabkan peningkatan signifikan dalam tingkat pengangguran di semua wilayah. TPT di Kabupaten Banggai Kepulauan naik menjadi 2,47 persen, sementara di Sulawesi Tengah meningkat menjadi 3,77 persen, dan nasional mencapai puncaknya pada 7,07 persen. Kenaikan ini mencerminkan dampak langsung dari pembatasan sosial dan ekonomi yang diberlakukan untuk mengendalikan penyebaran virus, yang menyebabkan banyak bisnis tutup dan hilangnya pekerjaan. Tahun 2021 menunjukkan penurunan TPT di Sulawesi Tengah menjadi 3,75 persen dan secara nasional menjadi 6,26 persen, sementara di



Kabupaten Banggai Kepulauan, TPT justru meningkat menjadi 2,95 persen. Meskipun ada pemulihan ekonomi, beberapa daerah mungkin masih merasakan dampak lanjutan dari pandemi, terutama di sektor-sektor tertentu yang belum pulih sepenuhnya. Pada tahun 2022, TPT di Kabupaten Banggai Kepulauan menurun drastis menjadi 1,48 persen, mencerminkan pemulihan ekonomi yang lebih cepat di daerah ini. Sulawesi Tengah juga menunjukkan penurunan TPT menjadi 3,00 persen, dan secara nasional, TPT turun menjadi 5,86 persen. Penurunan ini menunjukkan adanya pemulihan yang lebih merata di berbagai wilayah dan sektor ekonomi.

Pada tahun 2023, TPT di Kabupaten Banggai Kepulauan sedikit meningkat menjadi 1,56 persen, tetapi masih lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, menunjukkan stabilisasi di pasar tenaga kerja. Di Sulawesi Tengah, TPT sedikit menurun menjadi 2,95 persen, dan nasional turun menjadi 5,32 persen. Data ini menunjukkan bahwa meskipun ada sedikit fluktuasi, tren umum adalah penurunan tingkat pengangguran setelah puncak pandemi. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan bahwa Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki tingkat pengangguran yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata provinsi dan nasional sepanjang periode 2019-2023. Fluktuasi yang terlihat terutama disebabkan oleh dampak pandemi dan pemulihan ekonomi berikutnya. Upaya yang dilakukan untuk pemulihan ekonomi pasca-pandemi di berbagai tingkatan tampaknya berhasil menurunkan tingkat pengangguran secara signifikan pada tahun 2022 dan 2023, meskipun tantangan masih ada untuk mencapai stabilisasi jangka panjang.



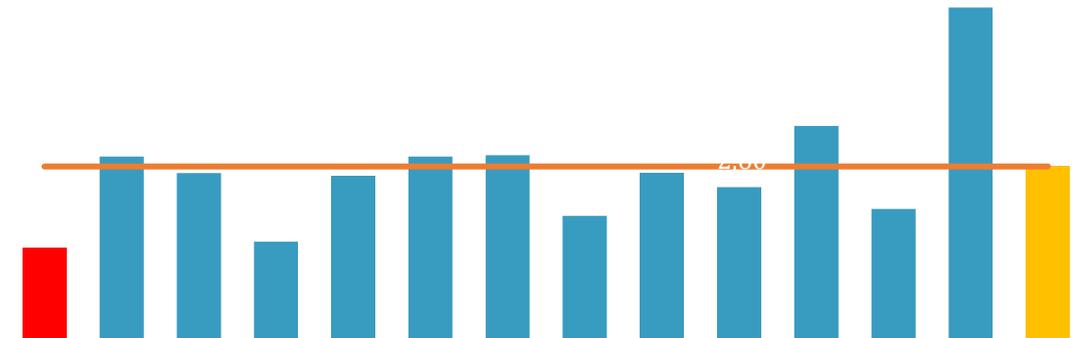
Sumber: BPS Kab. Bangkep, 2024 (diolah)

Gambar 2.33
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023

Selanjutnya, kondisi TPT Kabupaten Banggai Kepulauan dibandingkan dengan kondisi capaian Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah untuk melihat sejauh



mana kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam menangani masalah pengangguran. Berdasarkan data TPT Kabupaten Banggai Kepulauan sedikit meningkat di Tahun 2023 menjadi sebesar 1,56. TPT tertinggi yakni Kota Palu mencapai 5,65 persen, kemudian Kabupaten Banggai Laut mencapai 3,64 persen. Sedangkan, TPT terendah adalah Kabupaten Poso sebesar 1,67 persen, Kabupaten Banggai Kepulauan 1,56 persen dan Kabupaten Parigi Moutong sebesar 2,11 persen. Kabupaten Banggai Kepulauan adalah yang paling terendah di Provinsi Sulawesi Tengah. Data capaian TPT Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat pada Gambar 2.35 sebagai berikut ini.

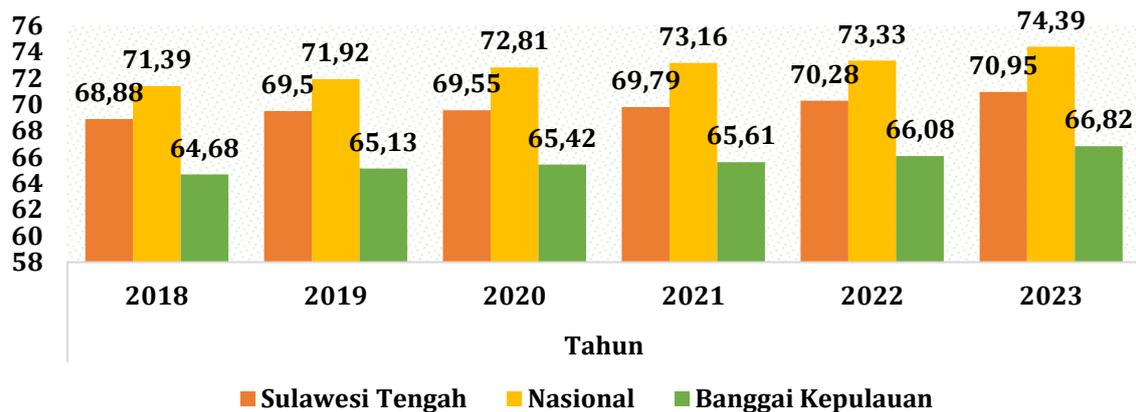


Sumber: BPS Tahun 2024 (data diolah)

Gambar 2.34
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

2.2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia atau *Human Development Index* (HDI) merupakan indeks pembangunan manusia yang dipergunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia, dalam hal ini berarti kualitas hidup masyarakat/penduduk yang disajikan sebagai salah satu ukuran kinerja di masing-masing daerah. Ukuran pencapaian keberhasilan suatu daerah dilihat melalui 3 dimensi dasar pembangunan yaitu (1) lamanya hidup, (2) pengetahuan/tingkat pendidikan dan (3) Stándar hidup layak. Indikator yang mewakili ketiga dimensi tersebut yaitu Angka Harapan Hidup (AHH) untuk mengukur peluang hidup, Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata lama sekolah (RLS) untuk mengukur status tingkat pendidikan, serta pengeluaran riil per kapita disesuaikan untuk mengukur kualitas pembangunan manusia dari dimensi pemenuhan stándar hidup layak.



Sumber: BPS Kabupaten Bangkep, 2024 (diolah)

Gambar 2.35

Perkembangan IPM Banggai Kepulauan, Sulteng dan Nasional Tahun 2018-2023

Berdasarkan data capaian pembangunan, IPM Banggai Kepulauan mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga 2023, yaitu dari 64,68 menjadi 66,82. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan pembangunan manusia di kabupaten Banggai Kepulauan. Namun, IPM Banggai Kepulauan masih berada di bawah rata-rata IPM Sulawesi Tengah dan Nasional, yang masing-masing mencapai 70,95 dan 74,39 pada tahun 2023. Ini berarti bahwa masih ada ruang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Banggai Kepulauan, terutama pada dimensi pengetahuan dan standar hidup layak.

IPM Sulawesi Tengah juga mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga 2023, yaitu dari 68,88 menjadi 70,95. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan manusia yang positif di provinsi tersebut. Namun, IPM Sulawesi Tengah masih berada di bawah rata-rata IPM Nasional, yang mencapai 74,39 pada tahun 2023. Ini berarti bahwa masih ada tantangan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Sulawesi Tengah, terutama pada dimensi umur panjang dan sehat dan standar hidup layak.

IPM Nasional terus meningkat dari tahun 2018 hingga 2023, yaitu dari 71,39 menjadi 74,39. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan pembangunan manusia yang signifikan di tingkat nasional. IPM Nasional telah mencapai kategori tinggi, yang menunjukkan bahwa Indonesia telah mencapai standar hidup yang layak bagi penduduknya. Namun, IPM Nasional masih memiliki potensi untuk meningkat lebih lanjut, terutama pada dimensi umur panjang dan sehat dan pengetahuan.

Selanjutnya untuk perbandingan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan tahun 2023 menunjukkan Kota palu dengan IPM tertinggi yakni sebesar 82,52 masuk kategori sangat tinggi. Kabupaten Banggai Kepulauan berada pada urutan keduabelas (terendah kedua). Kabupaten dengan IPM terendah adalah Kabupaten Tojo Una-una dan Kabupaten Banggai Kepulauan yang disajikan pada Tabel 2.35 sebagai berikut ini.



Tabel 2.35
IPM Kabupaten/Kota, Sulawesi Tengah,
Dan Nasional Tahun 2019-2023

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Banggai Kepulauan</i>	<i>65,13</i>	<i>65,42</i>	<i>65,61</i>	<i>66,08</i>	<i>66,82</i>
Banggai	70,36	70,52	70,6	71,08	71,7
Morowali	72,02	72,21	72,29	72,55	73,02
Poso	71,4	71,28	71,45	71,93	72,48
Donggala	65,49	65,56	65,72	66,25	66,95
Toli-Toli	65,42	65,69	66,3	66,76	67,66
Buol	67,69	67,82	68,25	68,72	69,57
Parigi Moutong	65,47	65,44	65,82	66,26	67,11
Tojo Una-Una	64,52	64,59	64,74	65,54	66,39
Sigi	68,16	68,12	68,49	69,05	69,93
Banggai Laut	65,27	65,43	65,65	66,22	66,93
Morowali Utara	68,45	68,36	68,48	68,97	69,73
Kota Palu	81,5	81,47	81,7	82,02	82,52
Sulawesi Tengah	69,5	69,55	69,79	70,28	74,39
Nasional	71,92	71,94	72,29	72,91	66,82

Sumber: Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2024 (data diolah)

2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

Sub-bab ini menggambarkan kondisi kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Banggai Kepulauan dari aspek sosial budaya. Adapun indikator yang dijelaskan dalam bagian ini diantaranya Indeks keluarga sehat, indeks Pembangunan gender, indeks pemberdayaan gender Indeks ketimpangan gender dan beberapa indikator lainnya.

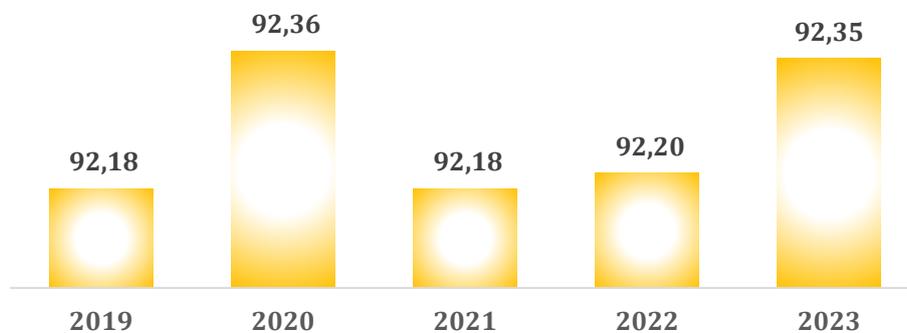
2.2.2.1 Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender adalah ukuran yang menggambarkan tingkat kesetaraan gender dalam hal kesehatan, pendidikan, dan penghasilan. IPG berkisar antara 0 hingga 100, dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan kesetaraan gender yang lebih baik. Data terkait dapat dilihat pada gambar berikut ini. Data Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Banggai Kepulauan dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan stabilitas yang relatif tinggi dengan sedikit fluktuasi. IPG adalah indikator yang digunakan untuk mengukur keseimbangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek, seperti pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Pada tahun 2019, IPG Kabupaten Banggai Kepulauan tercatat sebesar 92,18. Angka ini sedikit meningkat menjadi 92,36 pada tahun 2020, menunjukkan adanya perbaikan dalam kesetaraan gender. Namun, pada tahun 2021, IPG kembali ke angka 92,18, yang menunjukkan tidak ada perubahan signifikan dibandingkan dengan tahun 2019. Pada tahun 2022, IPG sedikit naik menjadi 92,20, dan pada tahun 2023, angka ini meningkat kembali menjadi 92,35.

Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa IPG di Kabupaten Banggai Kepulauan cukup stabil dan berada di atas angka 92 sepanjang periode tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Banggai Kepulauan telah mencapai tingkat keseimbangan yang relatif baik antara laki-laki dan perempuan dalam hal



pembangunan. Meski ada sedikit penurunan pada tahun 2021, tren umum tetap positif dengan adanya peningkatan kembali pada tahun-tahun berikutnya. Stabilitas IPG ini mencerminkan bahwa kebijakan dan program yang dijalankan di Kabupaten Banggai Kepulauan untuk mendukung kesetaraan gender cenderung efektif dan berkelanjutan. Meski begitu, untuk meningkatkan IPG lebih lanjut, perlu ada fokus pada area-area di mana masih terdapat kesenjangan gender, serta penerapan kebijakan yang lebih proaktif untuk memastikan bahwa pencapaian dalam pendidikan, kesehatan, dan ekonomi dirasakan secara merata oleh semua gender. Secara keseluruhan, meskipun ada fluktuasi kecil, tren IPG menunjukkan adanya komitmen dan kemajuan dalam mencapai kesetaraan gender di Kabupaten Banggai Kepulauan. Upaya yang berkelanjutan dan inovatif masih diperlukan untuk memastikan bahwa kesetaraan gender terus membaik dan menjadi bagian integral dari pembangunan di wilayah ini.



Sumber: BPS Kabupaten Bangkep, 2024 (diolah)

Gambar 2.36
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2019-2023

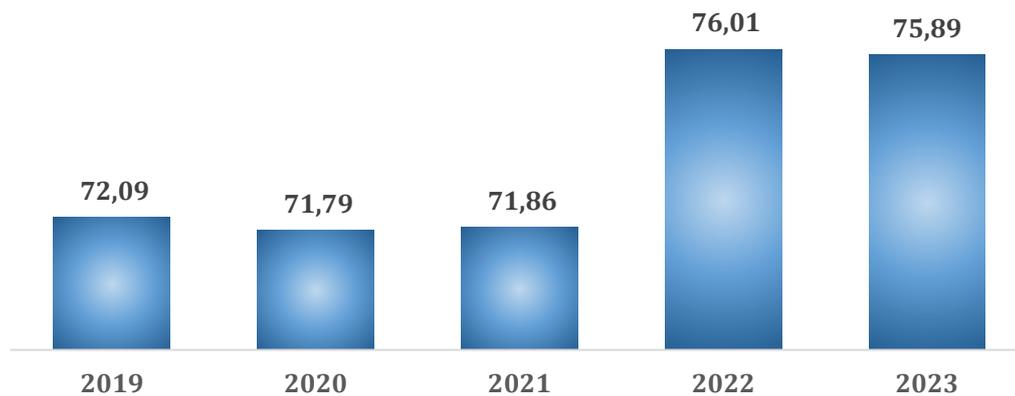
2.2.2.2 Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender merupakan sebuah indikator yang mengukur tingkat pemberdayaan gender yang mencakup berbagai aspek, seperti kesehatan, pendidikan, kepartisipasian ekonomi, dan lainnya, yang memperlihatkan sejauh mana perempuan dapat berpartisipasi dan berkontribusi dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Data Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) di Kabupaten Banggai Kepulauan dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan tren yang umumnya positif dengan beberapa fluktuasi kecil. IPG mengukur keterlibatan perempuan dalam kehidupan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan, serta kemampuan mereka untuk mengakses sumber daya dan peluang. Pada tahun 2019, IPG tercatat sebesar 72,09. Pada tahun 2020, indeks ini sedikit menurun menjadi 71,79, menunjukkan adanya sedikit penurunan dalam pemberdayaan perempuan pada tahun tersebut. Namun, pada tahun 2021, IPG meningkat sedikit menjadi 71,86, menunjukkan perbaikan kecil setelah penurunan pada tahun sebelumnya.

Tahun 2022 menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam IPG, naik menjadi 76,01. Ini menandakan adanya kemajuan besar dalam pemberdayaan



perempuan, mungkin sebagai hasil dari berbagai program dan kebijakan yang lebih fokus pada peningkatan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor. Namun, pada tahun 2023, IPG sedikit menurun menjadi 75,89, meskipun masih tetap lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, meskipun terdapat beberapa fluktuasi, tren umum IPG di Kabupaten Banggai Kepulauan adalah positif. Kenaikan yang signifikan pada tahun 2022 menunjukkan adanya upaya yang berhasil dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan. Penurunan kecil pada tahun 2023 tidak terlalu mengkhawatirkan mengingat bahwa indeks tetap berada pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.



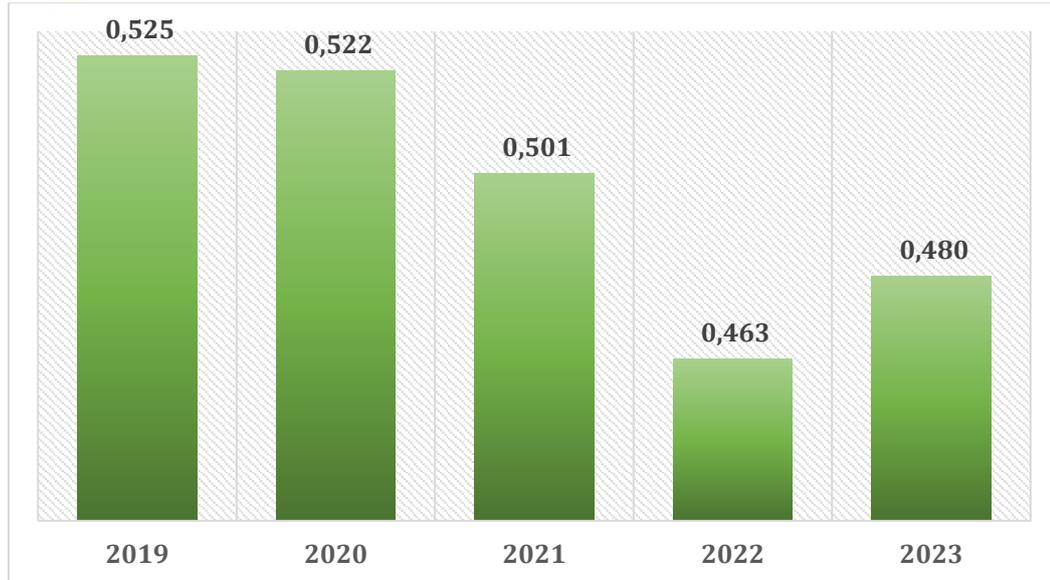
Sumber: BPS Kab. Bangkep, 2024 (diolah)

Gambar 2.37
Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2019-2023

Stabilitas dan peningkatan IPG menunjukkan bahwa Kabupaten Banggai Kepulauan telah melakukan upaya yang baik dalam memberdayakan perempuan dan meningkatkan peran serta mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, untuk mempertahankan dan terus meningkatkan IPG, perlu ada fokus yang berkelanjutan pada kebijakan dan program yang mendukung kesetaraan gender, akses terhadap pendidikan, kesempatan kerja yang setara, serta keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi.

2.2.2.3 Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur ketidaksetaraan gender dalam tiga dimensi penting pembangunan manusia: kesehatan reproduktif, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. IKG memberikan gambaran tentang sejauh mana perempuan mengalami kerugian dalam tiga dimensi tersebut dibandingkan dengan laki-laki. Semakin tinggi nilai IKG, semakin besar ketimpangan gender yang ada.



Sumber: BPS Kabupaten Bangkep, 2024 (diolah)

Gambar 2.38
Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2019-2023

Data Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Banggai Kepulauan dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan tren penurunan yang signifikan dalam ketidaksetaraan gender, meskipun ada sedikit fluktuasi. IKG mengukur ketidaksetaraan gender dalam tiga dimensi penting: kesehatan reproduktif, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. Nilai yang lebih rendah menunjukkan ketimpangan yang lebih sedikit. Pada tahun 2019, IKG tercatat sebesar 0,525, menunjukkan tingkat ketidaksetaraan gender yang cukup tinggi. Pada tahun 2020, indeks ini sedikit menurun menjadi 0,522, mencerminkan sedikit perbaikan dalam keseimbangan gender. Penurunan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2021, ketika IKG turun menjadi 0,501. Ini menunjukkan bahwa upaya untuk mengurangi ketidaksetaraan gender mulai menunjukkan hasil yang lebih nyata. Pada tahun 2022, IKG kembali menurun cukup tajam menjadi 0,463. Penurunan ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam keseimbangan gender, yang mungkin mencerminkan kebijakan dan program yang lebih efektif dalam mendukung kesetaraan gender di berbagai dimensi. Namun, pada tahun 2023, IKG sedikit meningkat menjadi 0,480, meskipun masih lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Fluktuasi kecil ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perubahan dalam kondisi ekonomi, sosial, atau kebijakan yang mempengaruhi partisipasi dan pemberdayaan perempuan.

Secara keseluruhan, tren penurunan IKG dari tahun 2019 hingga 2022 menunjukkan bahwa Kabupaten Banggai Kepulauan telah membuat kemajuan signifikan dalam mengurangi ketidaksetaraan gender. Meskipun ada sedikit peningkatan pada tahun 2023, IKG tetap berada pada tingkat yang lebih baik



dibandingkan tahun 2019 dan 2020, mencerminkan kemajuan yang berkelanjutan. Kemajuan ini dapat dikaitkan dengan berbagai inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan ke pendidikan, layanan kesehatan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi. Namun, untuk terus mengurangi ketidaksetaraan gender, diperlukan upaya yang berkelanjutan dan konsisten, termasuk kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengatasi hambatan struktural yang mereka hadapi.

2.3 ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

Daya saing ekonomi daerah mengacu pada kemampuan suatu daerah untuk menarik dan mempertahankan investasi, bakat, dan bisnis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Penjelasan gambaran daya saing ekonomi daerah ini setidaknya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti PDRB, PDRB Per Kapita, Indeks Ekonomi Inklusif, Indeks Ekonomi Hijau, Rasio Kewirausahaan, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

2.3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Secara umum, nilai PDRB menurut lapangan usaha di Kabupaten Banggai Kepulauan menggambarkan struktur perekonomian daerah tersebut dalam kurun waktu lima tahun. Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama di sektor pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.36
PDRB Kabupaten Banggai Kepulauan Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha (Milyar) Tahun 2019-2023

Lapangan Usaha		Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
-1	-2	-4	-5	-6	-7	-7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.843,33	1.836,92	1.958,16	2.190,24	2.362,05
B	Pertambangan dan Penggalian	38,56	32,48	34,23	38,47	44,01
C	Industri Pengolahan	101,01	104,86	110,75	119,79	122,93
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,54	0,61	0,64	0,71	0,75
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,34	4,51	4,82	5,16	5,41
F	Konstruksi	117,84	102,98	107,44	115,57	124,85
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	755,05	727,22	812,59	909,40	997,05
H	Transportasi dan Pergudangan	123,05	101,27	107,64	123,88	132,74



Lapangan Usaha		Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
-1	-2	-4	-5	-6	-7	-7
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	16,65	15,86	18,13	19,64	21,43
J	Informasi dan Komunikasi	119,66	128,42	140,48	149,28	159,50
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	90,75	103,06	122,47	141,21	144,09
L	Real Estate	66,95	68,49	70,71	76,54	86,81
M,N	Jasa Perusahaan	3,71	3,82	3,94	4,33	4,71
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	213,98	218,31	231,03	243,92	256,34
P	Jasa Pendidikan	208,44	212,78	216,68	227,71	241,38
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	103,93	113,05	126,41	135,92	149,11
R,S,T,U	Jasa lainnya	57,87	58,92	62,70	67,03	72,37
PDRB		3.865,67	3.833,55	4.128,83	4.568,79	4.925,53
PDRB NON MIGAS		3.865,67	3.833,55	4.128,83	4.568,79	4.925,53

Sumber: BPS Kab. Bangkep, 2024 (diolah)

Data PDRB Kabupaten Banggai Kepulauan Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami peningkatan signifikan dari Rp1.843,33 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp2.362,05 miliar pada tahun 2023. Sektor Pertambangan dan Penggalan juga mencatat pertumbuhan, dari Rp38,56 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp44,01 miliar pada tahun 2023. Industri Pengolahan meningkat dari Rp101,01 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp122,93 miliar pada tahun 2023. Sektor Pengadaan Listrik dan Gas juga mengalami kenaikan dari Rp0,54 miliar menjadi Rp0,75 miliar dalam periode yang sama. Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang tumbuh dari Rp4,34 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp5,41 miliar pada tahun 2023.

Sektor Konstruksi menunjukkan fluktuasi namun tetap tumbuh dari Rp117,84 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp124,85 miliar pada tahun 2023. Perdagangan Besar dan Eceran, serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor meningkat dari Rp755,05 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp997,05 miliar pada tahun 2023. Transportasi dan Pergudangan juga mengalami peningkatan dari Rp123,05 miliar menjadi Rp132,74 miliar dalam lima tahun. Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh dari Rp16,65 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp21,43 miliar pada tahun 2023, sementara Informasi dan Komunikasi meningkat dari Rp119,66 miliar menjadi Rp159,50 miliar. Jasa Keuangan dan Asuransi mengalami pertumbuhan yang cukup besar dari Rp90,75 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp144,09 miliar pada tahun 2023. Sektor Real Estate meningkat dari Rp66,95 miliar menjadi Rp86,81 miliar, sedangkan Jasa Perusahaan tumbuh dari Rp3,71 miliar menjadi Rp4,71 miliar. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib meningkat dari



Rp213,98 miliar menjadi Rp256,34 miliar. Jasa Pendidikan tumbuh dari Rp208,44 miliar menjadi Rp241,38 miliar, dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial meningkat dari Rp103,93 miliar menjadi Rp149,11 miliar. Sektor Jasa lainnya juga menunjukkan pertumbuhan dari Rp57,87 miliar menjadi Rp72,37 miliar dalam lima tahun.

Secara keseluruhan, PDRB Kabupaten Banggai Kepulauan tumbuh dari Rp3.865,67 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp4.925,53 miliar pada tahun 2023. Pertumbuhan ini menunjukkan adanya peningkatan yang konsisten di berbagai sektor ekonomi, mencerminkan perkembangan ekonomi yang positif di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Selanjutnya untuk nilai PDRB ADH Konstan 2010 menunjukkan Data PDRB Kabupaten Banggai Kepulauan Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor dengan nilai yang sudah disesuaikan dengan inflasi. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami peningkatan dari Rp1.301,25 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp1.424,87 miliar pada tahun 2023. Sektor Pertambangan dan Penggalian juga mencatat pertumbuhan dari Rp24,23 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp23,36 miliar pada tahun 2023, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2020.

Industri Pengolahan meningkat dari Rp70,61 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp77,36 miliar pada tahun 2023. Sektor Pengadaan Listrik dan Gas juga mengalami kenaikan dari Rp0,47 miliar menjadi Rp0,63 miliar dalam periode yang sama. Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang tumbuh dari Rp2,81 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp3,20 miliar pada tahun 2023.

Sektor Konstruksi mengalami fluktuasi namun tetap tumbuh dari Rp64,33 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp59,19 miliar pada tahun 2023. Perdagangan Besar dan Eceran, serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor meningkat dari Rp507,04 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp597,02 miliar pada tahun 2023. Transportasi dan Pergudangan juga mengalami peningkatan dari Rp85,06 miliar menjadi Rp76,12 miliar dalam lima tahun. Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh dari Rp12,90 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp15,14 miliar pada tahun 2023, sementara Informasi dan Komunikasi meningkat dari Rp98,82 miliar menjadi Rp131,60 miliar. Jasa Keuangan dan Asuransi mengalami pertumbuhan yang cukup besar dari Rp56,21 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp75,52 miliar pada tahun 2023. Sektor Real Estate meningkat dari Rp51,15 miliar menjadi Rp58,21 miliar, sedangkan Jasa Perusahaan tumbuh dari Rp2,64 miliar menjadi Rp3,02 miliar. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib meningkat dari Rp141,26 miliar menjadi Rp153,67 miliar. Jasa Pendidikan tumbuh dari Rp142,24 miliar menjadi Rp156,52 miliar, dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial meningkat dari Rp67,42 miliar menjadi Rp83,20 miliar. Sektor Jasa lainnya juga menunjukkan pertumbuhan dari Rp37,65 miliar menjadi Rp44,68 miliar dalam lima tahun.

Secara keseluruhan, PDRB Kabupaten Banggai Kepulauan tumbuh dari Rp2.563,11 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp2.870,36 miliar pada tahun 2023.



Pertumbuhan ini menunjukkan adanya peningkatan yang konsisten di berbagai sektor ekonomi, mencerminkan perkembangan ekonomi yang positif di Kabupaten Banggai Kepulauan setelah disesuaikan dengan inflasi dan perubahan harga. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.37**PDRB Kabupaten Banggai Kepulauan Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha (Milyar) Tahun 2019-2023**

Lapangan Usaha		Tahun (Rp Miliar)				
		2019	2020	2021	2022	2023
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.301,25	1.277,96	1.321,56	1.382,24	1.424,87
B	Pertambangan dan Penggalian	24,23	20,06	20,75	21,45	23,36
C	Industri Pengolahan	70,61	71,00	72,60	75,91	77,36
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,47	0,53	0,56	0,61	0,63
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,81	2,89	3,02	3,13	3,20
F	Konstruksi	64,33	54,06	55,74	57,59	59,19
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	507,04	479,28	525,48	563,68	597,02
H	Transportasi dan Pergudangan	85,06	65,17	68,45	73,27	76,12
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12,90	11,76	13,21	14,09	15,14
J	Informasi dan Komunikasi	98,82	107,60	116,61	123,21	131,60
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	56,21	63,77	72,78	75,29	75,52
L	Real Estate	51,15	51,34	52,59	55,44	58,21
M,N	Jasa Perusahaan	2,64	2,67	2,73	2,89	3,02
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	141,26	141,65	147,89	150,79	153,67
P	Jasa Pendidikan	142,24	143,33	145,12	149,62	156,52
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	67,42	72,07	75,83	78,73	83,20
R,S,T,U	Jasa lainnya	37,65	38,15	40,33	42,41	44,68
PDRB		2.563,11	2.666,09	2.603,27	2.735,24	2.870,36
PDRB NON MIGAS		2.563,11	2.666,09	2.603,27	2.735,24	2.870,36

Sumber: BPS Kab. Bangkep, 2024 (diolah)

Data distribusi PDRB Kabupaten Banggai Kepulauan menurut lapangan usaha



dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan persentase kontribusi setiap sektor terhadap total PDRB. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan consistently menjadi kontributor terbesar dengan kontribusi yang sedikit meningkat dari 47,68 persen pada tahun 2019 menjadi 47,96 persen pada tahun 2023. Sektor Pertambangan dan Penggalian sedikit mengalami fluktuasi namun menunjukkan peningkatan dari 1,00 persen pada tahun 2019 menjadi 0,89 persen pada tahun 2023.

Industri Pengolahan mengalami penurunan kontribusi dari 2,61 persen pada tahun 2019 menjadi 2,50 persen pada tahun 2023. Sektor Pengadaan Listrik dan Gas tetap stabil dengan kontribusi sekitar 0,02 persen. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang juga menunjukkan kontribusi yang stabil sekitar 0,11 persen selama periode tersebut. Sektor Konstruksi menunjukkan penurunan kontribusi dari 3,05 persen pada tahun 2019 menjadi 2,53 persen pada tahun 2023. Perdagangan Besar dan Eceran, serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mengalami peningkatan kontribusi dari 19,53 persen pada tahun 2019 menjadi 20,24 persen pada tahun 2023. Sektor Transportasi dan Pergudangan juga sedikit mengalami penurunan kontribusi dari 3,18 persen menjadi 2,69 persen. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menunjukkan stabilitas dengan kontribusi sekitar 0,44 persen. Sektor Informasi dan Komunikasi mengalami peningkatan dari 3,10 persen pada tahun 2019 menjadi 3,24 persen pada tahun 2023. Jasa Keuangan dan Asuransi juga mengalami peningkatan dari 2,35 persen menjadi 2,93 persen dalam periode tersebut.

Sektor Real Estate menunjukkan sedikit fluktuasi namun secara keseluruhan meningkat dari 1,73 persen pada tahun 2019 menjadi 1,76 persen pada tahun 2023. Jasa Perusahaan menunjukkan stabilitas dengan kontribusi sekitar 0,10 persen. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mengalami sedikit penurunan dari 5,54 persen menjadi 5,20 persen. Jasa Pendidikan mengalami penurunan kontribusi dari 5,39 persen pada tahun 2019 menjadi 4,90 persen pada tahun 2023, sementara Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial menunjukkan peningkatan dari 2,69 persen menjadi 3,03 persen. Sektor Jasa lainnya menunjukkan stabilitas dengan kontribusi sekitar 1,47 persen.

Secara keseluruhan, distribusi PDRB Kabupaten Banggai Kepulauan tetap seimbang dengan sektor-sektor utama yang berkontribusi signifikan terhadap ekonomi daerah, mencerminkan stabilitas dan pertumbuhan yang konsisten di berbagai sektor selama lima tahun terakhir.



Tabel 2.38
Distribusi PDRB Kabupaten Banggai Kepulauan
Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2019-2023

Lapangan Usaha		Tahun (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	47,68	47,92	47,43	47,94	47,96
B	Pertambangan dan Penggalian	1,00	0,85	0,83	0,84	0,89
C	Industri Pengolahan	2,61	2,74	2,68	2,62	2,50
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,12	0,12	0,11	0,11
F	Konstruksi	3,05	2,69	2,60	2,53	2,53
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	19,53	18,97	19,68	19,90	20,24
H	Transportasi dan Pergudangan	3,18	2,64	2,61	2,71	2,69
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,43	0,41	0,44	0,43	0,44
J	Informasi dan Komunikasi	3,10	3,35	3,40	3,27	3,24
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,35	2,69	2,97	3,09	2,93
L	Real Estate	1,73	1,79	1,71	1,68	1,76
M,N	Jasa Perusahaan	0,10	0,10	0,10	0,09	0,10
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,54	5,69	5,60	5,34	5,20
P	Jasa Pendidikan	5,39	5,55	5,25	4,98	4,90
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,69	2,95	3,06	2,98	3,03
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,50	1,54	1,52	1,47	1,47
PDRB		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber: BPS Kab. Bangkep, 2024 (diolah)

2.3.1.2 Laju Inflasi

Secara sederhana inflasi diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi. Inflasi di Kabupaten Banggai Kepulauan diukur berdasarkan inflasi yang dikeluarkan Kota Luwuk yang dihitung menurut kelompok pengeluaran, ditahun-tahun sebelumnya inflasi diukur berdasarkan inflasi yang dikeluarkan oleh Kota Palu. Laju Inflasi Kota Luwuk terdapat pada tabel berikut.



Tabel 2.39
Tingkat Inflasi Kota Luwuk Menurut Kelompok Pengeluaran
Tahun 2020-2022

No	Kelompok/Sub Kelompok	Tingkat Inflasi		
		2020	2021	2022
Indeks Umum/General Index		-0,26	0,84	0,82
1	Makanan, Minuman dan Tembakau	-0,42	1,78	0,66
2	Pakaian dan Alas Kaki	0	-0,25	-0,12
3	Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0	0,54	0
4	Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0	0,3	0,02
5	Kesehatan	0	0,24	-0,03
6	Transportasi	-0,81	-1,8	0,12
7	Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	0	-0,71	-0,02
8	Rekreasi, Olahraga dan Budaya	0	1,14	0,05
9	Pendidikan	0	0,03	0
10	Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0	0,32	0,01
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	-0,36	-0,01	0,12

Sumber: BPS Kab. Bangkep, 2023 (diolah)

2.3.1.3 Pendapatan Perkapita

PDRB per kapita merupakan gambaran pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk sebagai keikutsertaannya dalam proses produksi, besaran PDRB perkapita diperoleh dari output yang dihasilkan pada tahun tertentu dibagi jumlah penduduk pada tahun tersebut. Semakin besar angka PDRB per kapita, semakin sejahtera penduduk wilayah tersebut. Variabel lain juga dapat dipakai untuk mengetahui tingkat kesejahteraan umum masyarakat adalah perkembangan nilai pengeluaran perkapita disesuaikan yang dipakai dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia.

Tabel 2.40
PDRB Perkapita Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023 (juta Rp)

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai PDRB ADH Berlaku (Rp Milyar)	3.865,67	3.833,55	4.128,83	4.568,79	4.925,53
Nilai PDRB ADH Konstan 2010 (Rp Milyar)	2.666,09	2.603,27	2.735,24	2.870,36	2.983,31
Jumlah Penduduk (Ribuan Jiwa)	118,4	120,14	121,68	123,58	123,42
PDRB Perkapita					



Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
ADH Berlaku (Rp Juta)	32,65	31,91	33,93	36,97	39,91
ADH Konstan 2010 (Rp Juta)	22,52	21,67	22,48	23,23	24,17

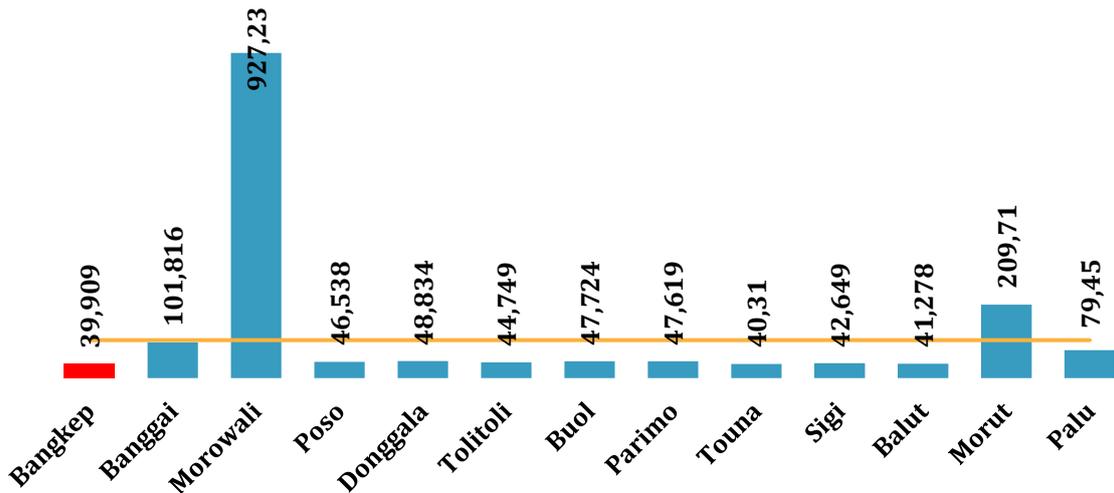
Sumber: BPS Kab. Bangkep, 2024 (diolah)

Data di atas menunjukkan nilai PDRB per kapita Kabupaten Banggai Kepulauan dari tahun 2019 hingga 2023. Data PDRB per kapita Kabupaten Banggai Kepulauan dari tahun 2019 hingga 2023 menggambarkan pertumbuhan ekonomi per penduduk berdasarkan harga berlaku dan harga konstan 2010. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADH Berlaku) meningkat dari Rp3.865,67 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp4.925,53 miliar pada tahun 2023. Sementara itu, nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 (ADH Konstan 2010) juga menunjukkan peningkatan dari Rp2.666,09 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp2.983,31 miliar pada tahun 2023.

Jumlah penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan meningkat secara bertahap dari 118,4 ribu jiwa pada tahun 2019 menjadi 123,42 ribu jiwa pada tahun 2023. Peningkatan jumlah penduduk ini disertai dengan peningkatan PDRB per kapita. PDRB per kapita berdasarkan ADH Berlaku mengalami peningkatan dari Rp32,65 juta pada tahun 2019 menjadi Rp39,91 juta pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan peningkatan kesejahteraan ekonomi penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan jika diukur dengan nilai nominal.

Sementara itu, PDRB per kapita berdasarkan ADH Konstan 2010 juga meningkat dari Rp22,52 juta pada tahun 2019 menjadi Rp24,17 juta pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi riil per penduduk yang telah disesuaikan dengan inflasi, menunjukkan peningkatan kesejahteraan ekonomi yang lebih akurat.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan jumlah penduduk, ekonomi Kabupaten Banggai Kepulauan tetap tumbuh, yang tercermin dalam peningkatan PDRB per kapita baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan 2010. Pertumbuhan ini mencerminkan perbaikan dalam produktivitas ekonomi dan kesejahteraan penduduk di Kabupaten Banggai Kepulauan selama periode tersebut.



Sumber: Sulawesi Tengah dalam Angka Tahun 2024 (data diolah)

Gambar 2.39
PDRB PerKapita Kabupaten/Kota
Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Berdasarkan data pada Gambar 2.40 di atas, sampai dengan tahun 2023 capaian PDRB tertinggi adalah Kabupaten Morowali dengan PDRB Per Kapita sebesar Rp927,23 juta, dan Kabupaten Morowali Utara berada pada posisi kedua sebesar Rp209,71 juta, serta tertinggi ketiga Kabupaten Banggai sebesar Rp101,816 juta. Sedangkan untuk Kabupaten dengan PDRB Perkapita terendah adalah Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Banggai Kepulauan serta Kabupaten Sigi. Kabupaten Banggai Kepulauan berada pada urutan ke-13 atau yang terendah di Provinsi Sulawesi Tengah.

2.3.1.4 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif

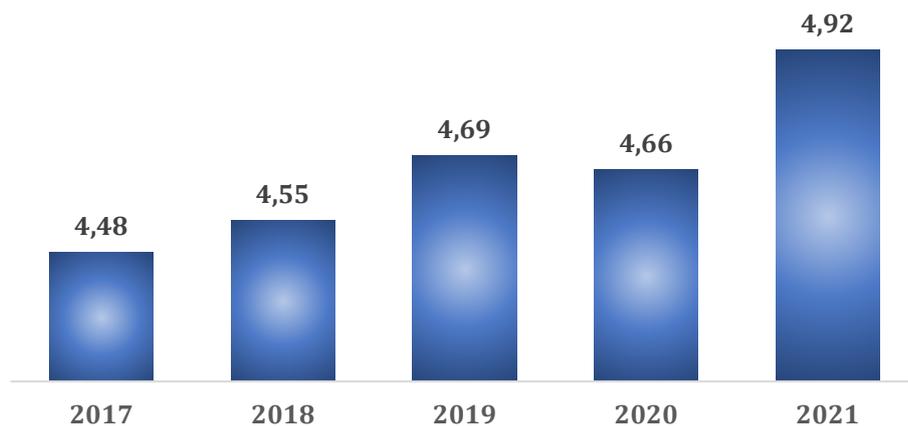
Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) adalah sebuah alat atau ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana pertumbuhan ekonomi suatu negara atau wilayah mampu menghasilkan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. IPEI tidak hanya mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memperhitungkan aspek-aspek inklusivitas, seperti distribusi pendapatan, kesetaraan kesempatan, dan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh semua anggota masyarakat, terutama kelompok yang rentan dan kurang beruntung.

Data Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) Kabupaten Banggai Kepulauan untuk periode 2017 hingga 2021 menunjukkan tren peningkatan yang stabil dalam inklusivitas ekonomi. Pada tahun 2017, IPEI Kabupaten Banggai Kepulauan tercatat sebesar 4,48. Angka ini meningkat menjadi 4,55 pada tahun 2018, menunjukkan adanya perbaikan dalam aspek-aspek inklusivitas ekonomi seperti distribusi pendapatan dan akses terhadap layanan dasar.



Pada tahun 2019, IPEI meningkat lagi menjadi 4,69, mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi semakin inklusif, dengan lebih banyak masyarakat yang merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi tersebut. Namun, pada tahun 2020, terdapat sedikit penurunan dalam IPEI menjadi 4,66. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh dampak ekonomi dari pandemi Covid-19 yang mengakibatkan gangguan pada berbagai sektor ekonomi dan mempengaruhi inklusivitas. Meskipun demikian, pada tahun 2021, IPEI kembali meningkat signifikan menjadi 4,92. Peningkatan ini mencerminkan upaya yang berhasil dalam memperbaiki inklusivitas ekonomi pasca pandemi, dengan fokus pada kebijakan dan program yang memastikan distribusi manfaat ekonomi yang lebih merata di seluruh lapisan masyarakat.

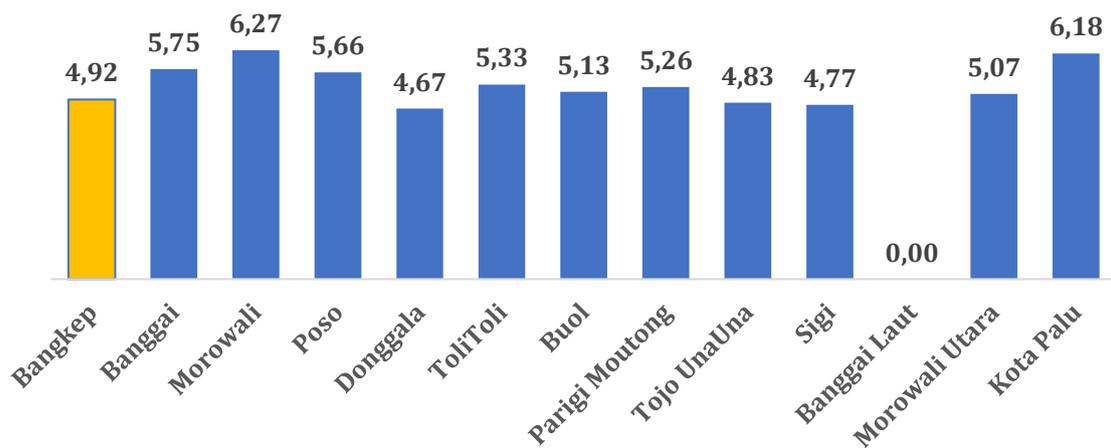
Secara keseluruhan, peningkatan IPEI dari 4,48 pada tahun 2017 menjadi 4,92 pada tahun 2021 menunjukkan bahwa Kabupaten Banggai Kepulauan berhasil membuat kemajuan signifikan dalam pembangunan ekonomi yang inklusif, memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, termasuk kelompok-kelompok yang rentan dan kurang beruntung.



Sumber: Bappenas, 2024 (diolah)

Gambar 2.40
Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2021

Selanjutnya, untuk posisi di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, IPEI Kabupaten Banggai Kepulauan berada pada urutan kesebelas atau terendah ketiga. Hanya lebih tinggi dari Kabupaten Donggala, Tojo Una-Una dan Kabupaten Sigi. Sedangkan yang tertinggi adalah Kabupaten Morowali dan Kota Palu serta Kabupaten Banggai. Data terkait secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: Bappenas, Tahun 2024 (data diolah)

Gambar 2.41
Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten/Kota
Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021

2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam era globalisasi dan revolusi industri 4.0, daya saing sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu faktor kunci yang menentukan keberhasilan pembangunan suatu daerah. Kabupaten Banggai Kepulauan menyadari bahwa untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka panjang 2025-2045, peningkatan kualitas dan daya saing SDM harus menjadi prioritas utama. Dengan memperkuat kapasitas dan kompetensi SDM, Kabupaten Banggai Kepulauan dapat menghadapi tantangan global, meningkatkan produktivitas, serta memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, strategi dan program pengembangan SDM akan difokuskan pada peningkatan akses pendidikan berkualitas, pelatihan keterampilan kerja, serta pengembangan inovasi dan teknologi untuk menciptakan tenaga kerja yang kompeten, kreatif, dan adaptif terhadap perubahan.

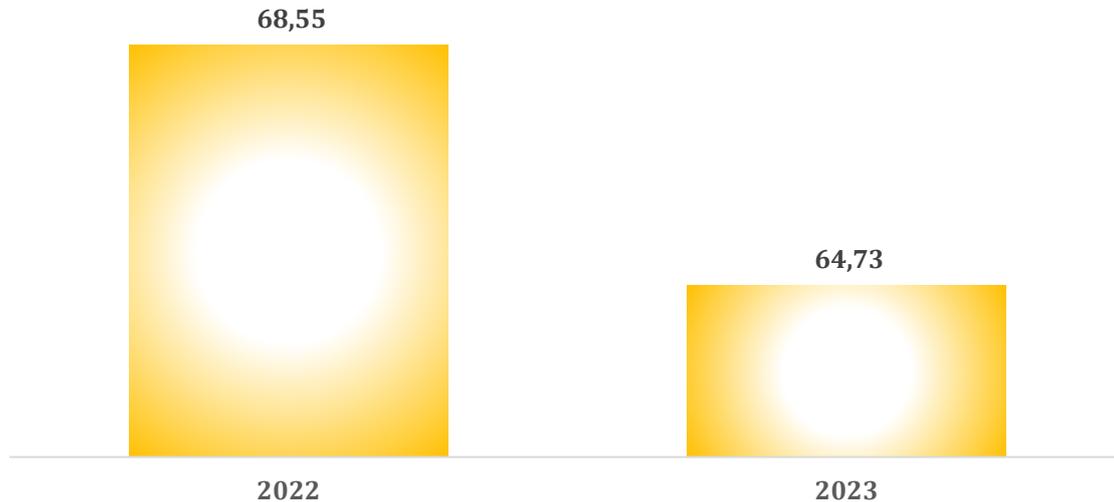
2.3.2.1 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat literasi masyarakat di suatu wilayah. Literasi, dalam konteks ini, tidak hanya merujuk pada kemampuan dasar membaca dan menulis, tetapi juga mencakup kemampuan untuk memahami, menggunakan, dan mengevaluasi informasi dalam berbagai bentuk dan konteks. IPLM bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kualitas pendidikan dan akses terhadap pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat.

Data Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Banggai Kepulauan untuk tahun 2022 dan 2023 menunjukkan adanya penurunan dalam tingkat literasi masyarakat. Pada tahun 2022, IPLM Kabupaten Banggai Kepulauan tercatat sebesar 68,55. Namun, pada tahun 2023, angka ini turun menjadi 64,73.



Penurunan ini dapat mengindikasikan berbagai tantangan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan literasi masyarakat. Beberapa faktor yang mungkin berkontribusi terhadap penurunan IPLM ini antara lain: berkurangnya akses terhadap pendidikan berkualitas, minimnya program-program literasi, atau tantangan-tantangan ekonomi dan sosial yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan literasi.



Sumber: Perpustakaan RI, 2024 (diolah)

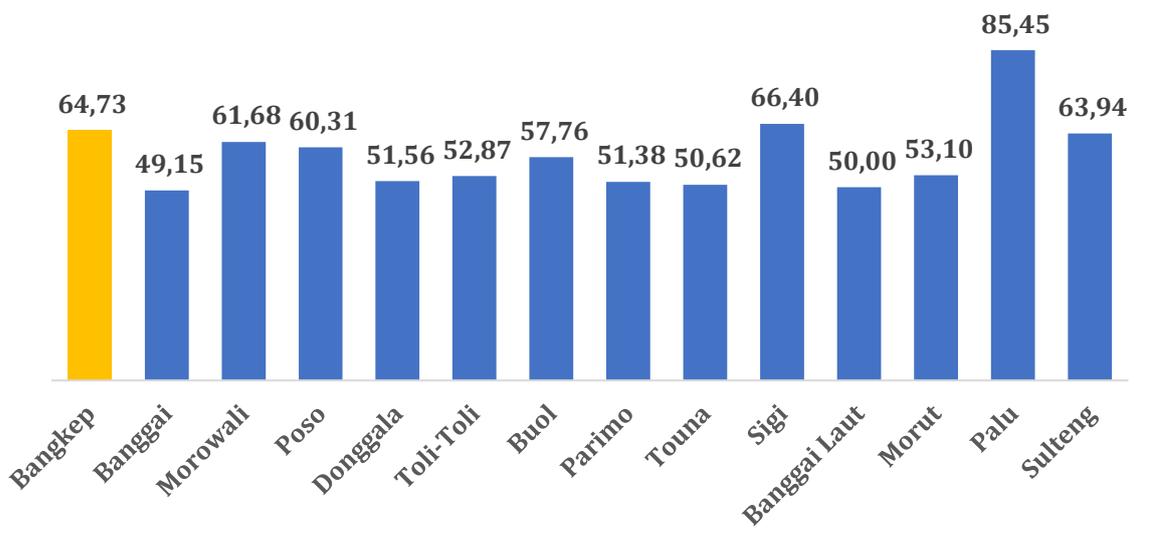
Gambar 2.42
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022-2023

Data Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 menunjukkan variasi yang signifikan antar kabupaten/kota. Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) mencatat IPLM sebesar 64,73, sedikit di atas rata-rata provinsi yang berada di angka 63,94. Kabupaten Sigi memiliki IPLM tertinggi kedua setelah Kota Palu dengan nilai 66,40, sementara Kota Palu memimpin dengan IPLM sebesar 85,45, menunjukkan capaian literasi masyarakat yang jauh lebih baik dibandingkan daerah lainnya di provinsi ini. Di sisi lain, beberapa kabupaten menunjukkan nilai IPLM yang lebih rendah, seperti Kabupaten Banggai dengan 49,15 dan Kabupaten Banggai Laut dengan 50,00, yang mengindikasikan tantangan signifikan dalam upaya meningkatkan literasi masyarakat di daerah-daerah tersebut. Kabupaten Donggala (51,56), Parigi Moutong (51,38), dan Tojo Una-Una (50,62) juga mencatat nilai IPLM di bawah rata-rata provinsi, menunjukkan perlunya intervensi yang lebih kuat untuk meningkatkan literasi di wilayah-wilayah ini.

Kabupaten Morowali dan Poso mencatat IPLM masing-masing sebesar 61,68 dan 60,31, menunjukkan pencapaian literasi yang sedikit di bawah Kabupaten Banggai Kepulauan tetapi masih relatif baik dibandingkan dengan beberapa daerah lain di Sulawesi Tengah. Kabupaten Toli-Toli, Buol, dan Morowali Utara juga



menunjukkan variasi nilai IPLM dengan masing-masing sebesar 52,87, 57,76, dan 53,10.

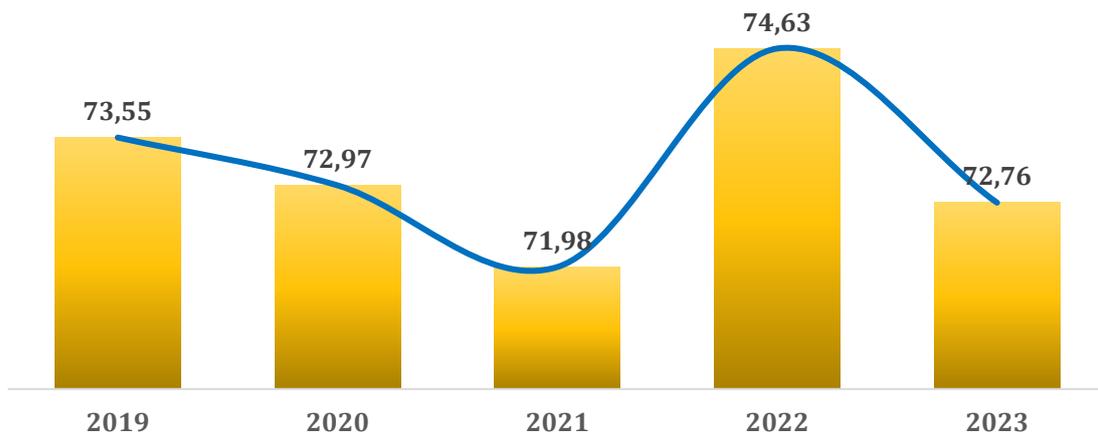


Sumber: Perpustakaan RI, 2024 (diolah)

Gambar 2.43
Indeks Pembangunan Literasi Kabupaten/Kota
Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

2.3.2.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tenaga kerja (*man power*) adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Untuk mengetahui banyaknya jumlah angkatan kerja (labor force) yang dapat diserap oleh pasar kerja, biasanya dipakai suatu ukuran yang dinamakan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) yaitu rasio antara jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk usia kerja.



Sumber: BPS Kab. Bangkep, 2024 (diolah)

Gambar 2.44
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2019-2023

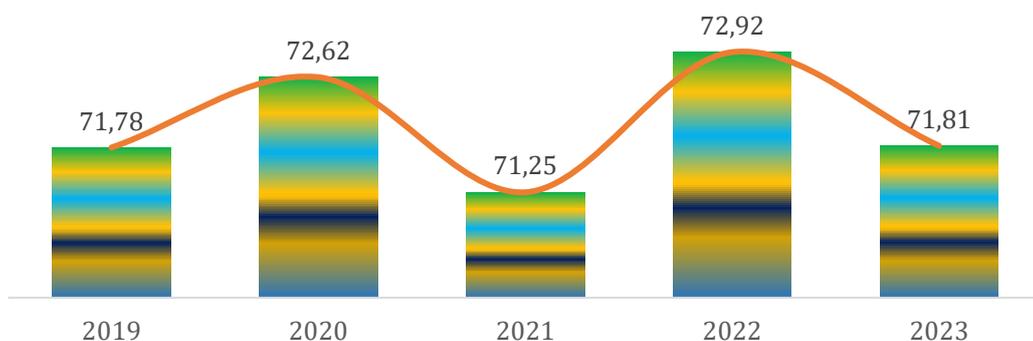


Data menunjukkan bahwa TPAK di Kabupaten Banggai Kepulauan meningkat secara tidak konsisten dari tahun 2019 hingga 2023. Ini berarti bahwa proporsi penduduk usia kerja yang bekerja atau mencari pekerjaan di kabupaten tersebut mengalami fluktuasi setiap tahunnya. TPAK tertinggi terjadi pada tahun 2019 dengan nilai 73,55 persen, sedangkan TPAK terendah terjadi pada tahun 2021 dengan nilai 71,98 persen. TPAK tahun 2022 adalah 74,63 persen, yang merupakan nilai tertinggi kedua setelah tahun 2019 dan kemudian ditahun 2023 sebesar 72,76 persen.

2.3.2.3 Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan merupakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja. Angka partisipasi angkatan kerja di peroleh dari Angkatan kerja 15 Tahun ke atas dibagi jumlah penduduk usia 15 Tahun ke atas.

Selama periode 2019-2023, Kabupaten Banggai Kepulauan mencatat peningkatan yang konsisten dalam Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK), naik dari 71,78 persen pada tahun 2019 menjadi 71,81 persen pada tahun 2022. Peningkatan ini mengindikasikan kemungkinan adanya kebijakan pemerintah atau pertumbuhan ekonomi yang memberikan lebih banyak peluang kerja, serta meningkatnya keterampilan atau pendidikan masyarakat. Dampaknya kemungkinan besar positif, termasuk potensi peningkatan produktivitas dan pendapatan per kapita, serta pengurangan tingkat pengangguran di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.



Sumber: BPS Kabupaten Bangkep, 2024 (diolah)

Gambar 2.45

Angka Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023

2.3.2.4 Angkatan Ketergantungan

Aspek saing daerah pada fokus sumber daya manusia dapat dilihat melalui indikator rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan merupakan perbandingan antara jumlah penduduk bukan angkatan kerja (kelompok usia 0-14 tahun dan kelompok usia lebih dari 64 tahun) dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja (usia



15-64). Semakin tinggi angka Rasio Ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sementara itu, semakin rendah Rasio Ketergantungan menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Rasio ketergantungan di Kabupaten Banggai Kepulauan selama periode 2019-2023 menunjukkan tren penurunan yang stabil. Rasio ini menggambarkan hubungan antara jumlah penduduk yang tidak produktif (usia di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun) dengan jumlah penduduk yang produktif (usia 15-64 tahun). Pada tahun 2019, rasio ketergantungan di Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar 54,44, yang berarti setiap 100 orang usia produktif harus memikul tanggung jawab ekonomi untuk 54,44 orang yang tidak produktif. Selama empat tahun berikutnya, terjadi penurunan yang signifikan dalam rasio ketergantungan. Pada tahun 2020, rasio ini turun menjadi 49,77 dan terus menurun hingga mencapai 48,43 pada tahun 2023. Penurunan ini dapat dijelaskan oleh beberapa faktor, termasuk peningkatan harapan hidup dan penurunan angka kelahiran yang menyebabkan peningkatan proporsi penduduk usia produktif dalam populasi total.

Meskipun demikian, perlu diperhatikan bahwa meskipun rasio ketergantungan menurun, namun jumlah penduduk tidak produktif (usia di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun) tetap relatif stabil atau bahkan meningkat sedikit selama periode tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ketergantungan ekonomi individu mungkin berkurang, namun perlu tetap ada perencanaan dan kebijakan yang memperhatikan kebutuhan populasi yang semakin tua, termasuk dalam hal layanan kesehatan, sosial, dan pensiun.

Tabel 2.41
Rasio Ketergantungan Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2019-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk < 15 Tahun	35.627	33.323	33.429	33.429	32.868
Jumlah Penduduk > 65 Tahun	6.109	6.604	6.948	6.948	7.400
Jumlah Penduduk tidak Produktif	41.736	39.927	40.377	40.377	40.268
Jumlah Penduduk 15-64 tahun	76667	80.215	81.307	81.307	83.152
Rasio ketergantungan	54,44	49,77	49,66	49,66	48,43

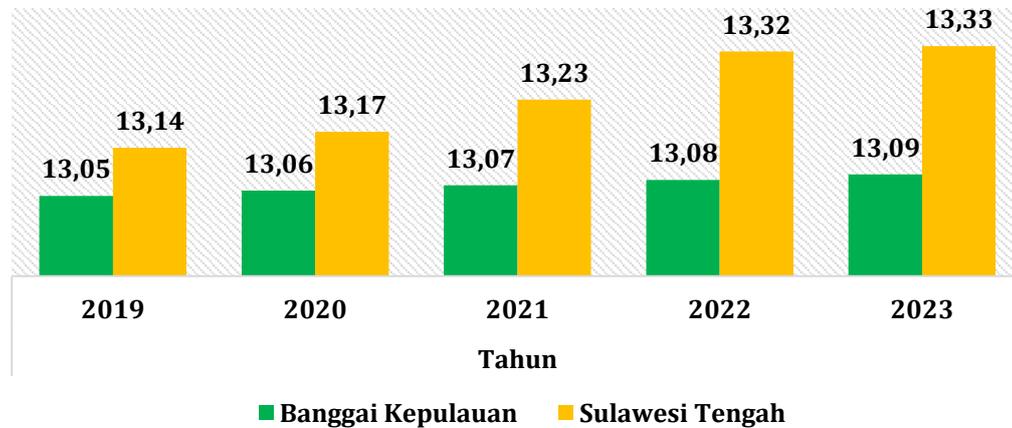
Sumber: BPS, Banggai Kepulauan Tahun 2024

2.3.2.5 Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah merupakan indikator kinerja daerah dalam bidang pendidikan. Angka Harapan Lama Sekolah digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan bidang pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan



dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.



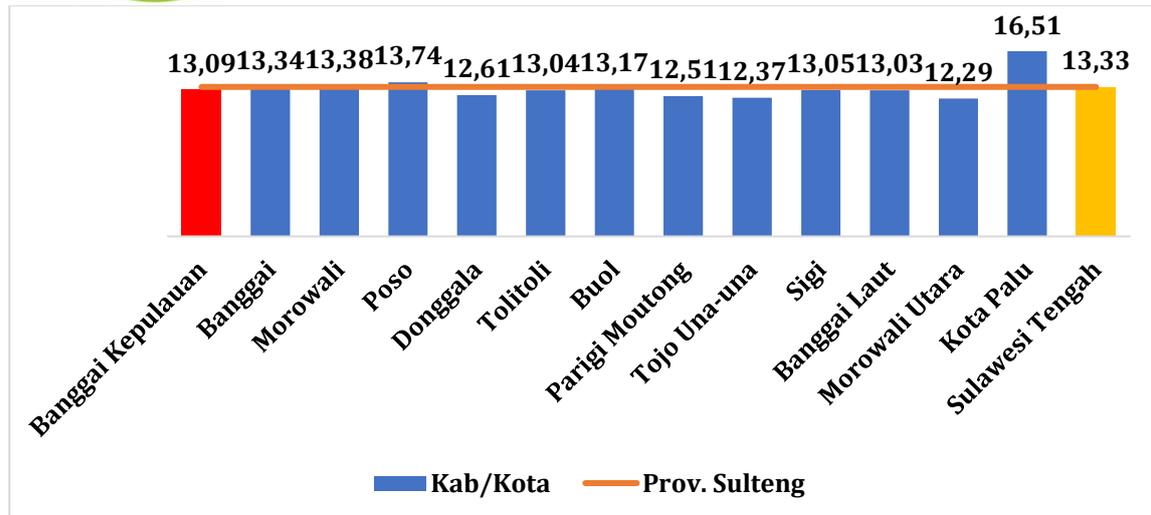
Sumber: BPS Kab. Bangkep, 2024 (diolah)

Gambar 2.46
Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Banggai Kepulauan dan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019-2023

HLS di Kabupaten Banggai Kepulauan mengalami kenaikan yang sangat kecil dari tahun 2019 hingga 2023, yaitu dari 13,05 menjadi 13,09. Hal ini menunjukkan bahwa peluang anak-anak di daerah tersebut untuk menempuh pendidikan formal hingga Diploma I tidak mengalami perubahan yang signifikan. Sedangkan HLS di Provinsi Sulawesi Tengah juga mengalami kenaikan yang relatif kecil dari tahun 2019 hingga 2023, yaitu dari 13,14 menjadi 13,33. Hal ini menunjukkan bahwa peluang anak-anak di provinsi tersebut untuk menempuh pendidikan formal hingga Diploma I tidak mengalami perubahan yang berarti.

HLS di Kabupaten Banggai Kepulauan selalu berada di bawah HLS di Provinsi Sulawesi Tengah dari tahun 2019 hingga 2023, dengan selisih yang berkisar antara 0,09 hingga 0,24. Hal ini menunjukkan bahwa peluang anak-anak di Kabupaten Banggai Kepulauan untuk mengenyam pendidikan formal lebih rendah daripada peluang anak-anak di Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk meningkatkan HLS, pemerintah dan masyarakat perlu meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan di semua jenjang, serta mengurangi angka putus sekolah, terutama di daerah-daerah tertinggal.

Selanjutnya ALS Kabupaten Banggai Kepulauan diperbandingkan dengan kondisi Kabupatenn/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2023, dapat diketahui bahwa posisi Kabupaten Banggai Kepulauan berada pada urutan ke-enam tertinggi, tertinggi pertama adalah Kota Palu sebesar 16,51 tahun, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Morowali Utara yakni 12,29 tahun. Data terkait dapat dilihat pada gambar berikut ini.



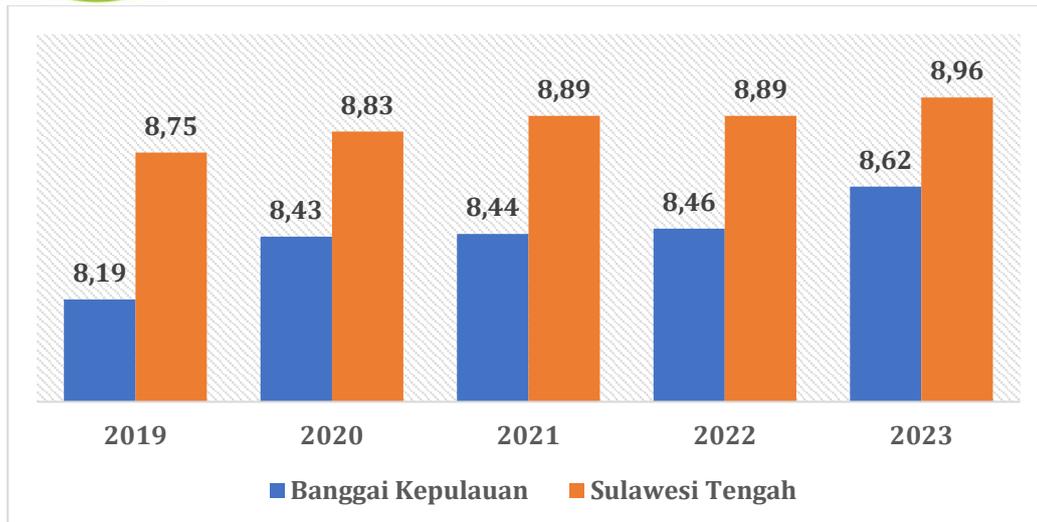
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2024 (diolah)

Gambar 2.47
Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Tahun 2023

2.3.2.6 Angka rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) mengindikasikan makin tinggi pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di suatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. Asumsi yang berlaku secara umum bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin tinggi pula kualitas (daya saing) seseorang. RLS merupakan indikator yang dihasilkan dari kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang ditamatkan. Namun, jumlah Tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali.

Berdasarkan RLS dapat diperoleh gambaran tingkat pendidikan penduduk suatu wilayah. Dimana angka RLS adalah rata-rata jumlah Tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Sehingga lamanya sekolah atau *years of schooling* dari setiap penduduk merupakan sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah pada sekolah formal, seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhirnya. Data mengenai perkembangan rata-rata lama sekolah kabupaten Banggai Kepulauan periode Tahun 2019-2023 terdapat pada Gambar 2.49 sebagai berikut ini.

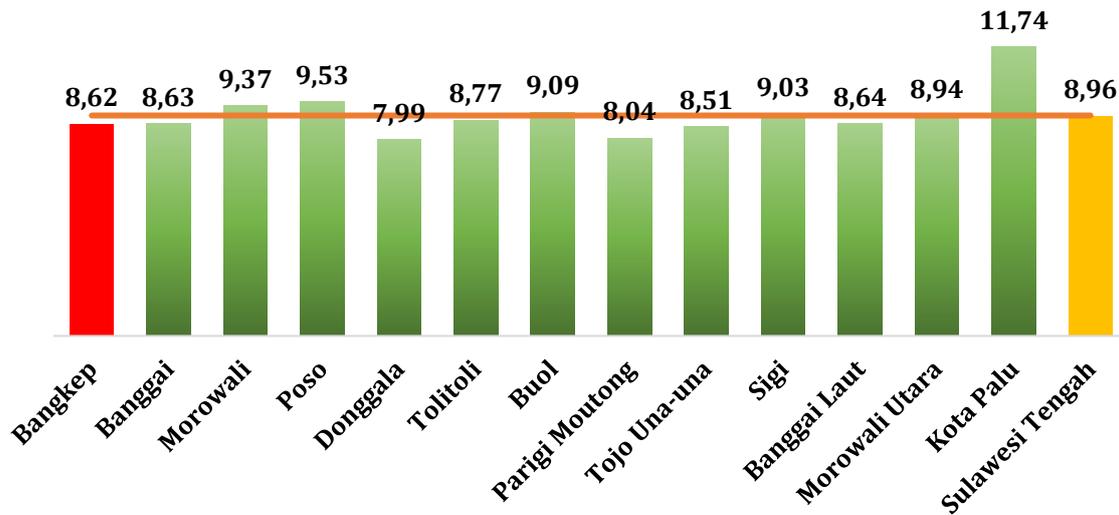


Sumber: BPS Kabupaten Bangkep, 2024 (diolah)

Gambar 2.48
Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Banggai Kepulauan dan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019-2023

RLS Kabupaten Banggai Kepulauan mengalami peningkatan dari 8,19 tahun pada tahun 2019 menjadi 8,62 tahun pada tahun 2023, dengan kenaikan rata-rata sebesar 0,08 tahun per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk kabupaten ini memiliki kemajuan dalam menempuh pendidikan formal. RLS Provinsi Sulawesi Tengah juga mengalami peningkatan dari 8,75 tahun pada tahun 2019 menjadi 8,96 tahun pada tahun 2023, dengan kenaikan rata-rata sebesar 0,09 tahun per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk provinsi ini memiliki kemajuan dalam menempuh pendidikan formal. RLS Kabupaten Banggai Kepulauan selalu lebih rendah dari RLS Provinsi Sulawesi Tengah pada setiap tahun, dengan selisih rata-rata sebesar 0,43 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk kabupaten ini memiliki akses dan kesempatan yang lebih terbatas untuk menempuh pendidikan formal dibandingkan dengan penduduk provinsi ini secara keseluruhan.

Perbandingan angka RLS Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengetahui gambaran posisi Kabupaten Banggai Kepulauan dari Kabupaten/kota. Diketahui bahwa angka RLS tertinggi Kota Palu selama 11,74 Tahun, kemudian Kabupaten Poso selama 9,53 Tahun, dan tertinggi ketiga Kabupaten Morowali selama 9,37 Tahun. Sedangkan RLS yang terendah adalah Kabupaten Donggala selama 7,99 Tahun. Posisi Kabupaten Banggai Kepulauan Berada pada urutan kesepuluh di Provinsi Sulawesi Tengah, secara lengkap disajikan pada gambar berikut ini.



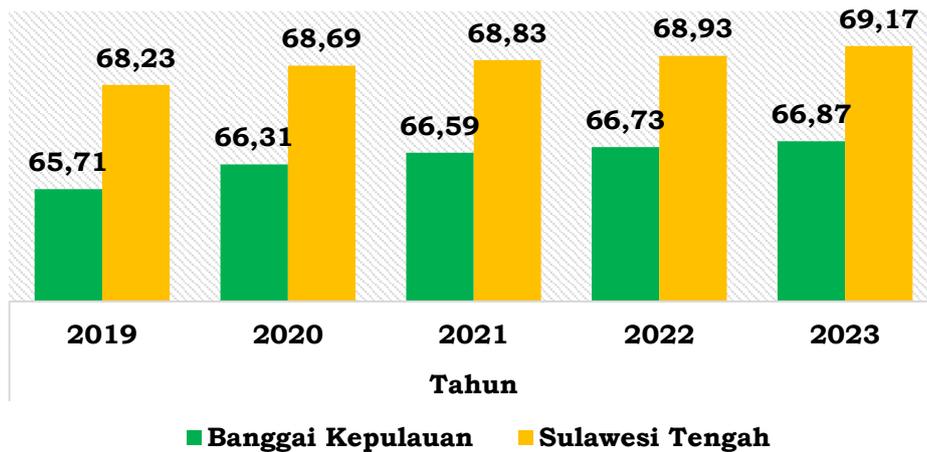
Sumber: Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2024 (data diolah)

Gambar 2.49
Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota
di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

2.3.2.7 Usia Harapan Hidup

Indikator ini menunjukkan kondisi dan sistem pelayanan kesehatan masyarakat, karena mampu merepresentasikan output dari upaya pelayanan kesehatan secara komprehensif. Hal ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa jika seseorang memiliki derajat kesehatan yang semakin baik maka yang bersangkutan akan berpeluang memiliki usia lebih panjang atau mempunyai angka harapan hidup yang tinggi, Angka harapan hidup merupakan indikator yang cukup efektif untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pada khususnya, Keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan di suatu wilayah akan disertai oleh peningkatan usia harapan hidup penduduknya, namun sebaliknya semakin rendah usia harapan hidup di suatu wilayah mencerminkan buruknya kualitas pembangunan kesehatan, Angka harapan hidup menggambarkan perkiraan rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.

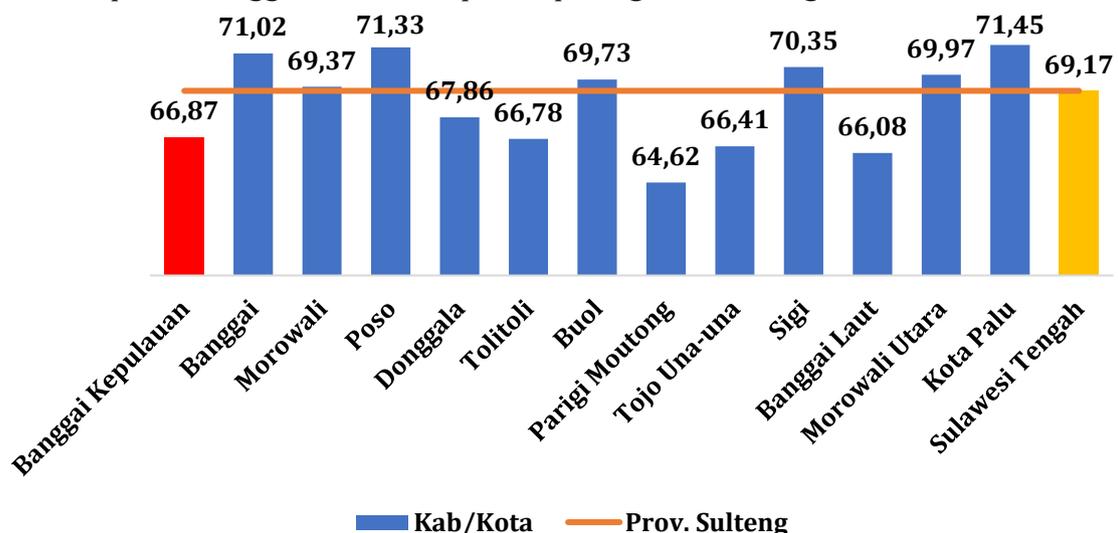
Angka Usia harapan hidup yang meningkat dari tahun ke tahun, menunjukkan adanya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat yang semakin membaik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 angka harapan hidup masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan sudah mencapai 66,87 tahun, meningkat dari 65,71 pada tahun 2019. UHH Kabupaten Banggai Kepulauan masih jauh dibawah rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah. Ini menjadi penanda adanya perbaikan kualitas fasilitas dan pelayanan kesehatan dan peningkatan kesejahteraan, namun belum optimal. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: BPS Kabupaten Bangkep, 2024 (diolah)

Gambar 2.50
Usia Harapan Hidup Kabupaten Banggai kepulauan dan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019-2023

Angka UHH Kabupaten Banggai Kepulauan dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan UHH Kabupaten Banggai Kepulauan lebih rendah dari rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah, terlihat pada Tahun 2023 UHH Kabupaten Banggai Kepulauan 66,87 Tahun dan rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah 69,17 Tahun. Posisi UHH Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 berada pada urutan sembilan dari Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah. UHH Tertinggi Kota Palu dan Kabupaten Poso sedangkan UHH terendah Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Banggai Laut ditampilkan pada gambar sebagai berikut ini.



Sumber: BPS Tahun 2024 (data diolah)

Gambar 2.51
Angka UHH Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

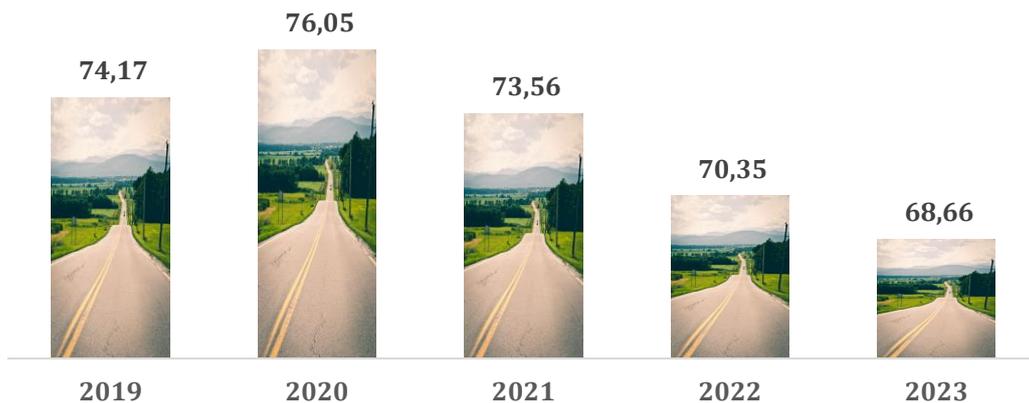


2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

2.3.3.1 Proporsi Panjang Jalan Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik (Persen)

Proporsi panjang jalan jaringan jalan dalam kondisi baik adalah perbandingan antara panjang jalan jaringan jalan yang memiliki tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 6 persen dengan panjang jalan jaringan jalan secara keseluruhan dalam satu tahun. Proporsi panjang jalan jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Banggai Kepulauan cenderung tinggi, dengan rata-rata 72,54 persen selama lima tahun. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar jalan jaringan jalan di Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki kualitas yang baik dan dapat mendukung arus lalu lintas dengan lancar.

Proporsi panjang jalan jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Banggai Kepulauan mengalami fluktuasi selama lima tahun. Angka ini naik turun dari 74,17 persen pada tahun 2019, kemudian naik menjadi 76,05 persen pada tahun 2020. Pada tahun 2021, angka ini turun menjadi 73,56 persen, dan turun lagi menjadi 70,35 persen pada tahun 2022. Selanjutnya pada tahun 2023 sedikit mengalami penurunan 68,66 persen terdapat pada gambar di bawah ini.



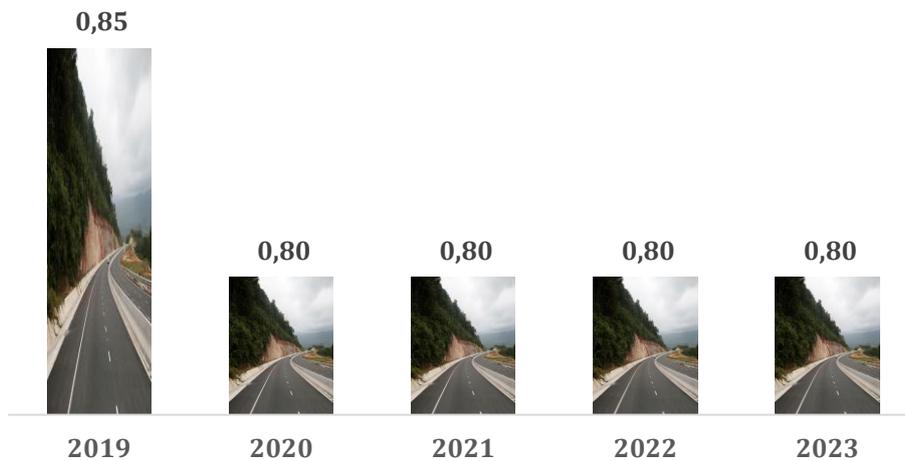
Sumber: BPS Kab. Bangkep, 2024 (diolah)

Gambar 2.52

Proporsi Panjang Jalan Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik (Persen) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023

2.3.3.2 Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk

Rasio panjang jalan adalah perbandingan antara panjang jalan yang ada di suatu daerah dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut dalam satu tahun. Rasio ini mengukur seberapa luas jaringan jalan yang dapat digunakan oleh penduduk di suatu daerah.



Sumber: BPS Kabupaten Bangkep, 2024 (diolah)

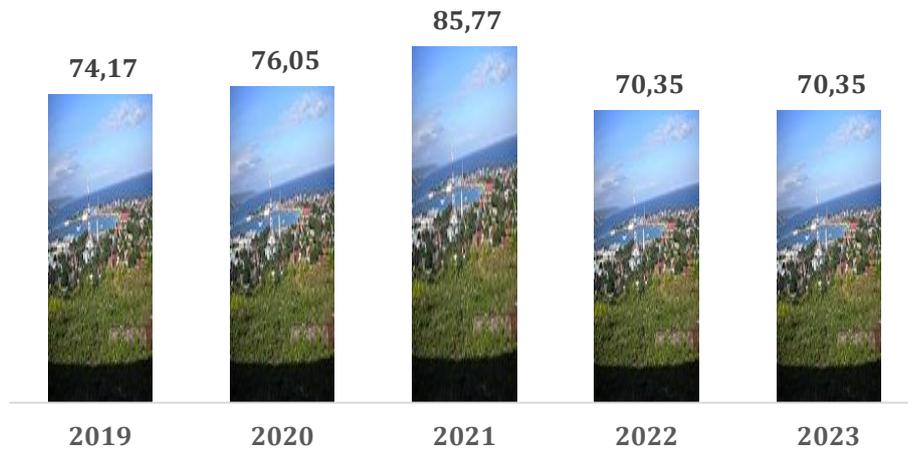
Gambar 2.53

Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023

Rasio panjang jalan di Kabupaten Banggai Kepulauan cenderung tinggi, dengan rata-rata 0,80 selama lima tahun. Angka ini menunjukkan bahwa setiap satu penduduk di Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki akses ke jalan sepanjang 0,80 meter. Ini bisa berdampak positif pada mobilitas dan konektivitas penduduk di daerah tersebut. Rasio panjang jalan di Kabupaten Banggai Kepulauan mengalami fluktuasi selama lima tahun. Angka ini naik turun dari 0,85 pada tahun 2019, kemudian turun menjadi 0,80 pada tahun 2020, 2021, dan 2022 dan ditahun 2023 juga sebesar 0,80.

2.3.3.3 Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (> 40 Km/Jam

Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik adalah perbandingan antara panjang jalan kabupaten yang memiliki kecepatan rata-rata lebih dari 40 km/jam dengan panjang jalan kabupaten secara keseluruhan dalam satu tahun. Persentase ini mengukur seberapa baik kualitas jalan kabupaten yang dapat mendukung arus lalu lintas dengan cepat dan lancar. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik di Kabupaten Banggai Kepulauan cenderung tinggi, dengan rata-rata 74,99 persen selama lima tahun. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar jalan kabupaten di Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki kualitas yang baik dan dapat mendukung arus lalu lintas dengan cepat dan lancar. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik di Kabupaten Banggai Kepulauan mengalami fluktuasi selama lima tahun. Angka ini naik turun dari 74,17 persen pada tahun 2019, kemudian naik menjadi 76,05 persen pada tahun 2020. Pada tahun 2021, angka ini naik menjadi 85,77 persen, dan turun lagi menjadi 70,35 persen pada tahun 2022 dan tahun 2023.



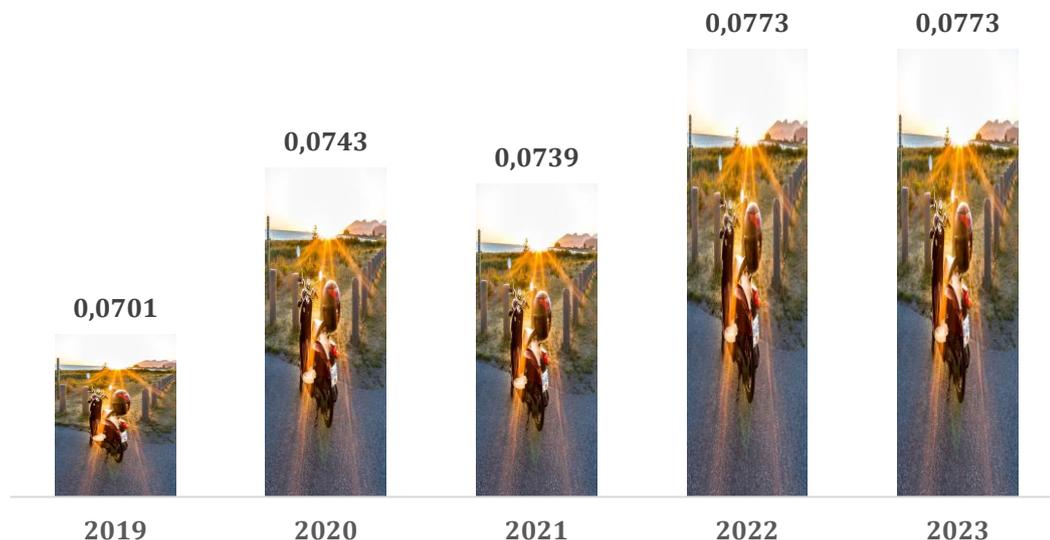
Sumber: BPS Kab. Bangkep, 2024 (diolah)

Gambar 2.54

Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (> 40 Km/Jam Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023

2.3.3.4 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah ukuran yang menggambarkan ketersediaan dan kecukupan jalan untuk menampung lalu lintas kendaraan di suatu daerah. Rasio ini dapat dihitung dengan membagi panjang jalan (dalam kilometer) dengan jumlah kendaraan (dalam unit) yang terdaftar di Kabupaten Banggai Kepulauan.



Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2024

Gambar 2.55

Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023

Berdasarkan data di atas, rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Banggai Kepulauan tidak mengalami perubahan signifikan selama periode



tersebut. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan tetap 0,07 dari tahun 2019 hingga 2020, yang berarti bahwa setiap kilometer jalan di daerah tersebut menampung rata-rata 14,29 kendaraan. Pada tahun 2021, rasio panjang jalan per jumlah kendaraan juga tetap 0,07, yang berarti bahwa setiap kilometer jalan di daerah tersebut menampung rata-rata 14,28 kendaraan. Pada tahun 2022 dan tahun 2023, rasio panjang jalan per jumlah kendaraan naik menjadi 0,08, yang berarti bahwa setiap kilometer jalan di daerah tersebut menampung rata-rata 12,50 kendaraan.

2.3.3.5 Jenis Dan Jumlah Bank Dan Cabang

Bank dan cabang adalah lembaga keuangan yang bergerak di bidang perbankan, seperti menyalurkan kredit, menerima simpanan, dan memberikan jasa lainnya. Jenis bank dan cabang yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.42
Jenis Dan Jumlah Bank Dan Cabang Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2019-2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kantor Cabang	2	1	2	2	2
Kantor Cabang Pembantu	6	4	8	8	5
BPR	2	2	2	2	1

Sumber: Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2024

Kantor Cabang: Jumlah kantor cabang yang beroperasi dalam rentang waktu tersebut mengalami fluktuasi. Dimulai dengan 2 kantor cabang pada tahun 2019, kemudian menurun menjadi 1 pada tahun 2020, dan kembali naik menjadi 2 pada tahun 2021 dan 2022 serta tahun 2023.

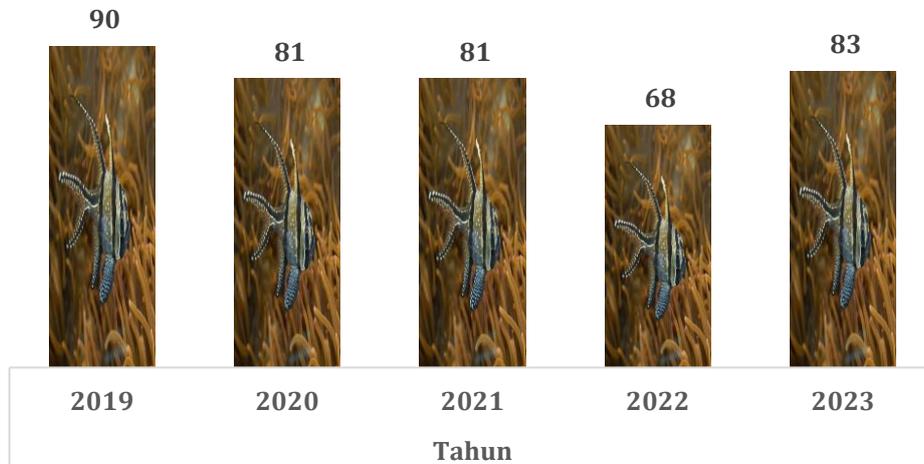
Kantor Cabang Pembantu: Jumlah kantor cabang pembantu juga mengalami variasi selama periode tersebut. Dimulai dengan 6 kantor cabang pembantu pada tahun 2019, kemudian menurun menjadi 4 pada tahun 2020, dan meningkat menjadi 8 pada tahun 2021 dan tetap 8 pada tahun 2022, namun di tahun 2023 menurun menjadi 5. Bank Perkreditan Rakyat (BPR): Jumlah BPR tetap konsisten sepanjang periode tersebut, yaitu 2 BPR dari tahun 2019 hingga 2022, namun di tahun 2023 hanya 1 BPR yang terdata di Kabupaten Banggai Kepulauan.

2.3.3.6 Jenis, Kelas, Dan Jumlah Restoran

Restoran adalah tempat usaha yang menyediakan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat atau dibawa pulang. Jumlah restoran mencerminkan tingkat kegiatan usaha, pariwisata, dan kuliner di daerah tersebut. Pada tahun 2019, jumlah restoran tetap stabil yaitu 90 restoran. Kemudian pada tahun 2020, terjadi penurunan menjadi 81 restoran. Jumlah restoran tetap sama pada tahun 2021, yaitu 81 restoran. Pada tahun 2022, terjadi penurunan lebih lanjut menjadi 68 restoran.



Selanjutnya meningkat sangat signifikan pada tahun 2023 sebanyak 83 restoran atau yang sejenis. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut ini.

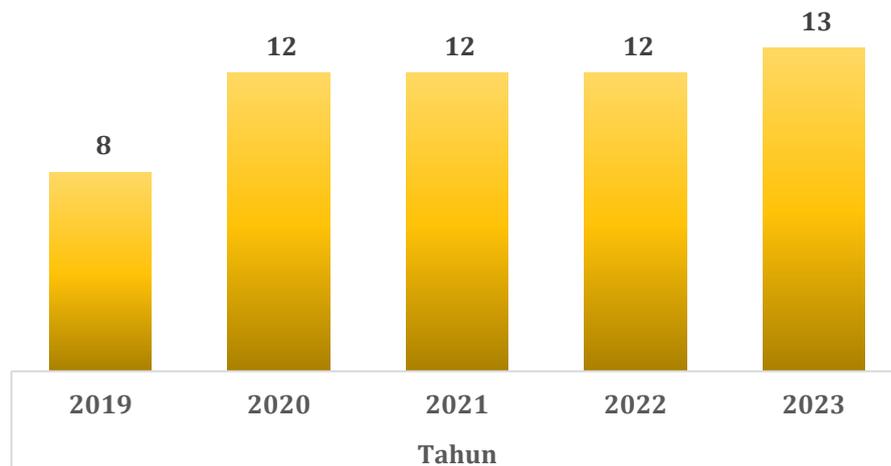


Sumber: Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2024

Gambar 2.56
Jumlah Restoran Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023

2.3.3.7 Jenis, Kelas, Dan Jumlah Penginapan/Hotel

Penginapan/hotel adalah tempat usaha yang menyediakan akomodasi untuk menginap, makan, dan mendapatkan pelayanan lainnya dengan pembayaran. Jumlah penginapan/hotel mencerminkan tingkat kegiatan usaha, pariwisata, dan kuliner di daerah tersebut. Hingga tahun 2023 jumlah penginapan/hotel yang terdata di Kabupaten Banggai Kepulauan sebanyak 13 unit. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut ini.



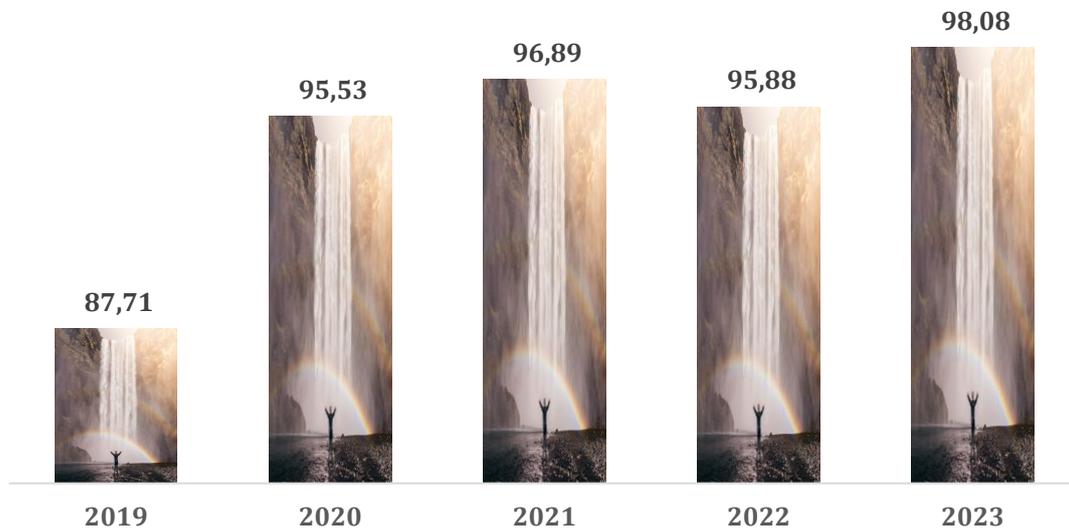
Sumber: Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2024

Gambar 2.57
Jumlah Penginapan/Hotel Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023



2.3.3.8 Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih

Persentase penduduk berakses air minum di Kabupaten Banggai Kepulauan cenderung tinggi, dengan rata-rata 84,27 persen selama lima tahun. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki akses ke air minum yang aman, bersih, dan layak. Ini bisa berdampak positif pada kesehatan dan kesejahteraan penduduk di daerah tersebut. Persentase penduduk berakses air minum di Kabupaten Banggai Kepulauan mengalami fluktuasi selama lima tahun. Angka ini naik turun dari 85,00 persen pada tahun 2019, kemudian turun menjadi 82,00 persen pada tahun 2020. Pada tahun 2021, angka ini naik menjadi 86,27 persen, dan naik lagi menjadi 88,08 persen pada tahun 2022 dan ditahun 2023 meningkat menjadi 98,08 persen. Data terkait disajikan pada gambar berikut ini.



Sumber: BPS, Sulawesi Tengah dalam Angka, 2024 (diolah)

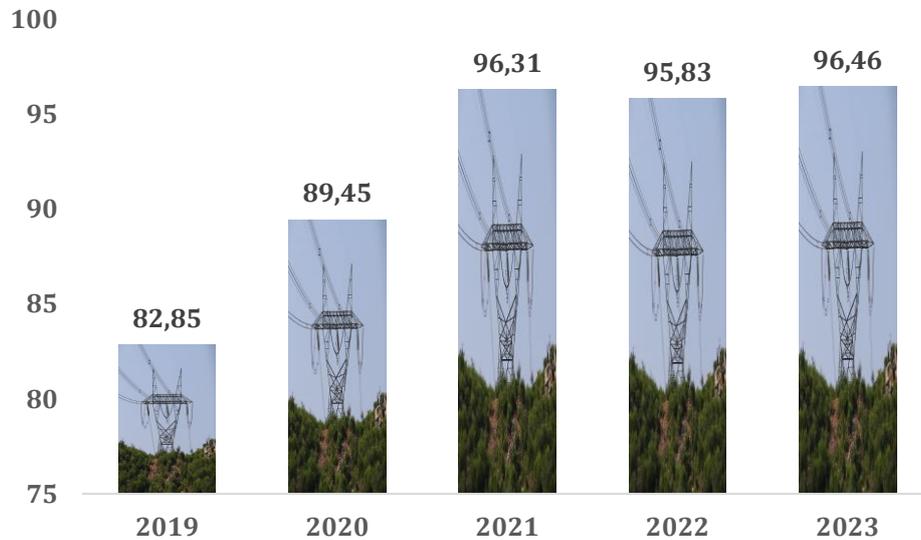
Gambar 2.58
Persentase Penduduk Berakses Air Minum
di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023

2.3.3.9 Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik adalah rasio antara jumlah rumah tangga yang memiliki akses listrik dengan jumlah rumah tangga yang ada di daerah tersebut. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik mencerminkan tingkat ketersediaan dan pemanfaatan energi listrik di daerah tersebut. Data menunjukkan bahwa persentase rumah tangga yang menggunakan listrik di Kabupaten Banggai Kepulauan mengalami kenaikan dari tahun 2019 (82,85 persen) menjadi tahun 2021 (96,31 persen), kemudian sedikit menurun pada tahun 2022 (95,83 persen), kemudian ditahun 2023 sebesar 96,46 persen. Hal ini mungkin menunjukkan bahwa ada peningkatan kualitas dan cakupan layanan listrik di daerah



tersebut, namun juga ada faktor-faktor yang menyebabkan fluktuasi permintaan atau pasokan listrik.



Sumber: Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2024

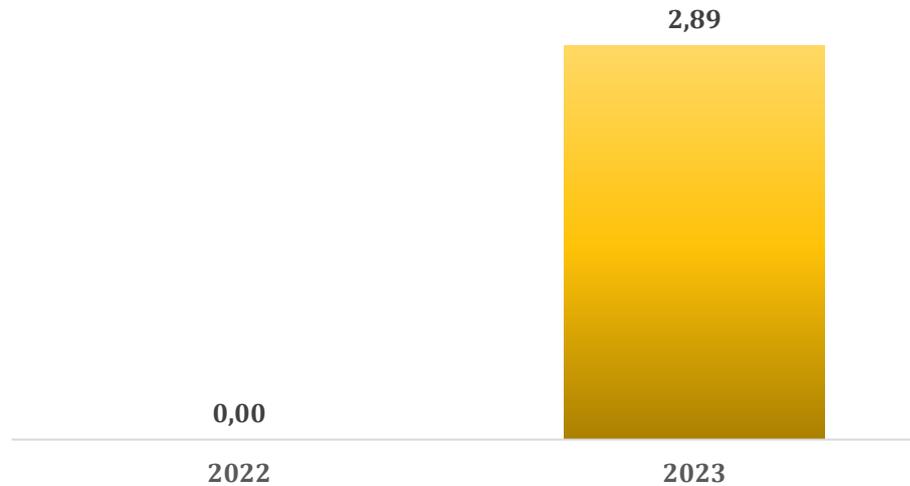
Gambar 2.59
Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023

2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi

Daya saing iklim investasi adalah kemampuan suatu wilayah untuk menarik dan mempertahankan investasi, baik dari investor lokal maupun asing. Iklim investasi yang baik mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan perkembangan teknologi. Daya Saing Iklim Investasi membahas faktor-faktor yang membuat suatu wilayah menarik bagi para investor. Iklim investasi yang kompetitif mencakup berbagai aspek seperti regulasi, kebijakan pemerintah, keamanan, stabilitas ekonomi, dan ketersediaan sumber daya.

2.3.4.1 Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu daerah dalam menarik investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Indeks ini mencakup berbagai aspek seperti ekonomi, infrastruktur, sumber daya manusia, institusi, dan inovasi. Berdasarkan data yang di publis oleh kementerian dalam negeri, pada tahun 2023 indeks daya saing Kabupaten Banggai Kepulauan Sebesar 2,89 dari nilai 5,00. Angka ini menunjukkan nilai daya saing Kabupaten Banggai Kepulauan di level sedang.



Sumber: Kementerian Dalam Negeri, Tahun 2024

Gambar 2.60
Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2022-2023

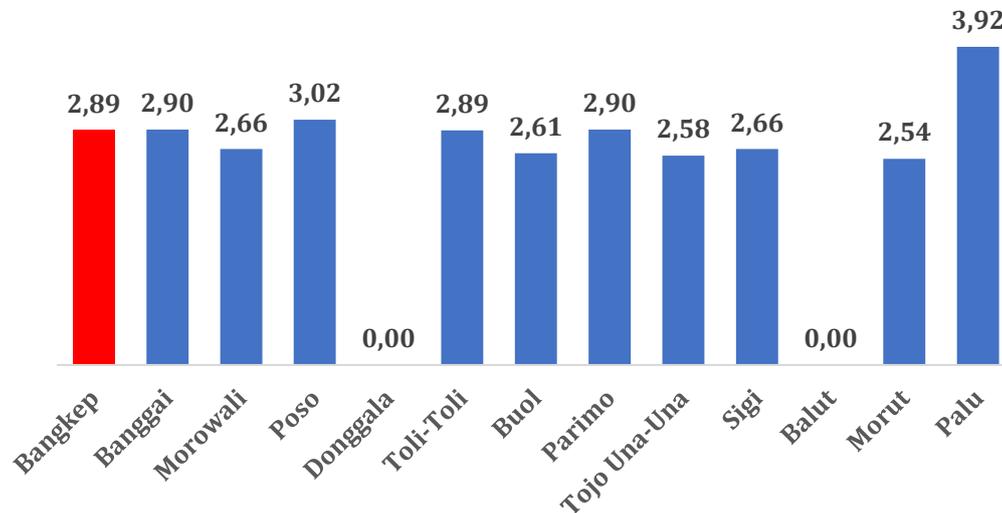
Data Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 menunjukkan variasi yang signifikan dalam tingkat daya saing di berbagai wilayah. Kota Palu mencatat indeks daya saing tertinggi dengan skor 3,92, menunjukkan keunggulan signifikan dalam berbagai aspek seperti infrastruktur, ekonomi, institusi, sumber daya manusia, dan inovasi. Palu tampak memiliki kondisi yang sangat kondusif untuk bisnis dan investasi, dengan fasilitas yang baik dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Kabupaten Poso berada di posisi kedua dengan skor 3,02, menunjukkan bahwa Poso juga memiliki kondisi yang cukup baik untuk mendorong perkembangan ekonomi dan menarik investasi, meskipun ada beberapa area yang memerlukan perbaikan.

Beberapa kabupaten seperti Banggai, Parimo, Bangkep, dan Toli-Toli memiliki skor sekitar 2,89 hingga 2,90, menandakan daya saing yang relatif seimbang dan potensi untuk peningkatan lebih lanjut melalui investasi dalam infrastruktur dan kebijakan ekonomi yang lebih baik. Sementara itu, kabupaten seperti Morowali, Sigi, Buol, Tojo Una-Una, dan Morut memiliki indeks daya saing lebih rendah, sekitar 2,54 hingga 2,66, menunjukkan adanya tantangan dalam hal infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, atau institusi yang perlu diatasi.

Menariknya, Donggala dan Balut menunjukkan indeks daya saing sebesar 0,00, yang mungkin menandakan adanya masalah serius atau kekurangan data signifikan dalam evaluasi daya saing mereka. Hal ini memerlukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi masalah mendasar dan menemukan solusi yang tepat. Secara keseluruhan, untuk meningkatkan daya saing daerah-daerah ini, pemerintah daerah dapat fokus pada peningkatan infrastruktur fisik dan digital, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, pengembangan kebijakan



yang mendukung iklim bisnis yang kondusif, penguatan institusi dan peningkatan transparansi serta efisiensi pemerintahan, serta mendorong inovasi dan adopsi teknologi di berbagai sektor ekonomi.



Sumber: Kementerian Dalam Negeri, Tahun 2024

Gambar 2.61
Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten/Kota
di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

2.3.4.2 Angka Kriminalitas

Kasus kriminalitas adalah peristiwa yang melanggar hukum pidana, seperti pencurian, penganiayaan, penipuan, narkoba, dan lain-lain. Jumlah kasus kriminalitas mencerminkan tingkat keamanan dan ketertiban di daerah tersebut. Pada tahun 2019, terdapat 523 kasus pada tahun 2019. Tahun 2020, jumlah kasus kriminalitas tetap hampir sama dengan tahun sebelumnya, yaitu 525 kasus. Pada tahun 2021, jumlah kasus kriminalitas menurun menjadi 411 kasus. Kemudian, pada tahun 2022, tercatat penurunan yang signifikan menjadi 294 kasus kriminalitas. Kemudian pada tahun 2023 kasus kriminalitas di Kabupaten Banggai Kepulauan menurun sebanyak 246 kasus. Data ini menunjukkan fluktuasi jumlah kasus kriminalitas di Kabupaten Banggai Kepulauan dari tahun ke tahun. Data terkait disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.43
Jumlah Kasus Kriminalitas Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2019-2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Kasus Kriminalitas	523	525	411	294	246

Sumber: Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2024

2.4 ASPEK PELAYANAN UMUM

Pelayanan Umum merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Pelayanan umum lebih menentukan keberhasilan pelaksanaan



pembangunan terutama pelayanan umum yang langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat. Dengan meningkatkan aspek pelayanan umum, Kabupaten dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah harus terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap pelayanan yang diberikan, dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini akan memastikan bahwa pelayanan yang disediakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

2.4.1 Aspek Kinerja Pemerintahan

2.4.1.1 Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah atau instansi pemerintah telah berhasil melakukan reformasi dalam tata kelola birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Banggai Kepulauan menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun 2022 ke tahun 2023, di mana nilai indeks ini naik dari kategori C ke kategori B. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah tersebut.

Tabel 2.44
Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2022-2023

Uraian	Tahun	
	2022	2023
Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	C	B

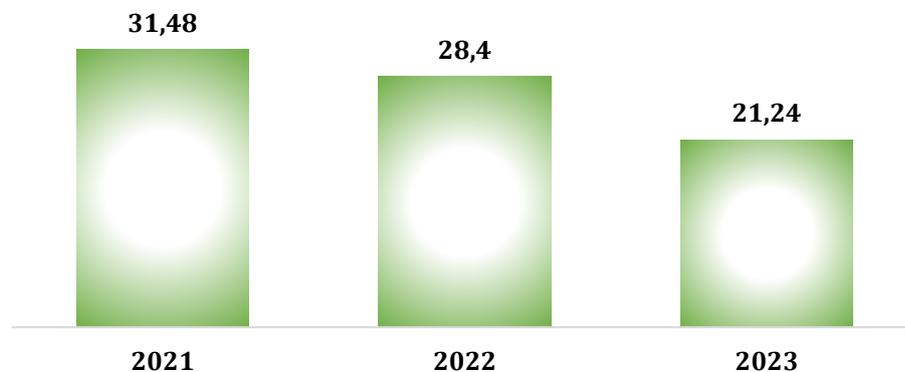
Sumber: Kementerian Dalam Negeri, Tahun 2024

Salah satu faktor yang mungkin berkontribusi terhadap peningkatan ini adalah investasi dalam pengembangan sumber daya manusia, yang mencakup pelatihan dan peningkatan kompetensi aparatur pemerintah. Selain itu, implementasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang lebih baik juga memainkan peran penting dalam mempercepat dan memperbaiki proses administrasi, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Kebijakan dan regulasi yang lebih efektif serta mekanisme pengawasan dan evaluasi yang ketat turut mendukung peningkatan indeks ini. Peningkatan indeks reformasi birokrasi ini berdampak positif terhadap kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, menciptakan iklim investasi yang lebih baik, dan meningkatkan kinerja organisasi pemerintah. Secara keseluruhan, perbaikan dalam indeks ini menunjukkan kemajuan dalam upaya perbaikan birokrasi dan pelayanan publik di Kabupaten Banggai Kepulauan, yang diharapkan dapat terus berlanjut dan membawa dampak positif bagi masyarakat dan pembangunan daerah di masa mendatang.



2.4.1.2 Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan publik. Indeks ini mencakup berbagai aspek seperti kreativitas, pengembangan teknologi, implementasi kebijakan baru, dan penerapan solusi inovatif untuk mengatasi masalah-masalah lokal. Data Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk tahun 2021-2023 menunjukkan penurunan yang signifikan dalam tingkat inovasi daerah selama tiga tahun berturut-turut. Pada tahun 2021, indeks inovasi tercatat sebesar 31,48 dan berada dalam kategori "Kurang Inovatif." Indeks ini kemudian mengalami penurunan menjadi 28,4 pada tahun 2022, dan semakin menurun drastis menjadi 21,24 pada tahun 2023, dengan kategori tetap "Kurang Inovatif."



Sumber: Kementerian Dalam Negeri, Tahun 2024

Gambar 2.62
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2021-2023

Penurunan ini mengindikasikan bahwa upaya inovasi di Kabupaten Banggai Kepulauan belum optimal dan menghadapi berbagai tantangan yang menghambat perkembangan inovasi. Beberapa kemungkinan penyebab penurunan ini bisa mencakup kurangnya investasi dalam penelitian dan pengembangan, terbatasnya sumber daya manusia yang terampil dalam bidang inovasi, atau mungkin kurangnya dukungan dari pemerintah dan sektor swasta untuk mendorong inisiatif inovatif. Dampak dari rendahnya indeks inovasi dapat dirasakan dalam berbagai aspek, termasuk efisiensi pemerintahan, kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah dalam menarik investasi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi faktor-faktor yang menghambat inovasi dan mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kemampuan inovatif daerah. Ini bisa melibatkan peningkatan kerjasama dengan lembaga pendidikan, pemberian insentif untuk proyek-proyek inovatif, serta peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi pegawai pemerintah dan masyarakat dalam bidang inovasi dan teknologi.

Data Indeks Inovasi Daerah untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2023 menunjukkan variasi yang signifikan dalam tingkat inovasi di berbagai daerah. Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki indeks inovasi sebesar



21,24, yang dikategorikan sebagai "Kurang Inovatif." Ini menempatkan Banggai Kepulauan di bawah banyak daerah lain dalam provinsi tersebut. Kabupaten Donggala juga menunjukkan kinerja inovasi yang sangat rendah dengan indeks 5,1, jauh di bawah rata-rata dan juga dikategorikan sebagai "Kurang Inovatif." Kabupaten Buol berada dalam kategori yang sama dengan indeks 17,94. Di sisi lain, beberapa kabupaten/kota di Sulawesi Tengah menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam hal inovasi. Kabupaten Banggai, dengan indeks 50,65, dan Kota Palu, dengan indeks 51,05, termasuk dalam kategori "Inovatif." Daerah lain yang juga masuk dalam kategori "Inovatif" meliputi Morowali (46,34), Poso (48,73), Parigi Moutong (41,38), Tojo Una-Una (45,46), Sigi (37,65), Banggai Laut (40,85), dan Morowali Utara (38,15).

Tabel 2.45
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2023

Kabupaten	2023	Kategori
Banggai Kepulauan	21,24	Kurang Inovatif
Banggai	50,65	Inovatif
Morowali	46,34	Inovatif
Poso	48,73	Inovatif
Donggala	5,1	Kurang Inovatif
Toli-Toli	32,11	Kurang Inovatif
Buol	17,94	Kurang Inovatif
Parigi Moutong	41,38	Inovatif
Tojo Una-Una	45,46	Inovatif
Sigi	37,65	Inovatif
Banggai Laut	40,85	Inovatif
Morowali Utara	38,15	Inovatif
Palu	51,05	Inovatif

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, Tahun 2024

Analisis data ini menunjukkan adanya disparitas yang cukup besar dalam tingkat inovasi di berbagai daerah di Sulawesi Tengah. Kabupaten Banggai Kepulauan, Donggala, dan Buol perlu melakukan upaya signifikan untuk meningkatkan kapasitas inovatif mereka. Ini bisa melibatkan penguatan kebijakan yang mendukung inovasi, peningkatan investasi dalam penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan.

2.4.1.3 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Indeks ini mencerminkan kemampuan pemerintah dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas layanan kepada masyarakat.



Data Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2023 menunjukkan variasi dalam implementasi dan kemajuan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kabupaten Banggai dengan indeks SPBE sebesar 3,23 dan Kabupaten Buol dengan indeks 2,95, keduanya dikategorikan sebagai "Baik," menunjukkan bahwa mereka telah mengadopsi dan mengimplementasikan teknologi dengan cukup efektif dalam sistem pemerintahan mereka.

Hal ini mencerminkan adanya upaya signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi melalui penggunaan teknologi informasi. Morowali, Parigi Moutong, dan Provinsi Sulawesi Tengah secara keseluruhan juga termasuk dalam kategori "Baik," dengan indeks masing-masing sebesar 2,88, 2,68, dan 3,14. Ini menunjukkan bahwa daerah-daerah tersebut telah melakukan investasi yang signifikan dalam infrastruktur teknologi dan pelatihan untuk mendukung operasional pemerintahan yang lebih efisien dan terintegrasi. Di sisi lain, Kabupaten Poso, Tolitoli, Banggai Kepulauan (Bangkep), dan Tojo Una-Una termasuk dalam kategori "Cukup," dengan indeks masing-masing sebesar 2,13, 2,18, 2,32, dan 2,13. Meskipun menunjukkan kemajuan, masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal adopsi teknologi dan integrasi sistem elektronik untuk mencapai kategori yang lebih tinggi.

Kabupaten Donggala berada dalam kategori "Kurang" dengan indeks SPBE sebesar 1,64, menunjukkan bahwa daerah ini menghadapi tantangan signifikan dalam mengimplementasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ini mungkin disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur, kurangnya sumber daya manusia yang terampil, atau hambatan lain yang perlu diatasi untuk meningkatkan kinerja SPBE.

Tabel 2.46

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Kabupaten	Tahun 2023	Kategori
Poso	2,13	Cukup
Donggala	1,64	Kurang
Tolitoli	2,18	Cukup
Banggai	3,23	Baik
Buol	2,95	Baik
Morowali	2,88	Baik
Bangkep	2,32	Cukup
Parigi Moutong	2,68	Baik
Tojo Una-Una	2,13	Cukup
Sulteng	3,14	Baik

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, Tahun 2024

Analisis ini mengindikasikan bahwa meskipun ada beberapa daerah yang menunjukkan kemajuan signifikan dalam adopsi sistem pemerintahan berbasis elektronik, masih terdapat beberapa daerah yang memerlukan perhatian lebih untuk meningkatkan implementasi teknologi dalam operasional pemerintahan mereka. Upaya kolaboratif antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat diperlukan untuk



mengatasi hambatan dan mendorong adopsi teknologi yang lebih luas dan efektif di seluruh wilayah Sulawesi Tengah. Hal ini dapat mencakup peningkatan infrastruktur teknologi, pelatihan sumber daya manusia, serta dukungan kebijakan yang mendorong inovasi dan adopsi teknologi dalam pemerintahan.

2.4.1.4 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik. Indeks ini mencerminkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola anggaran, pendapatan, belanja, dan aset daerah. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk memastikan bahwa pemerintah daerah mampu mengelola keuangan publik secara transparan dan bertanggung jawab, serta untuk mendorong perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 2.47
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Uraian	Tahun 2022	Kategori
Banggai Kepulauan	65,03	Perlu Perbaikan
Banggai	68,01	Perlu Perbaikan
Morowali	60,56	Perlu Perbaikan
Poso	67,70	Perlu Perbaikan
Donggala	44,71	Sangat Perlu
Toli-Toli	80,09	Baik
Buol	65,40	Perlu Perbaikan
Parigi Moutong	50,36	Sangat Perlu
Tojo Una-Una	84,25	Baik
Sigi	55,65	Sangat Perlu
Banggai Laut	68,08	Perlu Perbaikan
Morowali Utara	61,69	Perlu Perbaikan
Palu	76,23	Perlu Perbaikan
Sulteng	69,07	Perlu Perbaikan

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, Tahun 2024

Data tersebut merupakan indeks pengelolaan keuangan daerah untuk beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2023. Indeks ini memberikan gambaran tentang seberapa baik pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publiknya. Berdasarkan data tersebut, beberapa kabupaten/kota seperti Toli-Toli dan Tojo Una-Una memiliki kategori "Baik", yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah mereka telah berjalan dengan baik.

Di sisi lain, beberapa kabupaten/kota seperti Donggala, Parigi Moutong, Sigi, dan Morowali Utara berada dalam kategori "Sangat Perlu Perbaikan", menunjukkan adanya tantangan yang signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah mereka. Faktor-faktor seperti kurangnya efektivitas dalam pengumpulan pendapatan daerah,



pengelolaan belanja yang kurang efisien, atau kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah dapat menjadi penyebab kategori ini.

Kabupaten/kota lainnya, seperti Banggai Kepulauan, Banggai, Morowali, Poso, Buol, Banggai Laut, Palu, dan Sulteng, berada dalam kategori "Perlu Perbaikan", yang menunjukkan bahwa meskipun tidak seburuk yang "Sangat Perlu Perbaikan", masih ada ruang untuk peningkatan dalam pengelolaan keuangan daerah mereka.

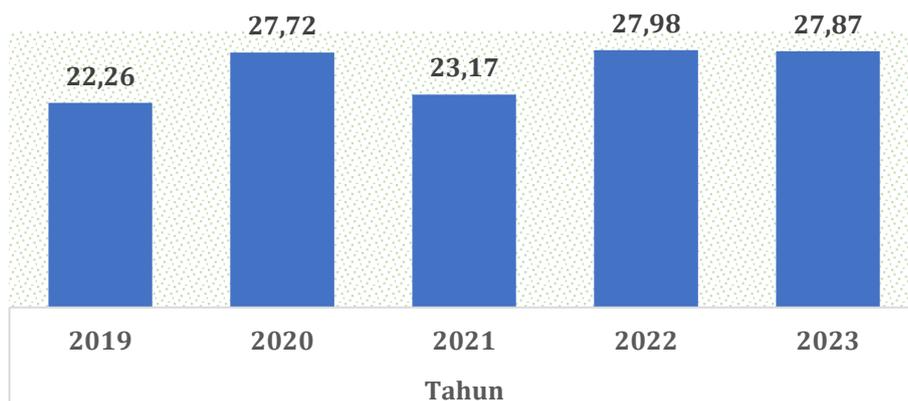
2.4.2 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

2.4.2.1 Pendidikan

Sebagaimana pembagian kewenangan dalam lampiran Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan pendidikan yang menjadi kewenangan kabupaten adalah jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar (Dikdas). Penyelenggaraan urusan pendidikan di Kabupaten Banggai Kepulauan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pendidikan Anak Usia Dini

Sesuai Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD, PAUD dapat meliputi pendidikan formal, non formal, dan/atau informal, baik dalam bentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) atau bentuk lain yang sederajat. PAUD merupakan upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun, melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu tumbuh kembang anak agar memiliki kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut. Cakupan penduduk usia 3-6 tahun yang sedang mengikuti pendidikan pra sekolah digambarkan dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD sebagai berikut.



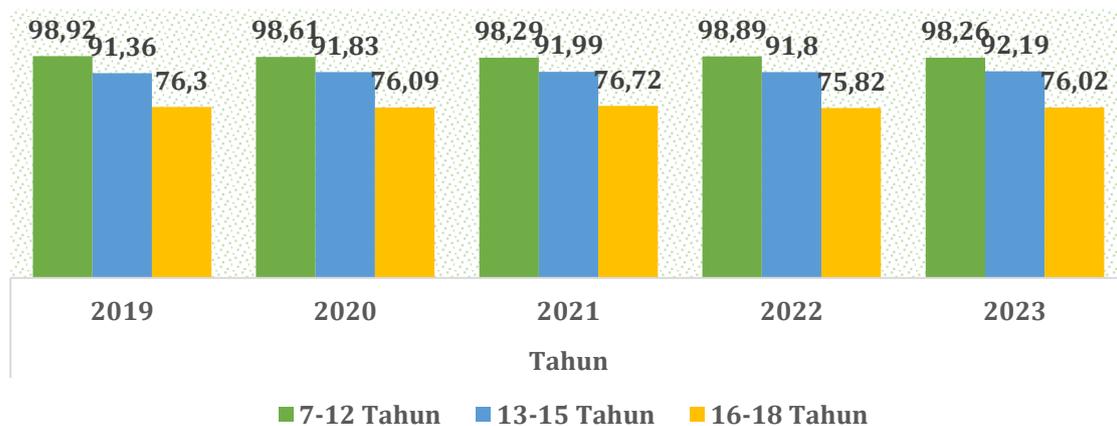
Sumber: BPS, Tahun 2024

Gambar 2.63
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Kab. Banggai Kepulauan
Tahun 2019-2023



2. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Dalam upaya mewujudkan keberhasilan Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun dan pemenuhan terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM), perlu peningkatan akses pemerataan dan mutu, relevansi serta partisipasi pendidikan di Kabupaten Banggai Kepulauan. Untuk menilai partisipasi pendidikan tersebut dilakukan dengan melihat tingkat partisipasi pendidikan yang ada. Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk usia sekolah pada fasilitas pendidikan. Semakin tinggi angka partisipasi sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan, namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan. APS Kabupaten Banggai Kepulauan terdapat pada gambar berikut.



Sumber: BPS, Tahun 2024

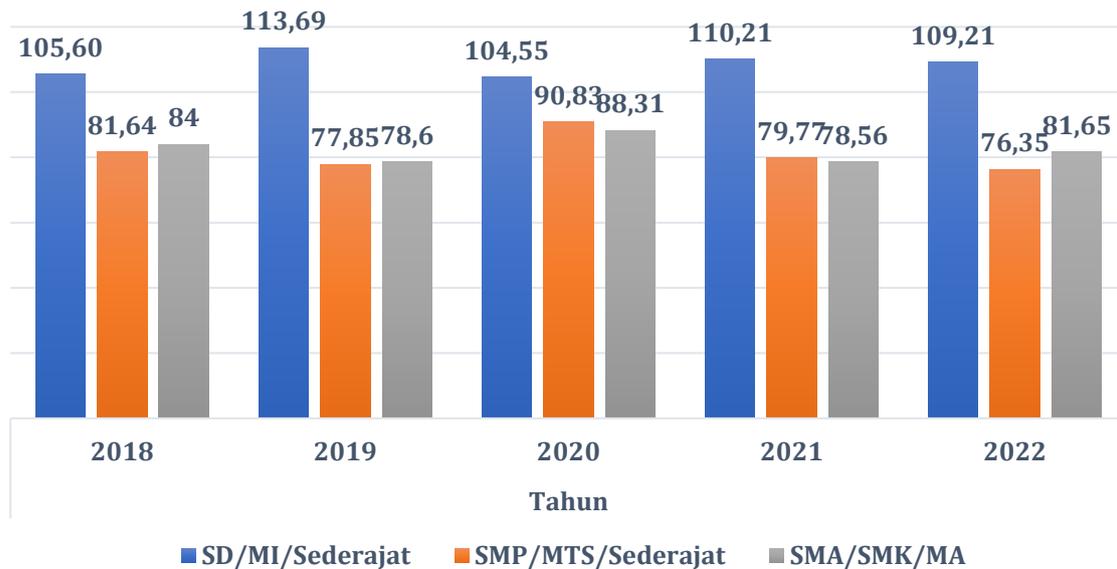
Gambar 2.64
Tingkat Partisipasi Pendidikan di Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2019-2023

Tingkat partisipasi pendidikan pada kelompok usia 7-12 tahun dalam kurun waktu 5 tahun menunjukkan capaian yang baik yaitu diatas 90 persen, yang menunjukkan bahwa program wajib belajar 9 tahun di Kabupaten Banggai Kepulauan sudah berjalan cukup baik. Sedangkan untuk APS kelompok umur 13-15 tahun pada tahun 2018 sampai dengan 2023 berfluktuasi dan cenderung meningkat dengan capaian di atas 90 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada penduduk usia sekolah yang belum tertampung di sekolah yang tersedia atau ada penduduk usia sekolah bersekolah di luar wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan. APS pada anak umur 13-15 tahun di bawah 100 persen berarti bahwa masih ada anak usia 13-15 yang putus sekolah.



3. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Untuk mengetahui akses pemerataan layanan pendidikan dapat dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK). APK merupakan perbandingan jumlah anak yang sekolah pada tingkat pendidikan tertentu dibagi jumlah anak usia pendidikan tersebut. Kegunaannya adalah untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan.



Sumber: BPS, Tahun 2024

Gambar 2.65

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018-2023

Dari gambar di atas, dapat dilihat APK SD/MI Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2018 mencapai 105,60 persen, dan tahun 2022 menjadi 109,21 persen. Rata-rata APK SD berada di atas 100 persen artinya jumlah penduduk yang bersekolah di tingkat SD lebih besar dibandingkan jumlah penduduk kelompok umur 7 - 12 tahun. Hal ini bisa disebabkan adanya anak berumur di atas 12 tahun masih bersekolah di tingkat SD dan anak berusia kurang dari 7 tahun sudah bersekolah di tingkat SD, serta adanya siswa yang berasal dari kabupaten lain.

Perkembangan APK pada jenjang SMP/MTs kurun waktu lima tahun terakhir, pada tahun 2018 mencapai 81,64 persen mengalami penurunan menjadi 76,35 di tahun 2022. Sedangkan APK pada SMA/MA/SMK kurun waktu lima tahun terakhir, pada tahun 2018 mencapai 84 menurun menjadi 81 di tahun 2022.

4. Angka Partisipasi Murni (APM)

Ukuran lain yang dapat digunakan untuk melihat akses pemerataan layanan pendidikan adalah Angka Partisipasi Murni (APM). APM menunjukkan proporsi anak kelompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan umurnya.



APM ini merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Gambaran perkembangan angka partisipasi murni tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: BPS, Tahun 2024

Gambar 2.66
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)
di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023

5. Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan adalah sarana dan prasarana yang digunakan untuk melaksanakan proses belajar mengajar, seperti gedung sekolah, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan lain-lain. Jumlah Sekolah untuk jenjang SD/MI/Sederajat paling banyak dibandingkan dengan jenjang lainnya. Jumlah ini meningkat dari 166 unit pada tahun 2019 menjadi 169 unit pada tahun 2023. Jumlah Sekolah untuk jenjang SMP/MTS/Sederajat meningkat dari 72 unit pada tahun 2019 menjadi 74 unit pada tahun 2023. Sedangkan untuk Jumlah Sekolah untuk jenjang SMA/SMK/MA paling sedikit dibandingkan dengan jenjang lainnya, meningkat dari 37 unit pada tahun 2019 menjadi 39 unit pada tahun 2021, dan tetap 39 unit pada tahun 2023. Secara umum, jumlah Sekolah di Kabupaten Banggai Kepulauan cenderung stabil atau sedikit meningkat selama lima tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki komitmen untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi masyarakatnya.



Tabel 2.48
Fasilitas Pendidikan Kabupaten Banggai Kepulauan (Unit)
Tahun 2019-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
SD/MI/Sederajat	166	166	166	169	169
SMP/MTS/Sederajat	72	72	72	74	74
SMA/SMK/MA	37	37	39	39	39

Sumber: BPS Kab. Bangkep, 2023 (diolah)

6. Ketersediaan Guru

Rasio guru terhadap siswa adalah jumlah siswa yang diampu oleh setiap guru berdasarkan jenjang pendidikan tertentu. Mengacu pada Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, rasio guru dan siswa ideal jika rata-rata sebesar 20. Sementara itu untuk jenjang SD/MI di Kabupaten Banggai Kepulauan pada tahun ajaran 2023 rasio guru dan siswa sebesar 8, artinya setiap guru mengampu 8 siswa.

Sedangkan pada jenjang SMP/MTs rasio guru terhadap siswa adalah sebesar 6. Kedua rasio guru dan siswa pada kedua jenjang tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan guru di Kabupaten Banggai Kepulauan sudah menunjukkan kondisi yang ideal. Namun, dalam kenyataannya ada sekolah yang masih kekurangan guru kelas dan guru mata pelajaran tertentu. Permasalahan lain yang terjadi juga hampir separuh guru tersebut adalah guru non ASN. Secara lebih lengkap, jumlah guru dan siswa pada jenjang pendidikan dasar Kabupaten Banggai Kepulauan selama 5 tahun sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 2.49
Ketersedian Guru di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
I	SD/MI					
	Jumlah Guru	1.242	1.507	1.496	1.535	1.679
	Jumlah Siswa	13.745	13.465	13.101	13.035	13.051
	Rasio Guru per 10.000 Murid	904	1119	1142	1178	1286
II	SMP/MTs					
	Jumlah Guru	827	924	958	973	953
	Jumlah Siswa	6.832	6.715	6.355	6.129	5.846
	Rasio Guru per 10.000 Murid	1210	1376	1507	1588	1630

Sumber: BPS Kab. Bangkep, 2024 (diolah)

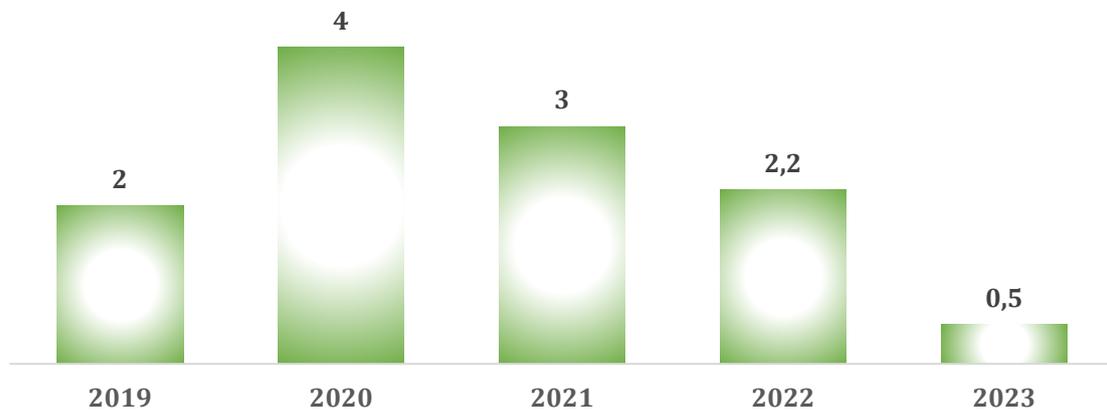


2.4.2.2 Kesehatan

Kualitas SDM salah satunya dipengaruhi oleh derajat kesehatan masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat salah satunya ditandai dengan meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH) dan perilaku masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta penyediaan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses oleh masyarakat. Terdapat berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam meningkatkan AHH, antara lain dijelaskan sebagai berikut.

1. Angka Kematian Bayi

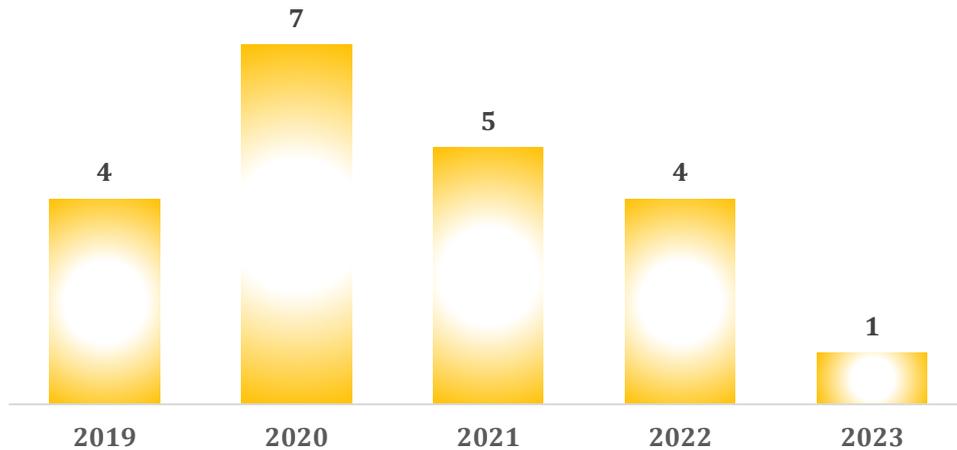
Angka Kematian Bayi adalah angka yang menunjukkan jumlah kematian bayi di bawah usia 1 tahun dari setiap 1.000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Angka kematian bayi merupakan indikator yang sensitif terhadap ketersediaan kualitas dan pemanfaatan pelayanan kesehatan terutama yang berhubungan dengan perinatal yang mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan kesehatan ibu, lingkungan, perilaku dan status sosial orang tua bayi. Kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang optimal akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan. Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Banggai Kepulauan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan, 2024

Gambar 2.67
Angka Kematian Bayi di Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2019-2023

Untuk melihat jumlah kematian bayi secara absolut terdapat pada gambar berikut.



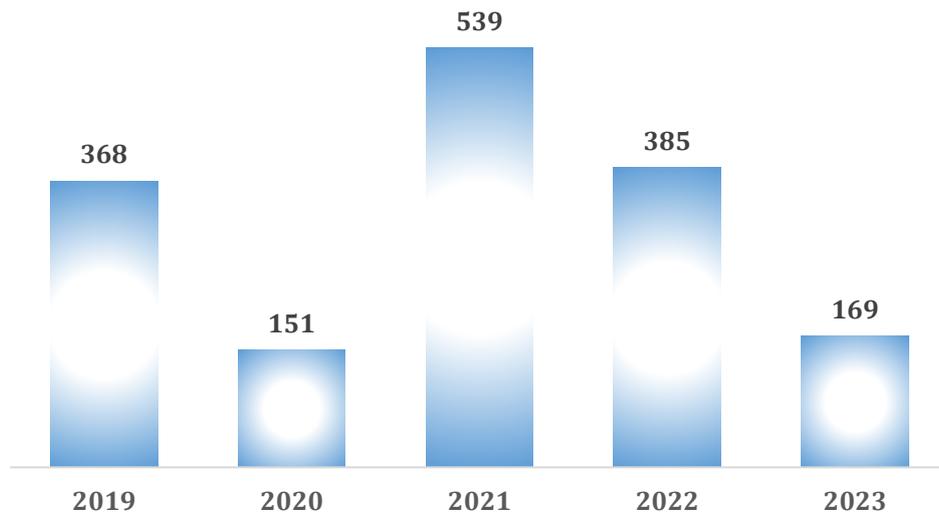
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan, 2024

Gambar 2.68
Jumlah Kematian Bayi di Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2019-2023

Berdasarkan gambar tersebut, dapat diketahui bahwa AKB di Kabupaten Banggai kepulauan selama rentang tahun 2018-2023 secara trens mengalami penurunan dengan jumlah kematian terendah pada tahun 2023 sebanyak 1 kasus dan tertinggi pada tahun 2018 sebanyak 21 kasus.

2. Angka Kematian Ibu

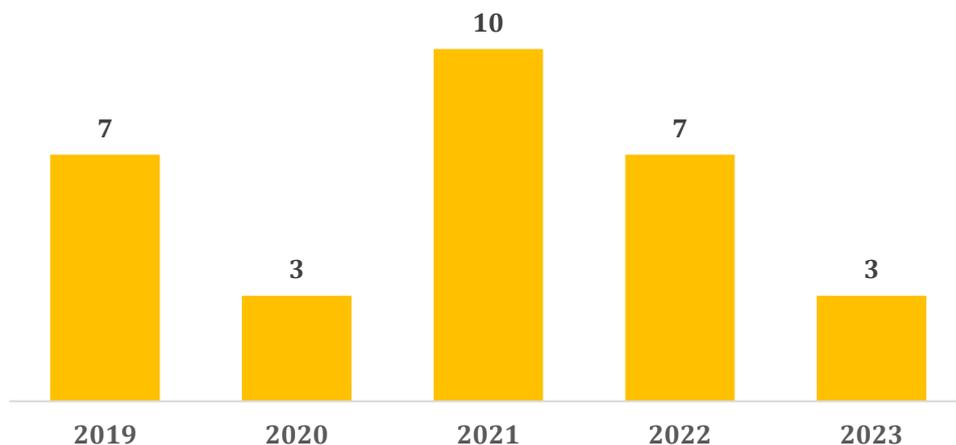
Angka Kematian Ibu adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab- sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Perkembangan AKI di Kabupaten Banggai Kepulauan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 dengan perhitungan secara konversi dikarenakan jumlah lahir hidup tidak mencapai 100.000 per tahun dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Banggai Kepulauan, 2024

Gambar 2.69
Perkembangan Angka Kematian Ibu
di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa untuk kematian ibu terdapat trend yang menurun tahun 2019-2023 dan 2021-2023. Untuk melihat berapa jumlah kematian ibu secara absolut terdapat pada gambar dibawah ini.



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan, 2024

Gambar 2.70
Jumlah Kematian Ibu Secara Absolut
di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023

Berdasarkan gambar tersebut, dapat diketahui bahwa, di Kabupaten Banggai Kepulauan selama rentang tahun 2019-2023 berfluktuasi, dengan AKI tertinggi pada tahun 2021 sebesar 539 per 100.000 kelahiran hidup dan terendah pada tahun 2020



sebesar 151 per 100.000 kelahiran hidup. Kenaikan AKI disebabkan adanya penataan sistem pencatatan dan pelaporan diseluruh sarana fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan sehingga intervensi untuk pemantau kesehatan ibu ditahun berikutnya dapat tepat sasaran.

3. Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Kesehatan

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap sarana pelayanan kesehatan dasar di Kabupaten Banggai Kepulauan yang terus meningkat, maka Pemerintah meningkatkan pelayanan Puskesmas menjadi Puskesmas rawat inap. Pada tahun 2019, dari 14 Puskesmas induk, sebanyak 5 Puskesmas merupakan puskesmas rawat inap, dan terdapat puskesmas pembantu sebanyak puskesmas. Jika ditinjau dari skala wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan data jumlah penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan sampai dengan tahun 2023 sejumlah 123.420 jiwa (data BPS) maka 1 puskesmas kurang lebih melayani 9.131 jiwa. Apabila dibandingkan dengan standar nasional, bahwa 1 puskesmas melayani 30.000 jiwa, maka pada saat ini sarana kesehatan dasar di Kabupaten Banggai Kepulauan sudah mencukupi. Sebagai fasilitas kesehatan rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, rumah sakit berperan dalam memberikan layanan kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif. Data rumah sakit di Kabupaten Banggai Kepulauan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.50

Jumlah Rumah Sakit dan Rasio Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2018-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk	118.403	120.142	121.684	123.576	123.420
Jumlah Rumah Sakit	1	2	2	2	2
Rasio Rumah Sakit per 1.000 penduduk	0,0084	0,0166	0,0164	0,0162	0,0162

Sumber: BPS & Dinas Kesehatan Kab. Banggai Kepulauan, 2024

Salah satu unsur yang berperan dalam percepatan pembangunan kesehatan adalah SDM tenaga kesehatan yang bertugas di sarana pelayanan kesehatan di masyarakat. Pada tahun 2019, jumlah dokter sebanyak 44 orang, dengan rasio 0,372 per 1000 penduduk. Pada tahun 2021, jumlah dokter sebanyak 47 orang, dengan rasio 0,386 per 1000 penduduk. Pada Tahun 2022, jumlah dokter sebanyak 64 dengan rasio 0,518 per 1000 penduduk. Sedangkan pada Tahun 2023, jumlah dokter sebanyak 47 orang dengan rasio 0,381 per 1000 penduduk, Apabila dibandingkan dengan rasio jumlah dokter di Indonesia berdasarkan Sistem Kesehatan Nasional tahun 2012 sebesar 19 dokter per 100.000 penduduk, maka pada saat ini jumlah dokter di Kabupaten Banggai Kepulauan masih belum mencukupi. Selain kecukupan kuantitas SDM Kesehatan, kualitas SDM Kesehatan juga mutlak diperlukan dalam



menunjang percepatan pembangunan kesehatan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.51
Jumlah Dokter dan Rasio Dokter Terhadap Jumlah Penduduk
Tahun 2018-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk	118.403	120.142	121.684	123.576	123.420
Jumlah Rumah Sakit	1	2	2	2	2
Rasio Rumah Sakit per 1.000 penduduk	0,0084	0,0166	0,0164	0,0162	0,0162

Sumber: BPS & Dinas Kesehatan Kab. Banggai Kepulauan, 2024

2.4.2.3 Urusan Pekerjaan Umum

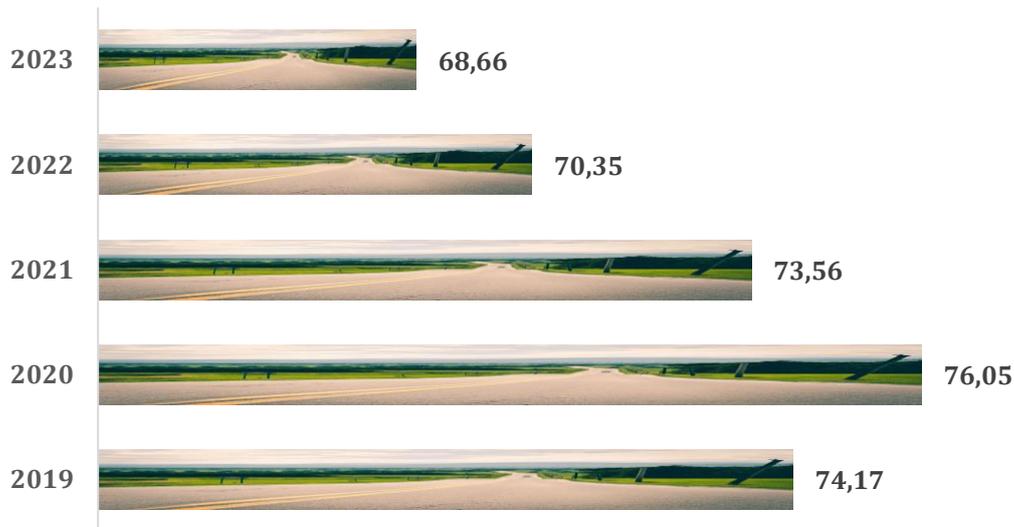
1. Proporsi Panjang Jalan Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Jalan merupakan salah satu infrastruktur yang mendasar dalam segala aktivitas pemenuhan kebutuhan manusia. Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan berupaya penuh dalam pelaksanaan pengembangan jaringan jalan sehingga pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat segera terlaksana. Pada tahun 2023, rasio panjang jalan terhadap jumlah penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan adalah 0,54; di mana jalan Kabupaten Banggai Kepulauan sepanjang 951.735 meter melayani jumlah penduduk sebesar 127.485 orang.

Pada Tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, panjang jalan kondisi mantap menjadi 36,96 persen dari panjang jalan 951.735 m, Persentase panjang jalan kondisi mantap di Kabupaten Banggai Kepulauan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Proporsi panjang jalan jaringan jalan dalam kondisi baik adalah perbandingan antara panjang jalan jaringan jalan yang memiliki tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 6 persen dengan panjang jalan jaringan jalan secara keseluruhan dalam satu tahun. Proporsi panjang jalan jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Banggai Kepulauan cenderung tinggi, dengan rata-rata 72,54 persen selama lima tahun. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar jalan jaringan jalan di Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki kualitas yang baik dan dapat mendukung arus lalu lintas dengan lancar.

Proporsi panjang jalan jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Banggai Kepulauan mengalami fluktuasi selama lima tahun. Angka ini naik turun dari 74,17 persen pada tahun 2019, kemudian naik menjadi 76,05 persen pada tahun 2020. Pada tahun 2021, angka ini turun menjadi 73,56 persen, dan turun lagi menjadi 70,35 persen pada tahun 2022. Selanjutnya pada tahun 2023 sedikit mengalami penurunan 68,66 persen. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



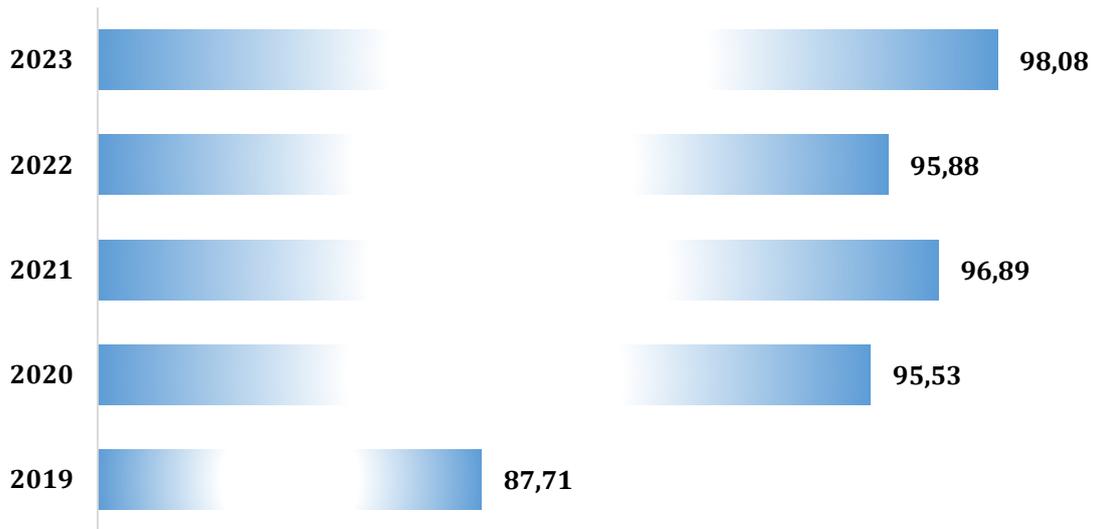
Sumber: BPS Kabupaten Bangkep, 2024 (diolah)

Gambar 2.71

**Proporsi Panjang Jalan Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik (Persen)
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023**

2. Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih

Persentase penduduk berakses air minum di Kabupaten Banggai Kepulauan cenderung tinggi, dengan rata-rata 84,27 persen selama lima tahun. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki akses ke air minum yang aman, bersih, dan layak. Ini bisa berdampak positif pada kesehatan dan kesejahteraan penduduk di daerah tersebut. Persentase penduduk berakses air minum di Kabupaten Banggai Kepulauan mengalami fluktuasi selama lima tahun. Angka ini naik turun dari 85,00 persen pada tahun 2019, kemudian turun menjadi 82,00 persen pada tahun 2020. Pada tahun 2021, angka ini naik menjadi 86,27 persen, dan naik lagi menjadi 88,08 persen pada tahun 2022 dan ditahun 2023 meningkat menjadi 98,08 persen. Data terkait disajikan pada gambar berikut ini.

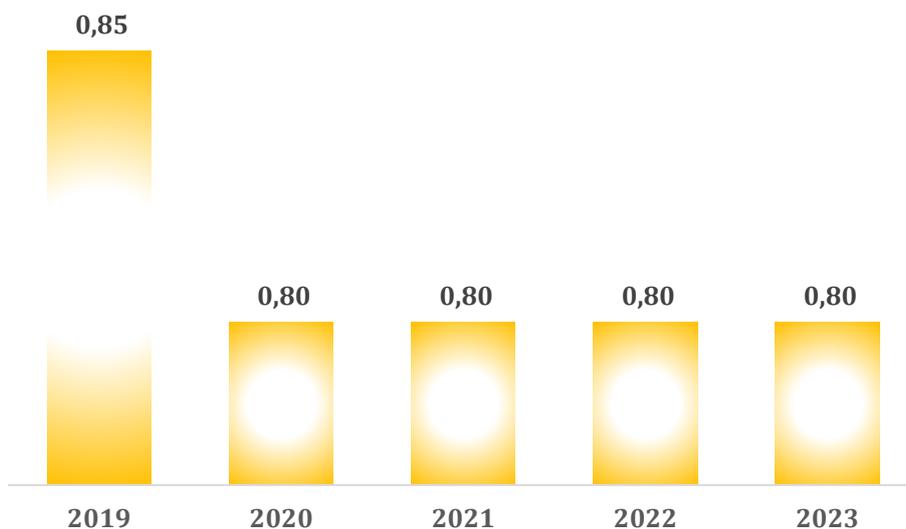


Sumber: BPS, Sulawesi Tengah dalam Angka, 2024 (diolah)

Gambar 2.72
Persentase Penduduk Berakses Air Minum
di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023

3. Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk

Rasio panjang jalan adalah perbandingan antara panjang jalan yang ada di suatu daerah dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut dalam satu tahun. Rasio ini mengukur seberapa luas jaringan jalan yang dapat digunakan oleh penduduk di suatu daerah.



Sumber: BPS Kab. Bangkep, 2024 (diolah)

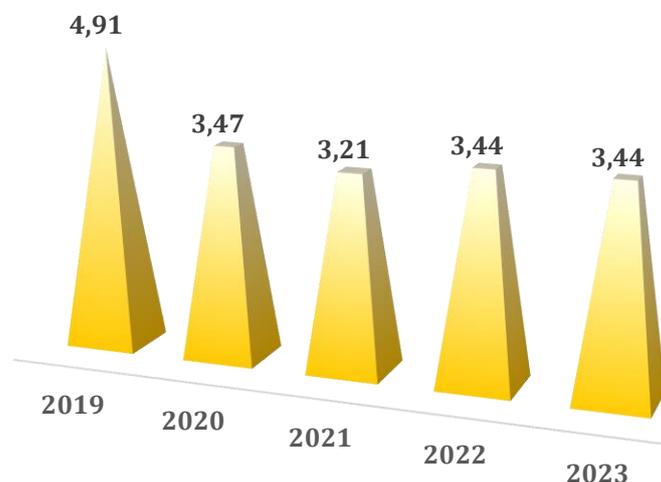
Gambar 2.73
Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Kabupaten Banggai
Kepulauan Tahun 2019-2023



Rasio panjang jalan di Kabupaten Banggai Kepulauan cenderung tinggi, dengan rata-rata 0,80 selama lima tahun. Angka ini menunjukkan bahwa setiap satu penduduk di Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki akses ke jalan sepanjang 0,80 meter. Ini bisa berdampak positif pada mobilitas dan konektivitas penduduk di daerah tersebut. Rasio panjang jalan di Kabupaten Banggai Kepulauan mengalami fluktuasi selama lima tahun. Angka ini naik turun dari 0,85 pada tahun 2019, kemudian turun menjadi 0,80 pada tahun 2020, 2021, dan 2022 serta tahun 2023.

4. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk

Rasio tempat ibadah adalah perbandingan antara jumlah tempat ibadah dengan jumlah penduduk dalam satu tahun. Tempat ibadah adalah bangunan atau tempat yang digunakan untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianut oleh masyarakat. Rasio ini mengukur seberapa mudah penduduk mendapatkan akses ke tempat ibadah di suatu daerah. Rasio tempat ibadah di Kabupaten Banggai Kepulauan cenderung tinggi, dengan rata-rata 3,69 selama lima tahun. Angka ini menunjukkan bahwa setiap satu tempat ibadah di Kabupaten Banggai Kepulauan melayani ratusan penduduk. Ini bisa berdampak positif pada kebebasan dan kerukunan beragama bagi masyarakat. Rasio tempat ibadah di Kabupaten Banggai Kepulauan mengalami fluktuasi selama lima tahun. Angka ini naik turun dari 4,91 pada tahun 2019, kemudian turun menjadi 3,47 pada tahun 2020. Pada tahun 2021, angka ini turun menjadi 3,21, dan naik lagi menjadi 3,44 pada tahun 2022 dan tahun 2023 juga diangka 3,44.



Sumber: BPS Kab. Bangkep, 2023 (diolah)

Gambar 2.74

Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023

2.4.2.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Dalam rangka pengentasan perumahan telah dilakukan penyediaan rumah layak huni dari dana APBN dan APBD. Harapannya ini adalah agar Masyarakat



Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum mempunyai rumah, dapat memiliki rumah yang layak untuk ditinggali.

1. Rasio Rumah Layak Huni

Rasio pemukiman layak huni adalah perbandingan antara jumlah pemukiman yang memiliki fasilitas dasar seperti air bersih, listrik, sanitasi, dan drainase dengan jumlah pemukiman secara keseluruhan dalam satu tahun. Rasio pemukiman layak huni di Kabupaten Banggai Kepulauan cenderung rendah, dengan rata-rata 6,61/9 selama lima tahun. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar pemukiman di Kabupaten Banggai Kepulauan tidak memiliki fasilitas dasar yang memadai. Ini bisa berdampak negatif pada kesehatan dan kesejahteraan penduduk di daerah tersebut. Rasio pemukiman layak huni di Kabupaten Banggai Kepulauan mengalami fluktuasi selama lima tahun. Angka ini naik turun dari 6,3/9 pada tahun 2018 menjadi 6,48/9 pada tahun 2019, kemudian naik menjadi 6,65/9 pada tahun 2020. Pada tahun 2021 dan 2022, angka ini naik menjadi 6,80/9. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel beriku ini

Tabel 2.52
Rasio Pemukiman Layak Huni Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Banggai Kepulauan	6,48/9	6,65/9	6,80/9	6,80/9	6,95/9

Sumber: Dinas Perumahan Kab. Banggai Kepulauan, 2024

2. Cakupan Ketersediaan Layanan Rumah Layak Huni

Cakupan ketersediaan layanan rumah layak huni adalah persentase rumah tangga yang memiliki akses ke rumah layak huni dari jumlah rumah tangga total dalam satu tahun. Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi syarat kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan, serta memiliki fasilitas dasar seperti air bersih, listrik, sanitasi, dan drainase. Cakupan ini mengukur seberapa baik ketersediaan dan kualitas rumah bagi penduduk di suatu daerah. Cakupan ketersediaan layanan rumah layak huni di Kabupaten Banggai Kepulauan cenderung tinggi, dengan rata-rata 73,43 persen selama lima tahun. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki akses ke rumah layak huni. Ini bisa berdampak positif pada kesehatan dan kesejahteraan penduduk di daerah tersebut.

Cakupan ketersediaan layanan rumah layak huni di Kabupaten Banggai Kepulauan meningkat selama lima tahun, angka cakupan ketersediaan rumah layak huni dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.53****Cakupan Ketersediaan Layanan Rumah Layak Huni Tahun 2019-2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Banggai Kepulauan	72,00	73,96	75,40	75,80	75,88

Sumber: Dinas Perumahan Kab. Banggai Kepulauan, 2024

3. Persentase Pemukiman yang Tertata

Persentase pemukiman yang tertata adalah perbandingan antara jumlah pemukiman yang memiliki tata ruang yang baik, sesuai dengan perencanaan dan peraturan yang berlaku, dengan jumlah pemukiman secara keseluruhan dalam satu tahun. Persentase ini mengukur seberapa baik kualitas pemukiman yang dapat mendukung kenyamanan, keamanan, dan kelestarian lingkungan di suatu daerah. Persentase pemukiman yang tertata di Kabupaten Banggai Kepulauan cenderung tinggi, dengan rata-rata 81,20 persen selama lima tahun. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar pemukiman di Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki tata ruang yang baik, sesuai dengan perencanaan dan peraturan yang berlaku. Ini bisa berdampak positif pada kenyamanan, keamanan, dan kelestarian lingkungan di daerah tersebut.

Persentase pemukiman yang tertata di Kabupaten Banggai Kepulauan mengalami fluktuasi selama lima tahun. Angka ini naik turun dari 75,00 persen pada tahun 2018 menjadi 80,00 persen pada tahun 2019, kemudian turun menjadi 75,00 persen pada tahun 2020. Pada tahun 2021, angka ini naik menjadi 80,00 persen, dan naik lagi menjadi 96,00 persen pada tahun 2022 juga ditahun 2023.

Tabel 2.54**Persentase Pemukiman yang tertata Tahun 2018-2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Banggai Kepulauan	80,00	75,00	80,00	96,00	96,00

Sumber: Dinas Perumahan Kab. Banggai Kepulauan, 2024

4. Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh

Persentase lingkungan pemukiman kumuh adalah perbandingan antara luas lingkungan pemukiman yang memiliki kondisi fisik yang buruk, tidak sehat, dan tidak layak huni dengan luas lingkungan pemukiman secara keseluruhan dalam satu tahun. Persentase ini mengukur seberapa besar masalah kumuh yang dihadapi oleh penduduk di suatu daerah. Persentase lingkungan pemukiman kumuh di Kabupaten Banggai Kepulauan sangat rendah, dengan rata-rata 2,29 persen selama lima tahun (2019-2023). Angka ini menunjukkan bahwa sebagian kecil lingkungan pemukiman di Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki kondisi fisik yang buruk, tidak sehat, dan



tidak layak huni. Ini bisa berdampak positif pada kenyamanan, keamanan, dan kelestarian lingkungan di daerah Kabupaten Banggai Kepulauan. Persentase lingkungan pemukiman kumuh di Kabupaten Banggai Kepulauan tidak berubah selama lima tahun. Angka ini menunjukkan bahwa tidak ada peningkatan atau penurunan masalah kumuh di Kabupaten Banggai Kepulauan selama periode tersebut.

Tabel 2.55
Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Banggai Kepulauan	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29

Sumber: Dinas Perumahan Kab. Banggai Kepulauan, 2024

2.4.2.5 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan mengupayakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat melalui penegakan perda, penyelesaian pelanggaran K3, pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta upaya-upaya lainnya terkait pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan warga masyarakat.

1. Penegakan Perda

Sebagai salah satu unsur strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah kepatuhan masyarakat dan disiplin aparatur dalam menegakkan peraturan. Data jumlah Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.56
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah	200	200	200	158	161
Pamong Praja	118.403	120.142	121.684	123.576	123.420
Jumlah Penduduk	17	17	17	16	16

Sumber: Satpol PP dan Damkar Kab. Banggai Kepulauan, 2024



2. Penanganan Bencana kebakaran

Pesatnya pembangunan yang diikuti oleh arus urbanisasi yang meningkat menimbulkan potensi munculnya kawasan-kawasan padat penduduk dengan sarana dan prasarana/infrastruktur yang belum memadai. Umumnya pemasangan dan pemeliharaan listrik rumah tangga yang belum sesuai ketentuan menjadi salah satu penyebab bencana kebakaran yang merupakan salah satu bencana perkotaan, di samping kejadian bencana lainnya.

Tabel 2.57

Kejadian Kebakaran per Penyebab Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Hubungan Listrik	5	1	3	3	3
Api Terbuka	0	1	0	0	4
Api Mekanis	0	0	0	1	1
Dalam Penyelidikan	0	0	0	0	0
Tidak	0	0	0	0	0
Total	5	2	3	4	8

Sumber: Satpol PP dan Damkar Kab. Banggai Kepulauan, 2024

Penanggulangan bencana kebakaran dilakukan Pemerintah dengan merespon laporan kejadian kebakaran hingga siap sampai di tempat tujuan dalam jangka waktu maksimal 15 menit. Waktu tanggap ini dapat terlaksana didukung oleh upaya dan kesigapan kerja tim pemadam kebakaran serta ketersediaan sarana prasarana pemadam kebakaran yang optimal, termasuk operasional Command Center 112 yang memudahkan masyarakat untuk melaporkan segala kejadian kedaruratan sehingga pelayanan secara keseluruhan menjadi lebih baik. Pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, rata-rata pemenuhan waktu tanggap Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam menangani kejadian kebakaran telah mencapai 100 persen. Rincian tingkat waktu tanggap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.58

Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah kejadian kebakaran dengan waktu tanggap maksimal 15 menit	3	2	2	4	3
Jumlah kejadian kebakaran	5	2	1	1	8
Persentase penanganan waktu tanggap kejadian	60%	50%	50%	75%	50%

Sumber: Satpol PP dan Damkar Kab. Banggai Kepulauan, 2024



Cakupan pelayanan wilayah manajemen kebakaran Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023 dapat dilihat bahwa jumlah pos pemadam kebakaran sebanyak 21 unit, jumlah pos pemadam kebakaran sebanyak 21 unit direncanakan dapat mencakup jumlah penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai dengan waktu respon yang telah ditentukan.

Tabel 2.59**Cakupan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran	0	1	0	0	0
Jumlah Pos Pemadam Kebakaran	0	0	0	0	0
Jumlah Penduduk	118.403	120.142	121.684	123.576	123.420
Jumlah pelayanan WMK	5	2	3	4	8

Sumber: Satpol PP dan Damkar Kab. Banggai Kepulauan, 2024

2.4.2.6 Urusan Sosial

Urusan sosial menurut UU 23 Tahun 2014 adalah salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan sosial sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah.

Tabel 2.60**Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018-2022**

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Cakupan Jumlah Penerima Tunjangan Hari Tua bagi Masyarakat Miskin	20 orang	0	0	0	0
3	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	PKH 6536, Bencana sosial 68 jiwa	99	99	99	99
4	Persentase PMKS yang Tertangani	80%	99	99	99	99
5	Persentase Korban Bencana Alam yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	97,87%	98	98	98	98
6	Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan sosial	0,03%	0,86	0,86	0,86	0,86

Sumber: Dinas Sosial Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2024



Indikator pertama adalah cakupan jumlah penerima tunjangan hari tua bagi masyarakat miskin. Tunjangan hari tua adalah bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat miskin yang berusia 60 tahun ke atas atau yang tidak mampu bekerja. Data menunjukkan bahwa jumlah penerima tunjangan hari tua menurun dari 50 orang pada tahun 2018 menjadi 20 orang pada tahun 2019, dan menjadi nol pada tahun 2020 hingga 2022. Hal ini dapat berarti bahwa masyarakat miskin yang memenuhi syarat untuk mendapatkan tunjangan hari tua telah berkurang atau tidak ada lagi, atau bahwa program bantuan sosial ini telah dihentikan atau diganti dengan program lain.

Indikator kedua adalah persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial. Bantuan sosial adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah atau pihak lain kepada PMKS untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, kesehatan, pendidikan, perumahan, dan lain-lain. Data menunjukkan bahwa persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial meningkat dari 75% pada tahun 2018 menjadi 80 persen pada tahun 2019, dan mencapai 99 persen pada tahun 2020 hingga 2022. Hal ini dapat berarti bahwa pemerintah telah berhasil menjangkau dan memberikan bantuan sosial kepada hampir seluruh PMKS di Kabupaten Banggai Kepulauan. Data juga menunjukkan jenis-jenis bantuan sosial yang diberikan, seperti Rastra (Beras Sejahtera), PKH (Program Keluarga Harapan), bantuan anak terlantar, dan bantuan bencana sosial.

Indikator ketiga adalah persentase PMKS yang tertangani. PMKS yang tertangani adalah PMKS yang telah mendapatkan bantuan sosial dan telah keluar dari garis kemiskinan atau meningkatkan kesejahteraan sosialnya; Data menunjukkan bahwa persentase PMKS yang tertangani meningkat dari 75 persen pada tahun 2018 menjadi 80 persen pada tahun 2019, dan mencapai 99 persen pada tahun 2020 hingga 2022. Hal ini dapat berarti bahwa bantuan sosial yang diberikan telah efektif dan berdampak positif bagi PMKS, sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dan tidak lagi bergantung pada bantuan sosial.

Indikator keempat adalah persentase korban bencana alam yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat. Bencana alam adalah peristiwa alam yang menyebabkan kerusakan, kerugian, atau kematian yang besar, seperti gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, gunung meletus, dan lain-lain. Masa tanggap darurat adalah masa segera setelah terjadinya bencana alam, yang bertujuan untuk menyelamatkan jiwa, mengurangi penderitaan, dan memulihkan fungsi-fungsi vital masyarakat. Bantuan sosial selama masa tanggap darurat adalah bantuan yang diberikan kepada korban bencana alam untuk memenuhi kebutuhan mendesak mereka, seperti makanan, air, tenda, selimut, obat-obatan, dan lain-lain. Data menunjukkan bahwa persentase korban bencana alam yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat meningkat dari 97,87 persen pada tahun 2019 menjadi 98 persen pada tahun 2020 hingga 2022. Hal ini dapat berarti bahwa pemerintah telah cepat dan tanggap dalam memberikan bantuan sosial kepada korban bencana alam di Kabupaten Banggai Kepulauan.



Indikator kelima adalah persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial. Penyandang cacat fisik dan mental adalah orang yang mengalami keterbatasan atau hambatan dalam beraktivitas akibat gangguan fisik atau mental. Lanjut usia tidak potensial adalah orang yang berusia 60 tahun ke atas atau yang tidak mampu bekerja. Jaminan sosial adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah atau pihak lain kepada penyandang cacat dan lanjut usia untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, kesehatan, pendidikan, perumahan, dan lain-lain. Data menunjukkan bahwa persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial meningkat dari 0,06 persen pada tahun 2018 menjadi 0,03 persen pada tahun 2019, dan menjadi 0,86 persen pada tahun 2020 hingga 2022. Hal ini dapat berarti bahwa pemerintah telah meningkatkan akses dan pemberian jaminan sosial kepada penyandang cacat dan lanjut usia di Kabupaten Banggai Kepulauan.



BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah (*local government finance/regional finance*) merujuk pada semua aspek pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Ini mencakup pendapatan, pengeluaran, dan pengelolaan aset daerah. Pendapatan daerah terdiri dari berbagai sumber, seperti pajak daerah, retribusi, dana perimbangan dari pemerintah pusat (seperti Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus), serta pendapatan asli daerah lainnya. Pengeluaran daerah digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dana yang dikelola oleh pemerintah daerah digunakan secara efisien dan efektif demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pembangunan berkelanjutan di daerah tersebut.

Bab ini akan membahas gambaran pengelolaan keuangan daerah yang berisi penjelasan tentang kinerja pengelolaan keuangan di masa lalu, perilaku data dan informasi pertanggungjawaban keuangan daerah, dan bagaimana proyeksi ketersediaan dana pembangunan pada perodesasi RPJMD mendatang. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah, hal ini sangat penting dalam penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Kepulauan. Untuk memahami tingkat kemampuan keuangan daerah, maka perlu dicermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.



3.1. GAMBARAN RINGKAS KONDISI KEUANGAN DAERAH LIMA TAHUN TERAKHIR

3.1.1 Gambaran Pelaksanaan APBD

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mencakup seluruh proses yang melibatkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Kinerja pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dapat dilihat dari realisasi APBD pada periode sebelumnya.

APBD sendiri merupakan dokumen yang memuat rencana keuangan tahunan daerah yang mencakup pendapatan daerah, belanja daerah, serta pembiayaan daerah, dan ditetapkan melalui peraturan daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD adalah bentuk pengelolaan keuangan daerah yang disahkan setiap tahun melalui peraturan daerah. Selain itu, sesuai dengan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, APBD memiliki beberapa fungsi utama, antara lain:

1. *Fungsi otorisasi*, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;
2. *Fungsi perencanaan*, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;
3. *Fungsi pengawasan*, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyalenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
4. *Fungsi alokasi*, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;
5. *Fungsi distribusi*, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
6. *Fungsi stabilisasi*, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

3.1.1.1 Gambaran Pendapatan Daerah

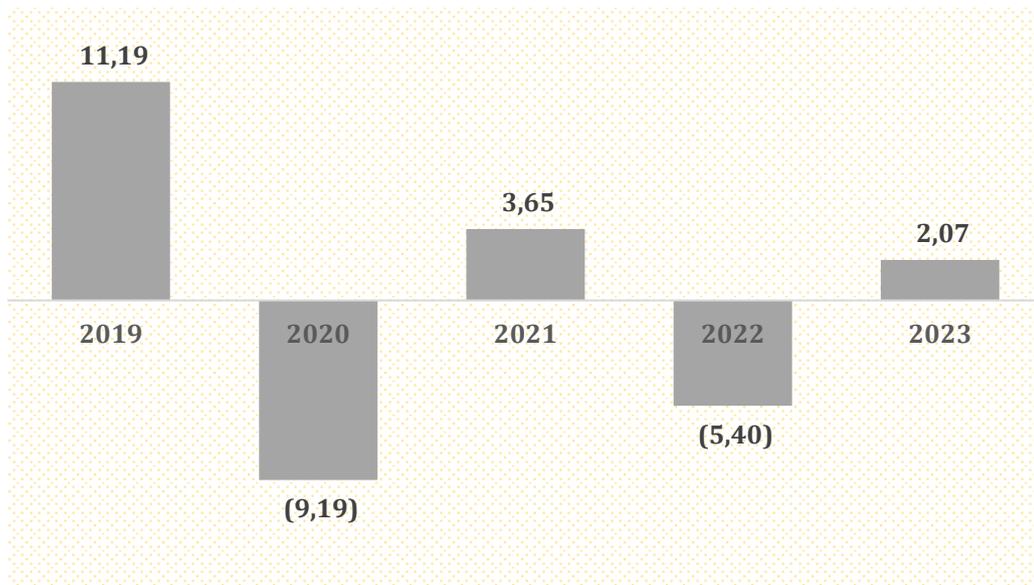
Pertumbuhan anggaran pendapatan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan selama lima tahun terakhir menunjukkan pola yang fluktuatif, mencerminkan tantangan dan dinamika yang dihadapi daerah ini dalam mengelola pendapatan. Pada tahun 2019, pertumbuhan yang kuat sebesar 11,19 persen mencerminkan kondisi ekonomi yang relatif stabil serta efektivitas kebijakan fiskal daerah dalam meningkatkan pendapatan. Namun, masuknya tahun 2020 membawa tantangan besar dengan penurunan pertumbuhan sebesar (9,19) persen. Penurunan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak ekonomi dari pandemi Covid-19, yang mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi, berkurangnya penerimaan dari sektor pajak dan retribusi, serta penurunan transfer dari pusat.



Pada tahun 2021, terlihat upaya pemulihan dengan pertumbuhan kembali ke angka positif sebesar 3,65 persen. Meskipun ini menunjukkan perbaikan, namun laju pertumbuhan yang masih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelum pandemi menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi belum sepenuhnya optimal. Keterbatasan dalam sumber pendapatan serta mungkin adanya hambatan dalam pelaksanaan kebijakan fiskal menjadi faktor yang perlu dicermati lebih lanjut.

Tahun 2022 kembali mencatatkan kontraksi dengan pertumbuhan negatif sebesar (5,40) persen. Ini menandakan bahwa tantangan eksternal dan mungkin juga internal, seperti ketidakstabilan ekonomi global, penurunan harga komoditas, atau kelemahan dalam pengelolaan fiskal daerah, masih menjadi kendala utama. Penurunan ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih adaptif dan responsif dalam mengelola pendapatan daerah, serta mungkin perlunya diversifikasi sumber pendapatan untuk mengurangi ketergantungan pada sumber yang rentan terhadap fluktuasi ekonomi.

Memasuki tahun 2023, pertumbuhan kembali ke jalur positif dengan angka 2,07 persen. Meskipun ini merupakan tanda pemulihan, namun laju pertumbuhan yang relatif kecil menunjukkan bahwa pemulihan masih berjalan lambat dan memerlukan perhatian lebih dalam pengelolaan keuangan daerah. Perlu diupayakan strategi-strategi yang lebih inovatif dan berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan yang lebih stabil di masa depan. Peningkatan kapasitas pendapatan asli daerah (PAD), optimalisasi sumber daya lokal, serta penguatan kerja sama dengan pemerintah pusat dan swasta bisa menjadi langkah-langkah yang efektif dalam menghadapi tantangan ke depan.



Sumber: LRA Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 -2023

Gambar 3.1
Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023

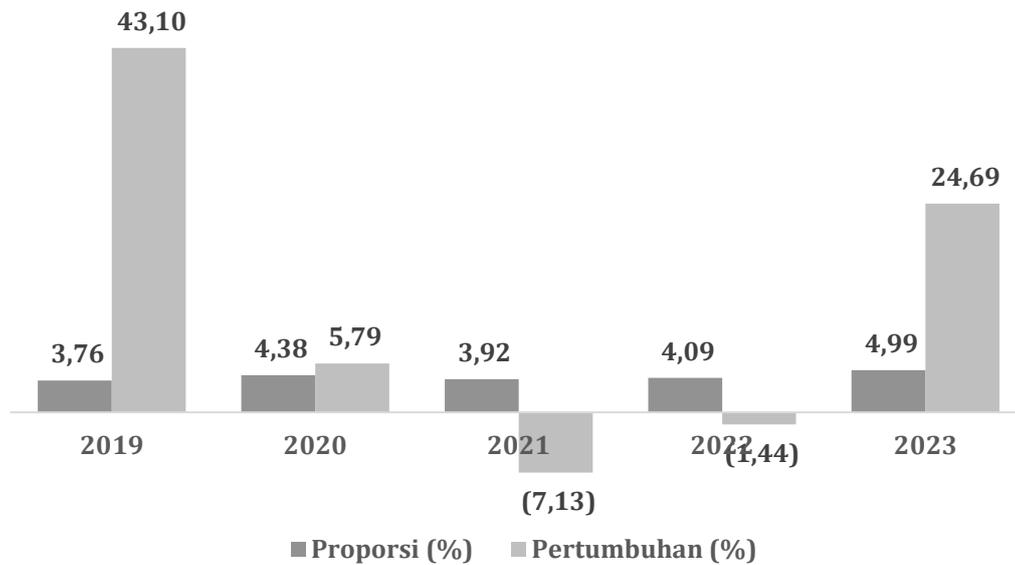


A). Pendapatan Asli Daerah

Proporsi dan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banggai Kepulauan selama periode 2019-2023 menunjukkan variasi yang cukup signifikan, mencerminkan dinamika yang terjadi dalam upaya peningkatan kemandirian fiskal daerah. Pada tahun 2019, proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah berada pada angka 3,76 persen, dengan pertumbuhan PAD yang sangat tinggi sebesar 43,10 persen. Ini menunjukkan upaya yang berhasil dalam meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber lokal. Namun, pada tahun 2020, meskipun proporsi PAD meningkat menjadi 4,38 persen, pertumbuhannya melambat drastis menjadi hanya 5,79 persen. Penurunan laju pertumbuhan ini mungkin disebabkan oleh dampak awal pandemi Covid-19 yang mulai mempengaruhi perekonomian daerah.

Pada tahun 2021, terjadi penurunan baik dalam proporsi maupun pertumbuhan PAD. Proporsi PAD menurun sedikit menjadi 3,92 persen, dan bahkan terjadi pertumbuhan negatif sebesar (7,13) persen. Ini menandakan bahwa sumber-sumber PAD mengalami tekanan yang cukup besar, mungkin disebabkan oleh penurunan aktivitas ekonomi atau penurunan efektivitas dalam pengumpulan PAD. Kondisi ini sedikit membaik pada tahun 2022, di mana proporsi PAD naik sedikit menjadi 4,09 persen, meskipun pertumbuhan PAD masih negatif sebesar (1,44) persen. Stabilitas ini menunjukkan adanya upaya perbaikan, meskipun tantangan dalam meningkatkan PAD masih terasa.

Tahun 2023 menunjukkan tanda pemulihan yang lebih kuat, di mana proporsi PAD naik signifikan menjadi 4,99 persen dengan pertumbuhan PAD yang kembali positif sebesar 24,69 persen. Kenaikan ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli, mungkin melalui peningkatan efisiensi dalam pengumpulan pajak, retribusi, atau pendapatan lainnya. Meskipun begitu, meskipun ada peningkatan proporsi dan pertumbuhan PAD, kontribusinya terhadap total pendapatan daerah masih relatif kecil, menandakan bahwa upaya lebih lanjut diperlukan untuk memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Banggai Kepulauan. Data terkait secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: LRA Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023

Gambar 3.2

**Proporsi dan Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023**

Proporsi item-item Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total PAD Kabupaten Banggai Kepulauan dalam periode 2019-2023 menunjukkan variasi yang mencerminkan perubahan prioritas dan dinamika pengelolaan keuangan daerah. Pajak Daerah, yang merupakan salah satu komponen utama PAD, mengalami fluktuasi proporsi sepanjang lima tahun ini. Pada tahun 2019, kontribusi Pajak Daerah terhadap total PAD sebesar 20,28 persen, namun menurun cukup tajam menjadi 13,26 persen pada tahun 2020, sebelum kembali mengalami kenaikan bertahap hingga mencapai 18,95 persen pada tahun 2022, dan kemudian turun lagi ke 16,04 persen pada tahun 2023. Ini mungkin menunjukkan adanya tantangan dalam pengumpulan pajak atau perubahan kebijakan yang mempengaruhi pendapatan dari sektor ini.

Retribusi Daerah, yang juga menjadi sumber utama PAD, menunjukkan proporsi yang dominan, khususnya pada tahun 2020 dan 2022 dengan proporsi masing-masing 55,22 persen dan 56,08 persen. Proporsi Retribusi Daerah mengalami peningkatan signifikan dari 43,06 persen pada tahun 2019, namun menurun menjadi 33,64 persen pada tahun 2023. Fluktuasi ini bisa mencerminkan perubahan dalam kebijakan penarikan retribusi atau variasi dalam penerimaan dari layanan publik yang dikenai retribusi.

Sementara itu, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan menunjukkan tren peningkatan yang stabil dari 3,86 persen pada tahun 2019 menjadi 10,24 persen pada tahun 2023. Kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan pendapatan dari pengelolaan aset daerah yang dipisahkan, yang mungkin mencerminkan pengelolaan yang lebih efektif atau peningkatan kontribusi



dari BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) atau investasi lainnya.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, yang mencakup berbagai sumber pendapatan lainnya, juga mengalami fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2019, item ini menyumbang 32,81 persen terhadap total PAD, namun menurun menjadi 16,11 persen pada tahun 2022, sebelum kembali meningkat tajam menjadi 40,09 persen pada tahun 2023. Kenaikan tajam di tahun 2023 bisa menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam sumber-sumber pendapatan lain yang sah, mungkin dari hibah, sumbangan, atau hasil denda dan hukuman lainnya yang meningkat.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa sementara beberapa komponen PAD mengalami fluktuasi, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan menunjukkan potensi sebagai sumber pendapatan yang semakin penting. Hal ini mencerminkan adanya pergeseran dalam struktur pendapatan daerah, dengan beberapa item menunjukkan peningkatan kontribusi yang stabil terhadap PAD.

Tabel 3.1
Proporsi Item Pendapatan Asli Daerah Terhadap PAD
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Proporsi Terhadap PAD (persen)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pajak Daerah	20,28	13,26	16,74	18,95	16,04
2.	Retribusi Daerah	43,06	55,22	48,22	56,08	33,64
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3,86	4,70	7,70	8,85	10,24
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	32,81	26,82	27,34	16,11	40,09

Sumber: LRA Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023

B). Pendapatan Transfer

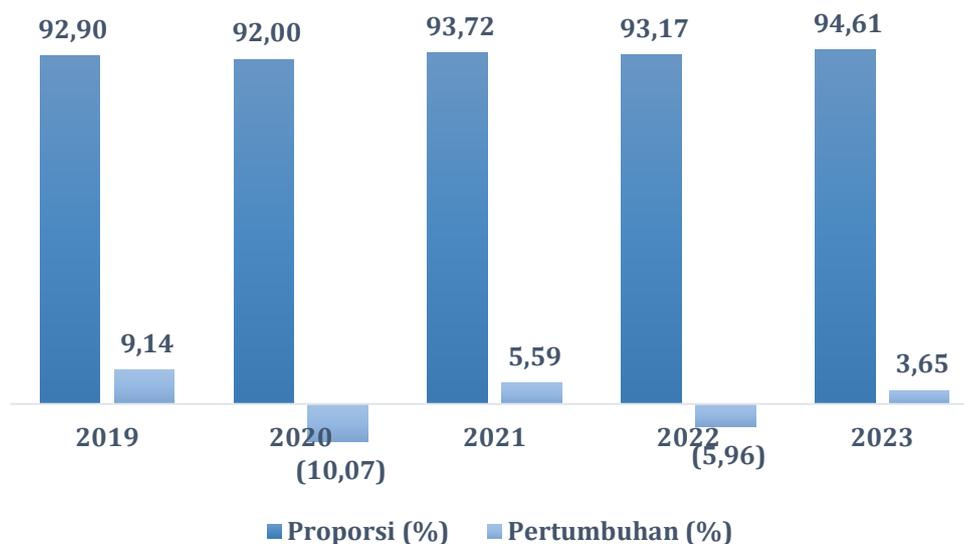
proporsi dan pertumbuhan Pendapatan Transfer Kabupaten Banggai Kepulauan selama periode 2019-2023 menunjukkan bahwa pendapatan transfer dari pemerintah pusat tetap menjadi sumber pendapatan utama bagi daerah ini. Sepanjang lima tahun terakhir, proporsi Pendapatan Transfer terhadap total pendapatan daerah berada pada angka yang sangat tinggi, berkisar antara 92,00 persen hingga 94,61 persen. Pada tahun 2019, proporsi Pendapatan Transfer mencapai 92,90 persen, dan meskipun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2020 menjadi 92,00 persen, proporsi ini kembali meningkat pada tahun-tahun berikutnya, mencapai puncaknya pada 2023 dengan 94,61 persen. Peningkatan ini mencerminkan ketergantungan yang sangat besar Kabupaten Banggai Kepulauan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, yang mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), serta berbagai bentuk transfer lainnya.

Namun, pertumbuhan Pendapatan Transfer menunjukkan pola yang lebih bervariasi. Pada tahun 2019, Pendapatan Transfer tumbuh sebesar 9,14 persen, menandakan adanya peningkatan alokasi dari pemerintah pusat yang mungkin



disebabkan oleh program-program baru atau peningkatan kebutuhan fiskal daerah. Namun, pada tahun 2020, pertumbuhan ini berbalik menjadi negatif sebesar (10,07) persen, kemungkinan besar akibat pengurangan alokasi transfer yang terkait dengan dampak ekonomi dari pandemi Covid-19 dan pengalihan prioritas anggaran nasional untuk penanganan pandemi. Meskipun ada sedikit pemulihan pada tahun 2021 dengan pertumbuhan 5,59 persen, pertumbuhan kembali negatif pada tahun 2022 dengan angka (5,96) persen. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh penyesuaian anggaran pemerintah pusat atau perubahan dalam mekanisme penyaluran dana transfer.

Pada tahun 2023, pertumbuhan Pendapatan Transfer kembali positif dengan angka 3,65 persen. Meskipun pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, hal ini menandakan adanya stabilisasi dalam alokasi dana transfer dari pemerintah pusat. Meskipun demikian, pola fluktuasi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Banggai Kepulauan harus mempertimbangkan diversifikasi sumber pendapatannya untuk mengurangi ketergantungan yang tinggi pada pendapatan transfer, terutama dalam menghadapi kemungkinan perubahan kebijakan fiskal di tingkat nasional yang bisa mempengaruhi alokasi dana ke daerah.



Sumber: LRA Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023

Gambar 3.3

**Proporsi dan Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Transfer
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023**

Proporsi item Pendapatan Transfer terhadap total Pendapatan Transfer Kabupaten Banggai Kepulauan selama periode 2019-2023 menunjukkan dominasi yang sangat kuat dari Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Sepanjang lima tahun tersebut, Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat selalu mendominasi, dengan proporsi yang sangat tinggi, yakni di atas 96 persen setiap tahun. Pada tahun 2019, proporsi



Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mencapai puncaknya di 97,79 persen, dan meskipun terjadi penurunan kecil selama beberapa tahun berikutnya, proporsi ini tetap tinggi dengan angka 96,07 persen pada tahun 2023. Dominasi ini mencerminkan bahwa sebagian besar pendapatan transfer yang diterima oleh Kabupaten Banggai Kepulauan bersumber dari alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah pusat, yang mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH).

Di sisi lain, Pendapatan Transfer Antar Daerah, yang mencakup aliran dana antar pemerintah daerah seperti hibah atau bantuan dari provinsi, memiliki proporsi yang jauh lebih kecil namun menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, Pendapatan Transfer Antar Daerah hanya menyumbang 2,21 persen dari total Pendapatan Transfer. Namun, proporsi ini terus meningkat, mencapai 3,93 persen pada tahun 2023. Peningkatan ini mungkin mencerminkan peningkatan kerja sama antar daerah atau bantuan yang lebih besar dari pemerintah provinsi. Meskipun kontribusi Pendapatan Transfer Antar Daerah masih relatif kecil dibandingkan dengan Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat, tren peningkatan ini menunjukkan potensi yang dapat dioptimalkan lebih lanjut oleh Kabupaten Banggai Kepulauan untuk mendiversifikasi sumber pendapatan dan mengurangi ketergantungan pada dana dari pusat. Secara keseluruhan, meskipun Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat tetap menjadi komponen utama, peran Pendapatan Transfer Antar Daerah yang terus meningkat menjadi indikasi positif terhadap potensi kerjasama regional dan penguatan otonomi fiskal melalui sumber-sumber pendanaan alternatif.

Tabel 3.2**Proporsi Item Pendapatan Transfer Terhadap Pendapatan Transfer Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023**

No.	Uraian	Proporsi Terhadap Pendapatan Transfer				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	97,79	97,42	97,13	96,25	96,07
2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	2,21	2,58	2,87	3,75	3,93

Sumber: LRA Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 s/d tahun 2023

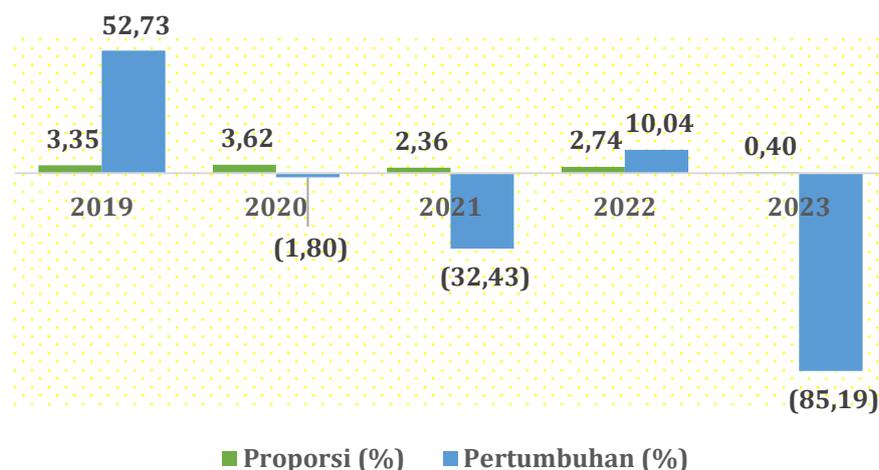
C). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Proporsi dan pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Banggai Kepulauan selama periode 2019-2023 menunjukkan tren yang fluktuatif dan cenderung menurun secara keseluruhan. Pada tahun 2019, proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap total pendapatan daerah berada di angka 3,35 persen, dengan pertumbuhan yang cukup signifikan sebesar 52,73 persen. Ini menunjukkan bahwa pada tahun tersebut, ada peningkatan yang kuat dari sumber-sumber pendapatan lain yang sah, seperti hibah, sumbangan, atau pendapatan yang tidak termasuk dalam kategori lain.



Namun, pada tahun 2020, meskipun proporsi terhadap total pendapatan daerah sedikit meningkat menjadi 3,62 persen, pertumbuhan pendapatan di kategori ini mengalami penurunan sebesar (1,80) persen. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh berkurangnya kontribusi dari sumber-sumber pendapatan tertentu akibat dampak ekonomi dari pandemi Covid-19, yang mempengaruhi banyak sektor. Pada tahun 2021, proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah menurun drastis menjadi 2,36 persen, dengan pertumbuhan negatif yang signifikan sebesar (32,43) persen. Ini menandakan adanya penurunan yang cukup tajam dalam penerimaan dari sumber-sumber ini, yang kemungkinan besar disebabkan oleh penurunan hibah atau bantuan lain yang biasanya diterima oleh daerah. Pada tahun 2022, meskipun proporsinya sedikit meningkat menjadi 2,74 persen, pertumbuhan pendapatan di kategori ini kembali menunjukkan angka positif sebesar 10,04 persen, menandakan adanya sedikit pemulihan atau peningkatan dalam pendapatan yang sah dari sumber-sumber lain. Namun, pada tahun 2023, proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami penurunan drastis hingga hanya mencapai 0,40 persen dari total pendapatan daerah, dengan pertumbuhan negatif yang sangat tajam sebesar (85,19) persen. Penurunan ini menandakan bahwa kontribusi dari sumber-sumber pendapatan lain yang sah telah berkurang secara signifikan, yang mungkin disebabkan oleh berkurangnya alokasi hibah, penurunan sumbangan, atau faktor lainnya yang menyebabkan penurunan penerimaan di kategori ini.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah di Kabupaten Banggai Kepulauan mengalami penurunan baik dari segi proporsi maupun pertumbuhan selama lima tahun terakhir. Hal ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan pendapatan dari sumber-sumber alternatif, serta menunjukkan perlunya strategi yang lebih efektif untuk mengoptimalkan penerimaan dari kategori ini.



Sumber: LRA Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 s/d tahun 2023

Gambar 3.4

Proporsi dan Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023



Proporsi item Pendapatan terhadap Lain-lain Pendapatan yang Sah di Kabupaten Banggai Kepulauan selama periode 2019-2023 menunjukkan perubahan yang sangat dinamis, dengan pergeseran signifikan dalam sumber utama pendapatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, Hibah merupakan sumber dominan, menyumbang 99,41 persen dari total Lain-lain Pendapatan yang Sah. Ini menunjukkan bahwa hampir seluruh pendapatan di kategori ini berasal dari hibah, baik dari pemerintah pusat, provinsi, atau lembaga lain. Namun, pada tahun 2020, meskipun Hibah masih menjadi sumber utama dengan proporsi 93,22 persen, terjadi sedikit peningkatan dalam kontribusi dari kategori "Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan," yang menyumbang 6,78 persen.

Pada tahun 2021 dan 2022, Hibah kembali mendominasi dengan proporsi 100 persen, yang berarti bahwa semua pendapatan yang tercatat dalam kategori Lain-lain Pendapatan yang Sah sepenuhnya berasal dari hibah. Ini menandakan bahwa tidak ada pendapatan yang diterima dari sumber lain dalam kategori ini selama dua tahun tersebut. Namun, terjadi perubahan besar pada tahun 2023, di mana Hibah tidak lagi memberikan kontribusi, dengan proporsi 0 persen. Sebaliknya, semua Lain-lain Pendapatan yang Sah pada tahun tersebut berasal dari "Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan," yang mengambil alih dengan proporsi 100 persen.

Tidak adanya kontribusi dari Dana Darurat selama seluruh periode ini menunjukkan bahwa Kabupaten Banggai Kepulauan tidak menerima pendapatan darurat yang mungkin dialokasikan untuk situasi krisis atau bencana. Perubahan dramatis dalam sumber pendapatan pada tahun 2023, dengan beralihnya proporsi sepenuhnya dari Hibah ke kategori lain, mungkin mencerminkan perubahan kebijakan pendanaan, pergeseran prioritas daerah.

Tabel 3.3**Proporsi Item Pendapatan Terhadap Lain-lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023**

No.	Uraian	Proporsi Terhadap Lain-Lain Pendapatan Yang Sah				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Hibah	99,41	93,22	100,00	100,00	0,00
2.	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,59	6,78	0,00	0,00	100,00

Sumber: LRA Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023

3.1.1.2 Gambaran Belanja Daerah

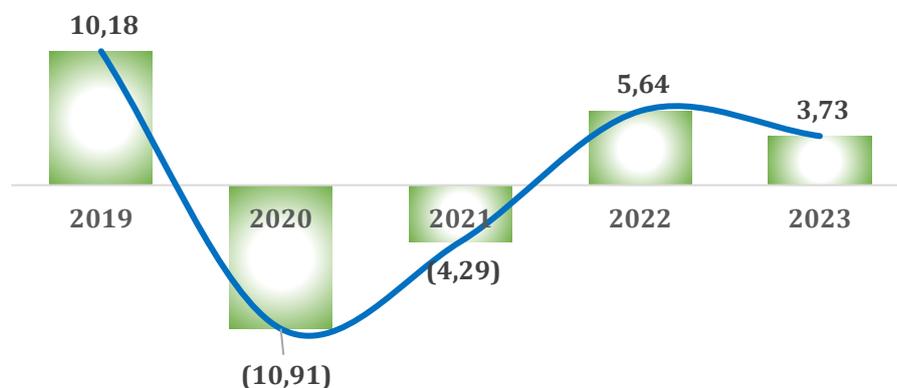
Pertumbuhan anggaran belanja daerah Kabupaten Banggai Kepulauan selama periode 2019-2023 menunjukkan fluktuasi yang mencerminkan dinamika pengelolaan keuangan daerah dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk dampak pandemi Covid-19. Pada tahun 2019, belanja daerah mengalami



pertumbuhan positif sebesar 10,18 persen, yang menunjukkan adanya ekspansi anggaran untuk mendukung program-program pembangunan dan pelayanan publik. Pertumbuhan ini mencerminkan kondisi ekonomi yang stabil dan mungkin adanya peningkatan pendapatan daerah atau alokasi dana dari pemerintah pusat yang mendukung peningkatan belanja. Namun, pada tahun 2020, terjadi kontraksi yang signifikan dengan pertumbuhan belanja daerah berkurang sebesar (10,91) persen. Penurunan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19, yang memaksa pemerintah daerah untuk menyesuaikan anggaran dengan situasi darurat, termasuk pengurangan atau penundaan belanja untuk proyek-proyek non-prioritas. Tahun 2021 melanjutkan tren negatif ini, meskipun dengan kontraksi yang lebih kecil, yaitu sebesar (4,29) persen. Hal ini mungkin disebabkan oleh penyesuaian berkelanjutan dalam respons terhadap pandemi serta tantangan dalam mengoptimalkan anggaran di tengah pendapatan yang berkurang.

Pada tahun 2022, belanja daerah kembali tumbuh positif sebesar 5,64 persen, menunjukkan adanya pemulihan ekonomi yang memungkinkan pemerintah daerah untuk meningkatkan belanja. Peningkatan ini mungkin mencerminkan upaya pemerintah dalam mempercepat pemulihan ekonomi melalui berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Meskipun demikian, pada tahun 2023, laju pertumbuhan belanja daerah melambat menjadi 3,73 persen. Penurunan laju pertumbuhan ini mungkin mengindikasikan adanya upaya konsolidasi fiskal atau penyesuaian terhadap kondisi pendapatan yang belum sepenuhnya pulih.

Secara keseluruhan, data ini mencerminkan bagaimana anggaran belanja daerah Kabupaten Banggai Kepulauan beradaptasi terhadap kondisi ekonomi yang bergejolak, dengan penurunan tajam selama masa krisis dan upaya pemulihan yang bertahap. Penting bagi pemerintah daerah untuk terus memantau pertumbuhan belanja dan menyesuaikannya dengan kemampuan pendapatan serta prioritas pembangunan yang ada untuk memastikan stabilitas fiskal dan keberlanjutan pembangunan daerah.



Sumber: LRA Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023

Gambar 3.5
Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023



Laju pertumbuhan belanja daerah Kabupaten Banggai Kepulauan pada periode 2019-2023 menunjukkan variasi yang signifikan di berbagai jenis belanja, mencerminkan dinamika kebutuhan dan prioritas daerah dalam pengelolaan anggaran. Belanja Operasi mengalami pertumbuhan yang relatif stabil dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,55 persen. Namun, fluktuasi terlihat di subkategori, seperti Belanja Pegawai, yang meskipun mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2019 dan 2020, menurun drastis pada tahun 2021 dengan pertumbuhan negatif sebesar (9,32) persen. Belanja Barang dan Jasa menunjukkan pola yang lebih tidak stabil, dengan penurunan tajam sebesar (24,54) persen pada tahun 2020 diikuti oleh lonjakan sebesar 30,02 persen pada tahun 2021, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh respons terhadap kebutuhan mendesak selama pandemi COVID-19.

Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial menunjukkan pertumbuhan yang sangat berfluktuasi. Belanja Hibah mengalami lonjakan drastis pada tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 128,32 persen, yang mungkin mencerminkan peningkatan bantuan pemerintah kepada masyarakat atau organisasi selama masa pandemi. Namun, angka ini kembali turun pada tahun 2022 sebelum melonjak lagi pada tahun 2023. Belanja Bantuan Sosial memiliki dinamika yang sangat tidak stabil, dengan pertumbuhan mencapai puncaknya pada tahun 2021 sebesar 939,78 persen, yang mencerminkan respon cepat pemerintah dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak pandemi. Namun, pertumbuhan ini kemudian menurun drastis pada tahun 2023 dengan angka negatif (59,27) persen.

Belanja Modal menunjukkan tren penurunan secara keseluruhan dengan rata-rata pertumbuhan negatif sebesar (4,00) persen, meskipun ada sedikit pemulihan pada tahun 2022 dan 2023. Penurunan yang tajam pada tahun 2020 sebesar (34,21) persen mungkin disebabkan oleh pengurangan investasi dalam infrastruktur akibat alokasi dana yang lebih banyak untuk penanganan pandemi. Belanja Tak Terduga menunjukkan fluktuasi yang ekstrim, terutama pada tahun 2020 dengan pertumbuhan sebesar 1.341,77 persen, yang mencerminkan alokasi besar untuk situasi darurat, kemungkinan besar terkait dengan Covid-19. Pertumbuhan ini kemudian menurun tajam pada tahun 2021 sebelum kembali meningkat di tahun-tahun berikutnya. Akhirnya, Belanja Transfer menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil, meskipun mengalami penurunan kecil pada tahun 2020 dan 2021. Dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,53 persen, ini mencerminkan adanya pengelolaan yang lebih konsisten dalam alokasi dana yang ditransfer ke pihak ketiga, seperti pemerintah desa atau lembaga lain yang menerima alokasi dana dari pemerintah daerah.

Secara keseluruhan, data ini mencerminkan bagaimana Kabupaten Banggai Kepulauan menyesuaikan alokasi belanja di tengah tantangan ekonomi dan sosial yang berubah, dengan fluktuasi yang mencerminkan respons terhadap kondisi darurat seperti pandemi, serta upaya untuk mempertahankan layanan publik dan infrastruktur. Fluktuasi yang besar di beberapa kategori belanja menunjukkan



kebutuhan untuk perencanaan anggaran yang lebih stabil dan berkelanjutan di masa depan.

Tabel 3.4
Laju Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2019-2023 (%)

Kode Rek	URAIAN	Pertumbuhan					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	
5.1	Belanja Operasi	4,87	-4,70	3,28	9,78	2,05	2,55
5.1.1	Belanja Pegawai	7,43	4,80	-9,32	5,43	2,37	1,78
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,58	-24,54	30,02	15,51	0,50	3,68
5.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.1.5	Belanja Hibah	-7,11	81,61	128,32	-16,71	73,30	43,23
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	-26,83	-33,06	939,78	404,29	-59,27	204,15
5.2	Belanja Modal	22,34	-34,21	-24,33	4,24	7,94	-4,00
5.3	Belanja Tak terduga	6,68	1.341,77	-97,91	220,27	53,23	254,01
5.4	Belanja Transfer	10,71	(1,23)	-0,28	-5,93	5,89	1,53

Sumber: LRA Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 s/d tahun 2023

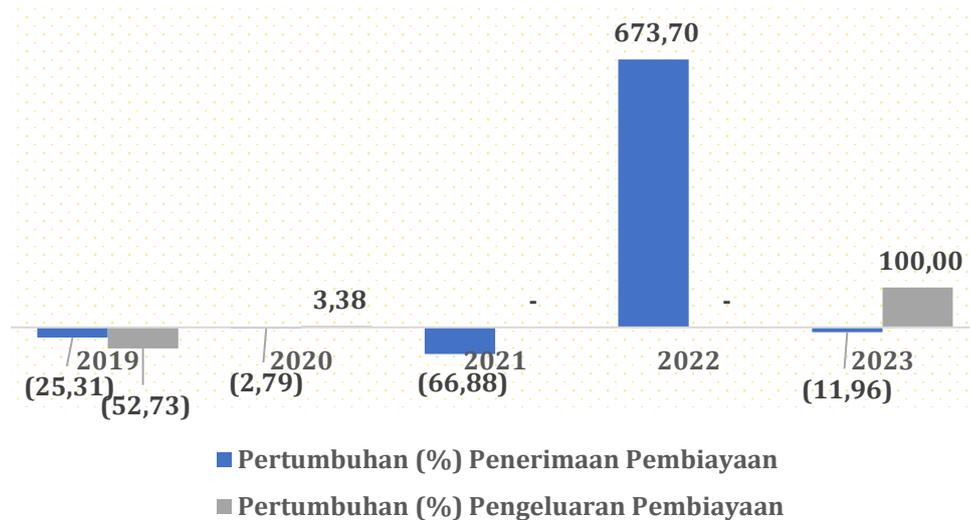
3.1.1.3 Gambaran Pembiayaan Daerah

Pertumbuhan pembiayaan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan selama periode 2019-2023 menunjukkan dinamika yang sangat fluktuatif, mencerminkan perubahan dalam kebutuhan dan strategi pengelolaan keuangan daerah. Pada sisi Penerimaan Pembiayaan, terjadi penurunan signifikan pada tahun 2019 dengan pertumbuhan negatif sebesar (25,31) persen. Penurunan ini dapat menunjukkan berkurangnya sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) atau berkurangnya kebutuhan pinjaman daerah pada tahun tersebut. Pada tahun 2020, penerimaan pembiayaan masih menurun, meskipun dengan laju yang lebih lambat, yaitu (2,79) persen. Penurunan ini berlanjut drastis pada tahun 2021, dengan penurunan sebesar (66,88) persen, yang kemungkinan disebabkan oleh minimnya kebutuhan pembiayaan tambahan atau strategi pengelolaan anggaran yang lebih ketat di tahun tersebut. Namun, pada tahun 2022, terjadi lonjakan luar biasa dalam penerimaan pembiayaan dengan pertumbuhan sebesar 673,70 persen. Peningkatan yang sangat besar ini bisa disebabkan oleh adanya kebutuhan mendesak untuk menutup defisit anggaran atau adanya program besar yang memerlukan pembiayaan tambahan, seperti investasi infrastruktur atau proyek pembangunan besar lainnya. Meski begitu, pada tahun 2023, penerimaan pembiayaan kembali menurun dengan pertumbuhan negatif sebesar (11,96) persen, yang mungkin mencerminkan stabilisasi setelah lonjakan tinggi pada tahun sebelumnya.

Di sisi Pengeluaran Pembiayaan, terjadi penurunan signifikan pada tahun 2019 sebesar (52,73) persen, yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah mungkin membayar lebih sedikit utang atau mengurangi penyertaan modal pada tahun tersebut. Pada tahun 2020, pengeluaran pembiayaan sedikit meningkat dengan



pertumbuhan sebesar 3,38 persen, namun tidak ada data pengeluaran pembiayaan yang tercatat untuk tahun 2021 dan 2022. Ini bisa menandakan bahwa tidak ada pengeluaran pembiayaan yang dilakukan pada tahun-tahun tersebut, mungkin karena tidak ada kewajiban pembayaran utang yang jatuh tempo atau tidak ada penyertaan modal yang diperlukan. Menariknya, pada tahun 2023, pengeluaran pembiayaan melonjak tajam dengan pertumbuhan sebesar 100,00 persen, menunjukkan adanya pengeluaran besar yang dilakukan oleh pemerintah daerah, kemungkinan terkait dengan pembayaran pokok utang atau penyertaan modal yang signifikan.



Sumber: LRA Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 s/d tahun 2023

Gambar 3.6
Pertumbuhan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023

Secara keseluruhan, data di atas menunjukkan bahwa pembiayaan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sangat dipengaruhi oleh kebutuhan jangka pendek dan strategi pengelolaan keuangan yang adaptif. Lonjakan dan penurunan yang drastis dari tahun ke tahun mengindikasikan adanya respons terhadap perubahan kondisi ekonomi dan fiskal, serta prioritas yang bergeser dalam pengelolaan pembiayaan daerah. Tantangan ke depan mungkin melibatkan stabilisasi pembiayaan dan pengelolaan utang yang lebih terencana untuk memastikan keberlanjutan fiskal daerah.



Tabel 3.5
Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2023

Kode Rek	URAIAN	Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan (persen)
		2019	2020	2021	2022	2023	
4	PENDAPATAN	910.888.768.858,00	827.151.804.218,27	857.381.199.315,34	811.071.133.450,26	827.853.187.730,31	0,46
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	34.231.612.395,00	36.213.331.404,27	33.630.899.775,34	33.146.420.283,26	41.330.438.640,31	13,00
4.1.1	Pajak Daerah	6.940.777.172,80	4.800.752.408,75	5.630.410.617,25	6.281.792.225,00	6.627.541.142,85	5,35
4.1.2	Retribusi Daerah	14.740.563.898,00	19.998.042.156,00	16.216.053.738,00	18.590.032.806,00	13.903.900.977,00	16,90
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.319.993.123,00	1.703.694.094,00	2.588.375.499,55	2.934.152.411,84	4.231.364.872,00	30,56
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	11.230.278.201,20	9.710.842.745,52	9.196.059.920,54	5.340.442.840,42	16.567.631.648,46	35,23
4.2	Pendapatan Transfer	846.179.994.463,00	761.008.452.814,00	803.526.760.540,00	755.670.384.454,00	783.226.137.466,00	0,47
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	827.497.596.849,00	741.372.862.024,00	780.429.409.234,00	727.334.250.998,00	752.451.260.771,00	0,15
4.2.01.1	Dana Perimbangan	714.364.855.849,00	627.257.913.024,00	666.339.460.234,00	618.257.263.998,00	635.301.295.771,00	(0,38)
	Dana Bagi Hasil	21.370.899.434,00	37.792.595.883,00	56.044.929.192,00	77.483.168.576,00	44.156.169.532,00	19,15
	Dana Alokasi Umum	490.735.851.000,00	444.960.480.000,00	440.660.646.000,00	440.978.979.000,00	459.375.692.731,00	(0,12)
	DAK Fisik/Utama	202.258.105.415,00	144.504.837.141,00	169.633.885.042,00	99.795.116.422,00	131.769.433.508,00	0,53
	DAK Non Fisik						-
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah		0,00	0,00	4.584.136.000,00	5.734.069.000,00	5,02
4.2.1.3	Dana Otonomi Khusus		0,00				-
4.2.1.4	Dana Keistimewaan		0,00				-
4.2.1.5	Dana Desa	113.132.741.000,00	114.114.949.000,00	114.089.949.000,00	104.492.851.000,00	111.415.896.000,00	2,62
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	18.682.397.614,00	19.635.590.790,00	23.097.351.306,00	28.336.133.456,00	30.774.876.695,00	11,69
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	30.477.162.000,00	29.930.020.000,00	20.223.539.000,00	22.254.328.713,00	3.296.611.624,00	(11,33)
4.3.1	Hibah	30.297.162.000,00	27.899.800.000,00	20.223.539.000,00	22.254.328.713,00	0,00	(14,38)
4.3.2	Dana Darurat		0,00				-



Kode Rek	URAIAN	Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan (persen)
		2019	2020	2021	2022	2023	
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	180.000.000,00	2.030.220.000,00	0,00	-	3.296.611.624,00	182,32
5	Belanja	908.657.144.730,09	809.516.707.063,00	774.774.900.295,00	818.476.608.308,43	849.032.765.461,21	0,87
5.1	Belanja Operasi	496.126.249.963,52	472.812.399.581,00	488.324.989.590,00	536.100.878.785,43	547.076.049.093,21	3,06
5.1.1	Belanja Pegawai	324.273.559.302,00	339.825.146.471,00	308.168.941.166,00	324.897.549.199,00	332.586.846.754,00	2,14
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	168.442.690.661,52	127.104.053.110,00	165.256.922.512,00	190.882.105.372,43	191.836.809.175,21	4,41
5.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
5.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
5.1.5	Belanja Hibah	3.140.000.000,00	5.702.450.000,00	13.019.725.912,00	10.843.624.410,00	18.792.120.164,00	51,88
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	270.000.000,00	180.750.000,00	1.879.400.000,00	9.477.599.804,00	3.860.273.000,00	244,98
5.2	Belanja Modal	245.022.680.227,57	161.199.586.177,00	121.975.205.216,00	127.148.619.652,00	137.246.465.854,00	(4,80)
5.3	Belanja Tak terduga	749.020.000,00	10.799.143.123,00	225.348.494,00	721.724.500,00	1.105.880.000,00	304,81
5.4	Belanja Transfer	166.759.194.539,00	164.705.578.182,00	164.249.356.995,00	154.505.385.371,00	163.604.370.514,00	1,83
	SURPLUS /(DEFISIT)	2.231.624.127,91	17.635.097.155,27	82.606.299.020,34	-7.405.474.858,17	-21.179.577.730,90	199,03
6	Pembiayaan Daerah						
6.1	Penerimaan Pembiayaan						
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	36.534.424.530,80	35.516.048.658,71	11.763.857.853,98	91.016.990.071,66	80.133.513.365,49	113,35
6.1.2	Pencairan Dan Cadangan						-
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan						-
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah						-
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman						-
6.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan						-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	36.534.424.530,80	35.516.048.658,71	11.763.857.853,98	91.016.990.071,66	80.133.513.365,49	113,35



Kode Rek	URAIAN	Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan (persen)
		2019	2020	2021	2022	2023	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan						
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	-
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	3.250.000.000,00	3.360.000.000,00	3.360.000.000,00	3.360.000.000,00	3.360.000.000,00	(9,87)
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo						-
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah						-
6.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan						-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	3.250.000.000,00	3.360.000.000,00	3.360.000.000,00	3.360.000.000,00	3.360.000.000,00	(9,87)
	PEMBIAYAAN NETTO	33.284.424.530,80	32.156.048.658,71	8.403.857.853,98	87.656.990.071,66	76.773.513.365,49	166,51
3.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	35.516.048.658,71	49.791.145.813,98	91.010.156.874,32	80.251.515.213,49	55.593.935.634,59	15,53

Sumber: LRA Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 s/d tahun 2023



3.2. PROYEKSI KEUANGAN DAERAH LIMA TAHUN KEDEPAN

Penyelenggaraan fungsi pemerintah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan (*money follow program*). Penyusunan kerangka pendanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025-2029 diproyeksikan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional dan daerah. Selain itu, kerangka pendanaan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk tahun 2025-2029 dalam melakukan perencanaan dan penganggaran tahun melakukan sinergi antara kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dengan berpedoman pada regulasi terkait.

Proyeksi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Banggai Kepulauan periode 2025-2029 menunjukkan tren pertumbuhan yang moderat dan stabil, dengan beberapa dinamika penting yang perlu dicermati. Pendapatan daerah diproyeksikan mengalami peningkatan bertahap setiap tahunnya, dimulai dari Rp923,94 miliar pada tahun 2025 hingga mencapai Rp931,17 miliar pada tahun 2029. Sebagian besar pendapatan ini masih akan didominasi oleh Pendapatan Transfer dari pemerintah pusat, yang mencakup sekitar 94 persen dari total pendapatan setiap tahunnya. Ini menunjukkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap dana transfer, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya menyumbang sekitar 6 persen dari total pendapatan. Meskipun ada kenaikan bertahap dalam PAD, terutama dari pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, kontribusinya terhadap total pendapatan daerah masih relatif kecil.

Belanja daerah juga diproyeksikan tumbuh secara bertahap dari Rp915,33 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp948,66 miliar pada tahun 2029. Belanja Operasi akan tetap menjadi komponen terbesar dari belanja daerah, mencakup lebih dari 60 persen dari total belanja, dengan Belanja Pegawai sebagai bagian terbesar di dalamnya. Perlu diperhatikan bahwa pada tahun 2029, terjadi peningkatan signifikan dalam Belanja Hibah yang mencapai Rp30 miliar, yang menunjukkan kemungkinan adanya program-program baru atau peningkatan bantuan yang direncanakan oleh pemerintah daerah. Belanja Modal, yang penting untuk pembangunan infrastruktur, diproyeksikan tumbuh secara stabil, namun dengan laju yang lebih lambat dibandingkan dengan belanja operasi.

Proyeksi menunjukkan bahwa Kabupaten Banggai Kepulauan akan mengalami defisit anggaran yang semakin meningkat setiap tahun, dengan defisit yang paling signifikan terjadi pada tahun 2029 sebesar Rp17,49 miliar. Namun, defisit ini akan dikelola melalui penerimaan pembiayaan yang juga diproyeksikan meningkat, terutama melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dari tahun-tahun sebelumnya. Sisa lebih ini akan cukup untuk menutupi defisit hingga tahun 2028, namun pada tahun 2029, diproyeksikan tidak akan ada sisa lebih pembiayaan, menunjukkan tantangan keuangan yang mungkin perlu diantisipasi dengan lebih baik.



Secara keseluruhan, proyeksi anggaran ini menggambarkan stabilitas relatif dalam pendapatan dan belanja daerah, namun dengan peningkatan ketergantungan pada dana transfer dari pusat dan tantangan dalam menjaga keseimbangan fiskal dalam jangka panjang. Pemerintah daerah perlu terus berupaya meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer dan memperkuat kapasitas fiskal daerah secara berkelanjutan.



Tabel 3.6

Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029

Kode Rek	URAIAN	Proyeksi Pertumbuhan				
		2025	2026	2027	2028	2029
4	PENDAPATAN	923.943.135.056,38	926.499.911.694,41	928.056.688.332,44	929.613.464.970,47	931.170.241.608,50
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	53.906.989.856,00	54.694.547.877,93	55.482.105.899,85	56.269.663.921,78	57.057.221.943,71
4.1.1	Pajak Daerah	7.638.725.000,00	7.659.152.960,44	7.679.580.920,87	7.700.008.881,31	7.720.436.841,75
4.1.2	Retribusi Daerah	4.140.184.000,00	4.175.159.093,23	4.210.134.186,46	4.245.109.279,69	4.280.084.372,92
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.231.000.000,00	4.295.645.809,07	4.360.291.618,13	4.424.937.427,20	4.489.583.236,27
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	37.897.080.856,00	38.564.590.015,19	39.232.099.174,39	39.899.608.333,58	40.567.117.492,77
4.2	Pendapatan Transfer	867.536.145.200,38	868.305.363.816,48	869.074.582.432,59	869.843.801.048,69	870.613.019.664,79
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	837.029.905.146,38	837.620.773.655,12	838.211.642.163,86	838.802.510.672,60	839.393.379.181,34
4.2.01.1	Dana Perimbangan	728.735.359.146,38	729.184.479.492,17	729.633.599.837,95	730.082.720.183,74	730.531.840.529,52
	Dana Bagi Hasil	46.678.729.000,00	47.125.766.745,39	47.572.804.490,79	48.019.842.236,18	48.466.879.981,57
	Dana Alokasi Umum	552.263.738.141,00	552.230.918.558,82	552.198.098.976,65	552.165.279.394,47	552.132.459.812,29
	DAK Fisik	129.792.892.005,38	129.827.794.187,95	129.862.696.370,52	129.897.598.553,09	129.932.500.735,66
	DAK Non Fisik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.3	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.4	Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.5	Dana Desa	108.294.546.000,00	108.436.294.162,95	108.578.042.325,91	108.719.790.488,86	108.861.538.651,82
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	30.506.240.054,00	30.684.590.161,36	30.862.940.268,73	31.041.290.376,09	31.219.640.483,45
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00
4.3.1	Hibah	2.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00
4.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode Rek	URAIAN	Proyeksi Pertumbuhan				
		2025	2026	2027	2028	2029
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja	915.326.738.838,47	917.413.432.199,87	919.500.125.561,27	921.586.818.922,67	948.656.326.139,92
5.1	Belanja Operasi	591.491.674.050,93	592.721.805.224,50	593.951.936.398,07	595.182.067.571,64	621.395.012.601,06
5.1.1	Belanja Pegawai	374.351.476.840,39	374.751.656.439,79	375.151.836.039,18	375.552.015.638,58	375.952.195.237,97
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	210.140.197.210,54	210.602.852.754,07	211.065.508.297,60	211.528.163.841,14	211.990.819.384,67
5.1.3	Belanja Bunga	0,00	0	0	0	0
5.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0	0	0	0
5.1.5	Belanja Hibah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	30.000.000.000,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	2.000.000.000,00	2.367.296.030,64	2.734.592.061,28	3.101.888.091,93	3.451.997.978,42
5.2	Belanja Modal	160.111.524.210,74	160.291.789.970,34	160.472.055.729,94	160.652.321.489,54	160.832.587.249,14
5.3	Belanja Tak terduga	500.000.000,00	1.026.973.751,43	1.553.947.502,86	2.080.921.254,29	2.607.895.005,72
5.4	Belanja Transfer	163.223.540.576,80	163.372.863.253,60	163.522.185.930,41	163.671.508.607,21	163.820.831.284,01
	SURPLUS / (DEFISIT)	8.616.396.217,91	9.086.479.494,54	8.556.562.771,17	8.026.646.047,80	-17.486.084.531,42
6	Pembiayaan Daerah					
6.1	Penerimaan Pembiayaan					
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	0	5.256.396.217,91	10.982.875.712,46	16.179.438.483,62	20.846.084.531,42
6.1.2	Pencairan Dan Cadangan					
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan					
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah					
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman					
6.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan					
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0,00	5.256.396.217,91	10.982.875.712,46	16.179.438.483,62	20.846.084.531,42
6.2	Pengeluaran Pembiayaan					



Kode Rek	URAIAN	Proyeksi Pertumbuhan				
		2025	2026	2027	2028	2029
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan					
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	3.360.000.000,00	3.360.000.000,00	3.360.000.000,00	3.360.000.000,00	3.360.000.000,00
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo					
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah					
6.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan					
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	3.360.000.000,00	3.360.000.000,00	3.360.000.000,00	3.360.000.000,00	3.360.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	-3.360.000.000,00	1.896.396.217,91	7.622.875.712,46	12.819.438.483,62	17.486.084.531,42
3.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	5.256.396.217,91	10.982.875.712,46	16.179.438.483,62	20.846.084.531,42	0,00

Sumber: data diolah, tahun 2024



BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah merujuk pada berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di suatu wilayah. Permasalahan ini dapat bersifat ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan, dan sering kali saling terkait satu sama lain. Permasalahan Pembangunan merupakan pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realitas/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia/dicapai. Hasil evaluasi terhadap gambaran umum kondisi daerah menjadi dasar identifikasi sejumlah permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan dan isu strategis daerah yang perlu diselesaikan dalam 5 (lima) tahun kedepan dalam periode 2025-2029.

Penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Rantek-RPJMD) Kabupaten Banggai Kepulauan untuk periode 2025-2029. Melalui analisis menyeluruh terhadap kondisi terkini serta partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan, bab ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami dengan lebih dalam permasalahan esensial yang memengaruhi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah ini. Dalam proses analisis ini, akan mencermati beragam aspek termasuk ekonomi, sosial, lingkungan, kesehatan, infrastruktur, dan bidang-bidang kunci lainnya. Dari evaluasi yang teliti, terungkaplah serangkaian permasalahan yang memerlukan penanganan serius guna mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Selain mengidentifikasi permasalahan yang ada, bab ini juga mengupas secara rinci isu-isu strategis yang menjadi fokus utama dalam arah kebijakan pembangunan ke depan. Analisis mendalam terhadap isu-isu ini tidak hanya menyoroti akar permasalahan, tetapi juga menjelaskan dampaknya serta memberikan kerangka strategis yang terukur sebagai langkah penyelesaian yang diharapkan. Melalui pemahaman yang dalam terhadap permasalahan dan isu strategis yang terungkap, diharapkan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Rantek-RPJMD) Kabupaten Banggai Kepulauan untuk periode 2025-2029 ini mampu menetapkan landasan yang kuat untuk perumusan kebijakan yang bertujuan



merespons tantangan-tantangan nyata, menghadirkan solusi yang tepat, serta mewujudkan visi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat Banggai Kepulauan dalam rentang waktu 2025-2029.

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Selanjutnya, identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4.1.1. Aspek Geografi

Pada aspek geografi, Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan daerah kepulauan/bahari yang mempunyai mempunyai gugusan atau rangkaian pulau-pulau berukuran sedang dan kecil sejumlah lebih kurang 121, dari jumlah tersebut lima diantaranya berukuran sedang, sisanya berukuran kecil-kecil bahkan ada yang berwujud batu karang yang mencuat ke permukaan laut. Terdapat beberapa permasalahan pokok pembangunan daerah di Kabupaten Banggai Kepulauan, yakni belum terwujudnya kabupaten yang berwawasan lingkungan, dimana terdapat beberapa wilayah masih bermasalah dalam penyediaan air bersih, pelayanan transportasi umum terbatas, belum optimalnya penataan ruang wilayah dan belum optimalnya mitigasi bencana. Penjabaran masing-masing permasalahan pokok pada aspek geografis di Kabupaten Banggai Kepulauan yakni sebagai berikut.

- a. **Belum terwujudnya kabupaten yang berwawasan lingkungan**, yang disebabkan oleh **belum optimalnya kualitas lingkungan hidup** karena menurunnya daya dukung, fungsi, dan kualitas lingkungan hidup; Hasil kajian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 141 desa dan 3 kelurahan yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan telah tercemar oleh berbagai jenis pencemaran. Pencemaran lingkungan yang paling dominan terjadi adalah pencemaran air. Pencemaran air telah melanda semua desa yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan. Sumber pencemaran air yang paling banyak adalah pencemaran air yang berasal dari limbah rumah tangga. belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman hayati sebagai akibat dari belum teridentifikasinya keanekaragaman hayati; belum optimalnya pengurangan dan penanganan persampahan khususnya wilayah pesisir pantai; belum



- optimalnya pengelolaan dan pengolahan limbah; serta belum terbangunnya kota salakan yang berwawasan lingkungan;
- b. Beberapa wilayah masih bermasalah dalam penyediaan air bersih,** Perbukitan dan pegunungan karst menempati sebagian besar Pulau Peling, dan secara lokal-lokal pada pulau-pulau lainnya. Ciri khas morfologi ini adalah pola kerucut dan lembah karst, dolin, goa, ponor, dan sungai bawah tanah. Puncak terdapat di Gunung Tinakong (558 meter) dan Bukit Balombong di Pulau Peling akibatnya sumber air bersih terbatas pada beberapa wilayah kecamatan. Berdasarkan hasil kajian kinerja jasa ekosistem, kemampuan lingkungan alami di Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai pengaturan tata aliran air terjadi penurunan pada Kecamatan Bulagi Utara, Peling Tengah, Tinangkung, Tinangkung Utara, dan Tinangkung Selatan. Persebaran wilayah penurunan jasa ekosistem pengaturan tata aliran air perlu menjadi perhatian bagi para pihak dan pemerintah kabupaten untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan daerah tangkapan dan sumber air;
 - c. Pelayanan transportasi umum terbatas,** Secara umum penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan tinggal di pesisir pantai dikarenakan sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai nelayan sehingga rata rata letak ibukota kecamatan hanya berkisar 1–10 DPL diatas permukaan laut. Mengenai jarak ibukota kecamatan yang paling jauh ke ibukota Kabupaten yaitu kecamatan Buko Selatan mencapai 134 km dengan jarak tempuh sekitar 3 – 4 jam perjalanan, dimana kendala yang ditemui belum ada angkutan mobil umum yang mempunyai rute tetap dari ibukota Kecamatan ke ibukota Kabupaten sehingga menyulitkan dalam pelayanan umum dan tarif angkutan masih mahal karena masih harus menggunakan sistim carter;
 - d. Belum optimalnya mitigasi bencana,** yang disebabkan oleh **(a) belum optimalnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana** sebagai akibat dari terbatasnya anggaran penanggulangan bencana; kurangnya kuantitas dan kualitas kelembagaan tangguh bencana; sarana dan prasarana (peralatan penanggulangan bencana) yang dimiliki BPBD belum memadai; belum optimalnya kuantitas dan kompensasi sumberdaya aparatur; serta belum dilakukannya penyusunan dokumen kajian risiko bencana daerah; **(b) belum optimalnya penanganan bencana kebakaran** sebagai akibat dari terbatasnya personil pemadam kebakaran, sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran yang dimiliki masih belum memadai.

4.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Pada aspek kesejahteraan masyarakat, terdapat tujuh permasalahan pokok pembangunan daerah di Kabupaten Banggai Kepulauan, meliputi relatif tingginya kemiskinan, belum optimalnya penyerapan tenaga kerja,



melambatnya pertumbuhan ekonomi daerah, belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat, belum optimalnya pelaksanaan program keluarga berencana dan pembangunan keluarga, belum optimalnya kualitas hidup anak dan perempuan, serta belum optimalnya daya saing pemuda dan olahraga. Berikut merupakan penjabaran masing-masing permasalahan pokok pada aspek kesejahteraan di Kabupaten Banggai Kepulauan.

- a. **Relatif tingginya angka kemiskinan**, yang disebabkan oleh **(a) tidak mencukupinya kualitas sumber daya manusia** sebagai akibat dari belum optimalnya akses terhadap pemenuhan layanan dasar, termasuk adanya keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan/atau pelayanan lainnya yang diselenggarakan pemerintah; **(b) rendahnya akses terhadap pekerjaan yang layak** sebagai akibat dari kurangnya kesempatan produktif; **(c)**
- b. **Belum optimalnya penyerapan tenaga kerja**, yang disebabkan oleh **(a) belum optimalnya fasilitasi pemerintah daerah untuk menciptakan tenaga kerja terdidik dan terlatih** sebagai akibat dari belum optimalnya pelaksanaan program link and match ketenagakerjaan, serta belum optimalnya pelatihan vokasi yang diselenggarakan di BLK; **(b) belum optimalnya pelaksanaan program transmigrasi** karena kurangnya daya tarik di daerah tujuan transmigrasi; dan **(c) rendahnya daya saing tenaga kerja** karena kualitas tenaga kerja yang rendah, di mana jumlah penduduk usia kerja di kabupaten ini didominasi oleh lulusan SD dan SMP.
- c. Melambatnya pertumbuhan ekonomi daerah, yang disebabkan oleh (a) Nilai investasi di Kabupaten Banggai Kepulauan terhadap komoditas unggulan masih rendah (b) Masyarakat Kabupaten Banggai kepulauan sebagian besar adalah nelayan, namun Nilai tukar nelayan (NTN) rendah dibawah 100 disebabkan biaya produksi yang tinggi sementara nilai jual hasil produksi rendah dan produksi hasil tangkapan tinggi sementara akses pasar rendah.
- d. **Menurunnya produktifitas pertanian dan ketahanan pangan daerah** sebagai akibat dari pengairan terbatas; rendahnya pendapatan petani; menurunnya populasi dan produksi ternak; belum optimalnya ketersediaan, akses, distribusi, keamanan dan penguatan cadangan serta konsumsi pangan yang beragam;
- e. **Belum optimalnya pembangunan kepariwisataan daerah** karena terbatasnya anggaran dalam pengembangan dan pembangunan infrastruktur dan manajemen destinasi pariwisata; serta belum optimalnya pengembangan dan pelestarian seni dan budaya;



- f. **Belum optimalnya pengembangan Sektor Perdagangan** karena belum optimalnya kegiatan perdagangan; masih rendahnya daya saing produk daerah baik secara regional maupun internasional; belum optimalnya pengelolaan pasar; serta belum optimalnya layanan kemetrologian legal; (d) belum optimalnya pengembangan industri karena belum optimalnya pemanfaatan teknologi untuk mendapatkan hasil produk dan biaya produksi yang efisien; rendahnya daya saing produk industri kecil dan menengah; belum optimalnya digitalisasi pemasaran; belum optimalnya pengembangan sentra; serta rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam kepemilikan legalitas usaha; (e) belum optimalnya perkembangan UMKM karena pelaku UMKM belum mampu mengikuti persaingan pasar global, serta terbatasnya pada akses permodalan; (f) belum optimalnya persaingan koperasi dengan lembaga keuangan dan/atau lembaga ekonomi lainnya karena belum optimalnya pengelolaan koperasi, rendahnya pemanfaatan koperasi oleh masyarakat, serta terbatasnya sumber daya finansial koperasi.
- g. **Belum optimalnya investasi di daerah**, yang disebabkan karena kurang terarahnya pembangunan investasi di daerah sebagai akibat dari belum optimalnya pengembangan iklim investasi; belum optimalnya ketersediaan infrastruktur penduduk seperti belum optimalnya penyediaan akses jalan, Ketersediaan Energi listrik penunjang industri terbatas, jaringan listrik, air, jaringan telekomunikasi, akses Internet, dan infrastruktur; belum optimalnya layanan perizinan; serta belum optimalnya penyerapan tenaga kerja lokal pada kegiatan investasi di daerah karena kualitas daya saing tenaga kerja masih rendah dan belum memenuhi kebutuhan dunia usaha.
- h. **Belum optimalnya kualitas hidup anak dan perempuan**, yang disebabkan oleh (a) belum optimalnya perlindungan perempuan sebagai akibat dari relatif tingginya perempuan dan anak perempuan yang mengalami KDRT dan kekerasan non-KDRT, serta belum optimalnya lembaga penyedia layanan termasuk jejaring dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; (b) belum optimalnya pencapaian kabupaten ramah anak karena belum optimalnya pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak. (b) belum optimalnya pemberdayaan keluarga karena lemahnya upaya pembinaan dan kesejahteraan keluarga; serta (c) belum optimalnya kualitas pembangunan keluarga sebagai akibat dari relatif tingginya pernikahan usia dini dan tingginya angka perceraian;
- i. **Belum optimalnya daya saing pemuda dan olahraga**, yang disebabkan oleh (a) belum optimalnya prestasi olahraga sebagai akibat



dari belum optimalnya pengembangan olahraga; dan (b) belum optimalnya peran pemuda di daerah karena adanya kecenderungan pemuda produktif yang lebih memilih untuk merantau ke luar daerah setelah lulus kuliah, salah satunya karena kurangnya ketersediaan lapangan kerja di daerah; belum optimalnya pengembangan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepelopran, dan kepemimpinan dalam pembangunan; serta belum optimalnya pembinaan organisasi kemasyarakatan kepemudaan.

4.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

Pada aspek daya saing daerah, terdapat empat permasalahan pokok pembangunan daerah di Kabupaten Banggai Kepulauan, yakni belum optimalnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia, belum optimalnya penyediaan infrastruktur dasar dan wilayah, belum optimalnya stabilitas keamanan daerah, serta belum optimalnya investasi di daerah. Berikut merupakan penjabaran masing-masing permasalahan pokok pada aspek daya saing daerah di Kabupaten Banggai Kepulauan.

1. Belum optimalnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia, dari aspek pendidikan yang disebabkan oleh kualitas dan distribusi guru belum memadai, Sarana dan Prasarana serta Fasilitas pembelajaran relatif belum memadai, baik Pendidikan formal maupun Pendidikan Non Formal; Pemenuhan SPM Pendidikan Dasar belum optimal; Keterbatasan akses internet di beberapa wilayah belum optimal sehingga digitalisasi Pendidikan untuk mendukung proses belajar mengajar masih terkendala; Jumlah Guru profesional dengan kompetensi tinggi masih terbatas dan belum terdistribusi secara merata ke seluruh wilayah; Sebaran, Kualitas dan Kuantitas Tenaga pendidik dan kependidikan yang kurang dan tidak merata; Kemampuan literasi, matematika dan sains peserta didik belum memenuhi standar nasional; Peran serta masyarakat dalam Pendidikan masih perlu di tingkatkan; Cakupan layanan perpustakaan dan Gerakan literasi masyarakat masih rendah.
2. Belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat, yang disebabkan oleh (a) relatif rendahnya angka harapan hidup karena belum optimalnya akses dan kualitas layanan kesehatan; (b) belum optimalnya aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi karena masih adanya angka kematian ibu dan anak; masih banyak penyakit endemis dan penyakit menular seperti TBC, DBD; penyakit tidak menular (PTM) seperti DM, hipertensi, penyakit kardiovaskular, dan gangguan jiwa, belum memenuhi target dalam pelayanan kepada masyarakat; serta masih



tingginya stunting pada baita. Kendala geografis pada beberapa wilayah menyebabkan sulitnya akses ke fasilitas Kesehatan; Sarana dan prasarana di fasilitas dan pelayanan kesehatan belum memadai; Ketersediaan Sumber daya manusia Kesehatan masih terbatas dan belum merata; Kesadaran akan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat masih rendah; Pola Asuh, Pola Makan, dan ketersediaan air bersih dan sanitasi layak belum memadai sehingga menyebabkan tingginya prevalensi stunting.

3. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur dasar dan wilayah, yang disebabkan oleh (a) belum optimalnya pembangunan infrastruktur wilayah berkelanjutan karena belum optimalnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah; belum optimalnya akses pelayanan air bersih; rendahnya jangkauan akses air minum perpipaan; belum optimalnya penanganan genangan; masih rendahnya capaian akses sanitasi aman; belum optimalnya operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi; serta belum optimalnya penyediaan dan pemanfaatan sumber daya air; (b) belum optimalnya penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang layak dan berkualitas karena belum optimalnya ketersediaan dan kondisi Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU); masih adanya kawasan kumuh; masih adanya rumah tidak layak huni; masih adanya backlog perumahan; belum optimalnya penyediaan perumahan untuk MBR; serta belum adanya rencana terkait relokasi rumah untuk masyarakat terdampak program pemerintah; (c) belum optimalnya kinerja pelayanan lalu lintas dan angkutan umum karena belum optimalnya pemenuhan sarana prasarana lalu lintas; rendahnya tingkat disiplin berlalulintas; masih terbatasnya kompetensi sumber daya manusia; terjadinya kemacetan lalu lintas (terutama pada ruas jalan menuju akses wisata); terbatasnya pelayanan angkutan umum; serta belum optimalnya belum optimalnya penyediaan layanan uji kendaraan; (d) belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi karena masih banyaknya area *area blankspot* yang belum mendapatkan akses internet; belum optimalnya jangkauan jaringan intra pemerintah daerah; serta belum optimalnya pusat daya pemerintah daerah.
4. Belum optimalnya stabilitas keamanan daerah, yang disebabkan oleh belum terciptanya kondisi wilayah yang tertib, tentram, dan aman karena kurang optimalnya penyelenggaraan trantibum; masih adanya konflik sosial; belum optimalnya partisipasi peran aktif masyarakat dalam berdemokrasi; belum optimalnya pemahaman dan penerapan atas nilai-nilai Pancasila di masyarakat; serta belum optimalnya



kondusifitas wilayah, termasuk pada situasi politik.

4.1.4. Aspek Pelayanan Umum

Pada aspek pelayanan umum, terdapat satu permasalahan pokok pembangunan daerah di Kabupaten Banggai Kepulauan, yakni belum optimalnya tata kelola pemerintahan. Berikut merupakan penjabaran masing-masing permasalahan pokok pada aspek pelayanan umum di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang terjadi di Kabupaten Banggai Kepulauan disebabkan belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima sebagai akibat dari belum optimalnya layanan kependudukan; belum optimalnya layanan pemerintahan berbasis digital (sistem *e-government*); belum optimalnya pengelolaan data secara terpadu dan terintegrasi secara spasial maupun non spasial; belum optimalnya penerapan manajemen keamanan sistem informasi daerah; belum optimalnya daya saing kelurahan; belum optimalnya pengelolaan kearsipan secara baku; belum optimalnya manajemen kinerja ASN; belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah; belum optimalnya kinerja perencanaan daerah; belum optimalnya pelaksanaan riset dan inovasi daerah; belum optimalnya kinerja pengawasan internal daerah; belum optimalnya fungsi koordinasi terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan daerah; serta belum optimalnya dukungan terhadap tugas dan fungsi perwakilan rakyat.

4.2. ISU STRATEGIS

Isu strategis dalam konteks perencanaan pembangunan merujuk pada permasalahan atau tantangan utama yang memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu rencana pembangunan. Isu-isu ini memerlukan perhatian khusus karena dapat mempengaruhi arah dan prioritas kebijakan serta program pembangunan yang dirancang oleh pemerintah atau organisasi. Isu strategis biasanya mencakup faktor-faktor yang berkaitan dengan dinamika ekonomi, sosial, politik, lingkungan, dan teknologi yang dapat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan suatu daerah. Contohnya termasuk perubahan demografi, perkembangan teknologi, perubahan iklim, atau dinamika ekonomi global yang dapat membawa peluang atau ancaman bagi pembangunan. Dalam perencanaan pembangunan, identifikasi dan pemahaman terhadap isu strategis sangat penting untuk merumuskan kebijakan dan strategi yang tepat, sehingga pembangunan dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak,



berjangka menengah ataupun panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Dalam perumusannya isu strategis daerah dianalisis berdasarkan gambaran kondisi daerah dan permasalahan perangkat daerah.

Isu strategis daerah dirumuskan berdasarkan pada permasalahan pembangunan yang perumusannya mempertimbangkan permasalahan masing-masing perangkat daerah, termasuk di dalamnya telaah tentang norma dan standar, juga proses dan prosedur yang harus diikuti, serta kriteria (terutama mengacu dalam lampiran Permendagri 86 tahun 2017), serta memperhatikan dokumen rencana pembangunan lainnya, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, dan isu strategis satuan kerja perangkat daerah. Dengan demikian analisis dan perumusan isu strategis juga sudah memperhatikan Norma Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ada dan berlaku.

Hasil rumusan isu strategis daerah diupayakan dapat menggambarkan dinamika lingkungan eksternal baik skala regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap daerah dalam kurun waktu jangka menengah maupun jangka panjang. Isu strategis daerah menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah mulai dari tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan berikut program-program pembangunannya.

4.2.1. Telaah Dokumen Perencanaan

A. Global Megatren

Megatrend dapat diartikan sebagai transformasi global dalam periode jangka panjang yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Transformasi global ini terdiri dari 10 komponen, yang meliputi:

1. Demografi Global

Adanya tren demografi global akan mendorong peningkatan urbanisasi, arus imigrasi, dan penduduk usia lanjut. Jika dikaitkan dengan persebaran usia penduduk maka pada negara maju terjadi persaingan antara populasi penduduk usia produktif dan penduduk lanjut usia yang menjadi hambatan dalam hal pendapatan pajak. Adapun pada negara berkembang, proporsi penduduk usia produktif diprediksi akan lebih dominan sehingga memunculkan tuntutan dalam hal pendidikan, ketersediaan lapangan pekerjaan, dan sumber daya. Hal ini agar peluang tingginya jumlah penduduk usia dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga tidak menimbulkan peningkatan pengangguran yang menjadi beban pada aspek kependudukan.



2. Urbanisasi Dunia

Pembangunan perkotaan akan berperan dalam meningkatkan daya saing, kualitas hidup masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini menjadi implikasi bahwa perlu adanya perencanaan perkotaan yang efektif dan berkelanjutan sehingga kawasan perkotaan menjadi layak huni dalam jangka waktu lama untuk mengantisipasi lonjakan jumlah penduduk perkotaan yang meningkat.

3. Peranan *Emerging Economies*

Adanya investasi Sumber Daya Manusia dan infrastruktur serta reformasi structural dan iklim usaha mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berdaya saing, dan berkesinambungan.

4. Perdagangan Internasional

Poros perdagangan dan investasi dunia terletak di negara berkembang dengan pertumbuhan enam persen per tahun. Diprediksikan perdagangan intra Asia akan meningkat dan investasi asing langsung ke dan antar negara berkembang berlanjut.

Pergeseran peningkatan peranan negara berkembang dalam ekonomi global mendorong perdagangan internasional berpusat di kawasan Asia-Afrika. Perekonomian Negara berkembang terutama negara E7 diperkirakan akan meningkat tinggi dan mendominasi perekonomian dunia menggantikan dominasi dari negara maju yang tergabung dalam G7. Pertumbuhan perdagangan negara berkembang akan didorong oleh perdagangan intra-Asia yang menunjukkan tren yang berlanjut terutama dari Tiongkok, India dan negara-negara ASEAN. Selain itu, peningkatan pendapatan serta proyeksi peningkatan demografi penduduk di Kawasan Afrika, Nigeria dan beberapa negara di Afrika Selatan, mendorong perdagangan internasional bergerak ke kawasan tersebut untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang tinggi.

Kolaborasi produksi bersama internasional (*global production networks/GPN*) dan rantai pasok global (*global value chain/GVC*) semakin menguat dan terdiversifikasi. Skema GPN dan GVC menjadi salah satu pilihan utama bagi industri dalam melakukan produksi. Manfaat ekonomi yang diperoleh dari GPN dan GVC tidak hanya mendapatkan keuntungan dari biaya produksi yang lebih murah, tetapi juga meningkatkan penerimaan investasi asing dan perdagangan internasional bagi suatu negara. Sementara itu, Kawasan Asia Timur dan ASEAN akan berkembang sebagai pusat GVC dunia seiring dengan infrastruktur yang memadai, pangsa pasar yang substansial, dan kompetensi SDM industri yang berkualitas, khususnya dalam memproduksi barang manufaktur berorientasi ekspor.



Perdagangan internasional akan semakin dipengaruhi kecepatan perubahan teknologi dan digital, dan keberlanjutan yang terus berkembang. Perkembangan teknologi digital mendorong kompleksitas dan diversifikasi produksi. Selain itu, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengurangi biaya transaksi dan mempercepat perubahan dalam struktur perdagangan. Negara yang dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan digital, memanfaatkan hilirisasi sumber daya alam dan mineral untuk memproduksi produk yang lebih kompleks dan berkelanjutan, berpeluang semakin memiliki peran penting dalam rantai nilai perdagangan global.

Kerjasama Kawasan menciptakan *hub* perdagangan strategis. Kerjasama Kawasan seperti *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* dan *Indo-Pacific Economic Framework (IPEF)* yang beranggotakan negara-negara dengan kekuatan ekonomi yang signifikan, sumber daya alam yang melimpah, dan posisi geografis yang strategis, akan menciptakan peluang perdagangan yang lebih besar di kawasan Asia Pasifik yang mendorong ketersediaan rantai pasok global, investasi, serta inovasi dan teknologi. Dengan demikian, perdagangan internasional akan berpusat di Asia terutama Kawasan Indo-Pasifik.

5. Keuangan Internasional

Terjadinya pergeseran dominasi mata uang dunia dari dolar AS menjadi *multi currencies*. Desain kebijakan fiskal global dan nasional pada tahun 2045 sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan demografi. Pendapatan negara ke depan akan sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan produktivitas penduduk. Hal tersebut berpotensi meningkatkan penerimaan negara secara signifikan. Dari sisi belanja negara, pergeseran komposisi demografi yang menuju *aging society* pada tahun 2045 akan menentukan komposisi belanja negara yang lebih didominasi oleh komponen belanja perlindungan sosial dan pensiun. Dari sisi pembiayaan anggaran, tren ke depan akan sejalan dengan pendalaman pasar keuangan dan arah kebijakan moneter global yang ditransmisikan melalui jalur suku bunga serta aliran likuiditas di pasar uang dan pasar modal. Tren penggunaan *Central Bank Digital Currency (CBDC)* yang merupakan bentuk digital dari mata uang fiat suatu negara. CBDC juga merupakan terobosan untuk mengatasi risiko stabilitas aset kripto yang berpotensi menimbulkan sumber risiko baru yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi makro, moneter, dan sistem keuangan di masa depan. Perkembangan teknologi informasi telah menimbulkan disrupsi dalam industri jasa keuangan. Berkembangnya berbagai inovasi teknologi seperti *Internet of Things (IoT)*, *Cloud Computing*, *Artificial Intelligence (AI)*, dan



Machine Learning telah membawa perubahan yang signifikan pada industri jasa keuangan. Ke depannya puluhan juta pekerjaan pada jasa keuangan akan menghilang, tetapi akan tergantikan dengan pekerjaan baru dengan kemampuan (*skill*) yang baru. Sementara itu, munculnya perusahaan teknologi finansial (*financial technology*) seperti bank digital, dan keuangan terdesentralisasi telah meningkatkan efisiensi dan perluasan akses ke layanan keuangan, sekaligus sebagai pesaing industri keuangan. Namun, pertumbuhan pesat perusahaan teknologi finansial banyak mengandung risiko terlebih regulasi yang belum memadai dapat menimbulkan implikasi stabilitas keuangan.

6. Kelas Menengah

Jumlah *middle* dan *upper income class* akan terus meningkat, dengan Asia dan Amerika Latin sebagai negara dengan jumlah *middle* dan *upper income class* terbesar. Proporsi kelas menengah yang semakin meningkat mendorong penciptaan jenis dan lapangan pekerjaan baru dan kebutuhan konsumsi yang lebih beragam termasuk kebutuhan gaya hidup baru (*new life style*). Jenis pekerjaan baru yang diperkirakan berkembang di masa mendatang antara lain, pekerjaan terkait dengan teknologi tinggi, pekerjaan melalui *virtual-metaverse*, serta pekerjaan lain yang bersifat fleksibel dan mobilitas tinggi. Pekerjaan baru ini akan mempercepat dan mempermudah proses bisnis, tetapi di sisi lain berpotensi meningkatkan mobilitas pekerja antar sektor dan antar jenis pekerjaan.

7. Persaingan Sumber Daya Alam

Persaingan memperebutkan sumber daya alam akan meningkat seiring dengan peningkatan peranan ekonomi Asia dan penduduk di Afrika. Akan tetapi, diperkirakan ketersediaan sumber daya alam tidak dapat memenuhi kebutuhan permintaan yang semakin bertambah meskipun dengan adanya teknologi yang mampu meningkatkan efisiensi sumber daya alam. Kelangkaan sumber daya yang diiringi dengan peningkatan kebutuhan akan berdampak pada peningkatan harga komoditas sumber daya. Oleh karena itu, perlu adanya inovasi untuk mengurangi penggunaan sumber daya, meningkatkan *reuse, recycle*, dan mencari alternatif sumber daya pengganti.

8. Teknologi

Kecepatan perubahan teknologi telah menimbulkan disrupsi teknologi di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi digital telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat seperti *Internet of Things* (IoT), *blockchain*, *Hyper Connection*, *Artificial Intelligence* (AI), *Distributed Ledger Technology* (DLT), *Production Lifecycle Management*, *Robotic*



Process Automation (RPA), Edge Computing, Auto Robotic System, 3D, dan Future Technologies.

Tren perubahan teknologi ke depan akan didominasi oleh teknologi informasi dan komunikasi, bioteknologi dan rekayasa genetik, Kesehatan dan pengobatan, energi terbarukan, *wearable devices*, otomatisasi dan robotik serta *artificial intelligence*. *Rockefeller Foundation and Global Business Network (RF and GBN, 2010)* menjelaskan bahwa tantangan utama bukan hanya tentang pengembangan teknologi, melainkan juga berkaitan dengan penyediaan akses teknologi yang dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia seperti pada urusan pendidikan, kesehatan, energi, dan pengaturan terhadap teknologi yang berpotensi mengancam keamanan negara seperti terorisme global atau perdagangan ilegal.

9. Perubahan iklim

Seiring waktu, tantangan pemanasan global semakin meningkat, baik berupa kejadian ekstrim maupun perubahan iklim jangka Panjang. Perubahan iklim berdampak pada seluruh aspek kehidupan. Jika tidak ada upaya untuk menurunkan emisi, maka rata-rata suhu global diprediksi meningkat 3 – 3,5 derajat celsius pada akhir abad ini. Pemanasan global berpotensi memicu bahaya perubahan iklim yang cepat dan parah, mengganggu *supply chains*, hingga menenggelamkan beberapa kota besar di seluruh dunia. Selain itu, keanekaragaman hayati akan terus berkurang dan mengancam kestabilan pasokan pangan dan sumber daya air. Upaya mengatasi perubahan iklim harus dilakukan oleh seluruh pihak, khususnya merubah gaya hidup yang lebih berkelanjutan. Pemerintah sebagai salah satu pemangku kepentingan, dapat melakukan beberapa upaya, khususnya terhadap sektor industri yang menyumbang emisi besar seperti melalui penyusunan regulasi terkait perubahan iklim serta pemberian insentif dan disinsentif.

10. Perubahan Geopolitik

Perubahan geopolitik akan terus berlanjut di masa mendatang seiring dengan meningkatnya peranan Cina, kerentanan di Kawasan Timur Tengah serta meningkatnya kelas baru dan kelompok penentu.

Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara tak terkecuali Indonesia. Perkembangan geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi persaingan antarnegara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai kekuatan baru telah memengaruhi



pergolakan di kawasan maupun tatanan global serta sikap Indonesia dalam dunia internasional.

Terdapat beberapa hal yang dapat menjadi perhatian oleh pemerintah atau pemangku kepentingan mengenai *Environmental Assesment* (penilaian lingkungan) dengan adanya *Megatrend*, yaitu 1) Menghadapi kompleksitas dan ketidakpastian; 2) Meningkatkan efisiensi; 3) Menghadapi perubahan yang signifikan; 4) Menghadapi komunikasi dan partisipasi. Peningkatan populasi yang cepat, urbanisasi, dan inovasi teknologi yang terus berkembang mempengaruhi kompleksitas pengambilan keputusan dan juga ketidakpastian akan perubahan. *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPPC) 2016, memperkirakan bahwa masa depan menjadi lebih tidak stabil dan sulit untuk diprediksi, salah satu kasus yang telah terjadi adalah pada perubahan iklim.

Selain itu, dengan adanya perubahan demografi, urbanisasi, dan inovasi teknologi yang membuat lebih banyak populasi penduduk maka diperlukan efisiensi dalam meningkatkan informasi sehingga mempersingkat waktu pengambilan keputusan. Khususnya dalam hal regulasi di pemerintahan. *International Association for Impact Assessment* (IAIA) dan *Institute for Environmental Assessment* (IEA) dalam Retief, dkk., 2016 menjelaskan empat prinsip pendukung efisiensi, yaitu relevan, hemat biaya, fokus, dan kredibel. Berbagai analisis *Megatrend* menunjukkan bahwa di masa depan, permintaan terhadap sumber daya akan terus meningkat dan menyebabkan kelangkaan terjadi. Peraturan yang berkaitan dengan upaya pencegahan kerusakan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat harus menjadi isu utama yang diperhatikan.

Di masa depan, perkembangan yang pesat pada teknologi komunikasi dan urbanisasi sekali lagi menjadi aspek penting. Hal ini karena setiap orang akan lebih mudah terhubung antara satu sama lain melalui teknologi. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat akan lebih mudah diakomodasi dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah memberikan informasi dan meminta masukan dari masyarakat sehingga kebijakan yang diambil nantinya sesuai dengan kebutuhan di dalam Masyarakat.

Perkembangan *Megatrend* dan dampak yang ditimbulkan di masa mendatang, harus diperhatikan oleh para pemangku kepentingan. Kendati demikian, pemahaman terhadap megatren dapat berbeda, bergantung pada sudut pandang pemangku kepentingan ataupun Masyarakat. Sebagai contoh, pertumbuhan populasi global, dapat dilihat sebagai faktor pendorong atau sebagai faktor penghambat bagi pembangunan ekonomi. Contoh lainnya adalah urbanisasi yang dapat dianggap sebagai faktor yang membenani keberlangsungan ekosistem atau sebagai peluang untuk menerapkan gaya hidup yang lebih hemat sumber daya. Dengan memahami hal tersebut maka



peluang yang mungkin muncul akibat *Megatrend* dapat ditangkap dan dimanfaatkan serta permasalahan yang mungkin terjadi dapat diantisipasi.



Gambar 4.1
Megatren Tahun 2045

B. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) menjadi agenda global 2030 setelah disepakati dalam sidang PBB pada bulan September 2015. SDGs yang berisikan 17 tujuan dan 169 target, adalah sebuah dokumen yang akan menjadi acuan dalam kerangka pembangunan dan perundingan negara-negara di dunia. Selain itu juga dikenal sebagai kerangka kerja untuk 15 tahun ke depan hingga tahun 2030. Butir-butir SDGs bersifat inklusif, melibatkan banyak pihak termasuk organisasi masyarakat sipil atau *Civil Society Organization* (CSO).

Pembangunan global ini merupakan agenda pembangunan global baru periode 2016- 2030 untuk meneruskan seluruh Tujuan Pembangunan Milenium/*Millennium Development Goals* (MDGs) termasuk pencapaian tujuan-tujuan yang tidak tercapai, terutama menjangkau kelompok masyarakat yang sangat rentan. TPB/SDGs jauh lebih luas daripada MDGs yang akan meneruskan prioritas-prioritas pembangunan meliputi penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan gizi, serta tujuan-tujuan yang lebih luas dari ekonomi, sosial dan lingkungan. TPB/SDGs juga menjanjikan masyarakat yang lebih damai dan inklusif. Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, ditetapkan pula sarana pelaksanaan (*Means of Implementation*).



Keberhasilan pencapaian SDGs tidak dapat dilepaskan dari peranan penting pemerintah daerah. Oleh karena pemerintah kota dan kabupaten berada lebih dekat dengan warganya, memiliki wewenang dan dana, dapat melakukan berbagai inovasi, serta ujung tombak penyedia layanan publik dan berbagai kebijakan serta program pemerintah. Hal ini didorong oleh kenyataan bahwa sejak pemberlakuan desentralisasi di Indonesia, dua pertiga nasib dan kualitas hidup masyarakat dalam praktiknya sangat ditentukan oleh baik buruknya kinerja pemerintah daerah. Mulai dari soal kebersihan lingkungan, seperti pengelolaan sampah, kualitas sekolah, dan pelayanan kesehatan. Pada intinya kondisi masyarakat tergantung pada tinggi rendahnya mutu pelayanan publik di daerah.

C. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045.

RPJPN 2025-2045 disusun melalui landasan pemikiran untuk mencapai Indonesia Emas 2045 yang merupakan penjabaran visi abadi Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945. Visi Indonesia Emas 2045 mempertimbangkan megatren global, modal dasar, perubahan iklim, daya tambung dan daya dukung, serta pencapaian pembangunan sebelumnya. **Visi Indonesia Emas 2045 yang dijabarkan dalam RPJPN 2025-2045 adalah :**

Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.

Visi tersebut dicerminkan dalam lima sasaran visi yang dicapai melalui **delapan misi (agenda) pembangunan**. Selanjutnya, delapan misi pembangunan dijabarkan ke dalam **17 (tujuh belas) arah pembangunan** yang diukur keberhasilannya melalui **45 (empat puluh lima) indikator utama**.

Terwujudnya Visi Indonesia Emas 2045 tercermin dalam lima sasaran visi, yaitu (1) pendapatan per kapita setara negara maju, (2) kemiskinan menuju 0 persen dan menurunnya ketimpangan, (3) meningkatnya kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di dunia internasional, (4) meningkatnya daya saing sumber daya manusia, (5) menurunnya intensitas emisi GRK menuju *net zero emission*. Sasaran pertama, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan mencapai US\$23.000-30.300 dan masuk dalam lima ekonomi terbesar di dunia dengan fokus utama pada peningkatan kontribusi PDB industri manufaktur dan kemaritiman. Sasaran kedua, tingkat kemiskinan diperkirakan berada pada kisaran 0,5-0,8 persen, ketimpangan pendapatan penduduk berada pada kisaran Rasio Gini 0,290-0,320, dan kontribusi PDRB Kawasan Timur Indonesia mengalami peningkatan menjadi 28,5 persen. Sasaran ketiga diukur dengan *Global Power Index (GPI)* di peringkat 15 besar dunia yang mencerminkan adanya penguatan diplomasi internasional dan



kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif dalam organisasi internasional, dan berkontribusi dalam penyelesaian isu-isu global. Sasaran keempat diukur melalui peningkatan *Human Capital Index* (HCI) menjadi 0,73 pada tahun 2045 yang dicapai melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dari segala aspek. Sasaran kelima ditunjukkan oleh menurunnya intensitas emisi GRK menjadi 93,5 persen pada tahun 2045 dan menuju *net zero emission* pada tahun 2060.

Sementara itu, terwujudnya Visi Indonesia Emas 2045 sebagai ***Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan*** diwujudkan melalui **delapan misi pembangunan** yang terdiri dari tiga misi transformasi, dua landasan transformasi, dan tiga kerangka implementasi transformasi. Delapan misi tersebut yaitu:

1. Mewujudkan transformasi sosial;
2. Mewujudkan transformasi ekonomi;
3. Mewujudkan transformasi tata kelola;
4. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia;
5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi;
6. Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan;
7. Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan;
8. Keseimbangan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas melalui kaidah pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan yang efektif.

Selanjutnya, **arah pembangunan** yang ditetapkan untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 terdiri dari **17 (tujuh belas) tujuan**, sebagai berikut:

1. Kesehatan untuk semua;
2. Pendidikan berkualitas yang merata;
3. Perlindungan sosial yang adaptif;
4. IPTEK, inovasi, dan produktivitas ekonomi;
5. Penerapan ekonomi hijau;
6. Transformasi digital;
7. Integrasi ekonomi domestik dan global;
8. Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
9. Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif;
10. Hukum berkeadilan, keamanan nasional tangguh, dan demokrasi substansial;
11. Stabilitas ekonomi makro;



12. Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan;
13. Beragama maslahat dan berkebudayaan maju;
14. Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif;
15. Lingkungan hidup berkualitas;
16. Berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan;
17. Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.

Pembangunan nasional jangka panjang dibedakan ke dalam empat tahapan. **Tahap pertama atau tahun 2025-2029 merupakan tahap perkuatan fondasi transformasi**, di mana pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5,6 hingga 6,1 persen per tahun dengan fokus pembangunan dalam setiap misi sebagai berikut:

- a. **Transformasi sosial**, difokuskan pada penuntasan pemenuhan layanan dasar (kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial) dan peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif;
- b. **Transformasi ekonomi**, difokuskan pada upaya lanjutan hilirisasi SDA unggul, peningkatan kapasitas riset, inovasi, dan produktivitas tenaga kerja, penerapan ekonomi hijau, pemenuhan akses digital di seluruh wilayah, pembangunan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan utamanya di luar pulau Jawa. Pembangunan sektor energi diarahkan lebih berkelanjutan dengan pembatasan pembangunan PLTU batu bara dan pengalihan subsidi fosil ke subsidi energi terbarukan secara bertahap;
- c. **Transformasi tata kelola**, difokuskan pada perbaikan kelembagaan, peningkatan kualitas ASN, dan peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi;
- d. Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, difokuskan pada penguatan stabilitas politik, pengembangan budaya hukum dan transformasi kelembagaan hukum yang mengedepankan asas hukum yang berlandaskan Pancasila, dan penguatan diplomasi;
- e. Ketahanan sosial budaya dan ekologi, difokuskan pada optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia sebagai modal sosial dan akselerasi pencapaian pembangunan berkelanjutan dan penurunan emisi GRK;
- f. Pembangunan wilayah, difokuskan pada optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang ada, pembangunan bertahap *national grid* untuk mendukung transisi energi, percepatan pembangunan konektivitas laut, melanjutkan pengembangan wilayah metropolitan dan kota besar, serta melanjutkan pembangunan dan penyiapan enam klaster Ibu Kota Nusantara (IKN).



- g. Pembiayaan pembangunan, difokuskan pada optimalisasi pembiayaan pembangunan non pemerintah dan reformasi tata kelola fiskal.

Visi Indonesia Emas 2045 dapat diwujudkan dengan pendekatan pembangunan yang melibatkan langkah transformasi menyeluruh, mencakup transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola. Transformasi sosial ditujukan untuk memastikan manusia sebagai tujuan pembangunan menjadi manusia Indonesia yang unggul untuk mencapai kesejahteraan yang optimal. Adapun transformasi ekonomi menjadi titik penting untuk meningkatkan produktivitas faktor produksi dan perekonomian menjadi negara maju. Sementara itu, transformasi tata kelola menjamin terlaksananya transformasi sosial dan ekonomi serta menciptakan pelayanan publik berkualitas dan masyarakat sipil yang partisipatif guna mencapai prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain ketiga transformasi tersebut, dibutuhkan landasan stabilitas nasional yang kuat dan ketangguhan diplomasi untuk memastikan keberlangsungan dan keberhasilan pembangunan. Di samping itu, ketahanan sosial budaya dan ekologi juga berperan penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Langkah transformasi tahap pertama yang sekaligus menjadi tema dan arah kebijakan RPJMN Teknokratik Tahun 2025-2029 dilaksanakan sebagai berikut.

Tabel 4.1

**Transformasi Tahap Pertama RPJPN/Tema dan Arah
Kebijakan RPJMN Teknokratik Tahun 2025-2029**

Transformasi	Penguatan Fondasi Transformasi
Transformasi Sosial	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial
Transformasi Ekonomi	Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja (kisaran pertumbuhan ekonomi 5,6-6,1 persen)
Transformasi Tata Kelola	Kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil
Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia	Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gantar kawasan dan ketangguhan diplomasi sebagai landasan transformasi dan pembangunan
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023 (diolah) dalam Rancangan Akhir RPJPN



D. Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029

Sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025- 2029, setidaknya terdapat tujuh isu strategis kewilayahan pada wilayah Pulau Sulawesi, yakni meliputi:

Isu mengenai pembangunan kawasan Kepulauan Sulawesi menjadi salah satu acuan penting bagi pengembangan wilayah Kabupaten Morowali. Pulau Sulawesi dengan luas paling sedikit 40 persen dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya serta tersebar secara proporsional. Dalam dokumen RPJPN Tahun 2025-2029 juga memuat skenario rencana pembangunan wilayah Sulawesi sebagai berikut.

➤ **Arah Kebijakan RPJMN Untuk Wilayah Sulawesi**



Tema Pembangunan Wilayah Sulawesi Periode 2025-2029

➤ **Penunjang *Superhub* Ekonomi Nusantara dan Industri Berbasis SDA**

Wilayah Penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Pintu Gerbang Internasional Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang berfokus pada Pengembangan Industri Hilirisasi Mineral dan Lumbung Pangan Nasional.

Dalam dokumen Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029 juga menjabarkan arahan kebijakan untuk Wilayah Sulawesi. dimana Wilayah Sulawesi berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia sebesar 7,0 persen pada tahun 2022 dan diproyeksikan menjadi 7,7 persen pada tahun 2029. Potensi peningkatan kontribusi tersebut didukung posisi geografis Sulawesi yang berada di antara 2 (dua) ALKI serta keuntungan lokasi yang berdekatan dengan Ibu Kota Nusantara, serta beragamnya sektor unggulan antara lain Sektor Pertanian, Sektor Pertambangan, dan Sektor Pariwisata.



Tabel 4.2
Thema Pembangunan Wilayah Sulawesi

No.	Provinsi	Thema
1.	Sulawesi Utara	Gerbang Perdagangan Asia Timur dan Pasifik, serta Pusat Pengolahan Hasil Perikanan dan Destinasi Ekowisata
2.	Sulawesi Tengah	Sentra Tanaman Pangan dan Perkebunan, serta Pusat Pengolahan Hasil Pertambangan
3.	Sulawesi Selatan	Gerbang Indonesia Timur dan Lumbung Pangan
4.	Sulawesi Tenggara	Sentra Pengolahan Hasil Pertambangan, Pertanian dan Destinasi Pariwisata Bahari
5.	Gorontalo	Sentra Tanaman Pangan dan Pertanian
6.	Sulawesi Barat	Sentra Pengolahan Komoditas Perkebunan

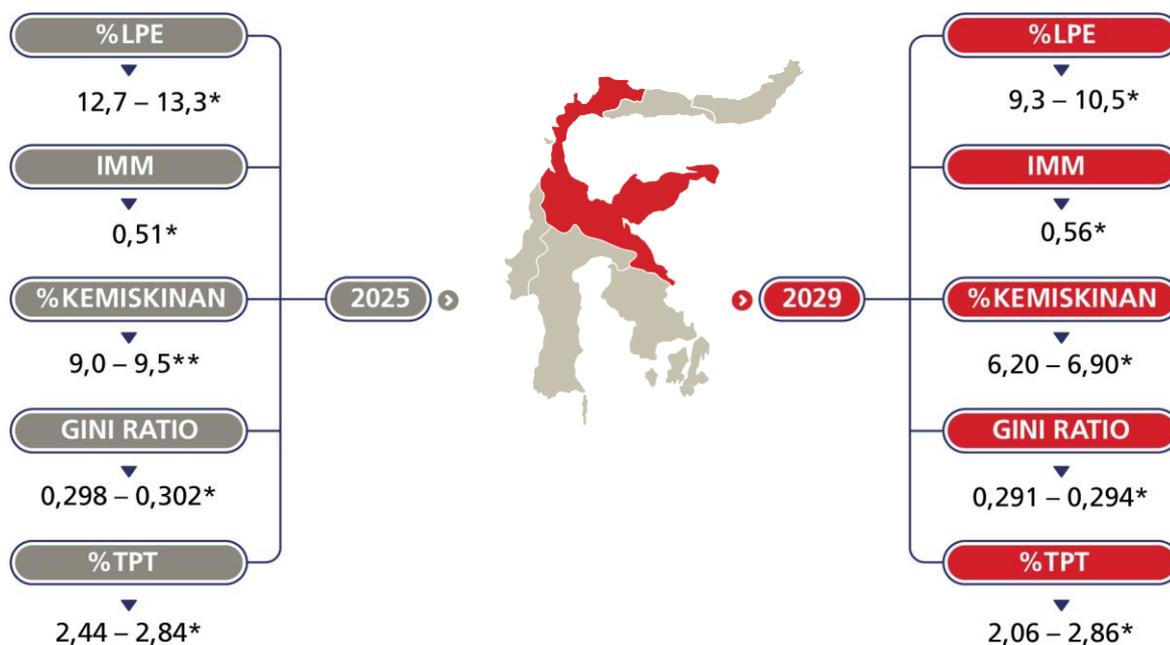
Pengembangan Wilayah Sulawesi diarahkan sebagai **“Penunjang Ekonomi IKN berbasis SDA”** secara khusus kedudukan provinsi Sulawesi Tengah berperan sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) dan pintu gerbang internasional Kawasan Timur Indonesia (KTI), melalui pengembangan industri hilirisasi mineral dan lumbung pangan nasional. Untuk itu dibangun konektivitas antarwilayah yang menjadi kunci rantai nilai domestik (*Domestic Value Chain*), diperkuat dengan *Global Value Chain* melalui skema kerja sama regional dan Peran Perguruan Tinggi (Pentahelix). Ke depannya pertumbuhan tinggi daerah akan lebih diimbangi dengan upaya-upaya yang inklusif dan berkelanjutan melalui perkuatan kebijakan pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial. Berdasarkan arah pembangunan tersebut, pembangunan di Wilayah Sulawesi mencakup 5 (lima) prioritas:



1. *Pertama*: pembangunan sumber daya manusia (SDM) terutama untuk mendukung peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan, serta mendorong pembangunan ekosistem riset dan inovasi;
2. *Kedua*: pembangunan ekonomi yang diarahkan untuk penguatan rantai produksi dan rantai nilai, serta peningkatan produktivitas dan daya saing perekonomian wilayah secara berkelanjutan yang difokuskan pada kawasan industri pertambangan, kawasan industri galangan kapal, kawasan ekowisata, kawasan perikanan tangkap dan budidaya, serta industri pengolahannya, kawasan pertanian tanaman pangan, serta kawasan perkebunan kakao, kelapa, dan kopi;
3. *Ketiga*: pembangunan sarana dan prasarana konektivitas untuk mendukung fungsi *hub* dan pintu gerbang internasional KTI dengan memanfaatkan ALKI II dan III, serta peningkatan infrastruktur ketenagalistrikan dan digital.
4. *Kelima*, peningkatan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi, termasuk penguatan pengendalian rencana tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan risiko bencana serta penuntasan RDTR kabupaten/kota untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berbudaya;
5. *Keempat*: perbaikan tata kelola pemerintahan, termasuk penataan keuangan daerah untuk mewujudkan good governance dan kemandirian fiskal, serta penguatan stabilitas pertahanan dan keamanan di wilayah Sulawesi, khususnya di kawasan perbatasan;
5. *Kelima*, peningkatan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi, termasuk penguatan pengendalian rencana tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan risiko bencana serta penuntasan RDTR kabupaten/kota untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berbudaya.

➤ **Arah Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah**

Tema Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah Sentra Tanaman Pangan dan Perkebunan, serta Pusat Pengolahan Hasil Pertambangan.



Transformasi	Highlight Indikasi Intervensi
Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan pencegahan dan percepatan penurunan <i>stunting</i>, serta perbaikan gizi lainnya • Pengendalian penyakit menular (TBC, malaria) dan eliminasi penyakit tropis terabaikan (<i>schistosomiasis</i> dan kusta), peningkatan cakupan imunisasi, dan penguatan kapasitas sistem pelayanan kesehatan. • Percepatan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi, serta penguatan prodi Perguruan Tinggi (STEAM) yang sesuai dengan potensi unggulan wilayah seperti pertambangan, industri pengolahan hasil pertambangan, perkebunan, perikanan, pertanian, dan pariwisata. • Pengentasan kemiskinan terutama pada perdesaan dan daerah afirmasi melalui perlindungan sosial adaptif dan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). • Perkuatan pemenuhan tenaga medis dan kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif dan afirmasi pendayagunaan tenaga medis dan kesehatan dari masyarakat lokal terutama di daerah sulit akses dan daerah afirmasi. • Pengembangan bidang keahlian jenjang SMK difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat pada sektor industri pengolahan
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan nilai tambah dan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam mineral yang berkelanjutan. • Peningkatan produktivitas dan nilai tambah tanaman pangan



Transformasi	<i>Highlight</i> Indikasi Intervensi
	<p>dan perkebunan.</p> <ul style="list-style-type: none">• Peremajaan kota (<i>urban renewal</i>) secara inklusif dan terpadu dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.• Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan di sekitar Kawasan Industri (KI) Morowali yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung.• Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah.• Pengembangan interkoneksi transmisi Sistem Sulawesi 150 kV• Pengembangan jalan mendukung akses simpul transportasi (Pelabuhan Laut (PP) Wani, Kolonedale, Ampana, Toli-Toli), penanganan jalan akses mendukung Kawasan Industri (KI Morowali dan KI/KEK Palu), peningkatan jalan daerah, serta penanganan daerah rawan kecelakaan dan pemenuhan fasilitas keselamatan jalan.• Pengembangan Pelabuhan Parigi, Lebiti, Bungin, Bungku, Luwuk, Ogoamas, Kolonedale, Bunta, dan penyediaan layanan penyeberangan menuju Kab. Banggai.• Optimalisasi dan peningkatan layanan dan prasarana Bandara Mutiara SIS Al-Jufri, Bandara Luwuk buol, dan Banggai Laut
Tata Kelola	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan antikorupsi, transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.• Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik melalui harmonisasi regulasi, pengembangan <i>smart government</i>, dan peningkatan kapasitas aparatur.• Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia.• Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi• Diversifikasi sumber pendapatan daerah dan pengelolaan belanja daerah dalam mendukung kemandirian fiskal.• Penguatan kerja sama regional dengan negara tetangga untuk menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan.• Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.• Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.• Pembangunan tampungan air serba guna yang memberikan manfaat secara cepat bagi kebutuhan air sehari-hari masyarakat.• Pengendalian banjir dan sedimen di Kota Palu.



Transformasi	<i>Highlight</i> Indikasi Intervensi
	<ul style="list-style-type: none">• Penguatan ekonomi budaya melalui pengembangan warisan budaya Tenun Donggala, serta revitalisasi cagar budaya kawasan karst, kota tua, dan goa-goa prasejarah.

Sumber: Teknokratik RPJMN 2025-2029.

4.2.2. ISU STRATEGIS PROVINSI SULAWESI TENGAH

Berdasarkan analisis kondisi di masa mendatang dan berdasarkan evaluasi permasalahan di masa lalu serta prediksi kebutuhan yang akan dibutuhkan oleh daerah, maka isu strategis Sulawesi Tengah sebagai berikut:

1. Kualitas Sumberdaya Manusia Belum Berdaya Saing

Pembangunan di Sulawesi Tengah sudah semestinya mengandalkan sumber daya manusia yang memadai dalam arti kuantitas dan kualitas, maka tantangan di masa mendatang akan bisa diatasi dengan baik. Kualitas sumber daya manusia yang sekarang kita miliki masih perlu ditingkatkan, agar tantangan tersebut bisa teratasi dengan baik.

Penduduk Sulawesi Tengah yang berjumlah besar dapat menjadi modal pembangunan bila memiliki kualitas yang memadai. Hal ini mengacu pada konsep bahwa manusia merupakan pelaku, pelaksana, dan penikmat pembangunan. Artinya, dengan kualitas penduduk yang rendah, maka manusia akan lebih banyak berperan sebagai penikmat dan kurang berperan sebagai pelaku dan pelaksana pembangunan. Kualitas sumber daya manusia di Sulawesi Tengah telah meningkat secara kuantitatif, khususnya jika dilihat dari perkembangan data Indeks Pembangunan Manusia sudah berada pada kategori tinggi, namun secara kualitatif kapasitas dan daya saing sumber daya manusia yang dimiliki relatif masih lemah jika dibandingkan dengan kapasitas dan daya saing sumber daya manusia dari daerah-daerah yang lebih maju. Permasalahan dari pemetaan indikator-indikator IPM adalah kontribusi tiga komponen tersebut belum merata, kontribusi pembentukan IPM lebih banyak diberikan oleh komponen pendidikan, sedangkan komponen kesehatan dan kemampuan daya beli masyarakat masih rendah yang ditandai dengan masih tingginya angka kemiskinan dan Stunting di Sulawesi Tengah.

Perkembangan kesehatan yang digambarkan dengan indikator Usia Harapan Hidup (UHH) di Sulawesi Tengah semakin membaik. Kualitas pelayanan kesehatan dan semakin baiknya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, yang didukung oleh sarana dan prasarana



pelayanan kesehatan, namun permasalahan yang masih dirasakan yaitu penyebaran tenaga medis dan paramedis di Kabupaten/kota di Sulawesi Tengah belum merata dan masih terbatas serta belum memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas sehingga pelaksanaan tugas belum mencapai tingkat maksimal.

Laju pertumbuhan usia produktif melebihi ketersediaan lapangan kerja, atau dengan kata lain, proporsi tenaga kerja yang besar di sektor unggulan memiliki tingkat pengetahuan dan keahlian yang rendah sehingga aksesibilitas terhadap lapangan pekerjaan, kemampuan pengelolaan dan faktor produksi juga sangat rendah yang akhirnya berkontribusi pada tingkat kemiskinan yang tinggi.

2. Rendahnya Daya Saing Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata dan Pertambangan.

Potensi pembangunan wilayah Sulawesi tidak dapat dipisahkan dari letak geografis dan sumber daya yang dimiliki. Posisi geografis wilayah Sulawesi Tengah yang terletak diantara ALKI II dan III berpotensi untuk mendukung sebagai hub dan pintu gerbang internasional KTI dan juga adanya pembangunan IKN di Wilayah Kalimantan menjadi peluang untuk peningkatan aktifitas ekonomi sebagai daerah penyanggah. Sulawesi Tengah telah memberikan sumbangsih untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Saat ini pembangunan di Provinsi Sulawesi Tengah telah diarahkan untuk menjadi kawasan penunjang IKN, utamanya penyiapan kawasan pangan dan perkebunan nasional.

Sulawesi Tengah memiliki beberapa komoditas unggulan daerah dari sub sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, pertambangan, perikanan dan kelautan seperti: padi, jagung, kakao, kelapa dalam, sapi potong, rotan, getah pinus, nikel, gas alam, ikan tuna dan rumput laut. Sampai saat ini, tingkat produktivitas sektor unggulan daerah masih berada dalam kategori rendah karena nilai tambah produk yang belum memberikan kontribusi signifikan bagi peningkatan pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat Sulawesi Tengah, meskipun persentase tenaga kerja dan profesi di sektor petani, pekebun, penambang dan nelayan memiliki persentase terbesar dibandingkan profesi lainnya.

Tingkat produktivitas sektor unggulan yang masih minim disebabkan oleh proporsi tenaga kerja yang besar di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, pertambangan, perikanan dan kelautan cenderung memiliki tingkat pengetahuan dan keahlian yang rendah sehingga akses petani/pekebun/nelayan terhadap kemampuan pengelolaan dan



aksesibilitas terhadap faktor produksi terutama lahan, peralatan dan modal adalah sangat minim yang selanjutnya tingkat pengembalian dari keuntungan usaha akan menjadi rendah dan cenderung penduduk pada profesi sektor-sektor unggulan memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi.

Oleh karena itu, komoditas sektor unggulan harus memiliki kriteria tertentu sehingga dapat menopang pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah, diantaranya yaitu (i) komoditas unggulan harus mampu menjadi penggerak utama pembangunan perekonomian. Artinya, komoditas unggulan dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada peningkatan produksi, pendapatan, maupun pengeluaran; (ii) komoditas unggulan mempunyai keterkaitan dari hulu sampai hilir dan memiliki keterkaitan yang kuat dengan sesama komoditas unggulan maupun komoditas lainnya; (iii) seharusnya komoditas unggulan mampu bersaing dengan produk sejenis dari wilayah lain di pasar nasional dan pasar internasional, baik dalam harga produk, biaya produksi, kualitas pelayanan, maupun aspek- aspek lainnya; (iv) komoditas unggulan memiliki status teknologi yang terus meningkat, terutama melalui inovasi teknologi; dan (v) arah pengembangan komoditas unggulan berorientasi pada kelestarian sumber daya dan lingkungan.

Sulawesi Tengah memiliki potensi sektor pertanian, perikanan dan kelautan yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Sektor pertanian Perikanan dan Kelautan merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu sebesar $\pm 60\%$. Sebagian besar masyarakat Sulawesi Tengah menjadikan pertanian, perikanan dan kelautan sebagai sumber penghidupan utama sebagai petani dan nelayan. Oleh karena itu, sektor pertanian, perikanan dan kelautan terus didorong agar menjadi sektor andalan di Sulawesi Tengah. Jika dilihat dari Struktur PDRB Sulawesi Tengah menurut Lapangan Usaha (persen) pada tahun 2023, maka lapangan usaha pertanian, perikanan dan kelautan memberikan andil yang cukup besar yaitu 14,78 persen yang menempati posisi kedua dari sektor pertambangan dan penggalian sebesar 15,59 persen (BPS Sulteng, 2024).

Sampai saat ini, sektor pertambangan dan penggalian, khususnya nikel dan gas bumi terus mendominasi, sehingga diperlukan usaha untuk meningkatkan produktivitas tanaman pertanian dan hasil tangkap perikanan untuk kesejahteraan para petani dan nelayan. Langkah kedepannya yaitu memajukan sektor pertanian seperti pemanfaatan sumber daya pertanian (modal, teknologi, pasar, informasi, lahan, alsintan) secara optimal, pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil produksi pertanian, pembinaan skill dan talenta petani millennial serta sektor perikanan dan kelautan, seperti peningkatan hasil tangkap laut melalui sarana dan



prasarana (kapal ikan, alat tangkap, smart fishing) yang modern, teknologi budidaya perikanan dan konservasi habitat-habitat pesisir yang berkelanjutan. Hal tersebut merupakan yang terpenting dalam upaya percepatan kesejahteraan petani dan nelayan juga masyarakat secara luas dan menjadikan Sulawesi Tengah sebagai daerah tujuan dalam berinvestasi. Sulawesi Tengah memiliki keanekaragaman wisata yang meliputi wisata Bahari, wisata alam serta wisata budaya yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota di Sulawesi Tengah. Isu strategis kedepannya yaitu bagaimana meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap peningkatan ekonomi daerah melalui nilai tambah pariwisata yang saling terkait satu sama lainnya. Kondisi saat ini, pariwisata yang ditawarkan belum memiliki hubungan obyek wisata yang saling terkait dan mendukung antara satu dengan lainnya, misalnya wisata Bahari yang ditawarkan belum dilengkapi dengan tersedianya sarana dan prasarana pendukung seperti: bandara dan pelabuhan yang memadai, hotel dan cottage, restaurant dan kuliner lokal serta aksesibilitas jalan yang memadai.

Kondisi obyek wisata yang tidak berdiri sendiri atau wisata yang dapat menggerakkan pusat-pusat perekonomian lainnya maka akan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat lainnya. Sudah saatnya, pariwisata Sulawesi Tengah mempromosikan paket wisata bernilai tambah. Sulawesi Tengah tidak hanya sekedar melakukan strategi business as usual atau hanya menjadi trend followers tetapi keanekaragaman budaya, bahasa, kuliner, dan alam yang dimiliki dapat mengantarkan Sulawesi Tengah menjadi pusat pariwisata nasional bahkan dunia.

Kedepannya isu pembangunan kepariwisataan di Sulawesi Tengah harus diikuti dengan kegiatan mempertahankan kualitas lingkungan (*carrying capacity*), meningkatkan kualitas tata kelola destinasi, meningkatkan pelayanan pariwisata yang prima, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pariwisata, membuka aksesibilitas udara, darat, dan laut, membuka peluang investasi sektor pariwisata, dan meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana khususnya di daerah-daerah wisata.

Upaya peningkatan pariwisata yang berkualitas ditunjukkan dengan peningkatan nilai tambah yang dapat diterima oleh Sulawesi Tengah atau masyarakat setempat, peningkatan nilai devisa melalui peningkatan lama tinggal dan belanja para wisatawan, peningkatan kualitas destinasi, kesiapan industri dan masyarakat, serta kapasitas sumber daya manusia pariwisata. Penerimaan nilai tambah dipersiapkan dengan peningkatan daya saing dan membangun ketahanan sektor pariwisata, termasuk melalui diversifikasi aktivitas ekonomi dalam rantai pasok pariwisata, perbaikan lingkungan



usaha mikro, kecil, dan menengah yang kondusif dan berkenambungan serta pembangunan citra pariwisata Sulawesi Tengah yang berkualitas.

Tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan yang ada dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat memerlukan terciptanya kondisi dasar, yakni: (1) Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; (2) Penciptaan sektor ekonomi yang kokoh; serta (3) Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah sangat tinggi selama kurun beberapa tahun terakhir, bahkan berada di atas rata-rata nasional, namun masih bersifat eksklusif karena belum mampu mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan di berbagai wilayah dan kelompok masyarakat. Pembangunan ekonomi dengan 5 (lima) sektor yang memberikan kontribusi PDRB tinggi yaitu (i) Industri Pengolahan; (ii) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; (iii) Pertambangan dan Penggalian; (iv) Konstruksi dan (v) Perdagangan Besar dan Eceran belum memberikan dampak positif terhadap pengurangan angka kemiskinan, peningkatan pendapatan petani dan nelayan, serta peningkatan fiskal daerah. Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah belum bisa dimanfaatkan secara optimal dan belum memberikan dampak besar kepada kesejahteraan masyarakat.

3. Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas Belum Sepenuhnya Terwujud

Isu-isu tata kelola pemerintahan yang berfokus pada tata kelola pemerintahan yang baik yaitu berupaya optimal untuk mewujudkan aspek-aspek pembentuk zona integritas. Aspek-aspek tersebut meliputi Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Reformasi Birokrasi sebagai langkah awal dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang berkualitas. Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah upaya untuk membangun pemerintahan yang lebih berdaya guna dalam melaksanakan pembangunan daerah. Birokrasi pemerintah daerah dapat diibaratkan sebagai mesin penggerak pembangunan dan pelayanan publik. Sehingga, untuk memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat, diperlukan birokrasi yang transparan, akuntabel, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Pelayanan publik merupakan salah satu unsur penting bagi pemerintah daerah. Oleh karena itu pelayanan publik yang diberikan aparatur pemerintah (birokrasi pemerintah) harus senantiasa berorientasi pada



kepentingan publik. Pemenuhan terhadap kepentingan publik secara substantif seharusnya memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan agar masyarakat yang dilayani dapat memberikan tanggapan positif terhadap hasil pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah. Namun untuk konteks daerah masalah pelayanan publik sudah lama menjadi pusat perhatian masyarakat seiring banyaknya kasus pelayanan publik yang dianggap kurang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Hal tersebut diatas, mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah daerah belum menunjukkan hasil yang memuaskan bagi masyarakat. Pelayanan yang berbelit-belit, in-efisiensi, lambat, tidak ramah serta tidak jelasnya waktu penyelesaian dan tidak jelasnya biaya pelayanan merupakan indikasi bahwa kualitas pelayanan yang diberikan aparatur pemerintah daerah masih rendah dan pelayanan publik belum berkualitas.

Beberapa faktor penyebab belum berkualitasnya pelayanan publik adalah faktor SDM aparatur, organisasi birokrasi, tata laksana, pola pikir, kinerja organisasi, budaya birokrasi, inovasi birokrasi dan teknologi informasi, perilaku birokrasi, system dan strategi pelayanan, kepemimpinan yang transaksional, struktur organisasi yang adaptif, perilaku organisasi yang koruptif, lemahnya implementasi kebijakan, belum diterapkannya prinsip good governance dan komunikasi birokrasi.

Kedepannya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki tantangan tentang hal ini, dikarenakan tuntutan profesionalitas ASN yang tepat sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya. Di kondisi saat ini, tata kelola pemerintahan perlu dibenahi lagi untuk meningkatkan pelayanan publik yang prima.

Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah telah berkomitmen mendukung pengembangan *Sustainable Development Goals (SDGs)* hingga tahun 2030, dan komitmen itu antara lain diwujudkan melalui program dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Pendek, Menengah dan Panjang pada periode-periode sebelumnya, namun implementasinya masih belum bisa terwujud sepenuhnya. Isu-isu yang terkait pembangunan berkelanjutan di daerah Sulawesi Tengah seperti: penghapusan kemiskinan dan kelaparan, peningkatan kesehatan dan pendidikan, pemberdayaan kota yang berkelanjutan, antisipasi perubahan iklim, dan perlindungan laut dan kemaritiman.

Perkembangan kehidupan masyarakat di masa mendatang ditunjukkan dengan semakin cepatnya perubahan dalam segala bidang kehidupan, semua itu diakibatkan efek globalisasi serta perkembangan teknologi informasi yang sangat akseleratif. Negara- negara dengan tingkat kapabilitas



teknologi informasi yang tinggi akan memiliki daya inovasi dan daya saing yang sangat besar yang sanggup menentukan arah perkembangan ekonomi dalam skala global. Pengembangan Iptek dan riset di Sulawesi Tengah dirasakan masih sangat minim, terlihat dari aplikasi penerapan teknologi dan berbasis riset yang masih kurang dalam pengelolaan bidang-bidang produksi seperti sektor pertanian, perikanan dan kehutanan.

Dengan kondisi dunia yang telah berubah sedemikian cepat dan dengan hadirnya revolusi industri 5.0 yang ditandai dengan adanya kemajuan teknologi AI (*Artificial Intelligence*), ICT (*Information Communication Technology*), IoT (*Internet of Things*), *Biotechnology* dan *Driverless Vehicles*, maka sudah saatnya proses transformasi ini segera dapat direspon oleh daerah dan dilaksanakan melalui kebijakan strategis nasional dan daerah dalam bidang iptek dan pendidikan tinggi. Hal pokok dalam mendukung Indonesia 5.0, bagi daerah Sulawesi Tengah adalah mempercepat pembangunan iptek dan riset di daerah. Oleh karena itu peran riset iptek dan riset harus segera ditingkatkan dengan kebijakan pengarusutamaan (*mainstreaming*) riset iptek daerah melalui perencanaan yang terintegrasi secara nyata dan konsisten dengan dunia industri.

Penerapan Iptek, Riset dan inovasi menjadi kunci bagi daerah untuk tumbuh menjadi provinsi maju dengan daya saing tinggi. Oleh karena itu, ekosistem kebijakan berbasis Iptek, Riset dan inovasi harus terus ditumbuhkan. Selain itu, pengembangannya pun patut dijadikan prioritas pembangunan daerah oleh pengambil kebijakan.

Isu-isu yang terkait Iptek dan Riset yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu menjadi penggerak daya saing daerah, kontribusi teknologi tinggi terhadap ekspor manufaktur juga masih rendah, sumber daya Iptek yang meliputi pendanaan, jumlah dan kualitas peneliti dan perekayasa, hingga tingkat produktivitas Iptek yang berkaitan dengan paten dan publikasi ilmiah juga masih belum optimal.

Untuk menjawab isu-isu diatas, perlu disusun strategi yang tepat, yaitu: pertama, adopsi dan penerapan Iptek. Kedua, peningkatan kemampuan dan kemandirian Iptek. Ketiga, pengembangan teknologi berbasis maritim. Keempat, pengembangan dana inovasi. Kelima, pelebagaan dan kerjasama model penta-helix, dan keenam, pengembangan Iptek berbasis budaya. Olehnya diperlukan penguatan kemitraan diantara pemerintah daerah, dunia industry dan perguruan tinggi. Hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh para akademisi dan peneliti di perguruan tinggi dapat diaplikasikan oleh industri dan dikembangkan menjadi produk komersial untuk kepentingan pasar dan bisnis.



4. Tinggimnya Ketimpangan Antar Wilayah Akibat Kondisi Infrastruktur Yang Belum Optimal Dan Merata.

Aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah di Sulawesi Tengah masih menjadi salah satu isu strategis. Kondisi geografis Sulawesi Tengah berupa kepulauan, perbukitan, pedalaman dan hutan membuat sulit dalam penataan aksesibilitas dan konektivitas atau jaringan penghubung antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.

Aksesibilitas yang rendah menyebabkan sulitnya suatu daerah untuk dijangkau sehingga terjadi perlambatan pembangunan ekonomi daerah. Selain itu, muncul berbagai permasalahan klasik yang ditemui daerah dan masyarakat, seperti tingginya daerah rawan pangan, harga barang-barang pokok tinggi, pelayanan kesehatan dan pendidikan yang tidak maksimal, kemampuan digitalisasi rendah, pembangunan tidak merata serta kondisi keamanan daerah yang rentan terhadap ancaman. Demikian juga dengan konektivitas yang rendah akan menyebabkan pemerataan pembangunan yang tidak merata karena terhambat pada terbatasnya tata kelola jaringan penghubung antara wilayahwilayah yang minus ekonomi dengan sentra-sentra produksi atau pusat- pusat ekonomi.

Penguatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah merupakan salah satu strategi yang ditempuh dalam rangka percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan maka diperlukan tercapainya kondisi aksesibilitas dan konektivitas yang ideal sehingga dapat mendukung perkembangan wilayah dan pemerataan pembangunan dapat tercapai.

Pengembangan wilayah pedesaan di Sulawesi Tengah masih memerlukan dukungan aksesibilitas yaitu kemudahan atau keterjangkauan oleh wilayah lain atau keterjangkauan pedesaan terhadap wilayah sekitarnya. Jika aksesibilitas terbangun maka akan membuka peluang besar untuk potensi pengembangan wilayahnya. Adapun konektivitas dapat diartikan sebagai keberadaan aksesibilitas yang mampu mempermudah jangkauan antar wilayah yang berarti akses terhadap keanekaragaman informasi yang tersedia dalam skala global yang mendukung pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah. Indikasi yang akan diwujudkan pada 20 tahun mendatang yaitu tersedianya jaringan jalan antar daerah baik Kondisi Jalan maupun Jenis Jalan yang mendukung dalam mengakses wilayah selanjutnya akan tersedia tersedianya sistem jaringan lainnya seperti: jaringan listrik, telepon seluler, internet dan lainnya.

Upaya yang hendak dilakukan dalam rangka isu strategis tersebut, yaitu: pertama, memaksimalkan pertumbuhan melalui kesatuan kawasan, bukan keseragaman (inclusive development) dengan menghubungkan pusat-



pusat pertumbuhan ekonomi; kedua, memperluas pertumbuhan melalui konektivitas wilayah-wilayah melalui *inter-moda supply chain system* yang menghubungkan hinterland dan yang tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan serta ketiga, mencapai pertumbuhan inklusif dengan menghubungkan daerah terpencil dengan infrastruktur dan pelayanan dasar dalam mendapatkan manfaat pembangunan.

Ketersediaan infrastruktur dan literasi (kemampuan penguasaan) digital di Sulawesi Tengah, masih minim dikarenakan masih banyaknya daerah di kabupaten/kota yang masih ber status *blank-spot*. Hal yang paling prioritas yaitu tersedianya infrastruktur digital yang menjangkau hingga daerah-daerah pedesaan di kepulauan, pegunungan, pedalaman dan area hutan. Biaya pengadaan infrastruktur adalah tergolong mahal sehingga diperlukan langkah awal berupa perencanaan yang baik, terarah dan terukur.

Literasi digital sangat penting dalam era digital saat ini dan di kemudian hari karena teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari dan menjadi alat yang penting dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, bisnis, dan komunikasi. Kemampuan literasi digital yang baik akan membantu seseorang untuk beradaptasi dengan perubahan yang terus-menerus dalam dunia teknologi dan meningkatkan kesempatan untuk sukses dalam bidang yang terkait dengan TIK.

Saat ini, isu infrastruktur dan digital di Sulawesi Tengah dikategorikan minim karena masih kurangnya akses ke perangkat teknologi dan kurangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan teknologi terutama bagi kaum milenial. Selain itu, masih banyak masyarakat yang kurang memahami manfaat dan cara menggunakan teknologi digital, sehingga tidak tertarik untuk meningkatkan kemampuan. Pemanfaatan teknologi informasi teknologi juga belum sepenuhnya, seperti rendahnya kemampuan masyarakat untuk terhindar dari korban penipuan dan berita hoaks di platform daring yang tidak terlepas dari masih rendahnya literasi keamanan digital warga sehingga diperlukan upaya lebih masif untuk meningkatkannya. Pihak pemerintah daerah telah melakukan kolaborasi dengan pihak swasta untuk meningkatkan literasi digital di Sulawesi Tengah melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, namun masih diperlukan upaya yang lebih besar untuk mengatasi masalah ini secara menyeluruh.



5. Potensi Bencana Daerah Yang Cukup Tinggi Serta Adanya Ancaman Degradasi Lingkungan Hidup;

Berkaitan dengan penanggulangan bencana, isu yang mengemuka adalah masih rendahnya kapasitas Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penanganan bencana. Penanggulangan bencana kedepan harus di fokuskan pada upaya untuk meningkatkan tata kelola resiko bencana yang ada dan kolaborasi dengan melibatkan semua pihak.

Resiko bencana akan tetap ada selama manusia masih beraktifitas, tapi dengan kesiapan dan monitoring yang di laksanakan, di harapkan bisa mengurangi resiko yang ditimbulkan.

Lingkungan yang berkelanjutan dapat menyediakan sumber-sumber energi yang ramah lingkungan dan terbarukan, sehingga pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan adalah prioritas utama dalam pembangunan dimasa mendatang. Sulawesi Tengah sebagai daerah rawan bencana perlu ditata dengan pembangunan berbasis mitigasi bencana sehingga dampakdampak yang akan terjadi akibat bencana dapat diminimalisir. Selain itu, upaya peningkatan kualitas penelitian yang berkenaan dengan lingkungan hidup diperlukan sebagai bahan acuan penyusunan kebijakan. Diperlukan perhatian dan peningkatan indeks-indeks sebagai ukuran peningkatan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, seperti: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Resiko Bencana, Indeks Ketahanan Energi, Indeks Ketahanan Air, Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks ketahanan daerah.

Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan menjadi penting untuk tujuan pengelolaan lingkungan hidup karena pada masa-masa yang akan datang tingkat kerusakan lingkungan akan mulai berdampak. Daya dukung lingkungan merupakan suatu kemampuan alam untuk mendukung kehidupan manusia harus dijaga agar senantiasa dapat memberikan dukungan yang maksimum kepada kehidupan manusia. Daya dukung alam dapat berkurang sejalan dengan perubahan waktu. Daya dukung alam dapat berkurang sejalan dengan perkembangan waktu. Daya dukung alam dapat berupa kekayaan alam yang terdapat didalam bumi (permukaan bumi dan perut bumi). Daya dukung alam sangat berdampak terhadap kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, keberadaan lingkungan alam harus perlu dijaga dalam suatu eksistensinya terhadap daya dukung alam agar tidak rusak.



4.2.3. Isu Strategis Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan 2025-2029.

Isu strategis Kabupaten Banggai Kepulauan dapat dikelompokkan berdasarkan isu strategis masing-masing transformasi sebagai berikut :

I. Isu Strategis Transformasi Sosial:

a. Kesehatan Untuk Semua

1. Tingginya Angka Kematian Ibu masih ada;
2. Tingginya Angka Stunting;
3. Tingginya Kasus TBC;
4. Rasio Ketersediaan Dokter Terhadap RSUD Trikora Salakan masih Rendah.

b. Pendidikan yang berkualitas dan merata

1. Akses Pendidikan Belum Merata;
2. Kualitas Pendidikan Tingkat SMA/SMK Masih Rendah;
3. Kuantitas, Kualitas Dan Distribusi Guru Terbatas;
4. Rendahnya Kualitas Lulusan SMA/SMK Sehingga Mempengaruhi Daya Saing produktivitas.

c. Perlindungan Sosial yang Adaptif

1. Akurasi Bantuan Sosial Masih Rendah;
2. Ancaman Bencana Dan Dampak Perubahan Iklim;
3. Kesempatan Yang Belum Merata Bagi Penyandang Disabilitas, Lansia Dan Kelompok Rentan;
4. Belum Optimalnya Integrasi Layanan Dan System Administrasi Kependudukan Sebagai Basis Perencanaan Pembangunan;
5. Program Jaminan Sosial Belum Optimal Dan Inklusif.

II. Isu Strategis Transformasi Ekonomi:

a. Industri

Industrialisasi belum menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, bahkan peranannya cenderung mengalami penurunan. Upaya pengembangan sektor industri pengolahan dihadapkan pada berbagai isu strategis, baik dari sisi permintaan maupun sisi penawaran (*supply*) yaitu:

1. Investasi industri pada sektor unggulan daerah Yang Masih Rendah;
2. Struktur Industri Yang Belum Kuat, Serta Kemampuan Adopsi Teknologi, Pemanfaatan RD&D (*Research, Development, and Demonstration*) Dan Penerapan Standardisasi Yang Masih Terbatas;
3. Rendahnya sumbangsih Sektor Industri Dalam Perekonomian daerah;



4. Kompleksitas dan Daya Saing Produk-Produk Industri Pengolahan Masih Rendah;
5. Pemanfaatan Teknologi Industri Pengolahan hasil perikanan masih kurang.

b. Produktivitas Tenaga Kerja

1. Jumlah Angkatan Kerja Belum Sebanding Dengan Ketersediaan Lapangan Kerja;
2. Lapangan Kerja masih terbatas;
3. Pengawasan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Belum Optimal;
4. Kurangnya Diklat Vokasi Untuk Penyiapan Tenaga Kerja Dan Calon Wirausaha Baru;
5. Kurangnya Tenaga Kerja Lokal Yang Terlibat/Terakomodir Dalam Industri Pertambangan;
6. Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Setiap Tahun Sehingga Menambah Jumlah Pengangguran Terbuka;
7. Rendahnya Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pembinaan Pelatihan Kerja Sehingga Di Dalam Persaingan Selalu Kalah Dengan Tenaga Kerja Lainnya.

c. Pertanian

1. Rendahnya Nilai Tambah Produk-Produk Pertanian (*Value Added Agriculture*);
2. Rendahnya Produktivitas Pertanian;
3. Kemampuan Mengadopsi Teknologi Pertanian Masih Rendah;
4. Kurangnya Regenerasi Petani (*Aging Farmers*);
5. Alih Konversi Dan Degradasi Lahan;
6. Belum Optimalnya Kondisi Dan Fungsi Prasarana sarana yang menunjang pertanian;
7. Rendahnya Produktifitas Tanam Yang Meliputi Pemenuhan Air, Realisasi Luas Tanam Dan Produksi Padi.

d. Ekonomi Biru

1. Upaya Konservasi Kawasan Perairan Dan Pesisir Yang Belum Maksimal;
2. Belum optimalnya Produktivitas, Nilai Tambah, Daya Saing Ekonomi Biru Yang Tercermin Pada Rendahnya Kontribusi PDRB (%) Sektor Kelautan Dan Perikanan Terhadap PDRB (%) Kabupaten Banggai;
3. Rendahnya Kualitas, Keterjangkauan, Dan Keamanan Pangan



Akuatik/Pangan Biru;

4. Rendahnya Jumlah Dan Kualitas Riset, Penggunaan Teknologi, Inovasi, Ketersediaan Data Dan Informasi Terkait Pesisir Dan Perairan Darat;
5. Kurangnya Pendanaan Dan Tata Kelola Pada Sektor-Sektor Penghasil Barang, Penghasil Jasa, Dan Upaya Konservasi Di Kawasan Perairan Dan Pesisir.

e. Ekonomi Kreatif

1. Ekosistem Kekayaan Intelektual Yang Belum Optimal;
2. Ketersediaan Data Ekonomi Kreatif Yang Sangat Terbatas, Sedangkan Peranan Data Sangat Penting Untuk Menyusun Kebijakan;
3. Kelembagaan Ekonomi Kreatif Yang Belum Optimal, Terutama Untuk Mendukung Ekosistem Kekayaan Intelektual;
4. Daya Saing SDM Ekonomi Kreatif Yang Rendah, Khususnya Dalam Hal Komersialisasi Kekayaan Intelektual;
5. Rantai Pasok Ekonomi Kreatif Yang Belum Optimal, Terutama Di Daerah.

f. UMKM dan Koperasi

1. Rendahnya Kontribusi Dan Jumlah Koperasi Yang Bergerak Di Sektor Riil;
2. UMKM dan IKM berbasis Komoditi unggulan seperti IKM pengolahan hasil Perikanan dan Ubi Banggai belum berkembang;
3. Rendahnya Pemanfaatan Riset Dan Adopsi Teknologi Pada UMKM;
4. Belum Optimalnya Akses UMKM Terhadap Pembiayaan Dan Pemasaran;
5. Rendahnya Wirausaha Yang Berorientasi Untuk Tumbuh.

g. Pekerjaan Hijau

Belum memadainya ekosistem pengembangan sumber daya manusia (SDM) menjadi tantangan besar dalam mengoptimalkan peluang penciptaan pekerjaan hijau (green jobs) untuk mendukung pembangunan ekonomi hijau yang berkelanjutan.

1. Minimnya Pemahaman Dan Minat Terhadap Pekerjaan Hijau (SDM Yang Menangani Pekerjaan Yang Berkontribusi Terhadap Pelestarian Atau Pemulihan Kualitas Lingkungan);
2. Belum Terintegrasi Data, Arah Kebijakan Dan Strategi



- Pengembangan SDM Dalam Mendukung Pekerjaan Hijau;
3. Belum Memadainya Pengembangan Keahlian Dan Kompetensi Tenaga Kerja Hijau;
 4. Terbatasnya Akses Pendanaan Dan Insentif Dalam Pengembangan Pekerjaan Hijau;
 5. Lemahnya Peran Asosiasi Dan Dunia Usaha, Dunia Industry Dan Dunia Kerja Dalam Mendukung Pengembangan Hijau.

h. Percepatan Transisi Energi

1. Ketergantungan Terhadap Energi Fosil Yang Cadangannya Terus Menurun;
2. Emisi GRK Sektor Energi Yang Cukup Tinggi Terutama Sektor Pembangkit Sektor Pembangkit Dan Transportasi;
3. Kualitas Infrastruktur Ketenagalistrikan Yang Belum Memadai;
4. Keterbatasan Dukungan Pendanaan Transisi Energi;
5. Pemanfaatan Energi Baru Yang Belum Berkembang;
6. Dominasi Pembangkit Listrik Berbasis Fosil Dan Keterbatasan System Penyaluran;
7. Ketimpangan Dan Rendahnya Kualitas Pelayanan;
8. Ketenagalistrikan;
9. Belum Optimalnya Tata Kelola Ketenagalistrikan Termasuk Kebijakan Tarif Dan Harga;
10. Terbatasnya Rantai Nilai Nilai Domestic Pendukung Transisi Energi;
11. Keterbatasan Untuk Adopsi Dan Adaptasi Perkembangan Teknologi (Termasuk Digitalisasi).

i. Digitalisasi

1. Belum Meratanya Infrastruktur Konektivitas Digital Yang Berkualitas seluruh wilayah kecamatan;
2. Terdapat Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Yang Belum sepenuhnya Berinternet;
3. Pengelolaan Destinasi Wisata, Pertanian, Perikanan, Logistik, Industri Serta Sektor Lain Yang Berbasis Teknologi;
4. Literasi Digital Masyarakat Banggai Kepulauan Yang Belum Merata;
5. Penyediaan SDM Dan Talenta Pendidikan Yang Berkualitas Untuk Menguasai Dan Menerapkan Adopsi Teknologi.



- j. Pertumbuhan Ekonomi dan pengembangan kawasan yang belum merata antar wilayah**
1. Infrastruktur Konektivitas Belum Memadai Dan Belum Terintegrasi;
 2. Pembangunan Kawasan Antar Wilayah Yang Tidak Merata;
 3. Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah Dan Kebutuhan Pendekatan;
 4. Masih Rendahnya Daya Saing Produk Ekspor Dan Jasa;
 5. Masih Belum Terintegrasinya Fasilitasi Dan Informasi Terkait Perdagangan;
 6. Keterbatasan Informasi Dalam Mengakses Data Sektor Perdagangan Jasa;
 7. Standardisasi Produk Ekspor Yang Masih Belum Optimal Masih Belum Optimalnya Ekosistem Persaingan Usaha Demand Side;
 8. Minat Pelaku Industri Sektor Jasa Yang Masih Rendah Untuk Masuk Ke Dalam Pasar nasional dan Global;
 9. Belum Optimalnya Penguatan Investasi Untuk Integrasi Ekonomi.
- k. Pariwisata**
1. Pelayanan Industry Pariwisata Masih Relatif Rendah;
 2. Sadar Wisata Masyarakat Masih Relatif Kurang;
 3. Belum Ada Rencana Studi Kawasan Wisata banggai Kepulauan Secara Detail;
 4. Sarana Dan Prasarana Pendukung Pariwisata Masih sangat Terbatas;
 5. Masih Lemahnya Konsep Pembangunan Wisata Berwawasan; Ekologi Namun Inovatif Di Lingkungan Pariwisata.
- l. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi**
1. Penggunaan Lahan Perkotaan Yang Belum Efisien;
 2. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Yang Belum Terlaksana Secara Efektif;
 3. Ketersediaan Rumah Layak Huni Terjangkau Belum Memadai;
 4. Pemenuhan Layanan Air Minum Dan Akses Sanitasi Layak Terjangkau Belum Merata;
 5. Pengelolaan Dan Penanganan Sampah Belum Berkelanjutan;
 6. Rendahnya Ketersediaan Dan Keterjangkauan Infrastruktur Dan Jaringan Aksesibilitas Kawasan Perkotaan;
 7. Sarana Pendidikan Dan Kesehatan Belum Memadai Dan Merata;
 8. Rendahnya Kesempatan Kerja Bagi Tenaga Kerja Penduduk Perkotaan;



9. Penanganan Sektor Ekonomi Informal Perkotaan Yang Belum; Optimal Tingkat Kemiskinan Dan Ketimpangan Sosial Yang Masih Tinggi;
10. Tingkat Kriminalitas Yang Tinggi Di Perkotaan;
11. Tingkat Pencemaran Lingkungan khususnya wilayah pesisir Perkotaan Kota Salakan Yang Tinggi;
12. Risiko Bencana Alam Dan Non alam Yang Tinggi;
13. Belum Adanya Regulasi Yang Khusus Mengatur tata ruang Perkotaan Secara Terpadu;
14. Belum Sinkronnya Kebijakan Pembangunan Perkotaan Antar Lembaga Sektoral Dan Antar Pusat Daerah;
15. Belum Lengkapnya Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Di Daerah;
16. Rendahnya Pemanfaatan Sumber-Sumber Pembiayaan Alternatif Perkotaan;
17. Rendahnya Kapasitas Fiskal Daerah Dan Rendahnya Kualitas Belanja Daerah;
18. Belum Optimalnya Digitalisasi Pelayanan Publik;
19. Belum Terintegrasi Dan Belum Memenuhinya Standar Data Perkotaan Dengan Data Lainnya;
20. Terdapat Kesenjangan Akses Pelayanan Dasar Pada Perdesaan Seperti Rendahnya Akses Air Minum Layak Di Perdesaan Kses Air Minum Jaringan Perpipaan Di Perkotaan Dan Akses Di Perdesaan Serta Ntuk Akses Sanitasi Aman;
21. Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Rumah Layak Huni Yang Dilengkapiakses Air Minum Dan Sanitasi Layak Masih Kurang;
22. Belum Optimalnya Integrasi Antara Penyediaan Perumahan Dengan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum

III. Isu Strategis Transformasi Tata Kelola

a. Integritas Partai Politik

Integritas partai politik belum terwujud karena standar etika belum ada, demokrasi internal belum optimal, kaderisasi belum terlembaga, rekrutmen politik belum terbuka, serta transparansi dan akuntabilitas keuangan belum optimal, di samping biaya politik tinggi dan pendanaan dari negara yang belum memadai.

b. Transformasi dan Digitalisasi Pelayanan Publik

1. Belum meratanya akses pelayanan publik bagi masyarakat serta



belum memadainya kompetensi digital penyelenggara dan pengguna pelayanan publik;

2. Belum terbangunnya sistem informasi satu pintu dalam mendukung diseminasi data dan informasi pada level pemerintahan untuk mewujudkan Keterbukaan Informasi Daerah.

c. Sistem Anti Korupsi dan Akuntabilitas Pembangunan

1. Lemahnya kontrol dalam pencegahan di sektor-sektor yang rawan korupsi serta rendahnya budaya antikorupsi yang akhirnya mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi;
2. Belum adanya sistem penilaian kementerian/ lembaga/daerah terintegrasi yang berbasis pada penilaian kinerja, anggaran, dan integritas;
3. Belum optimalnya peran APIP untuk dapat memberikan peringatan dini (*early warning system*) dan peningkatan manajemen risiko.

d. Sistem Penggajian Tunggal

Disparitas kesejahteraan ASN pusat dan daerah, remunerasi ASN belum memenuhi prinsip kompetitif, manfaat pensiun ASN masih rendah, dan adanya dual system penggajian ASN.

e. Kualitas Regulasi

Belum memadainya SDM di bidang regulasi, dan partisipasi pembentukan regulasi yang belum optimal.

f. Manajemen Talenta

1. Penerapan sistem merit belum optimal;
2. belum diterapkannya manajemen talenta secara merata.

g. Integrasi Proses Bisnis

Proses bisnis dan tata kelola pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak efektif serta tumpang tindih program yang memboroskan anggaran.

IV. Isu Strategis Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Daerah

a. Stabilitas Makro

Demokrasi masih prosedural dengan ciri: (1) Kapasitas dan kemandirian masyarakat sipil belum kuat; (2) Belum terjaminnya kebebasan dan kesetaraan sosial, ekonomi, dan politik; (3) informasi dan komunikasi publik belum merata; (4) Permasalahan politik electoral seperti, politik uang, politisasi isu SARA; (5) Fungsi- fungsi



asasi parlemen belum terlaksana secara optimal; (6) nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi yang belum terinternalisasi.

b. Demokrasi

Demokrasi masih prosedural dengan ciri: (1) Kapasitas dan kemandirian masyarakat sipil belum kuat; (2) Belum terjaminnya kebebasan dan kesetaraan sosial, ekonomi, dan politik; (3) informasi dan komunikasi publik belum merata; (4) Permasalahan politik electoral seperti, politik uang, politisasi isu SARA; (5) Fungsi- fungsi asasi parlemen belum terlaksana secara optimal; (6) nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi yang belum terinternalisasi.

c. Hukum

Rendahnya kepatutan hukum masyarakat sebagai akibat dari minimnya literasi dan pemberdayaan; Keterbatasan akses terhadap keadilan; dan Kelembagaan penegak hukum yang belum professional.

d. Keamanan

Konflik internal termasuk konflik sosial; Illegal Fishing; pelanggaran batas wilayah; disrupsi teknologi; pelanggaran hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi; serta perlindungan dari serangan siber.

V. Isu Strategis Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi

a. Isu Agama

1. Nilai agama belum optimal diejawantahkan menjadi kerja-kerja pembangunan yang membawa kebaikan bersama;
2. Wawasan dan identitas nasional sebagai bangsa majemuk tidak serta merta melahirkan kehidupan beragama dan berbudaya yang inklusif;
3. Beragama belum disertai dengan kemampuan literasi keagamaan yang inklusif, moderat, dan berorientasi kemaslahatan.

b. Isu Budaya

1. Karakter dan jati diri bangsa menghadapi peningkatan ancaman negatif budaya global;
2. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa indonesia belum sepenuhnya diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
3. Kearifan lokal belum dipertimbangkan sebagai modal dasar pembangunan dan penggerak transformasi masyarakat.

c. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif

1. Belum optimalnya peran dan fungsi keluarga menyebabkan ancaman krisis moral dan karakter di kalangan generasi muda;
2. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, pemuda, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia belum optimal;



3. Ketimpangan gender yang masih tinggi;
4. Kesetaraan gender dan pembangunan yang inklusif menjadi sulit terwujud.

d. Pangan

1. Belum idealnya kualitas, keragaman, dan keamanan pangan;
2. Belum optimalnya kapasitas produksi pangan daerah, termasuk pangan lokal dan pangan akuatik;
3. Belum terpadunya tata kelola sistem pangan, termasuk susut dan sisa pangan, Satu Data Pangan serta pendekatan *One Health*;
4. Masih belum optimal keterkaitan nexus antara pangan, energi, dan air (*food, energy, and water nexus*).

e. Kualitas Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati

1. Kualitas air, udara, tutupan lahan, dan air laut semakin menurun;
2. Meningkatnya pemanfaatan air tanah dengan kondisi jumlah air tanah yang terbatas sehingga meningkatkan resiko rawan air tanah;
3. Peningkatan luasan lahan terkontaminasi limbah B3 yang cukup signifikan akibat pembuangan limbah secara ilegal;
4. Pembangunan TPST Regional;
5. Laju Kepunahan Spesies global semakin cepat dan sudah puluhan hingga ratusan kali lebih tinggi daripada rata-rata selama 10 juta tahun terakhir.

f. Energi

1. Akses energi yang belum merata dan berkualitas di seluruh wilayah Kecamatan;
2. Investasi pada Danau Alani sebagai sumber Tenaga Listrik Mikro Hidro dibutuhkan untuk mendukung power plan pada investasi industri;
3. Pangsa pemanfaatan energi baru-terbarukan dalam bauran energi nasional yang masih kecil;
4. Efisiensi perusahaan dan pemanfaatan energi yang belum berjalan baik;
5. Tata kelola energi oleh badan usaha yang belum efektif dan belum efisien;
6. Kewenangan pengelolaan energi pada level Kabupaten yang terbatas;
7. Keselamatan ketenagalistrikan (K2) pada usaha ketenagalistrikan belum dilaksanakan secara maksimal.

g. Bencana dan Perubahan Iklim

1. Tingginya intensitas bencana wilayah Banggai Kepulauan terutama bencana hidrometeorologi (Banjir, Gelombang pasang, tanah longsor, curah hujan ekstrem dll);



2. Banyaknya desa yang terletak dalam daerah rawan bencana dan menjadi tempat tinggal bagi masyarakat.



BAB V

REKOMENDASI

RPJPD sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMD untuk setiap jangka waktu lima tahun, khususnya arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD menjadi acuan bagi para calon Kepala Daerah untuk menyusun visi dan misi dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah. Dengan mempertimbangkan kondisi umum daerah, kondisi keuangan daerah, permasalahan dan isu strategis yang sedang dan akan dihadapi Kabupaten Banggai Kepulauan hingga tahun 2029, serta dengan memperhatikan integrasi RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025-2045, maka terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025-2029, antara lain meliputi:

5.1 Rekomendasi Visi

Dalam merumuskan visi daerah agar dapat mengacu dan memedomani Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025-2045: **Kabupaten Banggai Kepulauan Yang Maju, Sejahtera, Merata Dan Berkelanjutan Berbasis Sektor Unggulan Daerah** Selain mengacu dan mempedomani visi pembangunan jangka panjang, rumusan visi tersebut mempunyai 5 (lima) Indikator Utama.



Tabel 5.1
Penyelarasan 5 (lima) Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Banggai kepulauan
dengan Sasaran Visi RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah dan RPJPN Tahun 2025-2045

No	Sasaran Visi RPJPN 2025-2045	Target Sasaran		Sasaran Visi RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2045	Target Sasaran		Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Bangkep 2025-2045	Target Sasaran	
		Baseline 2025	Sasaran 2045		Baseline 2025	Sasaran 2045		Baseline 2025	Sasaran 2045
1	Pendapatan Perkapita Setara Negara Maju			1. Peningkatan Pendapatan Perkapita			1. Peningkatan Pendapatan Perkapita		
	a. GNI Perkapita (US\$)	5,5	23.000-30.300	a. PDRB Perkapita (Rp. Juta)	152,25-154,17	1.191,02-1.446,61	a. PDRB Perkapita (Rp. Juta)	66.08	78.48
	b. Kontribusi PDB Maritim (%)	7,6	15,0	b. Indeks Ekono mio Biru Indonesia (IBEL)	59,87	542,9	b. Indeks Ekono mio Biru Indonesia (IBEL)	NA	4.5
	c. Kontribusi PDB Manufaktur (%)	20,8	28,0	c. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	40,97-41,45	49,17-52,70	c. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	2.62	7,62-10,00
2	Kemiskinan Menuju 0% dan Ketimpangan Berkurang			2. Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan			2. Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan		
	a. Tingkat Kemiskinan (%)	6,0-7,0	0,6-0,8	a. Tingkat Kemiskinan (%)	9,54-12,20	9,50	a. Tingkat Kemiskinan (%)	13.44	7,15
	b. Rasio Gini (Indeks)	0,377-0,382	0,290-0,320	b. Rasio Gini (Indeks)	0,298-0,302	0,236-0,287	b. Rasio Gini (Indeks)	0.28	5.44
	c. Kontribusi PDRB KTI (%)	20,6 -2022	28,5	c. Kontribusi PDRB Provinsi (%)	2,09	3,05	c. Kontribusi PDRB Kabupaten (%)	NA	3,45
3	Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat			3. Peningkatan Kepemimpinan dan Pengaruh di Daerah yang meningkat			3. Peningkatan Kepemimpinan dan Pengaruh di Daerah yang meningkat		
	Global Power Indeks (Indeks)	34 -2023	15 besar	Indeks Reformasi Birokrasi	78	100	Indeks Reformasi Birokrasi	C	AA
4	Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat			4. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			4. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia		
		0,54	0,73		77,48	90		66.08	78.48



No	Sasaran Visi RPJPN 2025-2045	Target Sasaran		Sasaran Visi RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2045	Target Sasaran		Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Bangkep 2025-2045	Target Sasaran	
		Baseline 2025	Sasaran 2045		Baseline 2025	Sasaran 2045		Baseline 2025	Sasaran 2045
	Human Capital Indeks (Indeks)	-2022		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		
5	Intensitas Emisi GRK menurun menuju <i>Net Zero Emission</i>			5. Penurunan Emisi GRK menurun menuju <i>Net Zero Emission</i>			5. Penurunan Emisi GRK menurun menuju <i>Net Zero Emission</i>		
	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	38,6	93,5	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	77,96	96,50	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	NA	12.5

Sumber: Ranhir RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025-2045



5.2. Rekomendasi Misi

Dalam merumuskan misi sebagai upaya yang dilaksanakan daerah untuk dapat mewujudkan visi daerah sampai dengan tahun 2029. Dalam perumusan misi harus memastikan aktivitas yang ditentukan mengarah pada terwujudnya kondisi-kondisi yang ingin dicapai. Perumusan misi tersebut harus mengacu dan memedomani misi pembangunan jangka panjang daerah sesuai dengan hasil penyelarasan RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025-2045,

Merumuskan misi sebagai upaya yang akan dilaksanakan daerah Kabupaten banggai Kepulauan untuk mewujudkan visi daerah sampai dengan tahun 2045. Untuk menjamin keselarasan dalam perumusan misi selaras dan sejalan dengan Visi RPJPN 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah yang mengarah pada terwujudnya kondisi-kondisi yang ingin dicapai mencapai Indonesai Emas 2045. Perumusan misi memedomani misi nasional sesuai hasil penyelarasan dengan RPJPN Tahun 2025-2045 yang merupakan agenda pembangunan dalam RPJPN Tahun 2025-2045, yaitu: a) Transformasi Sosial; b) Transformasi Ekonomi; c) Transformasi Tata Kelola; d) Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Ketangguhan Diplomasi; e) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; f) Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan; g) Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan f) Kestinambungan Pembangunan, yang kemudian diterjemahkan dalam Misi Kabupaten Banggai Kepulauan dengan jumlah misi disesuaikan dengan perumusan yang telah dilakukan dalam tahapan penyusunan RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan sepanjang mengadakan makna 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan Nasional tersebut.

Perumusan misi merupakan suatu upaya menyusun sistematika berupa pola perjalanan pemerintahan daerah dalam rangka mengembangkan sasaran dan arah kebijakan pembangunan berdasarkan tahapan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan pelayanan masyarakat lebih efektif efisien dan terukur. Adapun misi pembangunan jangka panjang daerah 2025-2045, sebagaimana berikut.

MISI 1

Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Birokrasi Banggai Kepulauan Yang Melayani

Kabupaten Banggai Kepulauan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menganut prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah yang bersih (*clean government*) dan pemerintah yang cerdas (*smart government*) yang merupakan model dan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang modern, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab, dengan menjaga sinergi dan sinkorinisasi interaksi yang bersifat konstruktif dan produktif antara pemangku kepentingan daerah (heahelix)



yaitu pemerintah, akademisi, sektor swasta, media, masyarakat madani (non-government) dan kelompok terdampak dalam bentuk kolaborasi antara para pihak dan berorientasi pada birokrasi yang melayani dengan karakteristik yang efisien, efektif, partisipatif berlandaskan hukum, adil demokratis, keterbukaan, responsif, berorientasi konsensus, kesetaraan, akuntabel dan memiliki visi strategik. Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan secara gradual melakukan optimalisasi melalui digitalisasi sebagai upaya untuk memanfaatkan teknologi secara maksimal untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan dalam usaha Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Birokrasi Banggai Kepulauan Yang Melayani dari setiap periode pemerintahan.

MISI 2***Mewujudkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Unggul Dan Berdaya Saing Tinggi Melalui Transformasi Sosial;***

Kabupaten Banggai Kepulauan berkomitmen mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing dan religius melalui pendidikan, kesehatan dan ekonomi (daya beli), yang merupakan tiga indikator komposit IPM. Upaya yang dilakukan melalui misi 2 ini, tidak hanya terhadap peningkatan IPM, tetapi juga menciptakan SDM berdaya saing, unggul dan religius dicerminkan dari Pembangunan bidang agama, moral, etika, dan perilaku baik yang harus menjadi karakter dan identitas utama masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan. Aspek-aspek tersebut diharapkan menjadi pedoman (*guidance*) bagi seluruh aktivitas kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan tetap menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan hidup beragama. Dengan adanya penguatan pada aspek religius, maka SDM yang unggul dan berdaya saing tersebut akan memberikan manfaat bagi dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara dalam kehidupan sosial, budaya dan kemasyarakatan. Sehingga terwujud sumber daya manusia unggul dan berdaya saing tinggi melalui transformasi sosial sebagai sebuah tujuan yang ambisius dan prioritas jangka menengah dan jangka Panjang pembnaganan Kabupaten banggai kepulauan dengan prioritas pada Investasi dalam pendidikan yang berkualitas dan terjangkau untuk semua lapisan masyarakat. Ini termasuk pendidikan dasar, menengah hingga menyiapkan perguruan tinggi lokal, serta pendidikan kejuruan (vokasi) dan pelatihan keterampilan diikuti dengan mengembangkan pembangunan karakter, kepemimpinan, dan keterampilan lunak (*soft skills*) seperti komunikasi, kepemimpinan, penghargaan pada budaya local, kerjasama tim, dan pemecahan masalah. Juga Memastikan akses terhadap layanan kesehatan dan penjegahan Stunting, Pemberdayaan Teknologi dan Inovasi dalam pendidikan, Kesetaraan dan Inklusi atau menjamin kesempatan yang sama bagi semua, serta kebijakan publik yang mendukung pengembangan SDM, mendorong konsep pembelajaran sepanjang hayat, di mana individu terus menerus belajar dan mengembangkan diri sepanjang karir mereka.

**MISI 3*****Mewujudkan Transformasi Ekonomi Bangkep Yang Maju Dan Sejahtera Berbasis Sumberdaya Unggulan Daerah;***

Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki potensi di Sektor Pertanian khususnya Perikanan Kelautan, Sektor Pariwisata, dan Sektor Industri serta pertambangan batu Gamping, apabila seluruh potensi sumber daya yang ada tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan, maka dapat menumbuhkembangkan perekonomian dan Pembangunan daerah yang memiliki daya saing dengan berbasis sumber daya unggulan daerah. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya tersebut melalui lembaga-lembaga ekonomi produktif di desa, kelurahan, kecamatan dan Kabupaten dengan melakukan optimalisasi potensi tersebut dan seiring dengan pemberdayaan masyarakat, maka diharapkan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih maju dan sejahtera bagi masyarakat. Posisi dan letak Kabupaten Banggai Kepulauan yang strategis pada Teluk Tolo dan Selat Peling dapat menjadi logistik utama hasil perikanan kelautan bagi masyarakat di wilayah Kawasan industri Morowali, Morowali Utara, dan wilayah lain Provinsi Sulawesi Tengah serta menghubungkan Sulawesi dan Laut Maluku. Selat Peling merupakan selat yang menghubungkan Kabupaten Banggai dan Kabupaten Banggai Kepulauan dan Indonesia Bagian Timur serta menghubungkan Laut Banda dengan Laut Maluku dan peran utama sebagai *hub-logistic* pengembangan ekonomi regional sebagai posisi strategis Kabupaten Banggai Kepulauan dalam memenuhi kebutuhan wilayah sekitar dan regional Sulawesi serta wilayah bagian timur Indonesia.

MISI 4***Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Antar Wilayah Kecamatan Yang Maju Dan Merata;***

Misi pembangunan infrastruktur wilayah yang maju dan merata adalah suatu upaya penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas hidup, dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Kabupaten Banggai Kepulauan menetapkan agenda pencapaian visi daerah tersebut berfokus pada pembangunan infrastruktur wilayah (jalan-Jembatan, drainase dan perumahan umum yang maju dan merata di seluruh wilayah. Pembangunan infrastruktur tersebut dilakukan secara berimbang antara pembangunan Kota Salakan Banggai Kepulauan, terdiri dari 12 Kecamatan dengan Jumlah 141 desa, 3 kelurahan. Dimana kedepannya pembangunan infrastruktur seluruh kecamatan yang di kembangkan untuk pencapaian pembagunan yang maju dan merata di seluruh wilayah. Konektivitas dan Aksesibilitas menjadi kata kunci didalam Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Antar Wilayah Kecamatan Yang Maju Dan Merata. Mengembangkan infrastruktur transportasi darat dan Laut terkoneksi atau yang menghubungkan berbagai wilayah dengan efisien, termasuk



Transportasi Laut, jalan raya kabupaten, transportasi publik, drainase dan jalur pejalan kaki, serta memastikan aksesibilitas bagi semua, termasuk penyandang disabilitas.

MISI 5***Mewujudkan Pembangunan Sarana Prasarana Publik Yang Maju Dan Memperhatikan Tataruang Wilayah;***

Pembangunan infrastruktur seluruh kecamatan Juga diikuti percepatan pembangunan sarana prasarana publik yang memadai, maju, modern dan merata di seluruh wilayah kecamatan yang dilakukan berpedoman dan patuh pada Rencana tataruang wilayah (RTRW), serta mampu memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat secara merata, adil dan berkelanjutan melalui percepatan peningkatan kapasitas sarana prasarana yakni fasilitas sosial dan umum yang berkeadilan pada masa mendatang untuk mengatasi ketimpangan pembangunan Sarana prasarana wilayah antar kecamatan di kabupaten Banggai Kepulauan.

Misi mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana publik yang maju, sekaligus memperhatikan tata ruang wilayah, adalah langkah penting dalam membangun sebuah masyarakat yang sejahtera dan berkelanjutan dimana Pemerintah daerah Mengembangkan rencana tata ruang yang menyeluruh, yang mempertimbangkan penggunaan lahan, kepadatan penduduk, kebutuhan lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi. Perencanaan ini harus mencakup pemetaan area-area penting untuk konservasi, pertanian, perumahan, industri, dan komersial. Juga memastikan bahwa pembangunan sarana dan prasarana publik mengikuti prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Ini termasuk penggunaan sumber daya yang efisien, mengurangi dampak lingkungan, dan memastikan keberlanjutan jangka panjang dari infrastruktur yang dibangun. Mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam pembangunan infrastruktur, seperti pengolahan air limbah, sistem transportasi rendah emisi, dan pembangunan gedung hijau. Serta Manajemen Sumber Daya Air dan Energi: Menerapkan sistem manajemen sumber daya air dan energi yang efisien, termasuk pengelolaan banjir, penyediaan air bersih, dan penggunaan energi terbarukan.

MISI 6***Mewujudkan Mitigasi Bencana Dan Perubahan Iklim Serta Lingkungan Hidup Berkelanjutan;***

Kabupaten Banggai Kepulauan menetapkan pedoman bahwa lingkungan merupakan tempat di mana kegiatan pembangunan dilaksanakan, sehingga keberadaan lingkungan mendapatkan perhatian utama, untuk pembangunan jangka panjang. Konsekuensi logis dari dilaksanakannya pembangunan daerah adalah penggunaan semua sumber daya, termasuk sumber daya alam dan tentunya akan membawa dampak negatif dan positif bagi pelaksanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang. Oleh karena itu, Kabupaten Banggai Kepulauan menetapkan kebijakan dalam pembangunan tidak harus mengorbankan kondisi lingkungan dan alam sekitarnya. Pemerintah daerah Kabupaten Banggai Kepulauan berkomitmen dalam jangka panjang akan tetap terjaga keseimbangan dan keberlanjutan, yakni keseimbangan antara eksploitasi SDA dengan keberlanjutan lingkungan, sehingga pembangunan yang



dilaksanakan saat tidak mengorbankan masa depan generasi yang akan datang. Upaya dan komitmen Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam Jangka Panjang untuk menjaga dan memulihkan lingkungan yang bersih, serta bebas dari sampah dan limbah yang menurunkan kondisi, kualitas dan daya dukung lingkungan melalui berbagai tindakan mitigasi, untuk tetap menjaga kondisi dan kelestarian lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam yang sangat penting bagi masyarakat luas dengan memperhatikan kelangsungan hidup generasi mendatang.

MISI 7***Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan Yang Maju Dan Berkelanjutan;***

Misi mewujudkan kesinambungan pembangunan yang maju dan berkelanjutan merupakan suatu visi yang mengarah pada penciptaan masa depan yang lebih baik bagi semua di kabupaten Banggai Kepulauan. Komitmen ini bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi kabupaten Banggai Kepulauan, tetapi juga tentang memelihara sumber daya alam, memastikan keadilan sosial, dan membangun ketahanan terhadap tantangan masa depan di tengah tantangan global yang semakin kompleks, termasuk perubahan iklim, ketidaksetaraan, dan pergeseran ekonomi, kabupaten Banggai Kepulauan berdiri di ambang sebuah era baru. Era di mana pembangunan tidak hanya diukur dari kecepatan pertumbuhannya, tetapi juga dari kedalaman dampaknya terhadap kualitas hidup, keadilan sosial, dan keseimbangan ekologis. Misi kabupaten Banggai Kepulauan adalah untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan yang maju dan berkelanjutan.

Membangun ekonomi kabupaten Banggai Kepulauan dalam jangka Panjang yang tidak hanya dinamis dan inovatif, tetapi juga inklusif dan adil. Ini berarti menciptakan peluang bagi semua lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan. Kita perlu meningkatkan investasi di sektor-sektor yang menunjang kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur hijau, sambil memastikan bahwa teknologi dan inovasi berkembang sejalan dengan kebutuhan manusia dan planet ini.

Kabupaten Banggai Kepulauan akan mengedepankan perlindungan lingkungan sebagai inti dari semua kebijakan pembangunan. Komitmen Misi ini bukan hanya tentang mengurangi emisi dan polusi, tetapi juga tentang mengembangkan cara-cara baru untuk hidup dan bekerja yang lebih harmonis dengan alam, pembangunan ekonomi berkelanjutan kabupaten Banggai Kepulauan bergerak menuju ekonomi sirkular, di mana sumber daya digunakan secara efisien dan berkelanjutan, dan limbah dijadikan sumber daya baru.

Ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana alam akan menjadi prioritas utama disetiap periode pemerintahan kabupaten Banggai Kepulauan. Arah kebijakan pembangunan memperkuat infrastruktur kabupaten Banggai Kepulauan dan masyarakat, memastikan masyarakat kabupaten Banggai Kepulauan mampu bertahan dan beradaptasi di tengah perubahan yang cepat dan tak terduga. Ini termasuk

pengembangan Ibukota Kabupaten berkedudukan di Salakan yang lebih aman, indah, maju, merata dan berkelanjutan, serta dukungan bagi komunitas yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Adanya berkomitmen pada kepemimpinan dan kolaborasi Penta Helix. Pembangunan yang berkelanjutan adalah tanggung jawab bersama. Melalui kerjasama Lokal, antara Kabupaten Banggai Kepulauan dan kabupaten regional Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional serta global dalam bentuk pertukaran pengetahuan, dan solidaritas menghadapi tantangan regional, nasional dan global menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi generasi yang akan datang.

Misi ini bukan hanya sebuah impian, tetapi merupakan komitmen seluruh masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan untuk bertindak dengan pendekatan yang holistik, inovatif, dan kolaboratif, kita bisa mewujudkan pembangunan yang maju, merata dan berkelanjutan. Misi ini mengajak seluruh stakeholders Banggai Kepulauan untuk bersama-sama membangun sebuah tatanan wilayah yang tidak hanya lebih sejahtera, tetapi juga lebih adil, hijau, dan tahan uji terhadap bencana dan lingkungan berkelanjutan.



Gambar 5.1
Perumusan Misi RPJPD Banggai Kepulauan 2025-2045

5.3. Upaya Transformasi Super Prioritas (*Game Changers*) RPJPD.

RPJPD sebagai pedoman memuat seluruh aspek pembangunan untuk mencapai terwujudnya *Bangkep Emas 2045* mendukung pencapaian Sulawesi Tengah Emas dan Indonesia Emas 2045, terdapat upaya transformatif super prioritas (*Game Changer*), yaitu:



5.3.1. Transformasi Sosial

1. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).
2. Peningkatan pelayanan Kesehatan yang merata dan terjangkau.
3. Peningkatan kualitas dan akses pendidikan.
4. Percepatan penuntasan kemiskinan dan pencegahan *stunting*.
5. Peningkatan Akses Infrastruktur pelayanan dasar (antara lain Pendidikan, Kesehatan, air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas (jalan dan jembatan).

5.3.2. Tranformasi Ekonomi

1. Peningkatan Nilai tambah hasil Sektor Perikanan Kelautan.
2. Percepatan pembangunan ekonomidaerah melalui pengembangan sector pariwisata unggulan daerah.
3. Hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelambagaan serta adopsi tehnologi tepat guna.

5.3.3. Tranformasi Tata Kelola

1. Akselerasi Kualitas ASN yang professional dan berkinerja tinggi.
2. Pembangunan ekosistem digital dalam rangka transformasi digital.
3. Peningkatan Kerjasama dan harmonisasi Eksekutif dan Legislatif (DPRD) adaatif terhadap dinamika politik nasional dan daerah.

5.3.4. Tranformasi Sosial Budaya dan Ekologi

1. Penguatan hubungan antara budaya daerah Banggai dengan suku dan budaya lainnya.
2. Peningkatan kapasitas Sumberdaya energi EBT dan ketersediaan air bersih bagi masyarakat.
3. Penguatan nilai luhur kebudayaan Banggai dalam sendi kehidupan masyarakat berlandaskan atas agama dan berasaskan Pancasila.



Gambar 5.2
Model Upaya Transformasi Super Prioritas (*Game Changers*)
Pencapaian Bangkep Emas 2045

5.4. Rekomendasi Arah Kebijakan

Dalam merumuskan misi sebagai upaya yang dilaksanakan daerah untuk dapat mewujudkan visi Misi daerah sampai dengan tahun 2029. Dalam perumusan Arah Kebijakan harus memastikan aktivitas yang dirahkan pada terwujudnya kondisi-kondisi yang ingin dicapai. Perumusan Arah Kebijakan tersebut dalam RPJMD dan Visi Misi Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati harus mengacu dan mempedomani tidak hanya Visi Misi pembangunan jangka panjang daerah sesuai dengan hasil penyelarasan RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025-2045, serta didasarkan pula pada arah kebijakan tahap pertama RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan (tahun 2025-2029), yakni Penguatan Fondasi Pembangunan.

Sesuai Inmendagri Inmendagri Nomor 1 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045, yang mengamanatkan Merumuskan arah kebijakan yang merupakan rumusan kerangka kerja dalam melaksanakan misi yang menyesuaikan dengan isu strategis dan dibagi ke dalam 4 (empat) tahapan. Tiap tahapan dapat memiliki tema pembangunan dalam kerangka pencapaian sasaran pokok yang menggambarkan terwujudnya visi daerah. Tema Tahapan arah kebijakan diuraikan sebagai berikut.



Gambar 5.3
Tema Tahapan Pembangunan RPJPD
Kabupaten Banggai Kepulauan 2025-2045

Pencapaian visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah menjadi dasar bagi perumusan arah kebijakan daerah selama 20 (dua puluh) tahun. Arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Banggai Kepulauan dibagi ke dalam empat periode RPJMD yaitu periode I. Tahun 2025-2029, Periode II Tahun 2030-2034, Periode III Tahun 2035-2039, dan Periode IV Tahun 2040-2045. Penjelasan prioritas pembangunan focus untuk tahapan Pembangunan I. Tahun 2025-2029 dijelaskan dimana ;

Pada Tahapan Pertama (2025-2029) adalah penguatan fondasi transformasi. Pada tahap ini, Transformasi Sosial dititikberatkan pada pemerataan pelayanan dan sarana prasarana kesehatan dan pendidikan diseluruh wilayah kecamatan, peningkatan kualitas pengajaran, produktivitas, daya saing, dan keahlian, serta pemenuhan sistem perlindungan sosial yang terintegrasi dan berbasis satu data Regsosek.

Transformasi Ekonomi difokuskan pada hilirisasi sumber daya alam unggulan berbasis pertanian, perikanan kelautan dan Pariwisata, peningkatan produktivitas tenaga kerja, penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru, penguatan sektor ekonomi yang berbasis riset dan inovasi, pemerataan akses digital, pengembangan sarana prasarana pariwisata bahari, serta pembangunan industry yang memberikan nilai tambah bagi sector pertanian dan perikanan kelautan di Bangkep.

Transformasi Tata Kelola difokuskan pada penataan kelembagaan yang tepat fungsi, manajemen ASN sesuai kompetensinya dan penyederhanaan regulasi yang berpotensi menghambat investasi dan pelayanan publik.

Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah, difokuskan pada penguatan peran dan fungsi pemerintah daerah dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) untuk menciptakan kondisi aman dan kondusif pada masyarakat



Kabupaten Banggai Kepulauan. Peningkatan peran, pemberdayaan dan penguatan kelembagaan adat, tatanan demokrasi dan infrastruktur politik melalui kerjasama antar stakeholder dan penataan kebijakan pendukung stabilitas social politik dan ekonomi daerah.

Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, difokuskan pada optimalisasi nilai agama, budaya dan peran keluarga dalam pembangunan karakter sumberdaya manusia Banggai Kepulauan dan menggerakkan modal sosial dalam masyarakat; peningkatan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan instrumen pengelolaan serta perlindungan lingkungan hidup, penguatan keterjangkauan pangan.

Penguatan Pembangunan Wilayah Kecamatan, pada tahap ini difokuskan untuk perwujudan pusat-pusat pertumbuhan wilayah Kecamatan melalui penyediaan dan optimalisasi sarana prasarana yang memadai dan berwawasan lingkungan untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan. pembiayaan Pembangunan, dioptimalkan melalui reformasi tata kelola fiskal, serta mobilisasi dan optimalisasi pembiayaan pembangunan non pemerintah (swasta dan pinjaman daerah) guna mempercepat penguatan pembangunan daerah.



Tabel 5.2

Rumusan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2025-2045

VISI : KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN YANG MAJU, SEJAHTERA, MERATA DAN BERKELANJUTAN				
MISI	ARAH KEBIJAKAN			
	PERIODE 2025-2029	PERIODE 2030-2034	PERIODE 2035-2039	PERIODE 2040-2045
	PENGUATAN FONDASI	AKSELERASI TRANSFORMASI	EKSPANSI	PERWUJUDAN BANGKEP EMAS
<p>MISI 1: MEWUJUDKAN TRANSFORMASI TATA KELOLA BIROKRASI BANGKEP YANG MELAYANI</p>	Meletakkan pondasi penyelenggaraan pemerintah daerah berbasis elektronik melalui peningkatan kualitas kinerja aparatur yang handal dalam menggunakan TIK, dan interoperabilitas data serta aplikasi melalui pemanfaatan Arsitektur SPBE	Akselerasi penyelenggaraan pemerintah daerah berbasis elektronik dan Arsitektur SPBE	Optimalisasi penyelenggaraan pemerintah daerah berbasis elektronik melalui peningkatan kualitas kinerja aparatur yang handal dalam menggunakan TIK, dan interoperabilitas data dan aplikasi melalui pemanfaatan Arsitektur SPBE	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah berbasis elektronik
	Percepatan reformasi birokrasi melalui penerapan area perubahan secara sistematis yang meliputi proses, pengukuran, struktur, dan budaya Organisasi	Akselerasi penerapan reformasi birokrasi melalui penerapan area perubahan secara sistematis yang meliputi proses, pengukuran, struktur, dan budaya Organisasi	Optimalisasi dan perwujudan reformasi birokrasi melalui penerapan area perubahan secara sistematis yang meliputi proses, pengukuran, struktur, dan budaya Organisasi	Perwujudan reformasi birokrasi melalui penerapan area perubahan secara sistematis yang meliputi proses, pengukuran, struktur, dan budaya Organisasi
	Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah berbasis elektronik	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah berbasis elektronik	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah berbasis elektronik	Perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah berbasis elektronik
	Penguatan kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar	Peningkatan kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar	Terpenuhinya kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar	



VISI : KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN YANG MAJU, SEJAHTERA, MERATA DAN BERKELANJUTAN

MISI	ARAH KEBIJAKAN			
	PERIODE 2025-2029	PERIODE 2030-2034	PERIODE 2035-2039	PERIODE 2040-2045
	PENGUATAN FONDASI	AKSELERASI TRANSFORMASI	EKSPANSI	PERWUJUDAN BANGKEP EMAS
	Penguatan peran & Kualitas Pelayanan serta pemberdayaan Masyarakat OPD, Kecamatan dan Desa secara optimal dan berkelanjutan	Akselerasi Penyelenggaraan Pelayanan serta pemberdayaan Masyarakat OPD, Kecamatan dan Desa secara optimal dan berkelanjutan	Optimalisasi penyelenggaraan Pelayanan serta pemberdayaan Masyarakat OPD, Kecamatan dan Desa secara optimal dan berkelanjutan	Mewujudkan Pelayanan yang berkualitas pemberdayaan Masyarakat OPD, Kecamatan dan Desa secara optimal dan berkelanjutan
	Penguatan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk mengurangi resiko dan efektifitas pencegahan korupsi pada ASN dan pemda	Akselerasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk mengurangi resiko dan efektifitas pencegahan korupsi	Ekpansi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Perwujudan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang bebas korupsi dan KKN
	Penguatan pengetahuan dan keterampilan untuk mewujudkan peran APIP yang efektif dalam pencegahan korupsi dan kerugian negara secara berkelanjutan	Akselerasi peran APIP yang efektif dalam pencegahan korupsi dan kerugian negara secara berkelanjutan	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan untuk mewujudkan peran APIP yang efektif dalam pencegahan korupsi dan kerugian negara secara berkelanjutan	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan untuk mewujudkan peran APIP yang efektif dalam pencegahan korupsi dan kerugian negara secara berkelanjutan
	Penguatan dan mempertahankan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah secara baik	Meningkatkan dan mempertahankan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah secara baik	Optimalisasi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah secara baik	Perwujudan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah secara baik
MISI 2: MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA UNGGUL DAN BERDAYA SAING TINGGI MELALUI TRANSFORMASI SOSIAL	Penguatan ketersediaan pendidikan dan perluasan akses pendidikan yang merata, terjangkau, berkelanjutan serta berkeadilan di seluruh wilayah	Meningkatkan ketersediaan pendidikan dan perluasan akses pendidikan berkeadilan di seluruh wilayah	Pemerataan ketersediaan pendidikan dan perluasan akses pendidikan yang merata, terjangkau, berkelanjutan serta berkeadilan di seluruh wilayah	Perwujudan akses pendidikan yang merata, terjangkau, berkelanjutan serta berkeadilan di seluruh wilayah



VISI : KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN YANG MAJU, SEJAHTERA, MERATA DAN BERKELANJUTAN

MISI	ARAH KEBIJAKAN			
	PERIODE 2025-2029	PERIODE 2030-2034	PERIODE 2035-2039	PERIODE 2040-2045
	PENGUATAN FONDASI	AKSELERASI TRANSFORMASI	EKSPANSI	PERWUJUDAN BANGKEP EMAS
	Penguatan pondasi akses lulusan anak didik sekolah menengah pertama dan atas terhadap keperluan pendidikan dengan mengembangkan dukungan nyata pembangunan fasilitas pendidikan yang memadai dan terjangkau	Peningkatan akses lulusan anak didik sekolah menengah pertama dan atas terhadap keperluan pendidikan	Fasilitasi akses lulusan anak didik sekolah menengah pertama dan atas memastikan tercapainya 13 tahun usia sekolah	Terwujudnya keberlanjutan pendidikan 13 tahun
	Pengutan kualitas atau mutu dan relevansi pendidikan yang memiliki keunggulan serta memberdayakan lembaga pendidikan formal dan non-formal	Meningkatkan kualitas atau mutu dan relevansi pendidikan yang memiliki keunggulan serta memberdayakan lembaga pendidikan formal dan non-formal	Ekspansi kualitas atau mutu dan relevansi pendidikan yang memiliki keunggulan serta memberdayakan lembaga pendidikan formal dan non-formal	Perwujudan kualitas atau mutu dan relevansi pendidikan yang memiliki keunggulan serta memberdayakan lembaga pendidikan formal dan non-formal
	Penguatan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Terjangkau, Berkualitas dan Berkeadilan Kepada Masyarakat	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Terjangkau, Berkualitas dan Berkeadilan Kepada Masyarakat	Ekspansi pola Pelayanan Kesehatan Terjangkau, Berkualitas dan Berkeadilan berbasis Digital	Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Terjangkau, Berkualitas dan Berkeadilan Kepada Masyarakat
	Penguatan sarana prasarana, obat obatan dan alat kesehatan pada semua tingkatan pelayanan kesehatan	Optimalisasi penyediaan sarana prasarana, obat obatan dan alat kesehatan pada semua tingkatan pelayanan kesehatan	pelibatan stakeholders dalam ekspansi penyediaan sarana prasarana, obat obatan dan alat kesehatan pada semua tingkatan pelayanan kesehatan	Mewujudkan ketersediaan sarana prasarana, obat obatan dan alat kesehatan pada semua tingkatan pelayanan kesehatan



VISI : KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN YANG MAJU, SEJAHTERA, MERATA DAN BERKELANJUTAN

MISI	ARAH KEBIJAKAN			
	PERIODE 2025-2029	PERIODE 2030-2034	PERIODE 2035-2039	PERIODE 2040-2045
	PENGUATAN FONDASI	AKSELERASI TRANSFORMASI	EKSPANSI	PERWUJUDAN BANGKEP EMAS
	Penguatan Daya saing SDM Banggai Kepulauan melalui optimalisasi peran dan fungsi keluarga serta lembaga keagamaan	Peningkatan Daya saing SDM Banggai Kepulauan melalui optimalisasi peran dan fungsi keluarga serta lembaga keagamaan	Ekspansi Daya saing SDM Banggai Kepulauan melalui optimalisasi peran dan fungsi keluarga serta lembaga keagamaan	terwujudnya Daya saing SDM Banggai Kepulauan
MISI 3: MEWUJUDKAN TRANSFORMASI EKONOMI BANGKEP YANG MAJU DAN SEJAHTERA BERBASIS SEKTOR UNGGULAN DAERAH	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas;	Menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas;	Menjaga momentum pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif;	Menciptakan pertumbuhan Ekonomi yang memihak kepada masyarakat miskin dan rentan;
	Pengutan Akselerasi dan nilai tambah Agro-fishery industry; Energi dan Mineral; Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian-Perikanan melalui smart farming, Hilirisasi Hasil pertanian dan perikanan kelautan.	Mendorong Akselerasi dan nilai tambah Agro-fishery industry; Energi dan Mineral; Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian-Perikanan melalui smart farming, Hilirisasi Hasil pertanian dan perikanan kelautan.	Percepatan Akselerasi dan nilai tambah Agro-fishery industry; Energi dan Mineral; Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian-Perikanan melalui smart farming, Hilirisasi Hasil pertanian dan perikanan kelautan.	Mewujudkan proporsi nilai tambah ekonomi Agro-fishery industry; Energi dan Mineral; Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian-Perikanan melalui smart farming, Hilirisasi Hasil pertanian dan perikanan kelautan.
	Peningkatan daya ungkit dan kontribusi Pariwisata Banggai Kepulauan terhadap pertumbuhan ekonomi; serta Ekonomi Kreatif dan Digital berbasis IKM dan UKM	Optimalisasi daya ungkit dan kontribusi Pariwisata Banggai Kepulauan terhadap pertumbuhan ekonomi; serta Ekonomi Kreatif dan Digital berbasis IKM dan UKM	Optimalisasi daya ungkit dan kontribusi Pariwisata Banggai Kepulauan terhadap pertumbuhan ekonomi; serta Ekonomi Kreatif dan Digital berbasis IKM dan UKM	Mewujudkan Pariwisata Banggai Kepulauan yang maju dan berkelanjutan
	Penguatan produktivitas ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan;	Peningkatan produktivitas ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan;	Peningkatan produktivitas ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan;	Peningkatan produktivitas ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan;



VISI : KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN YANG MAJU, SEJAHTERA, MERATA DAN BERKELANJUTAN

MISI	ARAH KEBIJAKAN			
	PERIODE 2025-2029	PERIODE 2030-2034	PERIODE 2035-2039	PERIODE 2040-2045
	PENGUATAN FONDASI	AKSELERASI TRANSFORMASI	EKSPANSI	PERWUJUDAN BANGKEP EMAS
	Penguatan Akses Layanan Keuangan bagi UMKM dan Kewirausahaan;	Peningkatan Akses Layanan Keuangan bagi UMKM dan Kewirausahaan;	Peningkatan Akses Layanan Keuangan bagi UMKM dan Kewirausahaan;	Peningkatan Akses Layanan Keuangan bagi UMKM dan Kewirausahaan;
	Penguatan Keahlian Tenaga Kerja untuk Menciptakan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing;	Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja untuk Menciptakan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing;	Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja untuk Menciptakan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing;	Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja untuk Menciptakan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing;
	Memajukan Destinasi Wisata melalui Pariwisata pariwisata yang berkelanjutan, peningkatan daya saing Destinasi Wisata Danau Paisupok, penciptaan nilai tambah, Promosi Wisata dan Pembangunan Infrastruktur destinasi Wisata Bahari dan wisata kuliner di Banggai Kepulauan	Akselerasi Destinasi Wisata melalui Pariwisata pariwisata yang berkelanjutan, peningkatan daya saing Destinasi Wisata Bangkep, penciptaan nilai tambah produk pariwisata, Promosi Wisata dan Pembangunan Infrastruktur destinasi Wisata Bahari dan wisata kuliner di Banggai Kepulauan	Ekspansi kontribusi Destinasi Wisata melalui Pariwisata pariwisata yang berkelanjutan, peningkatan daya saing Destinasi Wisata Bangkep, penciptaan nilai tambah produk pariwisata, Promosi Wisata dan Pembangunan Infrastruktur destinasi Wisata Bahari dan wisata kuliner di Banggai Kepulauan	Mewujudkan kontribusi pariwisata dan daya saing Destinasi Wisata Bangkep dalam kemajuan ekonomi daerah
MISI 4: MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR ANTAR	Penguatan Pembangunan/rehabilitasi infrastruktur jalan dan jembatan yang akan menghubungkan antar wilayah Kecamatan	Akselerasi Pembangunan/rehabilitasi infrastruktur jalan dan jembatan yang akan menghubungkan antar wilayah Kecamatan	Peningkatan Pembangunan/rehabilitasi infrastruktur jalan dan jembatan yang akan menghubungkan antar wilayah Kecamatan	Terwujudnya infrastruktur jalan dan jembatan yang mantap dalam menghubungkan antar wilayah Kecamatan



VISI : KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN YANG MAJU, SEJAHTERA, MERATA DAN BERKELANJUTAN

MISI	ARAH KEBIJAKAN			
	PERIODE 2025-2029	PERIODE 2030-2034	PERIODE 2035-2039	PERIODE 2040-2045
	PENGUATAN FONDASI	AKSELERASI TRANSFORMASI	EKSPANSI	PERWUJUDAN BANGKEP EMAS
WILAYAH KECAMATAN YANG MAJU DAN MERATA	Penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi secara merata di seluruh wilayah kecamatan dan wilayah desa tertinggal guna optimalisasi akses jaringan internet di seluruh wilayah kecamatan	Ekpansi infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi secara merata di seluruh wilayah kecamatan	Optimalisasi infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi secara merata di seluruh wilayah kecamatan	terwujudnya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi secara merata di seluruh wilayah kecamatan
MISI 5: MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA PUBLIK YANG MAJU DAN MEMPERHATIKAN TATARUANG WILAYAH	Penguatan pembangunan antar wilayah dan melancarkan arus lalu lintas antar kabupaten melalui fasilitasi sarana prasarana perhubungan laut	Akselerasi pembangunan lalu lintas Tol Laut antar pulau kewenangan Kabupaten melalui fasilitasi sarana prasarana perhubungan laut yang memadai	Terwujudnya lalu lintas Tol Laut antar kabupaten melalui fasilitasi sarana prasarana perhubungan laut Bangkep yang memadai	Ekpansi pembangunan lalu lintas Tol Laut antar kabupaten melalui fasilitasi sarana prasarana perhubungan laut yang memadai
	Optimalisasi konsumsi listrik masyarakat wilayah terpencil dan Memfasilitasi pengembangan klaster Industri pengolahan Sumberdaya Alam	•Memperluas jangkauan pelayanan ketenagalistrikan dan Penyediaan sumber energi baru terbarukan (EBT)	•Ekpansi jangkauan pelayanan ketenagalistrikan pada kebutuhan industri melalui penyediaan EBT;	Terwujudnya jangkauan pelayanan ketenagalistrikan;
	Pembangunan/rehabilitasi sarana prasaran pelayanan publik yang maju di wilayah Kota Salalkan dan Kota kecamatan secara merata	Pembangunan/rehabilitasi sarana prasaran pelayanan publik yang maju di wilayah Kota Salalkan dan Kota kecamatan secara merata	Pembangunan/rehabilitasi sarana prasaran pelayanan publik yang maju di wilayah Kota Salalkan dan Kota kecamatan secara merata	Pembangunan/rehabilitasi sarana prasaran pelayanan publik yang maju di wilayah Kota Salalkan dan Kota kecamatan secara merata



VISI : KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN YANG MAJU, SEJAHTERA, MERATA DAN BERKELANJUTAN

MISI	ARAH KEBIJAKAN			
	PERIODE 2025-2029	PERIODE 2030-2034	PERIODE 2035-2039	PERIODE 2040-2045
	PENGUATAN FONDASI	AKSELERASI TRANSFORMASI	EKSPANSI	PERWUJUDAN BANGKEP EMAS
	Peningkatan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berkualitas	Optimalisasi penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berkualitas	Ekspansi penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berkualitas	Terwujudnya perumahan dan permukiman kumuh yang berkualitas
MISI 6: MEWUJUDKAN MITIGASI BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM SERTA LINGKUNGAN HIDUP BERKELANJUTAN	Penguatan kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana melalui mitigasi dan penanggulangan bencana serta pembangunan ekonomi berbasis potensi unggulan yang ramah lingkungan	Peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana melalui mitigasi dan penanggulangan bencana serta pembangunan ekonomi hijau ramah lingkungan	Ekspansi kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana melalui mitigasi dan penanggulangan bencana serta pembangunan ekonomi hijau ramah lingkungan	Mewujudkan kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana melalui mitigasi dan penanggulangan bencana serta pembangunan ekonomi hijau
	Penguatan kesiapsiagaan daerah dan kemampuan adaptasi bencana melalui Desa tangguh bencana;	Akselerasi kesiapsiagaan daerah dan kemampuan adaptasi bencana melalui Desa tangguh bencana;	Peningkatan kesiapsiagaan daerah dan kemampuan adaptasi bencana melalui Desa tangguh bencana;	Perwujudan kesiapsiagaan dan kemampuan adaptasi bencana;
	Penguatan layanan pengelolaan limbah dan persampahan dari tingkat Desa hingga Ibukota Kecamatan	Peningkatan layanan pengelolaan limbah dan persampahan dari tingkat Desa hingga Ibukota Kecamatan	Ekspansi layanan pengelolaan limbah dan persampahan dari tingkat Desa hingga Ibukota Kecamatan	Pemenuhan layanan pengelolaan limbah dan persampahan dari tingkat Desa hingga Ibukota Kecamatan



VISI : KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN YANG MAJU, SEJAHTERA, MERATA DAN BERKELANJUTAN

MISI	ARAH KEBIJAKAN			
	PERIODE 2025-2029	PERIODE 2030-2034	PERIODE 2035-2039	PERIODE 2040-2045
	PENGUATAN FONDASI	AKSELERASI TRANSFORMASI	EKSPANSI	PERWUJUDAN BANGKEP EMAS
	Penguatan upaya pengurangan, penanganan, daur ulang, dan penggunaan kembali limbah; Penguatan tata kelola dan kelembagaan yang sinergis dalam pengelolaan sampah dan limbah; Mendorong meningkatnya produk lokal ramah lingkungan;	Optimalisasi upaya pengurangan, penanganan, daur ulang, dan penggunaan kembali limbah; Penguatan tata kelola dan kelembagaan yang sinergis dalam pengelolaan sampah dan limbah; Mendorong meningkatnya produk lokal ramah lingkungan;	Ekpansi upaya pengurangan, penanganan, daur ulang, dan penggunaan kembali limbah; Penguatan tata kelola dan kelembagaan yang sinergis dalam pengelolaan sampah dan limbah; Mendorong meningkatnya produk lokal ramah lingkungan;	Terwujudnya Kabupaten Bangkep Berkelanjutan ;
MISI 7: MEWUJUDKAN KESINAMBUNGAN PEMBANGUNAN YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN	Penguatan pertumbuhan ekonomi yang memihak kepada masyarakat miskin dan rentan;	Menciptakan pertumbuhan Ekonomi yang berkesinambungan;	Ekpansi pertumbuhan Ekonomi yang berkesinambungan;	Terwujudnya pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan berkesinambungan;
	menguatkan penyelarasan tujuan dan target pengendalian perubahan iklim dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten dengan target pembangunan TPB Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional.	Optimalisasi Penyelarasan tujuan dan target pengendalian perubahan iklim dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten dengan target pembangunan TPB Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional 2030		
	Penguatan peran & Kualitas Pelayanan serta pemberdayaan Masyarakat OPD, Kecamatan dan Desa secara optimal dan berkelanjutan	Peningkatan peran & Kualitas Pelayanan serta pemberdayaan Masyarakat OPD, Kecamatan dan Desa	Optimalisasi peran & Kualitas Pelayanan serta pemberdayaan Masyarakat OPD, Kecamatan dan Desa secara optimal dan berkelanjutan	Terwujudnya Kualitas Pelayanan serta pemberdayaan Masyarakat OPD, Kecamatan dan Desa secara optimal dan berkelanjutan



VISI : KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN YANG MAJU, SEJAHTERA, MERATA DAN BERKELANJUTAN

MISI	ARAH KEBIJAKAN			
	PERIODE 2025-2029	PERIODE 2030-2034	PERIODE 2035-2039	PERIODE 2040-2045
	PENGUATAN FONDASI	AKSELERASI TRANSFORMASI	EKSPANSI	PERWUJUDAN BANGKEP EMAS
		secara optimal dan berkelanjutan		



5.5. Rangkaian Kinerja

Sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan periode pertama RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025-2045 yang disepakati dengan DPRD menjadi dasar dalam perumusan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025-2029. Arah kebijakan tahap pertama RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan tahapan penguatan fondasi Banggai Kepulauan yang Bermartabat, Maju, dan Berkelanjutan. Selanjutnya, sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan daerah diukur melalui rangkaian kinerja pembangunan daerah yang dimungkinkan tercapai hingga tahun 2029, dengan mempertimbangkan karakteristik dan kemampuan daerah, isu strategis, sasaran visi dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025-2045, serta Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029. Adapun rangkaian kinerja pembangunan daerah yang dilakukan sampai dengan tahun 2029 di Kabupaten Banggai Kepulauan adalah sebagai berikut.



Tabel 5.3
Kinerja Pembangunan Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025-2029

MISI	SASARAN POKOK		INDIKATOR		DATA thn 2025	Periode 1 2025-2029
1	2		3		4	5
MISI 1: MEWUJUDKAN TRANSFORMASI TATA KELOLA BIROKRASI BANGKEP YANG MELAYANI			1	Indeks Reformasi Daerah	C	B
	1	IE 9. Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	2	Indeks Pelayanan Publik	D 1.51-2.00	C 2.51-3.00
	2	IE 6. Transformasi Digital	3	Indeks SPBE	2.04	2.62
			4	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	1.44	2.52
			5	Indeks Inovasi Daerah	21.24	31.49
	3	IE 10. Hukum Berkeadilan, Perangkat daerah (OPD) yang Tangguh dan melayani, serta Demokrasi Substansial	6	Indeks Profesionalitas ASN	43.66	53.91
			7	Indeks Kepuasan Masyarakat	23.25	40.69
			8	Indeks Reformasi Hukum	18.125	31.72
	4	IE 12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar melalui pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	9	Indeks Integrasi Nasional	18.125	31.72
			10	Nilai Maturitas SPIP	2	2.71
			11	Nilai Kapabilitas APIP	2	2.55
			12	Survei Penilaian Integritas	78.58	82.33
			13	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB	0.001	0.00
			14	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	65.03	67.53
MISI 2: MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA UNGGUL DAN BERDAYA			15	Indeks Modal Manusia	0.1875	0.33
			16	Indeks Pembangunan Manusia	66.08	69.18
	5	IE2. Pendidikan Berkualitas yang Merata	17	Rata-Rata Lama Sekolah	8.46	11.48
			18	Angka Harapan Lama Sekolah	13.08	15.83



MISI	SASARAN POKOK		INDIKATOR		DATA thn 2025	Periode 1 2025-2029
1	2		3		4	5
SAING TINGGI MELALUI TRANSFORMASI SOSIAL	6	IE1. Kesehatan untuk Semua	19	Usia Harapan Hidup	66.73	69.88
			20	Prevalensi Stunting	33	24.75
			21	Angka Kematian Ibu	385/100.000 KH	288.75
			22	Angka Kematian Anak	11/1000 KH	8.25
	7	14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	23	Indeks Ketimpangan Gender	0.560	0.510
			24	TPAK Perempuan	60.39	62.390
			25	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	2.00	4.00
			26	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	15.61	19.51
MISI 3: MEWUJUDKAN TRANSFORMASI EKONOMI BANGKEP YANG MAJU DAN SEJAHTERA BERBASIS SUMBERDAYA UNGGULAN DAERAH	8	IE 8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	27	Gini Rasio	0.272	0.25
			28	Pertumbuhan Ekonomi	4.94	5.98
	9	MIE 4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	29	PDRB Per Kapita	33.93	42.23
			30	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	0.43	0.45
			31	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang)	1000	1800
			32	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	2.62	3.30



MISI	SASARAN POKOK		INDIKATOR		DATA thn 2025	Periode 1 2025-2029	
1	2		3		4	5	
	10	IE 7. Integrasi Ekonomi Domestik	33	PDRB Nilai Tambah Akomodasi dan Makan Minum (Harga Berlaku)	19.64	92.66	
			34	Persentase Angka Kemiskinan	13.44	11.44	
			35	Pembentukan Modal Tetap Bruto	744.94	842.44	
			36	Kontribusi Terhadap PDRB Provinsi	1.28	1.31	
	11	IE 11. Stabilitas Ekonomi Makro daerah	37	Tingkat Pengangguran Terbuka	0.28	0.22	
			38	Inflasi	0.75	0.94	
			39	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	1.48	1.26	
			40	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi	25	45.00	
	MISI 4: MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR ANTAR WILAYAH KECAMATAN YANG MAJU DAN MERATA	12	Mewujudkan infrastruktur yang Maju dan Merata di seluruh Wilayah	41	Indeks Kepuasan Infatruktur	15.45	19.31
				42	Persentase Jalan Kondisi Mantap	70.35	73.91
13		IE3. Perlindungan Sosial yang Adaptif melalui kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat yang berkeadilan	43	Rumah Layak Huni	73	79.75	
			44	Persentase penduduk berakses air minum bersih	64.55	69.80	
			45	Tingkat Keamanan Transportasi Laut (Rasio Kecelakaan Transportasi laut)	NA		



MISI	SASARAN POKOK		INDIKATOR		DATA thn 2025	Periode 1 2025-2029
1	2		3		4	5
MISI 5: MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA PUBLIK YANG MAJU DAN MEMPERHATIKAN TATARUANG WILAYAH	14	IE 13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan melalui penciptaan sarana prasarana publik yang maju dan aman serta ramah lingkungan	46	Cakupan Layanan Transportasi Publik	NA	
			47	Rasio Elektrifikasi	95.83	96.58
			48	Persentase RTH Pada Wilayah Kecamatan	NA	#VALUE!
			49	Persentase Penduduk berakses Sanitasi Layak	75.6	80.10
MISI 6: MEWUJUDKAN MITIGASI BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM SERTA LINGKUNGAN HIDUP BERKELANJUTAN	15	IE 17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	50	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71.16	74.66
			51	Indeks Resiko Bencana (IRB)	163.2	148.45
	16	IE 15. Lingkungan Hidup Berkualitas dan Berkelanjutan	52	Persentase timbulan sampah yang dikelola (daur Ulang)	5.4	10.40
			53	Proporsi Limbah B3 yang dikelola	3.81	7.62
MISI 7: MEWUJUDKAN KESINAMBUNGAN PEMBANGUNAN YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN	17	Mewujudkan Kestinambungan Pengendalian Lingkungan Hidup Berkelanjutan	54	Penurunan intensitas emisi GRK	2.5	3.13
	18	IE 5. Penerapan Ekonomi Hijau	55	Indonesia Blue Economy Index (IBEI)	NA	
			56	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	4.92	5.37
	19	IE 16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	57	Indeks Ketahanan Pangan	60.87	63.37
58			Prevalensi ketidak cukupan konsumsi pangan	16.56	15.31	



MISI	SASARAN POKOK	INDIKATOR		DATA thn 2025	Periode 1 2025-2029
1	2	3		4	5
		59	Ketersediaan Energi Perkapita	18.00	36.00
		60	Ketersediaan Protein Perkapita	12.65	25.30



BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa Rancangan Teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Selanjutnya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pemerintah daerah berkewajiban untuk mendukung kesuksesan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak secara nasional tahun 2024. Salah satu wujud dukungan pemerintah daerah adalah dengan menyiapkan data dan informasi pembangunan daerah bagi para calon kepala daerah yang akan mengikuti kontestasi Pilkada.

Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan telah menyusun Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 yang memuat data dan informasi capaian kinerja pembangunan daerah, serta rekomendasi oleh para teknokrat untuk rencana pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Adanya Rancangan Teknokratik dimaksud, menjadi masukan penyusunan RPJMD sekaligus menjadi acuan bagi para calon kepala daerah untuk merumuskan visi, misi, dan program prioritas calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan. Dengan dipedomaninya Rancangan Teknokratik RPJMD 2025-2029 ini, diharapkan terjadinya keselarasan dan kesinambungan pembangunan, antara pusat dan daerah (vertikal) dan antar kepemimpinan kepala daerah, sehingga cita-cita **Banggai Kepulauan Emas 2045** dan **Sulteng Emas 2045** serta **Indonesia Emas 2045** dapat terwujud.

